



2025

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

BALAI BESAR POM DI SERANG

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Serang ini dapat diselesaikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BBPOM di Serang menyusun laporan kinerja sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai sarana informasi, monitoring dan evaluasi tentang pertanggungjawaban kinerja BBPOM di Serang pada Triwulan ke I Tahun 2025, sebagai bagian dari siklus manajemen yang baik perlu adanya proses evaluasi pada setiap waktu sehingga dapat dilakukan intervensi untuk sasaran kinerja organisasi dapat terwujud.

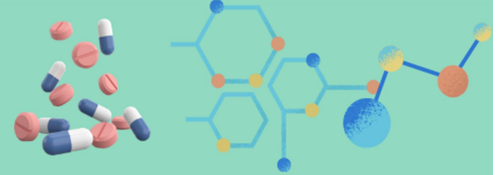


Laporan Kinerja Interim Triwulan I diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan sediaan Farmasi dan Makanan termasuk bagian keuangan yang berkaitan dengan anggaran negara yang dibelanjakan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini membawa manfaat dan keberhasilan bagi kita semua sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Serang, 30 April 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Serang,



Mojaza Sirait, S.Si., Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

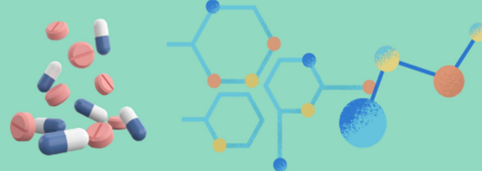
Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran kegiatan pada TW I Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra BBPOM di Serang tahun 2025-2029 yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja utama.



Capaian Kinerja Balai Besar POM di Serang Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut:

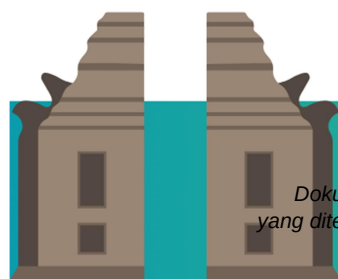
No	Indikator	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		%	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.61	110.00
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	110.00
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.76	110.00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	138.89	110.00





No	Indikator	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		%	%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113.64	110.00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	110.00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	110.71	110.00
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	12.53	12.53
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	108.03	108.03
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103.59	103.59
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.00	100.00
16	Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	66.65	66.65
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93.80	93.80
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	100.00
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	0.00	0.00
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00
25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	0.00	0.00
Total Capaian PK			1554.6
Nilai Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)			1554.6 / 16 = 97.16
Predikat NKO			Baik*

*) Berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama dengan nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan





Dari 25 indikator kinerja utama, diperoleh **7** indikator yang memperoleh capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, **2** indikator yang memperoleh capaian **Sangat Baik**, **5** indikator yang memperoleh capaian **Baik**, **1** indikator yang memperoleh capaian **Cukup** dan **1** indikator yang memperoleh capaian **Kurang**. Dari 25 IKU, indikator dengan capaian terendah pada indikator “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penetapan target RAPK, yang seharusnya kumulatif. Untuk itu pada triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian target sesuai dengan target kumulatif. Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*” disebabkan karena pelaku usaha/lintas sektor telah memberikan feedback atas surat tindak lanjut yang dikirimkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin oleh petugas kepada pelaku usaha dan juga lintas sektor (Dinas Kesehatan) terkait feedback / CAPA yang harus dikirimkan.

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Serang mempunyai 25 (dua puluh lima) indikator untuk mendukung pencapaian dengan hasil, 4 (empat) indikator efisien, 12 (dua belas) indikator tidak efisien dan 9 (sembilan) indikator belum diukur. Dari hasil tabel diatas diperoleh -1,00 – 0,45 bisa disimpulkan semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada triwulan I ini nilai ketidakefisienan tertinggi terlihat pada IKU 12 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan karena rencana penarikan anggaran pada TW I tidak ada, akan tetapi ada realisasi anggaran sebesar Rp 897.000 sedangkan capaian output tidak tercapai sebesar 12,53% hal ini dikarenakan Pemeriksaan sarana produksi Fortifikasi selanjutnya di bulan Mei dan Juni.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang didukung anggaran APBN di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 29.352.945.000,- termasuk *selfblocking* sebesar Rp 3.052.581.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2025 dengan nomor SP DIPA-063.01.2.672821/2025 tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 adanya realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000. Pada tanggal 14 Februari 2025 Surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, mengatakan bahwa Balai Besar POM di Serang harus memblokir anggaran sebesar Rp 11.230.764.000,- sehingga anggaran Balai Besar





POM di Serang sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp 29.078.945.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 3.256.600.782 atau sebesar 11,20%.

BBPOM di Serang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulan sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai target pada Perjanjian Kinerja. sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 pada tanggal 24 Januari 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan surat Sekretaris Utama nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025.

Serang, 30 April 2025

Kepala Balai Besar POM di Serang,



Mojaza Sirait, S.Si., Apt



HIGHLIGHT

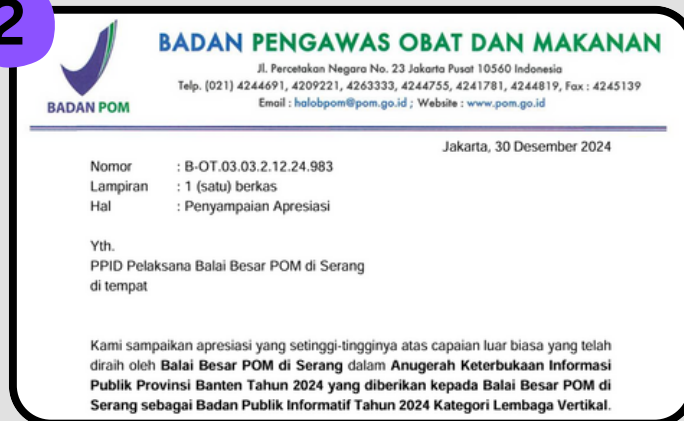
Selama triwulan I tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang telah menerima penghargaan, yaitu :

1



Penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengkoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2024

2



Apresiasi dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-OT.03.03.2.12.24.983 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Apresiasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2024 yang diberikan kepada Balai Besar POM di Serang sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024 Kategori Lembaga Vertikal.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Highlight	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	5
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025.....	22
2.5 Metode Pengukuran	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	209
3.3 Realisasi Anggaran	215
3.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	221
Bab IV Penutup	231
4.1 Kesimpulan	232
4.2 Saran	234
Lampiran.....	235





BADAN POM
BALAI BESAR POM DI SERANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN



Gambar Kantor Balai Besar POM di Serang

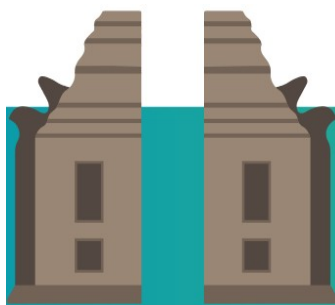
BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan I berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja Interim TW I juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Banten (terdiri dari 8 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- Balai Besar POM di Serang, cakupan pengawasan meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang
- Balai POM di Tangerang, cakupan pengawasan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan





1.2. Gambaran Umum Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Serang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling dan Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

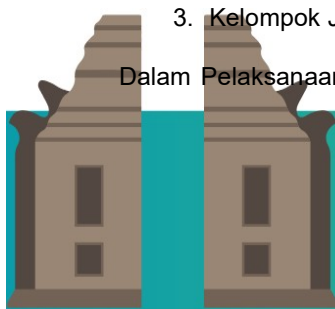
Balai Besar POM di Serang merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Serang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM Di Serang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, susunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terdiri atas:

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh fungsi-fungsi sesuai





dengan struktur organisasi Balai Besar POM di Serang dibawah ini :



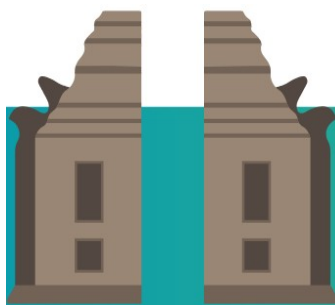
Gambar Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Serang) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Pada tahun 2025 terdapat 13 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Masing-masing unit yang terdapat pada struktur Balai Besar POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumah tangga dan administrasi penjaminan mutu.





Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran,
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara,
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan,
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu,
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian,
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi,
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan,
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim kerja terdiri atas ketua tim dan anggota tim. Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Serang antara lain:

1. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan





penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Serang melakukan patrol siber/profiling dan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara online/undercover buy berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Serang meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait Obat dan Makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Serang berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, talkshow, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile, dan penyebaran informasi melalui website BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Serang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).





6. Implementasi UU RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada tahun 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pengawasan Obat dan Makanan. BPOM memiliki tugas utama untuk mengawasi produksi, distribusi, dan konsumsi obat serta makanan di Indonesia, sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung atas keamanan pangan dan obat-obatan, BPOM berperan dalam beberapa aspek kunci yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pertama-tama, BPOM bertanggung jawab atas proses registrasi obat. Setiap obat yang akan beredar di pasaran harus melalui proses registrasi yang ketat untuk memastikan kualitas, keamanan, dan khasiatnya. BPOM melakukan penilaian menyeluruh terhadap obat-obatan yang diajukan oleh produsen, termasuk uji klinis, uji laboratorium, dan aspek lainnya untuk memastikan obat tersebut layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.

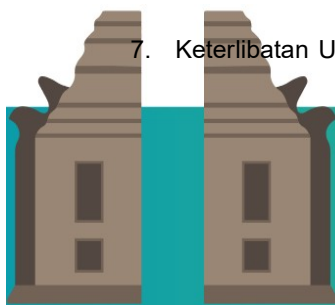
Kedua, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produksi Obat dan Makanan. dilakukan inspeksi rutin terhadap pabrik-pabrik Obat dan Makanan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi silang, pencemaran, atau pelanggaran lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Selain itu, BPOM juga memiliki tugas penting dalam pengawasan terhadap iklan Obat dan Makanan. Mereka memastikan bahwa iklan yang ditempatkan oleh produsen tidak menyesatkan konsumen, tidak memberikan informasi yang salah, dan tidak menjanjikan khasiat yang berlebihan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak tertipu oleh iklan yang tidak akurat dan tidak membeli produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan berbahaya.

Selanjutnya, BPOM juga turut serta dalam pemantauan pasca-edar obat. Mereka melakukan pemantauan terhadap efek samping yang dilaporkan setelah konsumen menggunakan obat tertentu. Jika ada indikasi bahwa suatu obat menimbulkan efek samping yang serius atau tidak diinginkan, BPOM dapat segera mengambil tindakan untuk menarik obat tersebut dari peredaran dan memberikan peringatan kepada masyarakat.

Dengan berbagai peran yang diemban oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam hal pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih efektif dan terarah. Masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, karena telah melalui proses pengawasan yang ketat oleh BPOM. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

7. Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan





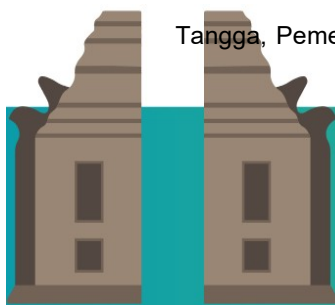
Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui pengawalan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Daerah, Pengawalan pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di 5 Kabupaten/ Kota penerima, dan keterlibatan aktif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Di Provinsi Banten telah diterbitkan Instruksi Gubernur nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dan telah dilakukan implementasi pelaksanaannya melalui beberapa kegiatan terpadu antara UPT BPOM dengan OPD tingkat provinsi khususnya pengawasan saat menjelang hari raya keagamaan maupun tahun baru.

Pada tahun yang sama yaitu 2018, terbit Pemendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengatur struktur dan kewenangan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota Perlu. Pada awal tahun 2024, TKPPOM yang telah terbentuk ada 2 yaitu di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Kemudian dilakukan langkah-langkah berupa advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi agar TKPPOM dapat terbentuk di Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Cilegon dan Provinsi. Melalui advokasi dan koordinasi yang intensif, pada akhir tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 400.7.1/Kep.148-Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Keputusan Bupati Serang Nomor 442/Kep.423-Huk.Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Serang, Keputusan Bupati Lebak Nomor 440/kep.95-Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 225 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Banten. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka implementasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bentuk implementasi koordinasi Pembinaan dan Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang adalah pengawalan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM). Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DAK NF BOK POM 2024 terdiri dari 3 menu utama yaitu Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar





dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan. Melalui pengawasan kegiatan bersumber DAK tersebut, maka cakupan pengawasan Obat dan Makanan dapat diperluas dan berjalan lebih efektif.

Selain upaya peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan melalui TKPPOM dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan bersumber DAK, Balai Besar POM di Serang juga berperan aktif pada Tim Percepatan Penurunan Stunting di Daerah melalui keikutsertaan pada kegiatan TPPS Provinsi dan juga pelaksanaan program nasional keamanan pangan pada lokus intervensi stunting. Peran BPOM dalam TPPS adalah terkait isu sensitif yang tidak secara langsung mengatasi stunting namun menjadi faktor pendukung. Berbeda dengan isu spesifik yang dikerjakan oleh OPD Kabupaten/ Kota yang berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting. Data hasil intervensi isu sensitif yang dilakukan oleh BBPOM di Serang menggunakan alokasi APBN disampaikan pada kegiatan Monev TPPS secara berkala.

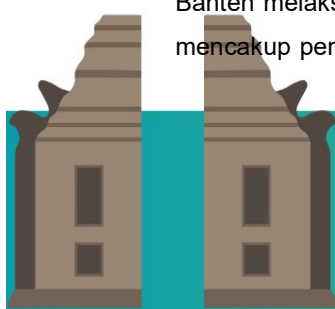
8. Peningkatan daya saing UMK di Provinsi Banten

Industri manufaktur skala mikro dan kecil mendominasi populasi industri di Indonesia, menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Industri ini juga berkontribusi sangat signifikan dalam menyediakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Namun di sisi lain, industri skala ini pada umumnya menghadapi berbagai keterbatasan seperti modal, fasilitas, pemasaran produk, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu pemerintah perlu memberi perhatian secara khusus untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pada Februari 2021 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk tumbuh dalam persaingan usaha yang sehat. Selain itu, peraturan pemerintah ini mengamanahkan kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah kepada UMKM.

Peran Badan POM terhadap UMKM, adalah memberikan dukungan yang signifikan terutama bagi UMK yang bergerak di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam, berupa program untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh UMK aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Usaha Mikro dan Kecil dalam hal ini di wilayah Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam pergerakan ekonomi daerah, karena menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Provinsi Banten melaksanakan berbagai program pendampingan. Program yang menyasar UMK di Provinsi Banten mencakup pemberian edukasi melalui bimtek, pendampingan perbaikan fasilitas produksi dan dokumentasi





sesuai Good Manufacturing Practices untuk tiap komoditas, fasilitasi proses izin edar dan sertifikasi, hingga pengujian produk yang hendak didaftarkan.

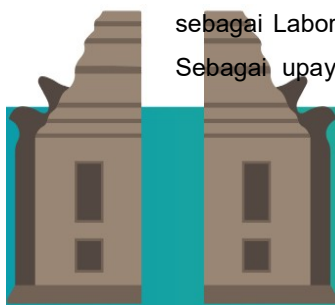
Pelaksanaan pendampingan UMK yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala yang di alami antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan Cara Produksi yang Baik pasca diterbitkannya izin sehingga pemenuhan komitmen tidak terpenuhi
- b. Kesulitan dalam memperoleh penanggung jawab teknis untuk UMK obat bahan alam dan kosmetik
- c. Kendala pada OSS pelaku usaha khususnya terkait KBLI, alamat usaha, status usaha (badan hukum dan perseorangan)

Sebagai solusi atas kendala yang dihadapi, Balai Besar POM di Serang mengembangkan Inovasi pendampingan UMKM yang diberi nama Badak Banten (Bantu Dampingi Pelaku Usaha Banten Tumbuh dan Berdaya Saing). Inovasi ini membantu pelaku usaha di wilayah Provinsi Banten dalam perizinan Obat dan Makanan mulai dari pengajuan permohonan, penyusunan dokumen persyaratan, pendampingan penerapan Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, penyusunan dokumen tindak lanjut audit berupa dokumen CAPA (Corrective Action and Preventive Action) hingga pengajuan izin edar Obat dan Makanan. Melalui inovasi ini, pelaku usaha dapat bertumbuh melalui peningkatan pemahaman secara teknis Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, serta peningkatan daya saing usaha melalui implementasi Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, sehingga produk Obat dan Makanan yang dihasilkan maupun diedarkan berkualitas serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

9. Penerapan Penyempurnaan Konsep Regionalisasi Laboratorium

Dalam melaksanakan tugas memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, dilakukan melalui Pengawasan Sebelum Beredar (Pre-Market) dan Pengawasan Selama Beredar (Post Market). Pengawasan Post Market dilakukan BPOM melalui sampling dan pengujian laboratorium baik secara kimia, fisika, biologi, mikrobiologi, serta biologi molekuler. Pengujian laboratorium merupakan landasan ilmiah yang berperan penting dalam pengambilan keputusan Badan POM. Tantangan pengujian yang semakin kompleks, perkembangan Teknologi serta tuntutan transformasi digital memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis diantaranya kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan sarana prasarana dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengujian. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya seluruh laboratorium pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan kemampuan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan, perlu dibentuk regionalisasi laboratorium. Penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM, dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Sebagai upaya untuk pemenuhan implementasi Regionalisasi Laboratorium BPOM tersebut kemudian





diukur kapasitasnya melalui kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi penguji laboratorium dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang menunjang pelaksanaan pengujian yang mengacu pada Standar Kemampuan Laboratorium BPOM.

10. Penyalahgunaan OOT dampak di masyarakat dan dengan BBPOM di Serang

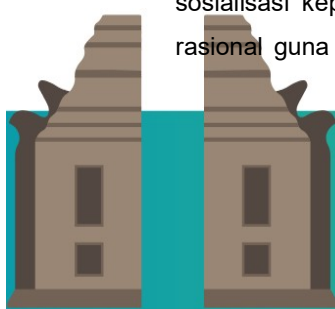
Penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu (OOT) merupakan permasalahan serius yang berdampak luas pada kesehatan dan sosial masyarakat. OOT yang sering disalahgunakan, seperti Tramadol, Triheksifenidil, dan Dekstrometorfan, dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, serta penurunan fungsi kognitif dan motorik jika digunakan tanpa pengawasan tenaga medis. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga lingkungan sekitar, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan akibat penyalahgunaan obat, serta beban ekonomi yang tinggi bagi keluarga dan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan OOT menjadi isu strategis yang harus ditangani secara komprehensif guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat.

BPOM mempunyai peran strategis dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan OOT melalui berbagai kebijakan dan program pengawasan obat. Salah Satu upaya yang dilakukan BBPOM di Serang dalam pencegahan OOT adalah pemberian sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan obat yang aman dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk obat yang beredar di masyarakat, serta inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap standar Cara Pembuatan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB dan CDOB) serta melakukan pengawasan terhadap iklan dan promosi obat guna mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, serta melakukan investigasi dan penindakan terhadap kasus penyalahgunaan OOT.

11. Resistensi antibiotik

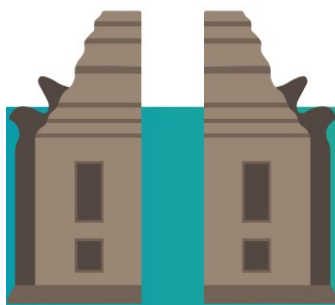
Resistensi antibiotik merupakan ancaman serius bagi kesehatan global yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika bakteri berkembang menjadi kebal terhadap pengobatan, sehingga infeksi yang sebelumnya dapat diatasi menjadi lebih sulit disembuhkan. Dampak dari resistensi antibiotik meliputi meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat infeksi yang tidak dapat diobati, bertambahnya biaya pengobatan, serta berkurangnya efektivitas terapi medis. Fenomena ini tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga sistem kesehatan secara keseluruhan, sehingga perlu adanya langkah strategis dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan antibiotik guna mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat.

BPOM mempunyai peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian resistensi antibiotik melalui berbagai kebijakan dan program pengawasan obat. Upaya ini diperkuat dengan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan antibiotik secara rasional guna menekan angka resistensi dan menjaga efektivitas pengobatan di masa depan. Selain itu,





Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk obat yang beredar, serta inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi guna memastikan kepatuhan terhadap standar Cara Pembuatan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB dan CDOB) serta menjalin kerja sama dengan lintas sektor sebagai upaya kolaborasi dan komitmen bersama dalam pencegahan resistensi antibiotik.





BADAN POM
BALAI BESAR POM DI SERANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Renstra tersebut kemudian menjadi acuan bagi setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja, dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dalam menyusun Rencana Strategis.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang (BBPOM di Serang) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Renstra BBPOM di Serang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2025-2029. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025.

A. Visi BPOM

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.





B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Tujuan BPOM

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
- 2) Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
- 4) Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 5) Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi





dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa hasil pengawasan terhadap produk obat, makanan, dan sarana produksi benar-benar direspon dengan tindakan nyata, sehingga dapat mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sering kali menghasilkan rekomendasi perbaikan atau tindakan hukum. Peningkatan tindak lanjut oleh lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian) bertujuan untuk memastikan rekomendasi tersebut diimplementasikan dengan baik, baik oleh pelaku usaha maupun pihak terkait. Selain itu, sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan yang efektif berperan penting dalam mencegah risiko kesehatan akibat peredaran produk yang tidak sesuai standar. Hal ini penting agar produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memberikan manfaat sesuai klaim yang tercantum.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memastikan bahwa pangan yang diperkaya dengan zat gizi esensial diproduksi sesuai standar keamanan, mutu, dan manfaat yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Pangan fortifikasi merupakan intervensi gizi penting untuk mencegah defisiensi zat gizi di masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan balita. Pengawasan sarana produksi yang efektif memastikan bahwa produk fortifikasi benar-benar mengandung zat gizi yang ditargetkan dalam jumlah yang tepat sehingga berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat.

3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Serang sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas





dan kapabilitas laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, BBPOM di Serang berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan mutu layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan para stakeholder termasuk dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Dalam Pelaksanaannya dilakukan pembaruan metode KIE, pengemasan kurikulum KIE dan materi KIE agar lebih menarik dan dapat dipahami oleh semua kalangan termasuk kelompok disabilitas serta penyampaian KIE dalam bentuk media sosial (Instagram, Youtube, facebook dan Tiktok), Media Cetak (Majalah, Leaflet, Brosur termasuk brosur dengan huruf braille), Media Luar Ruang, dan Media Elektronik (Videotron, Talk Show radio dan TV layanan). Semua hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pelayanan publik dan edukasi efektif, efisien, transparan serta mudah diakses oleh semua pihak.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran ini ditujukan untuk pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran ini ditujukan untuk mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran ini bertujuan mendeteksi kejahatan siber untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelaku kejahatan, yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan penegakan hukum. Deteksi dini mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber.

8. Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang





diberikan oleh BBPOM di Serang kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi SDM, pemberian layanan publik di Mall Pelayanan Publik kota/kabupaten yang berada di wilayah pengawasan BBPOM di Serang serta berbagai inovasi layanan publik agar proses layanan efisien dan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan dari BBPOM di Serang.

9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Sasaran ini ditujukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat khususnya di Provinsi Banten.

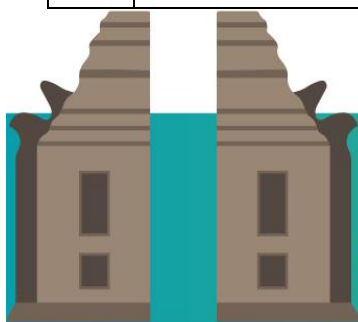
Sebagai lembaga pemerintah, BBPOM di Serang wajib mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menunjukkan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan program kerja yang direncanakan, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2020-2024 menuju Renstra 2025-2029. Sesuai surat Sekretaris Utama B-PR.06.02.2.09.24.724 tanggal 13 September 2024 perihal Permintaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 Balai Besar POM di Serang menetapkan target RKT berdasarkan *exercise* Rancangan Awal Renstra 2025-2029, sehingga terdapat perbedaan target bila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja.

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Serang tahun 2025*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.6
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	95
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80.2
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

*Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor HK.02.02.12A.09.24.397 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengembalian tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Serang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

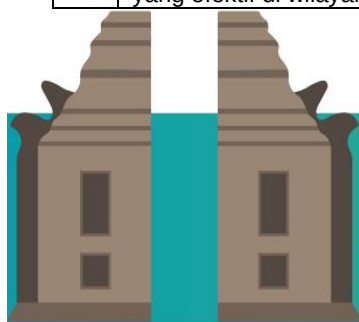




untuk mencapai kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 secara rinci sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan mengeluarkan surat dengan nomor B-PR.01.01.21.01.25.26 tanggal 17 Januari 2025 perihal Desk Pembahasan Target Renstra UPT Periode Tahun 2025-2029, yang menjelaskan bahwa adanya pertemuan secara daring mengenai kesepakatan Target UPT Tahun 2025-2029 lalu setelahnya Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025, sesuai dengan surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.07.2.02.25.91 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penetapan PK dan RAPK 2025.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, BBPOM di Serang mendapat dukungan anggaran untuk dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan dengan total anggaran sebesar Rp 29.352.945.000,-. Namun, pada tanggal 10 Maret 2025 Sekretaris Utama mengeluarkan surat dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, dengan adanya surat tersebut Balai Besar POM di Serang mengalami realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000,-, sehingga pada akhir triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Serang mempunyai anggaran total sebesar Rp 29.078.945.000,-.

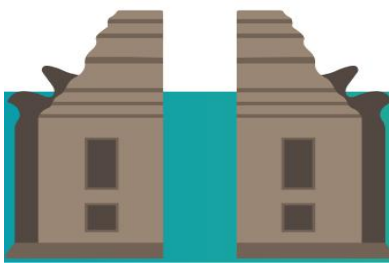




2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

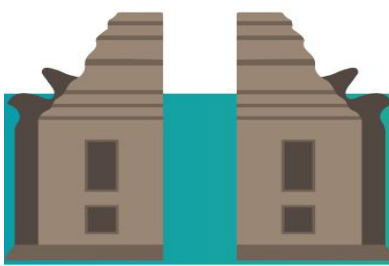
Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26												26
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72



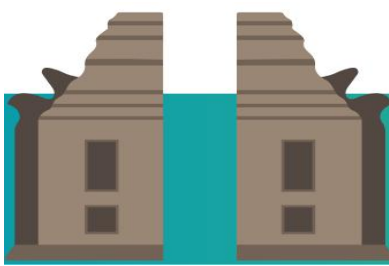


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57





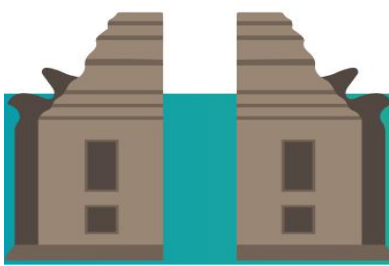
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98
		15 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10			10	75	75	75	100	100	100	100	100	10
		16 Jumlah desa pangan aman	5			10	50	70	70	70	70	70	80	100	5
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92			20	20	40	40	60	60	80	80	80	92
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	19 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	10	10	10	25	25	70	72	72	72	72	73	75





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7												4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2												90.2
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	82.44												82.44
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3												3

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.





2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 ini sudah disusun mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama dengan nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Gambar 2.3 Kriteria penilaian capaian





Nilai kinerja organisasi di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya. Ketentuan lebih lanjut dalam menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai tersebut diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran





yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut :

1. Penunjukkan Tim Pengelola Sakip dan Monev Balai Besar POM di Serang yang disahkan oleh SK Kepala Balai Besar POM di Serang. Hal ini untuk kelancaran pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Serang dan agar diperoleh data yang akurat dalam pelaporan dan monev yang tepat waktu terkait realisasi dan pencapaian program/kegiatan tiap bulannya.
2. Adanya SOP yang mengatur pengumpulan data kinerja nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.12A.01
3. Balai Besar POM di Serang melakukan rapat evaluasi setiap bulannya untuk menyepakati realisasi kinerja bulanan.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi Simetris.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui pemanfaatan aplikasi Simetris. Pengukuran kinerja diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN (e-SKP) pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Rapat evaluasi kinerja bulanan membahas pencapaian indikator kinerja dan capaian output yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.





BADAN POM
BALAI BESAR POM DI SERANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Serang yang berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun berjalan, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta upaya peningkatan kinerja.

No	Indikator	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		%	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.61	110.00
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	0.00	0.00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65	110.00
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111.76	110.00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	138.89	110.00
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113.64	110.00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	110.00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	110.71	110.00
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	12.53	12.53
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	108.03	108.03
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103.59	103.59



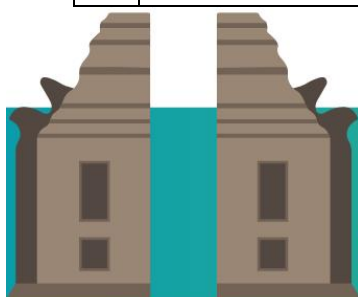
No	Indikator	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		%	%
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.00	100.00
16	Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	66.65	66.65
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93.80	93.80
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	100.00
21	Indeks Pelayanan Publik UPT *)	0.00	0.00
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM *)	0.00	0.00
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM *)	0.00	0.00
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM *)	0.00	0.00
25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja *)	0.00	0.00
Total Capaian PK			1555.34
Nilai Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)			1555.34 / 16 = 97.20
Predikat NKO			Baik

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan menghitung manual dan predikat NKO BBPOM di Serang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 97,20% dengan predikat **Baik**. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Serang telah berhasil mencapai target semua sasaran kegiatan.

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Periode : Interim Triwulan I Tahun 2025

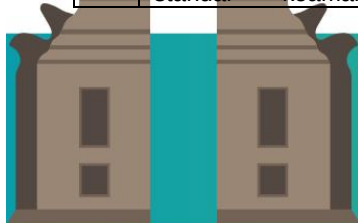
Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator, Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Kategori Capaian TW I 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	100,00	115,61	Tidak Dapat Disimpulkan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Kategori Capaian TW I 2025
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	-	-	-
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	100,00	138,89	Tidak Dapat Disimpulkan
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	100,00	113,64	Tidak Dapat Disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	-	-
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,93	98,45	110,71	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	7,14	12,53	Kurang
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,00	71,30	108,03	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	89,07	103,59	Sangat Baik
		15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	10,00	100,00	Baik
		16	Jumlah desa pangan aman	10,00	10,00	100,00	Baik
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10,00	10,00	100,00	Baik
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	20,00	13,33	66,65	Cukup





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Kategori Capaian TW I 2025
	dan mutu		baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan				
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10,00	9,38	93,80	Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	-	-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
		25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	-	-	-	-





Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 1 Balai Besar POM di Serang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 11 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\frac{A + B + C + D}{4}$$

Keterangan:

A = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan





Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi mencakup sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

- 1) Komponen A : Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh menggunakan rumus : **$a + b + c + d + e$**
a : Kesesuaian Perencanaan Sampling (30%); yang mengacu pada kesesuaian terhadap target sampel, rencana pelaksanaan berdasarkan kategori sampel, dan rencana pelaksanaan berdasarkan kelas terapi
b : Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (20%); yang mengacu pada kesesuaian pelaksanaan sampling terhadap rencana periode sampling dan ketentuan evaluasi penandaan
c : Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (20%); yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.
d : Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (20%) yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling.
e : Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (10%) yang mengacu pada jumlah laporan hasil monitoring penarikan yang dilaporkan setiap triwulan.
- 2) Komponen B : Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
a : Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling
b : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); merupakan jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu
c : Kesesuaian parameter uji; merupakan jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling
d : Akurasi dalam penentuan Kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai
e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT
- 3) Komponen C : Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
a : Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling





b : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); merupakan jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu

c : Kesesuaian parameter uji; merupakan jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling

d : Akurasi dalam penentuan Kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai

e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

4) Komponen D : Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a : Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2)/2$; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling

b : Kesesuaian pelaksanaan sampling; merupakan jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan

c : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; merupakan Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu

d : Ketepatan dalam penentuan kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai

e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

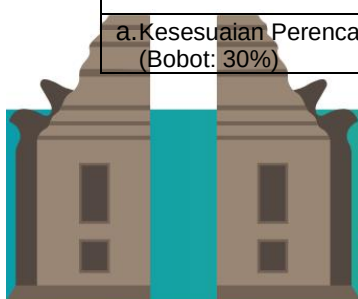
a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	100,00	115,61	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% diperoleh dari seluruh sampel Sediaan Farmasi yang telah disampling dan dilakukan pengujian sesuai ketentuan. Capaian persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yaitu 115,61% dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan"**.

Unsur penilaian untuk indikator sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target sampai TW I	Realisasi sampai TW I	Penilaian (%)
Obat			
a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	32	32	30





Parameter Penilaian	Target sampai TW I	Realisasi sampai TW I	Penilaian (%)
b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	32	32	20
c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%) meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel yang berasal dari Region Semarang	35	35	20
d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	32	32	20
e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)	1	1	10
Total			100
Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi			
a. Pemenuhan target pengawasan			
- Jumlah sampel diperiksa	27	27	100
- Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	36	36	
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	27	27	100
c. Kesesuaian Parameter Uji	27	27	100
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	27	27	100
5) Tanggapan atas surat tindak lanjut	10	10	100
Rata-rata			100
Suplemen Kesehatan			
a. Pemenuhan target pengawasan			
- Jumlah sampel diperiksa	9	9	100
- Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	12	12	
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	9	9	100
c. Kesesuaian Parameter Uji	9	9	100
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	9	9	100
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut	10	10	100
Rata-rata			100
Kosmetik			
a. Pemenuhan target pengawasan			
- Jumlah sampel diperiksa	32	32	100
- Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	44	44	
b. Kesesuaian pelaksanaan sampling	32	32	100
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	32	32	100
d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	32	32	100





Parameter Penilaian	Target sampai TW I	Realisasi sampai TW I	Penilaian (%)
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut	32	32	100
Rata-rata			100

Pada triwulan I capaian sampel yang telah diperiksa dan diuji sesuai timeline sama dengan target yang ditetapkan sehingga realisasi yang didapatkan pada triwulan I adalah 100%. Jumlah sampel yang diperiksa merupakan jumlah sampel yang disampling oleh BBPOM di Serang yaitu sebanyak 100 sampel, sedangkan jumlah sampel yang diuji sesuai standar merupakan total sampel BBPOM di Serang, Balai Tangerang dan sampel regionalisasi yang diterima dari Balai Besar/Balai/Loka POM di Region Semarang dengan total sampel sebanyak 127 sampel.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	86,50	100,00	115,61	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	86,50		0,00	
TW III	86,50		0,00	
TW IV	86,50		0,00	
2025	86,50	100,00	115,61	 Tercapai

Capaian persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target Tahun 2025 dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada triwulan I melebihi target yang telah ditetapkan.

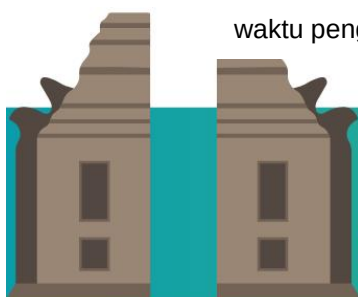
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025 telah disusun perencanaan sampling sesuai ketentuan. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan target sampel sediaan farmasi berkurang sampai dengan 20% dari target awal tahun. Pada bulan Maret, telah dilakukan penyesuaian perencanaan sampling menyesuaikan dengan anggaran dan target yang diperoleh.

Pelaksanaan sampling dan pelaporan monitoring recall dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Kuantitas target sampel yang turun dan SDM yang tidak berkurang, menyebabkan peningkatan kualitas hasil kinerja, sehingga capaian IKU pada triwulan I tahun 2025 jauh melebihi target dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Pada triwulan I tahun 2025 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter berdasarkan pedoman sampling dan memenuhi waktu timeline. Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya :

1. Dilakukan percepatan peningkatan kompetensi dan manajemen waktu terkait pelaksanaan waktu pengujian bagi personil baru

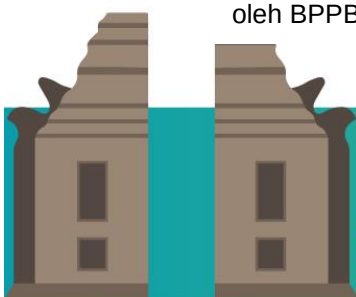




2. Dilakukan koordinasi untuk pengadaan reagen, media, suku cadang, baku pembanding dan bahan penunjang laboratorium khususnya untuk kebutuhan yang diperlukan selama 3 bulan pertama
3. Koordinasi yang baik antara Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Pengujian terkait penyesuaian terhadap target dan jenis sampel yang akan diuji di laboratorium khususnya untuk 3 bulan pertama karena menyesuaikan dengan ketersediaan reagen yang ada.
4. Koordinasi yang baik sesama Unit Pelaksana Teknis BBPOM/Balai/Loka di Region Semarang berkaitan dengan sampling dan pengujian yang dilakukan oleh masing-masing, serta dilakukan sharing kebutuhan pengujian jika ada kendala.
5. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai kemampuan uji laboratorium Region Semarang.
6. Pelaksanaan destruksi sebagian sampel Obat Bahan Alam terhambat dikarenakan saat tengah melakukan proses destruksi, microwave mengalami kerusakan. Semua microwave yang ada di laboratorium BBPOM Serang mengalami kerusakan. Kendala ini diatasi dengan melakukan destruksi untuk sampel yang tersisa di Laboratorium PPPOMN. Perbaikan microwave sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan target sampel bulan selanjutnya
7. Terdapat antrian penggunaan instrumen AAS khususnya metode FIAS, karena instrumen yang dimiliki ada dua namun hanya satu yang berfungsi dengan baik, sementara parameter yang harus diuji dengan AAS semakin meningkat. Bila alat tersebut rusak maka pengujian sampel logam berat akan terhenti karena menunggu perbaikan. Perbaikan untuk alat yang masih rusak dibutuhkan untuk memperpendek antrian penggunaan alat.
8. Adanya efisiensi anggaran pada pertengahan TW I tahun 2025 sehingga dilakukan penyesuaian jumlah sampel sesuai dengan anggaran yang ada.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

- Akibat terbatasnya anggaran pembelian sampel, diperlukan strategi agar target sampel obat tetap tercapai. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengambilan sampel pada fasilitas milik pemerintah (Instalasi Farmasi dan Puskesmas) untuk menekan biaya pembelian sampel.
- Efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap kemampuan uji laboratorium regional obat, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intens antar Balai Penyampling dan Balai Penguji supaya sampel yang telah didapat dan diuji dengan baik dan sesuai ketentuan.
- Perencanaan pengambilan sampel produk biologi perlu disesuaikan akibat kemampuan uji Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) yang juga terpengaruh oleh adanya efisiensi. Pengambilan sampel produk biologi dilakukan di Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten untuk menekan biaya, namun perlu disesuaikan juga terkait ketersediaan vaksin yang diminta oleh BPPB.





- Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium sehingga pengujian bisa berjalan dengan baik
- Mengajukan usulan pemeliharaan dan perbaikan alat khususnya untuk alat yang digunakan dengan frekuensi pemakaian yang tinggi
- Monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 bulan melalui *Tools Monev* Regionalisasi

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.002.055 A	Pengujian	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	A Pengadaan Laboratorium Sampel Obat - Reagen - Media Mikro	841,0 Sampel 536,0 sampel	0% 4,74%
		QIA.002.053 A (Pengambilan Sampel)	Pem - Inspeksi	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	A Pengadaan Sampel	658 Sampel	100 Sampel

Capaian Kinerja melampaui target kinerja yang disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada pengurangan anggaran termasuk penyesuaian target sampling obat TW I, dengan jumlah target yang menurun maka pencapaian sampling menjadi lebih mudah untuk dicapai sehingga Realisasi capaian jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan sepanjang TW I tahun 2025 adalah pengadaan sampling obat, obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sementara untuk serta proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi pada TW I belum dilakukan dikarenakan pada pertengahan TW I terdapat kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga capaian pengujian sampel pada TW I diselesaikan dengan menggunakan reagen dan media yang masih tersisa dari pengadaan tahun 2024. Adanya sistem regionalisasi dimana Balai Besar POM di Serang merupakan bagian dari Region Semarang juga diharapkan dapat saling melengkapi kebutuhan untuk menyelesaikan parameter uji yang dalam pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,50	100,00	115,61	16.150.000	Rp 21.900.347	135,61	0,85	-0,15	75 %	Tidak Efisien

Anggaran yang digunakan (input) untuk indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari mata anggaran QIA.002. Anggaran (input) yang sudah digunakan untuk indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang





ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 135,61% yaitu sebesar Rp. 21.900.347,- dengan capaian (output) 115,61% dengan tingkat efisiensi -0,15 dan masuk kategori tidak efisien. Realisasi anggaran melampaui target penggunaan anggaran TW I tahun 2025 disebabkan karena adanya perubahan dalam perencanaan sampling obat yang terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi di bulan Februari 2025, penyesuaian target berupa pengurangan jumlah sampel dilakukan dengan memastikan kesesuaian persentase kelas terapi, harga sampel untuk tiap kelas terapi berbeda-beda dipengaruhi oleh jenis zat aktif, merek zat aktif dan ketersediaan sampel di sarana distribusi dan pelayanan, untuk obat termasuk dengan menyesuaikan sampling dengan kemampuan uji Balai Regional, sehingga terdapat pembelian obat yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah dilakukan di awal tahun.

Anggaran yang digunakan merupakan anggaran untuk pengadaan sampling obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik, sedangkan anggaran untuk pembelian reagen dan media untuk kebutuhan pengujian belum digunakan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian kinerja di TW I tahun 2025 serta kendala yang dihadapi maka akan dilakukan penyesuaian target RAPK untuk TW II dan selanjutnya untuk dapat dilakukan penyesuaian kembali terutama untuk realisasi anggaran dengan menyesuaikan dengan target sampling setelah ditetapkan rencana pelaksanaan sampling yang baru menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi Capaian Kinerja IKU 1 di TW I tahun 2025 terhadap target kinerja dapat dilakukan penyesuaian untuk TW selanjutnya, namun menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama B-PR.05.03.2.04.25.191 tanggal 10 April 2025 tentang Penyampaian Pengesahan DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2025 yang berisi mengenai pengembalian anggaran pengawasan BBPOM di Serang yang berarti mengembalikan target perencanaan kepada Target Awal sehingga target IKU tetap dipertahankan dengan justifikasi jumlah target yang bertambah (kembali ke awal).



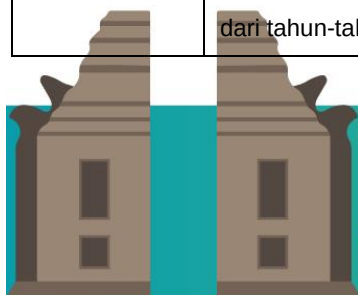


Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Merupakan IKU baru dan belum ada di Tahun 2024	Monitoring rekomendasi TW I	TW II	-	-	-	Berproses

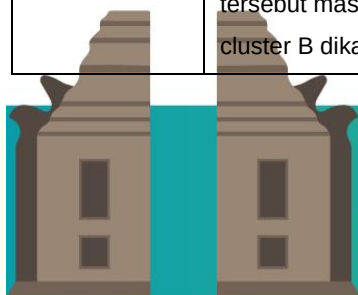
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala bulan tersebut	A. Pengujian Pelaksanaan destruksi sebagian sampel OBA dilakukan di Lab PPPOMN dikarenakan microwave Lab Pangan mengalami kerusakan. Kondisi saat ini 3 alat microwave digester Lab BBPOM di Serang mengalami kerusakan. B. Sampling Dep1. Renlak sampel dari regional baru disampaikan pada tanggal 15 Januari 2025 sehingga sampling untuk kelas terapi regional baru dilaksanakan tanggal 16 Januari 2025. Karena keterbatasan peralatan/reagen obat KB suntik tidak dapat disampling, sehingga obat KB yang awalnya direncanakan 2 menjadi hanya 1 item Dep.2. Pedoman sampling (PS) terbaru tahun 2025 masih belum disahkan pada awal tahun, yang ada hanya draft PS yang belum disetujui sebagai pedoman sampling, sedangkan pada tahun 2025 ini metode sampling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak	A. Pengujian - Terdapat 5 sampel TIE pada komoditi OBA yang tidak dilakukan penandaan (pemilihan jenis sampel TIE pada SIPT, untuk penandaan tidak dapat dilakukan). Hasil pengujian TMS BKO. - 2 KCKT Lab Kosmetik (KCKT Shimadzu dan UHPLC Agilent) mengalami kerusakan, pengujian Kosmetik sampel bulan Februari menggunakan KCKT Lab OBA, obat dan pangan (dilakukan penjadwalan pemakaian alat). Perbaikan KCKT Shimadzu sudah dilakukan (alat sudah dapat dipakai), untuk perbaikan UHPLC Agilent belum dapat dilakukan, karena tidak tersedia anggaran untuk pembelian suku cadang (pada saat pengecekan oleh teknisi perlu adanya pergantian suku cadang Cappilery ST 0.25mm x 80mm dan Outlet Filter flexible pump) - Terdapat kekurangan kebutuhan reagen Ammonium Phosphate Monobasic, namun sudah dapat diatasi dengan sharing reagen dengan BPOM Bengkulu. Saat ini reagen sudah diterima di BBPOM Serang. Dengan adanya sharing	A. Pengujian - 2 KCKT Lab Kosmetik (KCKT Shimadzu dan UHPLC Agilent) mengalami kerusakan, pengujian Kosmetik sampel bulan Maret menggunakan KCKT Lab OBA dan pangan (dilakukan penjadwalan pemakaian alat). Perbaikan KCKT Shimadzu sudah dilakukan (alat sudah dapat dipakai) tetapi untuk metode analisa yang memakai sistem gradien masih belum bisa dilakukan di KCKT Shimadzu, untuk perbaikan UHPLC Agilent belum dapat dilakukan, karena tidak tersedia anggaran untuk pembelian suku cadang (pada saat pengecekan oleh teknisi perlu adanya pergantian suku cadang Cappilery ST 0.25mm x 80mm dan Outlet Filter flexible pump) --> akan dilakukan permintaan perbaikan jika usulan relaksasi anggaran pengujian disetujui. - Dilakukan permohonan pemindahan alat Microwave dari Laboratorium Pangan PPPOMN ke Laboratorium di Serang per tanggal 6 Februari 2025, per tanggal 10



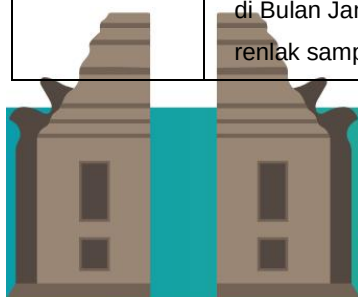


Keterangan	Januari	Februari	Maret
	ada lagi sampling acak hanya ada sampling targeted dengan kategori sampel yang sudah ditentukan dan untuk percepatan pengujian diberlakukan klusterisasi sampel. Sampel Januari jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemeriksaan dan pengujian, permintaan pengujian sampel yang disampling merupakan sampel kluster A (untuk OBA SK maupun Kos). Kendala yang dihadapi : OBASK : sampel cluster A di serang lumayan banyak yg beredar, namun produknya tidak variasi, sehingga produk yang tersampling merupakan produk yang sama/berulang dari tahun sebelum-sebelumnya. Pedoman sampling belum terbit, namun dikejar timeline sehingga petugas sampling belum faham betul pelaksanaan sampling tersebut apakah sudah sesuai atau belum karna belum adanya pedoman resmi. Adanya kesulitan untuk menentukan sarprod fasber MD masuk cluster A atau bukan. KOS : sama seperti OBASK, belum adanya pedoman resmi mengakibatkan petugas sampling kesulitan di lapangan memnentukan sampel mana yang masuk kategori cluster A, berdasarkan draft PS data sarana cluster A hanya tersedia data 38 sarana, sulitnya menentukan apakah perusahaan golongan A tersebut masuk cluster A atau cluster B dikarenakan pada saat	reagen tersebut, kebutuhan tercukupi hingga Desember 2025. - 3 alat microwave digester Lab BBPOM di Serang mengalami kerusakan B. Sampling Dep1. Akibat efisiensi, terdapat perubahan target sampel, sehingga renlak yang telah disusun harus diubah kembali. Untuk sampel februari sudah tersampling sebelum pengumuan efisiensi. Dep2. Terdapat kebijakan implementasi InPres 3 sehingga, untuk kosmetik yang semula direncanakan 23 sampel, baru disampling 14 dikarenakan harga sample yang tinggi sehingga di Februari, sampling kosmetik hanya dibatasi sejumlah 14 sampel. Untuk sampel kos bulan Februari terdapat kategori sample kontrak produksi maupun kuasa merek, tidak adanya data perusahaan yang masuk kontrak produksi ataupun kuasa merek menjadi kendala saat pelaksanaan sampling, petuga harus mengecek 1 per satu sampel melalui cek bpom & notifikos, hal ini menjadi lama ketika jaringan tidak stabil dan aplikasi cekbpom & notifikos eror. Adanya ketentuan bahwa sampel day cream, night cream n moisturizer yang akan disampling tidak boleh mengandung acrylamide maupun turunannya juga sangat membuat petugas sampling kesulitan untuk mendapatkan sampel, karena kebanyakan sampel tersebut mangandung acrylamid, adapun yg tidak mengandung namun harganya	Februari 2025 sudah ada surat balasan dari laboratorium PPPOMN bahwa PPPOMN menyetujui pemindahan microwave ke Laboratorium BBPOM di Serang. Proses pemindahan akan dilakukan pada 14 April 2025. Proses klik e-katalog diperkirakan tanggal 9 April 2025 (setelah libur hari raya Idul Fitri). B. Sampling Dep1. Tidak ada kendala Dep.2 Tidak ada kendala, pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak sampling yg telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran. Berdasarkan efisiensi anggaran OBASK pada bulan Maret tidak dilakukan sampling, sedangkan kosmetik sampel yang tersampling sebanyak 3 item dengan evaluasi penandaan Balai (3 MK, 0 TMK), untuk evaluasi PUsat belum ada





Keterangan	Januari	Februari	Maret
	sampling terkendala jaringan/sistem eror pada aplikasi cek bpom maupun notifikos	tidak masuk pagu sampling untuk 1 item sampel, sehingga tidak tersampling	
RTL bulan selanjutnya (IKU)	A. Pengujian - Menyelesaikan pengujian sampel Obat hingga input SIPT. - Mengajukan permintaan transfer alat Microwave Digester System Anton Paar Multiwave Pro dari PPPOMN B. Sampling Dep 1: Menyusun renlak bulanan sesuai dengan rancangan laboratorium regional Dep 2 : menyusun renlak bulanan sesuai dengan kemampuan uji lab dan draft PS yang belum disahkan	A. Pengujian - Menyelesaikan pengujian sampel Obat bulan Februari hingga input SIPT. - Persiapan pelaksanaan transfer alat Microwave Digester System Anton Paar Multiwave Pro dari PPPOMN B. Sampling Dep1. Menyusun renlak sampling obat pasca efisiensi Dep2. Menyusun renlak OBASKKOS pasca efisiensi	A. Pengujian - Persiapan pelaksanaan transfer alat Microwave Digester System Anton Paar Multiwave Pro dari PPPOMN B. Sampling on track melakukan sampling sesuai perencanaan Dep. 2 : pelaksanaan sampling sesuai renlak pasca efisiensi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	A. Pengujian Jumlah sampel masuk ke Pengujian pada bulan Januari 2025 sebanyak 37 sampel rutin dan 3 sampel kasus dari Penindakan, dengan 34 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. Jumlah sampel Loka/Balai/BB POM Regional masuk ke Pengujian pada bulan Januari 2025 sebanyak 9 sampel, dengan 4 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. B. Sampling Sejumlah 12 sampel obat telah dikirimkan ke balai regional Sejumlah 12 sampel obat telah selesai dievaluasi penandaan Dep.2 : Untuk capaian sampling di Bulan Januari sudah sesuai renlak sampling, dengan jumlah	A. Pengujian Jumlah sampel masuk ke Pengujian s.d. Februari 2025 sebanyak 72 sampel rutin dan 3 sampel kasus dari Penindakan, dengan 75 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. Jumlah sampel Loka/Balai/BB POM Regional masuk ke Pengujian s.d. bulan Februari 2025 sebanyak 22 sampel, dengan 21 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. B. Sampling Sejumlah 17 sampel obat telah dikirimkan ke balai regional. Sejumlah 17 sampel obat telah dievaluasi penandaannya Dep 2 : - Capaian sampling OBASK bulan february sudah sesuai dengan renlak sampling yakni :	A. Pengujian Jumlah sampel masuk ke Pengujian s.d. Maret 2025 sebanyak 76 sampel rutin dan 3 sampel kasus dari Penindakan, dengan 79 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. Jumlah sampel Loka/Balai/BB POM Regional masuk ke Pengujian s.d. bulan Maret 2025 sebanyak 27 sampel, dengan 27 sampel telah selesai uji hingga input SIPT tepat waktu. B. Sampling Dep1. Sejumlah 3 sampel obat telah dikirimkan ke balai regional Sejumlah 3 sampel obat telah dievaluasi penandaannya melalui SIPT. (Status di SIPT sudah sampai verifikator pusat)





Keterangan	Januari	Februari	Maret
	sampel dan evaluasi penandaan sebagai berikut : - OBA sebanyak 12 item dengan evaluasi penandaan Balai (8 MK, 4 TMK) dan Pusat (8 MK, 4 TMK) - SK sebanyak 4 item dengan evaluasi penandaan Balai (4MK, 0 TMK) dan Pusat (4 MK, 0 TMK) - Kos sebanyak 15 item dengan evaluasi penandaan balai (15 MK & 0 TMK) dan Pusat (15 MK & 0 TMK)	OBA 15 item dengan evaluasi penandaan Balai (8 MK, 2 TMK, 5 item sampel TIE tidak dilakukan evaluasi penandaan) dan Pusat (8 MK, 2 TMK) SK 5 item dengan evaluasi penandaan Balai (3 MK, 2 TMK) dan Pusat (3 MK, 2 TMK) - Capaian smapel kosmetik dibulan Februari mengalami pengurangan dari target awal sebanyak 23 item, realisasi sampling sebanyak 14 item. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran, mengingat target sediaan sampel kosmetik yang disampling pada bulan Februari merupakan sediaan sampel dengan harga tinggi (sediaan perawatan wajah). Dilakukan evaluasi penandaan sampel kosmetik dengan hasil sebagai berikut : KOS 14 item dengan evaluasi Balai (14 MK. 0 TMK) dan Pusat (14 MK, 0 TMK)	Dep2. Berdasarkan efisiensi anggaran OBASK pada bulan Maret tidak dilakukan sampling, sedangkan kosmetik sampel yang tersampling sebanyak 3 item dengan evaluasi penandaan Balai (3 MK, 0 TMK), untuk evaluasi PUSat belum ada

IKU 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat namun belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian obat dengan dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik.

KTD/ESO yang terjadi dapat dilaporkan oleh pasien melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud fasyankes adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasyankes yang dapat melaporkan KTD/ESO adalah rumah sakit,





puskesmas dan klinik. Untuk meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan/tenaga medis akan pentingnya pelaporan KTD/ESO, maka perlu dilakukan pemberian KIE Farmakovigilans. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans. Pada Tahun 2025, terdapat 45 tenaga kesehatan, yaitu Apoteker Penanggungjawab fasyankes yang akan diberikan KIE Farmakovigilans.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Serang telah memberikan KIE Farmakovigilans kepada 45 Apoteker penanggungjawab pada tanggal 26 Februari 2025. Fasyankes yang diberikan KIE Farmakovigilans terdiri dari 24 rumah sakit, 12 puskesmas dan 9 klinik yang tersebar di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaporan kejadian efek samping obat melalui aplikasi e-MESO, pada bulan Maret 2025 terdapat 3 sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan efek samping obat, yaitu Puskesmas Cilegon (Kota Cilegon), Puskesmas Mancak (Kabupaten Serang) dan RS Hermina Cilegon (Kota Cilegon). Capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO akan dihitung pada akhir tahun, sehingga pada TW I ini belum ada target.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	26		0.00	
2025	26		0.00	

IKU Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO memiliki target 26% yang nilainya baru akan diperoleh pada Triwulan 4. Berdasarkan hasil pemantauan pelaporan kejadian efek samping obat melalui aplikasi e-MESO, pada bulan Maret 2025 terdapat 3 sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan efek samping obat. Jumlah ini belum memenuhi target tahun 2025, yaitu 26% dari jumlah fasyankes yang diberikan KIE Farmakovigilans atau sebanyak 12 fasyankes.





c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan yang menjadi target pada Triwulan I adalah KIE Farmakovigilans kepada 45 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan tanggal 26 Februari 2025. Pada kegiatan ini, peserta diberikan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan monitoring efek samping obat, tata cara pelaporan kejadian tidak diinginkan (KTD)/efek samping obat (ESO) dan sharing session dari sarana pelayanan kesehatan yang telah menerapkan praktek farmakovigilans, yaitu Rumah Sakit Primaya Hospital, Kota Tangerang. Para peserta yang hadir juga difasilitasi dalam pembuatan akun pada aplikasi e-MESO, sehingga diharapkan setelah mendapatkan KIE seluruh peserta telah memiliki akun e-MESO yang terverifikasi dan siap untuk melaporkan KTS/ESO pada fasyankes masing-masing.

Pelaksanaan KIE Farmakovigilans dievaluasi melalui pemberian pre-test dan post test kepada peserta. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sebesar 17,77 dari sebelumnya nilai rata-rata pre-test peserta yaitu 80,67 menjadi 98,44 pada post test. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta ini didukung beberapa aspek, diantaranya kesesuaian antara materi yang diberikan dengan tujuan sosialisasi, narasumber yang kompeten, peserta yang terlibat secara aktif selama kegiatan, serta panduan pelaporan melalui aplikasi e-MESO dengan menggunakan contoh kasus.

Dengan dilaksanakan kegiatan KIE Farmakovigilans ini, diharapkan seluruh peserta telah memahami pentingnya monitoring efek samping obat sehingga aktif melaporkan kejadian efek samping obat melalui aplikasi e-MESO. Untuk mengawal pelaporan kejadian efek samping obat, BBPOM di Serang akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Diperlukan upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja pada IKU ini. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan, diantaranya :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala kepada Apoteker penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans untuk mengetahui kendala pelaporan KTD/ESO.





- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	QDC	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans Bagi tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	45 Orang (7.950.000)	45 Orang (7.950.000)	KIE Farmakovigilans diberikan kepada 45 Apoteker Penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan pada tanggal 26 Februari 2025

Pada tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan KIE Farmakovigilans dengan tagging anggaran QDC termasuk yang diblokir sebanyak 82,31%. Sehubungan dengan efisiensi anggaran BBPOM di Serang masih dapat melaksanakan KIE Farmakovigilans secara hybrid yaitu luring di Kantor BBPOM di Serang untuk peserta dan daring untuk narasumber dari RS. dengan adanya pemblokiran anggaran, untuk pemantauan pelaporan MESO akan dilakukan secara online /melalui chat grup.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	0,00	0,00	0,00	7.791.300	Rp 7.791.300	100,00	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien. Hal ini karena realisasi anggaran berupa pelaksanaan KIE Farmakovigilans sebesar 100%, sedangkan nilai realisasi output berupa persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO baru akan keluar pada Triwulan 4. Namun demikian, untuk memastikan nilai realisasi output memenuhi target, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

- g. informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

IKU Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan IKU baru pada Tahun 2025, sehingga tidak ada informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.





h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Sebanyak 45 Apoteker penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan yang di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak belum mendapatkan KIE Farmakovigilans	Dilakukan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilan kepada 45 Apoteker penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan.	Triwulan I 2025	Pada tanggal 26 Februari 2025 telah dilakukan pemberian KIE Farmakovigilan kepada 45 Apoteker penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 24 Rumah Sakit, 12 Puskesmas dan 9 Klinik di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Pada kegiatan ini juga diberikan fasilitasi pembuatan akun pada aplikasi e-MESO, sehingga sebanyak 45 sarana pelayanan kesehatan telah memiliki akun pada aplikasi e-MESO dan siap untuk melaporkan kejadian efek samping obat.	-	-	Sebanyak 45 Apoteker penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan yang di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak telah mendapatkan KIE Farmakovigilans. Setelah dilakukan KIE Farmakovigilans, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sebesar 17,77.
2	Sebanyak 45 fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 24 Rumah Sakit, 12 Puskesmas dan 9	Dilakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala terhadap pelaporan	Triwulan 4 2025	Pada periode bulan Maret 2025, sebanyak 3 sarana pelayanan kesehatan telah melakukan pelaporan	Pemantauan dan koordinasi secara berkala	Triwulan 4 2025	Dari target sebanyak 12 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	Klinik di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak belum memiliki akun pada aplikasi e-MESO dan belum pernah melakukan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) melalui aplikasi e-MESO	KTD/ESO kepada sarana pelayanan kesehatan.		kejadian efek samping obat melalui aplikasi e-MESO, yaitu Puskesmas Cilegon (Kota Cilegon), Puskesmas Mancak (Kabupaten Serang) dan RS Hermina Cilegon (Kota Cilegon).	terhadap pelaporan KTD/ESO kepada sarana pelayanan kesehatan		KTD/ESO, baru 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Bulanan			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	IKU baru per 2025	Dilakukan sosialisasi/ Bimtek Pelaporan e-MESO pada 26 Februari 2025 dengan jumlah peserta 45 orang yang berasal dari RS/ Klinik/ Puskesmas di Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak	Berdasarkan hasil pemantauan progress pelaporan dari sarana pelayanan kesehatan, pada bulan Maret 2025 terdapat 3 sarana yang telah melaporkan adanya efek samping obat, yaitu puskesmas mancak (kabupaten serang), puskesmas cilegon dan RS Hermina Cilegon (Cilegon).
Kendala bulan tersebut	IKU baru per 2025	Sosialisasi telah dilaksanakan, 45 sarana pelayanan kesehatan telah memiliki akun untuk melakukan pelaporan e-MESO	Dari 12 sarana pelayanan kesehatan yang ditargetkan melakukan pelaporan melalui e-MESO, baru 3 sarana pelayanan yang melaporkan adanya efek samping obat, sehingga harus tetap dilakukan pemantauan secara berkala agar target jumlah sarana yang melaporkan ESO terpenuhi
RTL/Rekomendasi	Akan dilakukan	Akan dilakukan	Untuk sarana yang belum melaporkan kejadian efek



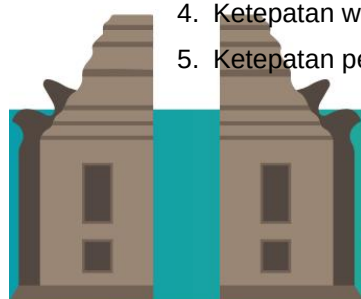


	Jan	Feb	Mar
	KIE Farmakovigilans pada bulan Februari	pemantauan progres pelaporan dari sarana pelayanan kesehatan yang telah dibimtek secara berkala	sampling obat, akan dilakukan pemantauan progress pelaporan dari sarana pelayanan kesehatan yang telah dibimtek secara berkala melalui PIC sarana yang telah ditentukan
Timeline Penyelesaian	-	Desember	Desember
Kondisi Awal	-	Sebanyak 45 Apoteker penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan belum pernah mengikuti KIE Farmakovigilans dan belum memiliki akun pada aplikasi e-MESO	Sebanyak 45 fasilitas pelayanan kesehatan belum pernah melakukan pelaporan KTD/ESO melalui e-MESO
Rencana Aksi	-	Melaksanakan KIE Farmakovigilans	Pemantauan pelaporan KTD/ESO pada aplikasi e-MESO
Kondisi Akhir	-	45 Apoteker penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan telah mengikuti KIE Farmakovigilans dan memiliki akun untuk melakukan pelaporan e-MESO	Sebanyak 3 fasilitas pelayanan kesehatan telah melakukan pelaporan melalui e-MESO

IKU 3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian





Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase sampel Pangan Olahan

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F
ketentuan

Keterangan :

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.





C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKU Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW I tahun 2025 sebesar 100,00% dengan target 85,00% sehingga capaian





pada TW I tahun 2025 sebesar 117,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Realisasi tersebut melebihi target yang ditentukan untuk TW I.

Unsur penilaian untuk indikator sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target sampai TW I	Realisasi sampai TW I	Penilaian (%)
a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)	35	35	20
b. Kesesuaian Parameter Uji (Bobot: 20 %) meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel yang berasal dari Region Semarang	78	78	20
c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot: 20%)	35	35	20
d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot: 10 %)	35	35	10
e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot:10%)	35	35	10
f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot:10%)	20	20	20
Total			100

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85,00		0,00	
TW III	85,00		0,00	
TW IV	85,00		0,00	
2025	85,00	100,00	117,65	Tercapai

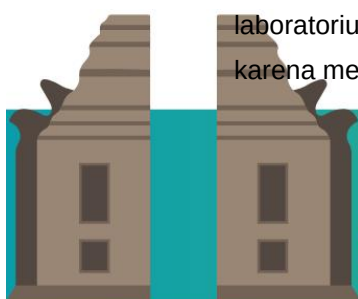
Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi TW I tahun 2025 sebesar 117,65 melebihi target tahun 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I capaian sampel yang telah diperiksa dan diuji sesuai timeline sama dengan target yang ditetapkan sehingga realisasi yang didapatkan pada triwulan I adalah 100%. Jumlah sampel yang diperiksa merupakan jumlah sampel yang disampling oleh BBPOM di Serang yaitu sebanyak 35 sampel, sedangkan kesesuaian parameter uji merupakan jumlah sampel yang diuji sesuai standar oleh laboratorium BBPOM di Serang yaitu total sampel BBPOM di Serang, Balai Tangerang dan sampel regionalisasi yang diterima dari Balai Besar/Balai/Loka POM di Region Semarang dengan total sampel sebanyak 68 sampel.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target diantaranya :

- Terdapat alat rusak yaitu *microwave* di laboratorium (baik di lab Pangan maupun di laboratorium lain), sehingga untuk pengujian logam membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan destruksi basah (waktu yang diperlukan 3-4 hari)





- Terdapat efisiensi terhadap pembelian sampel, pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025
- Proses *update database* tujuan sampling oleh Pusdatin yang baru selesai dilakukan pada bulan Januari

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel	Kesesuaian Parameter Uji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya	Realisasi (%)
Januari	11,00	85,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00
Februari	17,00	85,00	75,53	51,06	76,47	100,00	76,47	100,00	78,26
Maret	35,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel diatas terlihat semua parameter (target sampel, parameter uji, pengambilan kesimpulan, pelaporan, tindak lanjut telah tercapai dengan realisasi akhir triwulan adalah 100%. Realisasi melebihi target indikator yang direncanakan disebabkan karena :

- Pada *database* perhitungan target awal tahun target 85% berdasarkan dari perbandingan beban sampel per penguji. Namun dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyesuaian jumlah sampel yang diperiksa dan diuji menjadi hanya sebesar 20,27% dari baseline perhitungan awal sehingga seluruh sampel bisa diselesaikan dan dilaporkan oleh penguji sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
- Koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang sangat baik. Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%

Efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan standar operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan.

d. Upaya Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk mempertahankan realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025, perlu tetap dilakukan upaya untuk sebagai berikut :





1. Perencanaan yang Terstruktur dan Kolaborasi Antar Unit

Proses perencanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dengan berkoordinasi baik antar bagian Inspeksi dengan bagian Pengujian maupun dengan UPT lain dalam region Semarang, diantaranya :

- Untuk menekan biaya perjalanan dinas pembelian sampel akibat adanya efisiensi anggaran sebagai implikasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka kegiatan sampling dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sarana atau kegiatan lainnya yang menunjang.
- Efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap kemampuan uji laboratorium regional Semarang sehingga dilakukan penyesuaian perencanaan sampling.
- Melakukan penentuan skala prioritas terhadap perbaikan peralatan Laboratorium
- Melakukan penjadwalan pengujian sebagai bentuk efisiensi pemakaian listrik.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

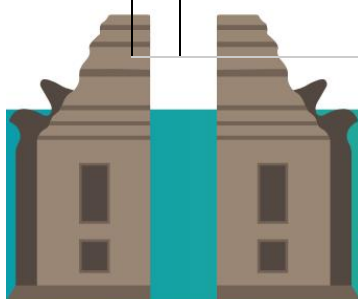
- Pelaksanaan pelatihan teknis baik bagi petugas pengambil sampel melalui pelatihan *E-Learning* Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan
- Melakukan supervisi penguji baru untuk peningkatan kompetensi personil pengujian

3. Pelaksanaan dan monitoring

- Monitoring pengambilan sampel dilakukan dengan membuat data base dan google form yang memantau Ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan, jenis pangan yang disampling, petugas yang melakukan sampling dan sisa anggaran (SAMPRO).
- Monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 bulan melalui *Tools Monev* Regionalisasi

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.001.053 (50%)	Pengujian	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pengadaan Laboratorium Sampel Makanan		68 sampel : - 35 sampel Serang - 33 sampel Regional
					- Reagen	368 sampel : - 291 sampel Serang	68 sampel : - 35 sampel Serang





NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
						- 77 sampel Regional	- 33 sampel Regional
					- Media Mikro		

Capaian Kinerja melampaui target kinerja yang disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada pengurangan anggaran termasuk penyesuaian target sampling pangan olahan TW I, dengan jumlah target yang menurun maka pencapaian sampling, pengujian sampai dengan pelaporan menjadi lebih mudah untuk dicapai sehingga Realisasi capaian jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan sepanjang TW I tahun 2025 adalah proses pengadaan reagensia dimana belum seluruhnya dilakukan karena pada pertengahan bulan Februari terdapat kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga pengujian sampel pada TW I diselesaikan dengan menggunakan reagen dan media yang masih tersisa dari pengadaan tahun 2024 dan reagen pengadaan tahun 2025 yang sudah datang pada termin 1.

Adanya sistem regionalisasi dimana Balai Besar POM di Serang merupakan bagian dari Region Semarang juga diharapkan dapat saling melengkapi kebutuhan untuk menyelesaikan parameter uji yang dalam pengawasan obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	24.975.500	Rp 33.555.800	134,35	0,88	-0,12	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk dalam kategori tidak efisien karena % realisasi anggaran input sebesar 134,35% lebih tinggi dari pada % capaian output sebesar 117,65% dengan tingkat efisiensi - 0,12. Hal ini disebabkan :

- Terdapat pengurangan anggaran pada mata anggaran QIA 001 dengan sisa anggaran sebesar 46,47% dari perencanaan awal menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji.
- Terdapat pengurangan anggaran untuk pengadaan reagen dan media mikro pada pengujian komoditi selain pangan olahan menyebabkan *sharing* pemakaian reagen dan media mikro tidak hanya untuk pengujian sampel pangan olahan.
- Belum terserapnya anggaran kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan yang meliputi pengadaan reagen dan media mikro karena ketersediaanya masih *indent*.





g. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 117,65 % (diatas target yang telah di tentukan). Berdasarkan hal tersebut dan kendala yang dihadapi maka pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan pengawalan. Jika diperlukan dilakukan penyesuaian target RAPK untuk TW II dan selanjutnya untuk dapat dilakukan penyesuaian kembali terutama untuk realiasi anggaran dengan menyesuaikan dengan target sampling setelah ditetapkan rencana pelaksanaan sampling yang baru menyesuaikan kebijakan anggaran terbaru.

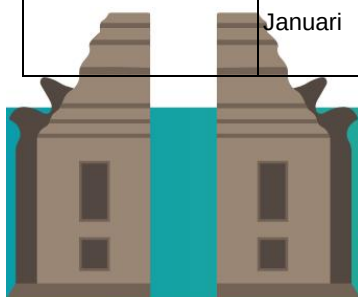
h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Merupakan IKU baru dan belum ada di Tahun 2024	Monitoring rekomendasi TW I	TW II	-	-	-	Berproses

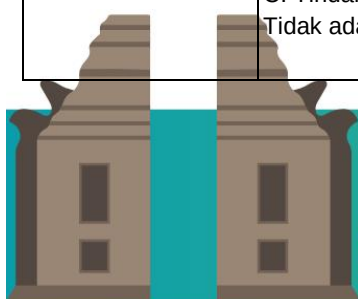
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU		85,00	85,00
Realisasi IKU	40,00	78,26	100,00
Capaian Bulanan	0,00	92,07	117,65
Capaian Tahunan	47,06	92,07	117,65
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	A. Monitoring terkait pengujian > Rincian sampel masuk : - Sampel Serang bulan Januari : 11 sampel (8 sampel PO, 1 sampel Fortif Garam, 2 sampel Kasus uji Mikro) - Sampel Tangerang bulan Januari : 9 sampel (8 sampel PO, 1 sampel Fortif Garam) - Parameter Penunjukkan (Regional) tidak ada sampel masuk bulan Januari	A. Monitoring terkait pengujian > Sampel masuk : - Sampel Serang masuk lab Feb : 6 sampel Produk Pangan Olahan (akumulasi s.d Februari 17 sampel) - Sampel Tangerang masuk lab Feb : 7 sampel (akumulasi s.d Feb 16 sampel) - Parameter Penunjukkan (Regional) : 14 sampel (PET) > Sampel Selesai uji : - Sampel Serang selesai Feb : 13 sampel (MS 9, 4 TMS) --> Sisa 4 sampel s.d Februari masih dalam proses pengujian dengan batas pelaporan 5-12 Maret 2025	A. Monitoring terkait pengujian > Rincian sampel masuk - Sampel Serang Maret : 7 sampel Produk Pangan Olahan dan 11 sampel kasus pemeriksaan (dimana 3 sampel diuji parameter mikrobiologi dan 8 sampel diuji parameter kimia) --> Akumulasi s.d Maret 35 sampel Produk Pangan Olahan - Sampel Tangerang Maret : 0 sampel (Akumulasi s.d Maret 16 sampel) - Sampel konfirmasi inwas : 13 sampel - Akumulasi total sampel yang





	Jan	Feb	Mar
	> Rincian Selesai Uji : Belum ada sampel yang selesai uji, masih dalam proses pengujian (timeline : 19 Feb s.d 5 Maret 2025) B. Monitoring Sampling Sampel yang disampling : 11 sampel (Produk Pangan Olahan 8 sampel, Fortifikasi garam 1 sampel, Kasus Mikrobiologi 2 sampel) C. Monitoring Tindak Lanjut : -	- Sampel Tangerang selesai Feb : 11 sampel --> sisa 5 sampel s.d Februari masih dalam proses pengujian dengan timeline 7 Maret 2025 - SIPT sampel januari dan februari sudah masuk MT pengujian - 14 sampel regional masuk di bulan Februari masih dalam pengujian dengan timeline 7-27 Maret 2025) B. Sampling Sampel disampling Feb : 6 sampel Produk Pangan Olahan Akumulasi sampel sampai dengan Feb : 17 sampel C. Monitoring Tindak Lanjut : Tindak lanjut sampel TMS dilaporkan melalui SIPT	masuk ke lab : 78 sampel (35 PO serang, 16 PO Tangerang, 14 Regional, 13 Konfirm Mobling Inwas) > Rincian sampel selesai uji - Sampel Serang selesai uji Maret: 11 sampel (MS 4 sampel, TMS 7 sampel) dan Sampel kasus pemeriksaan selesai uji 11 sampel (MS 1, TMS 9, HPST 1)--> Akumulasi 35 sampel (MS 14, TMS 20, HPST 1) - Sampel Tangerang selesai uji Maret : 5 sampel --> Akumulasi s.d Maret 16 sampel (MS 13, TMS 3) - Sampel regional : 14 sampel (MS 14, TMS 0) - Sampel konfirmasi inwas : 13 sampel (MS 0, TMS 13) - Akumulasi Total sampel selesai Uji : 78 sampel (41 MS, 36 TMS, 1 HPST) - Sampel Februari dan Maret sudah diselesaikan sampai input SIPT B. Sampling Sampel disampling Maret : 18 sampel Produk Pangan Olahan Akumulasi sampel sampai dengan Maret : 35 sampel C. Monitoring Tindak Lanjut : Tindak lanjut sampel TMS dilaporkan melalui SIPT
Kendala bulan tersebut	A. Pengujian - Microwave Lab Pangan mengalami kerusakan sehingga pengujian logam terhambat - Proses pelaporan melalui SIPT terhambat disebabkan update database tujuan sampling oleh Pusdatin pada bulan Januari. SIPT baru masuk MT pengujian 13 Februari 2025 (Batas waktu pengujian 19 Februari 2025) B. Sampling Tidak ada kendala C. Tindak Lanjut Tidak ada kendala	A. Pengujian - Terdapat alat rusak yaitu microwave di laboratorium (baik di lab Pangan maupun di laboratorium lain), sehingga untuk pengujian logam membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan destruksi basah (waktu yang diperlukan 3-4 hari) - Terdapat efisiensi terhadap pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025 - SIPT sampel regionalisasi belum berjalan lancar	A. Pengujian - Terdapat alat rusak yaitu microwave di laboratorium (baik di lab Pangan maupun di laboratorium lain), sehingga untuk pengujian logam membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan destruksi basah (waktu yang diperlukan 3-4 hari) B. Sampling Terdapat penyesuaian Renlak sampling pangan 2025 menyesuaikan dengan blokir mandiri sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 C. Tindak Lanjut : Tidak ada kendala





	Jan	Feb	Mar
		B. Sampling Terdapat penyesuaian Renlak sampling pangan 2025 menyesuaikan dengan blokir mandiri sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 C. Tindak Lanjut : Tidak ada kendala	
RTL/Rekomendasi	A. Pengujian - Mempercepat proses input SIPT sampel, diharapkan tetap terkirim sesuai dengan batas waktu pengujian - Permintaan perbaikan peralatan - Penjadwalan ulang pengujian dengan alat yang masih dapat digunakan atau menggunakan peminjaman alat lab lain	A. Pengujian - Monitoring perbaikan alat - Percepatan tiap tahap role SIPT dari mulai SPK, CP dan LHU	A. Pengujian - Monitoring perbaikan alat
Timeline Penyelesaian	TW 1	TW 1	TW 1
Kondisi Awal	SIPT sampel pangan olahan masih belum dapat diinput karena database belum final	Database sampel pangan olahan dalam proses update	Sampel Februari dan Maret diinput dari operator (tim sampling)
Rencana Aksi	Sampel pangan olahan bulan Januari selesai uji dan dilaporkan sesuai timeline	Sampel pangan olahan bulan Februari selesai uji dan dilaporkan sesuai timeline	Sampel pangan olahan bulan Maret selesai uji dan dilaporkan sesuai timeline
Kondisi Akhir	Database sampel pangan olahan Sudah update	Database pangan olahan selesai, sampel januari mulai diinput oleh operator dan dilaporkan	Sampel selesai di laporkan

IKU 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:





1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan : **persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =**

Dan Formula
$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{N}$$

$$N$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.

b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.

d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n , merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n .

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

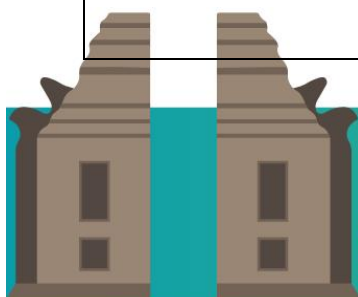
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.

g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.





h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	-	-	-

Selama triwulan I 2025 telah dilakukan pengujian sampel KLB sebanyak 4 (empat) sampel. Sampel diterima tanggal 13 Februari 2025 dan 100% diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2025. Semua sampel dapat diselesaikan tepat waktu. Hingga akhir triwulan 1 belum terdapat RHPK dari pusat untuk perhitungan capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar. Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 IKU ini dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	100	-	-	-
TW II	100		0,00	
TW III	100		0,00	
TW IV	100		0,00	
2025	100			

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena RHPK untuk perhitungan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar belum ada / belum final sehingga belum bisa dihitung capaiannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator kinerja yang baru pada tahun 2025 dan ditahun tahun sebelumnya belum ada. Keberhasilan IKU ini sangat didukung oleh banyak faktor antara lain :





1. Sumber Daya Manusia baik ketersediaan / jumlah maupun kompetesinya. Untuk peningkatan kompetensi diupayakan dengan pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal.
2. Sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai, sumber daya listrik, suku cadang, sarana penunjang maupun reagensia dan media mikrobiologi. Walaupun ada kebijakan blokir anggaran berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025 namun terhadap IKU Persentasi Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar tidak ada kendala yang berarti.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Dalam rangka peningkatan pencapaian target IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar di triwulan berikutnya perlu tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan Tim Pemeriksaan Kedeputian 3 ; Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi serta Tim Peralatan untuk tetap menjaga kesiapan tenaga penguji, kesiapan alat yang akan digunakan dan ketersediaan reagensia maupun media mikrobiologi yang dibutuhkan serta sumber daya lain yang dibutuhkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	QIA.001.053 (50%)	Pengujian	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pengadaan Media Mikro Laboratorium	148 sampel	68 sampel

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar di tagging pada KRO QIA.001.053 pada pengadaan media mikrobiologi.

Adanya Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja merubah rencana pelaksanaan pengadaan media mikrobiologi pada TW I. Sampai dengan akhir TW 1, proses pengadaan media mikrobiologi belum dilakukan , untuk capaian pengujian parameter uji mikrobiologi sampel pada TW I diselesaikan dengan menggunakan media mikrobiolgi yang tersisa pada pengadaan tahun 2024. Dan adanya sistem regionalisasi dimana Balai Besar POM di Serang merupakan bagian dari Region Semarang diharapkan dapat saling melengkapi kebutuhan media mikrobiologi dalam menyelesaikan parameter uji sampel.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0	0,00	24.975.500	Rp 33.555.800	134,35	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas penggunaan sumber daya / anggaran masih dianggap tidak efisien capaian TE berada pada angka 75% hal ini disebabkan oleh sudah ada realisasi anggaran namun belum ada capaian output indikator. Adanya realisasi yang lebih besar dari target





penggunaan anggaran di TW I tahun 2025 disebabkan oleh adanya perubahan rencana pengadaan media mikrobiologi yang disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran di bulan Februari 2025.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan untuk penyesuaian target indikator Persentasi Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja IKU 4 di TW I tahun 2025 dimana belum ada capaian serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama No B-PR.05.03.2.04.25.191 tanggal 10 April 2025 tentang Penyampaian Pengesahan DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2025 yang berisi mengenai pengembalian anggaran pengawasan BBPOM di Serang yang bertari mengembalikan target perencanaan kepada Target Awal sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang terkait pengadaan media mikrobiologi.

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Merupakan IKU baru dan belum ada di tahun 2024	Monitoring rekomendasi TW I	TW II	-	-	-	Berproses





i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar (QIA.001.053 50%)			Faizal
	Jan	Feb	Mar
Target IKU	100,00	100,00	100,00
Realisasi IKU			
Capaian Bulanan	0,00	0,00	0,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	0,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Tidak ada sampel KLB yang masuk pada bulan Januari	A. Monitoring terkait pengujian - Rincian sampel masuk dan selesai uji Bulan Februari : Sampel masuk lab : 4 sampel KLB tgl 13 Feb 2025 Sampel selesai diuji : HPST 4 sampel	Tidak ada sampel KLB yang masuk pada bulan Maret
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala	Terdapat efisiensi terhadap pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025	Tidak ada kendala
RTL/Rekomendasi	-	Review ketersediaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis	-
Timeline Penyelesaian	-	18 Feb 2025	-
Kondisi Awal	Tidak ada sampel	Diterima 4 sampel	Tidak ada sampel
Rencana Aksi	-	Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar terpenuhi	-
Kondisi Akhir	Tidak ada sampel	4 Sampel selesai diuji	Tidak ada sampel

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.





Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW I/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.





Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 sebesar 95,00% dengan target 85,00% sehingga capaian pada TW I tahun 2025 sebesar 111,76% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Realisasi TW I sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85,00		0,00	
TW III	85,00		0,00	
TW IV	85,00		0,00	
2025	85,00	95,00	111,76	Tercapai

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian TW I tahun 2025 sebesar 111,76% dan sudah melebihi target tahun 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan	% Ketepatan waktu pengambilan sampel	% Ketepatan waktu pelaporan	% Tindak lanjut sampel PIRT	Realisasi (%)
Jan	90,00	50,00	0,00	0,00	33,33	0,00	100,00	33,33
Feb	90,00	80,00	60,00	66,67	50,00	66,67	100,00	73,00
Mar	90,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	95,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya komponen D (Ketepatan waktu pengambilan sampel) yang tidak tercapai sedangkan komponen yang lainnya tercapai 100%. Jumlah sampel PIRT yang diperiksa merupakan jumlah sampel yang disampling oleh BBPOM di Serang yaitu sebanyak 6 sampel dari target awal di TW I sebanyak 12 sampel. Komponen tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat blokir mandiri sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pengurangan anggaran untuk pembelian sampel dan





pengadaan reagen serta media sehingga dilakukan pengurangan target jumlah sampel. Sedangkan sampel PIRT yang diuji merupakan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium BBPOM di Serang yaitu total sampel BBPOM di Serang, Balai Tangerang dan sampel regionalisasi yang diterima dari Balai Besar/Balai/Loka POM di Region Semarang dengan total sampel sebanyak 10 sampel.

Realisasi akhir triwulan I adalah sebesar 95%. Hal ini dapat dicapai karena koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang sangat baik. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 95%, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan standar operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

1. Perencanaan yang Terstruktur dan Kolaborasi Antar Unit

Proses perencanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dengan berkoordinasi dengan bidang Pengujian dan Lintas Sektor terkait, diantaranya dengan melakukan pengambilan sampel PIRT yang belum disampling pada triwulan II agar capaian sampel dapat terpenuhi.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

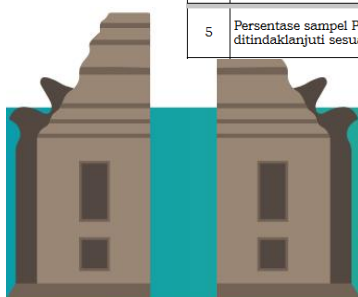
- Pelaksanaan pelatihan teknis baik bagi petugas pengambil sampel melalui pelatihan E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan
- Melakukan supervisi penguji baru untuk peningkatan kompetensi personil pengujian

3. Pelaksanaan dan monitoring

- Monitoring pengambilan sampel dilakukan dengan membuat data base dan google form yang memantau Ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan, jenis pangan yang disampling, petugas yang melakukan sampling dan sisa anggaran (SAMPRO).
- Monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 bulan melalui *Tools Monev* Regionalisasi
- Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.001.055	Pem - Inspeksi	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pengadaan Sampel	291 sampel	35 sampel





Kegiatan yang dilakukan sepanjang TW I tahun 2025 adalah pengadaan sampel makanan. Capaian Kinerja melampaui target kinerja disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada pengurangan anggaran termasuk penyesuaian target sampling produk PIRT pada TW I. Jumlah target sampel PIRT menurun menyesuaikan dengan harga sampel dan jenis sampel yang akan diuji. Hal ini berkaitan dengan reagen dan media yang dapat digunakan merupakan persediaan sisa dari pengadaan tahun 2024. Untuk itu pencapaian sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut menjadi lebih mudah untuk dicapai sehingga Realisasi capaian jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	95,00	111,76	4.403.000	Rp 5.018.613	113,98	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena % realisasi anggaran sebesar 113,98% lebih tinggi dari pada % capaian indikator sebesar 111,76% dengan tingkat efisiensi -0,02. Hal ini disebabkan:

- Terdapat pengurangan anggaran pada mata anggaran QIA 001 dengan sisa anggaran sebesar 46,47% dari perencanaan awal menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji.
- Terdapat pengurangan anggaran untuk pengadaan reagen dan media mikro untuk pengujian komoditi selain pangan olahan menyebabkan *sharing* pemakaian reagen dan media mikro tidak hanya untuk pengujian sampel pangan olahan.
- Belum terserapnya anggaran kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan yang meliputi pengadaan reagen dan media mikro karena ketersediaanya masih *indent*.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim TW I tahun 2025 diperoleh informasi capaian sebesar 111,76 %. (diatas target yang telah di tentukan). Berdasarkan hal tersebut dan kendala yang dihadapi, maka pada TW berikutnya akan terus dilakukan pengawalan. Jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian target RAPK untuk TW II dan selanjutnya terutama untuk realiasi anggaran dengan menyesuaikan dengan target sampling setelah ditetapkan rencana pelaksanaan sampling yang baru menyesuaikan kebijakan anggaran terbaru.





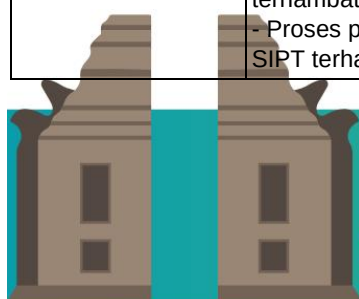
h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Merupakan IKU baru dan belum ada di Tahun 2024	Monitoring rekomendasi TW I	TW II	-	-	-	Berproses

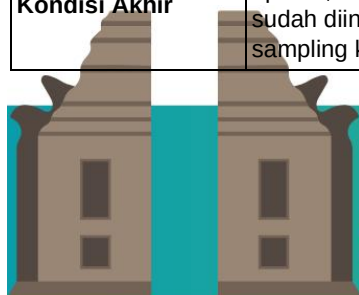
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU		85,00	85,00
Realisasi IKU	33,33	73,00	95,00
Capaian Bulanan	0,00	85,88	111,76
Capaian Tahunan	39,22	85,88	111,76
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	A. Monitoring pengujian > Rincian sampel masuk - Sampel Serang Jan : 4 sampel - Sampel Tangerang Jan : 2 sampel > Rincian sampel selesai uji Belum ada sampel yang selesai uji, masih dalam proses pengujian (timeline 19 Feb s.d 5 Maret 2025) B. Monitoring Sampling Sampel Serang yang disampling sesuai rencana : 4 sampel C. Monitoring Tindak Lanjut : -	A. Monitoring terkait pengujian > Rincian sampel masuk - Sampel Serang Feb : 2 sampel (akumulasi s.d Feb : 6 sampel) - Sampel Tangerang Feb : 2 sampel (akumulasi s.d Feb : 4 sampel) > Rincian sampel selesai uji - Sampel Serang selesai Uji Feb : 4 sampel (MS 3 sampel, TMS 1 sampel) --> sampel Januari selesai sesuai timeline - Sampel Tangerang selesai uji Feb : 2 sampel --> Sampel Januari selesai sesuai timeline - Sampel Februari masih dalam proses pengujian dengan batas pelaporan 12 Maret 2025 - SIPT sampel januari sudah selesai dilaporkan dan sampel februari sudah masuk MT pengujian B. Monitoring Sampling Sampel Februari yang disampling : 2 sampel (akumulasi s.d Feb 6 sampel) C. Monitoring Tindak Lanjut	A. Monitoring terkait pengujian > Rincian sampel masuk - Sampel Serang Maret : 0 sampel (akumulasi s.d Maret : 6 sampel) - Sampel Tangerang Maret : 0 sampel (akumulasi s.d Maret : 4 sampel) > Rincian sampel selesai uji - Sampel Serang selesai Uji Feb : 2 sampel (MS 1 sampel, TMS 1 sampel) --> sampel selesai sesuai timeline dan sudah dilaporkan secara SIPT - Sampel Tangerang selesai uji Feb : 2 sampel --> Sampel Feb selesai sesuai timeline dan sudah dilaporkan secara SIPT > Akumulasi sampel selesai sampai Maret - Serang : 6 sampel (4 MS, 2 TMS) - Tangerang 4 sampel (3 MS, 1 TMS) B. Monitoring Sampling Sampel Februari yang disampling : 2 sampel (akumulasi s.d Feb 6 sampel) C. Monitoring Tindak Lanjut Dibuat surat tindak lanjut produk PIRT TMS ke UPT BPOM setempat dimana produk tersebut diproduksi
Kendala bulan tersebut	A. Kendala Pengujian - Microwave Lab Pangan mengalami kerusakan sehingga pengujian logam terhambat - Proses pelaporan melalui SIPT terhambat disebabkan	A. Pengujian - Microwave di laboratorium baik di lab Pangan maupun di lab lain mengalami kerusakan sehingga untuk pengujian logam membutuhkan waktu yang lebih lama karena menggunakan destruksi	Tidak ada kendala





	Jan	Feb	Mar
	update database tujuan sampling oleh Pusdatin pada bulan Januari. SIPT baru masuk MT pengujian 13 Februari 2025 (Batas waktu pengujian 19 Februari 2025) B. Kendala Sampling : Tidak ada kendala C. Kendala Tindak Lanjut : Tidak ada kendala	basah (waktu yang diperlukan 3-4 hari) - Terdapat efisiensi terhadap pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025 B. Sampling Terdapat penyesuaian Renlak sampling pangan 2025 menyesuaikan dengan blokir mandiri sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 C. Tindak Lanjut : Tidak ada kendala	
RTL/Rekomendasi	A. Pengujian - Mempercepat proses input SIPT sampel, diharapkan tetap terkirim sesuai dengan batas waktu pengujian - Permintaan perbaikan peralatan - Penjadwalan ulang pengujian dengan alat yang masih dapat digunakan atau menggunakan peminjaman alat lab lain B. Sampling - Berkoordinasi dengan Linsek terkait untuk mencari sampel PIRT sesuai kategori yang telah ditetapkan C. Tindak Lanjut: Belum ada tindak lanjut dikarenakan belum ada sampel pangan olahan yang TMS	A. Pengujian - Monitoring perbaikan alat - Percepatan tiap tahap role SIPT dari mulai SPK, CP dan LHU - penjadwalan pemakaian alat dan melakukan kajian pemindahan alat idle dari PPPOMN B. Sampling - Berkoordinasi dengan Linsek terkait untuk mencari sampel PIRT sesuai kategori yang telah ditetapkan - Berkoordinasi dengan Bidang Pengujian terkait ketersediaan reagen untuk sampel PIRT yang akan disampling terkait blokir mandiri C. Tindak Lanjut : Membuat surat tindak lanjut bila diketahui terdapat sampel PIRT TMS berdasarkan hasil Uji	A. Pengujian - Monitoring perbaikan alat B. Sampling: Tidak dilakukan sampling PIRT di bulan Maret, dikarenakan adanya efisiensi anggaran, adanya penjadwalan pemakaian alat di pengujian, dan pengujian pada kategori pangan tertentu saja, sehingga berdampak pada sampling produk PIRT
Timeline Penyelesaian	TW 1	TW 1	TW 1
Kondisi Awal	SIPT sampel PIRT masih belum dapat diinput karena database belum final, masih ada beberapa kategori pangan yang tidak ada saat proses input data sampel	Terdapat penyesuaian renlak sampel pangan 2025 untuk sampel PIRT yang menyesuaikan dengan blokir mandiri sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 Sampel PIRT Bulan Februari diinput dari operator (tim sampling)	Tidak ada sampel PIRT di Bulan Maret
Rencana Aksi	Sampel PIRT Januari selesai sesuai timeline (19 Februari 2025)	Sampel PIRT Februari selesai sesuai timeline (dilaporkan maksimal tgl 15 Maret 2025)	Tidak ada sampel PIRT di Bulan Maret
Kondisi Akhir	Database sampel PIRT Sudah update, Sampel Bulan Januari sudah diinput oleh petugas sampling ke dalam SIPT	Database sampel PIRT Sudah update, Sampel Bulan Januari sudah diinput oleh petugas sampling ke dalam SIPT	Tidak ada sampel PIRT di Bulan Maret





IKU 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

$$= (A+B)/2$$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times$ 100%

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times$ 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	72,00	100,00	138,89	Tidak Dapat Disimpulkan





Pada triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait sebanyak 50 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 50 sarana/pelaku usaha/lintas sektor terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback* dengan rincian :

- 1) 24 tindak lanjut dari pelaku usaha komoditi obat (Sarana produksi obat, sarana distribusi obat, Apotek, Klinik, Rumah Sakit Swasta) dan 10 tindak lanjut dari lintas sektor (Gudang Farmasi Kota/Kabupaten dan Puskesmas).
- 2) 7 tindak lanjut dari pelaku usaha (1 Industri Obat Tradisional pada bulan Januari, 1 Industri Suplemen Kesehatan dan 1 Industri Kosmetik pada Maret 2025, 1 tindak lanjut dari sarana distribusi Kosmetik).
- 3) 12 tindak lanjut dari pelaku usaha komoditi pangan (Sarana produksi pangan olahan) dan 1 tindak lanjut dari lintas sektor

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **138,89 %** dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	72,00	100,00	138,89	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	72,00		0,00	
TW III	72,00		0,00	
TW IV	72,00		0,00	
2025	72,00	100,00	138,89	▲ Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 namun dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dikarenakan pada Triwulan I belum ada target dan pelaksanaan pemeriksaan ke sarana produksi PIRT.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha maupun lintas sektor diperoleh hasil sebesar 100% karena pelaku usaha/lintas sektor telah memberikan *feedback* atas surat tindak lanjut yang dikirimkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin oleh petugas kepada pelaku usaha dan juga lintas sektor (Dinas Kesehatan) terkait *feedback* / CAPA yang harus dikirimkan. Selain itu, untuk memastikan bahwa tindak lanjut pemeriksaan pada sarana distribusi obat bahan alam dan kosmetik efektif,





maka tindak lanjut terhadap produk tidak memenuhi ketentuan langsung dilakukan di tempat seperti pemusnahan terhadap produk tanpa izin edar (TIE), produk kedaluwarsa dan rusak.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :

- 1) Melakukan monitoring terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dibuat oleh petugas sesuai timeline dan mempercepat approval surat tindak lanjut sehingga bisa segera dikirimkan ke sarana sebagai dasar pembuatan CAPA.
- 2) Melakukan monitoring timeline terhadap *feedback* / CAPA dari pelaku usaha ataupun lintas sektor.
- 3) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha/lintas sektor untuk mengingatkan perihal pembuatan CAPA.
- 4) Melakukan kegiatan Desk CAPA untuk meningkatkan *feedback* dari pelaku usaha/lintas sektor.
- 5) Melakukan sosialisasi inovasi SEHATI (SEsuaikan Perbaikan CAPA dengan Harapan menjadi berarTI) agar tindak lanjut CAPA sesuai, tepat waktu, dan lebih optimal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	QIC.001.B	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	B Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Tindak Lanjut/ Monitoring Hasil Pengawasan (Saksi Pemusnahan/ Pendampingan/ Tindak Lanjut Kasus	24 Trip	0	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran khusus. Pelaksanaan pendampingan/ desk terhadap sarana dilaksanakan secara daring maupun luring tanpa melibatkan anggaran khusus mengingat adanya blokir mandiri sehingga sebagian besar peruntukan anggaran adalah untuk pencapaian target pemeriksaan sarana rutin.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder antara lain :

- 1) Sosialisasi terkait cara pembuatan CAPA kepada pelaku usaha/lintas sektor pada saat pemeriksaan sarana.
 - 2) Desk CAPA terhadap pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pembuatan CAPA.
 - 3) Memanfaatkan tools MNILIK untuk monitoring pembuatan surat tindak lanjut, pengiriman surat tindak lanjut ke sarana, dan timeline pengiriman *feedback*/CAPA dari sarana.
- Sosialisasi dan optimalisasi inovasi SEHATI, agar tindak lanjut CAPA sesuai, tepat waktu, dan lebih optimal.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	
	T	R	%	T	R	%					
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	100,00	138,89	0	Rp	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena belum terdapat realisasi anggaran hingga triwulan I tahun 2025. Hal ini dikarenakan pengawalan IKU persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran khusus. Pelaksanaan pendampingan/ desk terhadap sarana dilaksanakan secara daring maupun luring tanpa melibatkan anggaran khusus mengingat adanya blokir mandiri sehingga sebagian besar peruntukan anggaran adalah untuk pencapaian target pemeriksaan sarana rutin.

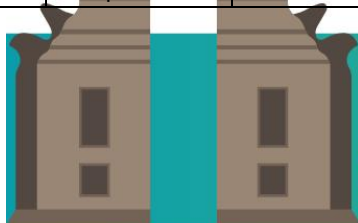
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi realisasi tahun 2024 sebesar 71,70% (target sebesar 70% dengan capaian indikator sebesar 102,42%) untuk itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target menjadi 72% serta akan dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Terdapat sarana yang belum mengirimkan CAPA terhadap pemeriksaan sarana yang dilakukan pada Nov-Des 2024 (masih masuk timeline CAPA 21 HK sejak surat tindak lanjut diterima sarana)	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha/lintas sektor untuk mengingatkan perihal pembuatan CAPA.	Akhir TW I 2025	Sudah dilakukan komunikasi dan koordinasi kepada pelaku usaha/lintas sektor terhadap <i>carryover</i> CAPA di tahun 2024	-	-	Terdapat 24 rekomendasi dari pelaku usaha/lintas sektor komoditi obat yang merupakan <i>carryover</i> 2024 yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha/lintas sektor pada bulan Januari-Februari 2025
2	Lamanya surat tindak lanjut diterima oleh sarana (periode dari tanggal pemeriksaan sarana sampai surat	Monitoring terhadap pembuatan dan pengiriman surat tindak lanjut ke sarana sesuai timeline	Akhir triwulan	Sudah dilakukan monitoring pembuatan surat tindak lanjut terhadap pemeriksaan sarana yang dilakukan pada Januari-Maret 2025	Pada bulan Maret terdapat pemeriksaan sarana dengan 3 tindak lanjut berupa PSK. Pelaksanaan PSK baru dilakukan terhadap 1 sarana	April 2025	Terhadap 22 sarana komoditi kedeputian I yang diperiksa selama TW I 2025 sudah dibuat 21 surat tindak lanjut

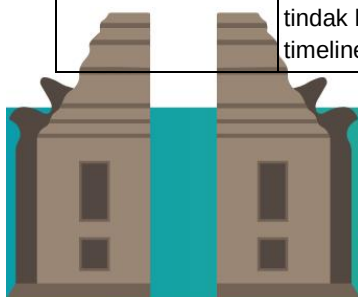




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	tindak lanjut di terima oleh sarana)				di akhir Maret sehingga masih terdapat 2 sarana yang belum menerima surat tindak lanjut PSK sebagai dasar pembuatan CAPA		sesuai timeline. 1 Sarana tutup sehingga tidak dibuat surat tindak lanjutnya.
3	Terdapat sarana (pelaku usaha/lintas sektor) yang tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sudah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Serang	- Sosialisasi terkait pembuatan CAPA kepada pelaku usaha/lintas sektor pada saat pemeriksaan sarana - Sosialisasi inovasi SEHATI - Monev terhadap <i>feedback</i> / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sektor	Akhir triwulan	- Sudah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha/lintas sektor pada saat dilakukan pemeriksaan sarana periode Jan-Mar 2025. - Sosialisasi Inovasi SEHATI melalui kegiatan BAPERAN tanggal 18 Maret 2025 - Desk CAPA untuk Pelaku Usaha Pangan Olahan tanggal 27 Februari 2025 - Sudah dilakukan monev terhadap <i>feedback</i>/CAPA terhadap surat tindak lanjut yang sudah di terima sarana di TW I 2025	Memastikan 11 surat tindak lanjut (dari pemeriksaan komoditi obat di bulan Maret) dikirimkan CAPA nya tepat waktu sesuai timeline 21 HK pada bulan April/Mei.	Akhir TW II	- Terhadap 10 sarana kedeputian I yang sudah menerima surat tindak lanjut s/d Feb, seluruhnya sudah mengirimkan CAPA sesuai timeline. - Terhadap 12 sarana produksi pangan olahan telah mengirimkan CAPA secara tepat waktu melalui aplikasi SEHATI.

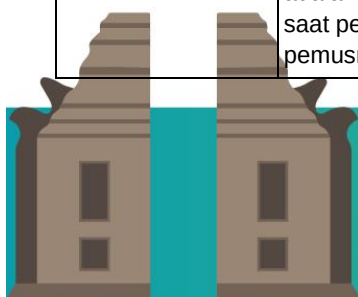
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	A. Dep 1 - TL yang diberikan ke pelaku usaha = 19 (merupakan carryover surat tindak lanjut Nov-Des 2024) karena timeline pengiriman CAPA 21 HK sejak sarana menerima surat tindak lanjut, CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha = 19 - TL yang diberikan ke lintas sektor = 4 (merupakan carryover surat tindak lanjut Nov-Des 2024) karena timeline pengiriman CAPA 21 HK	A. Dep 1 - TL yang diberikan ke pelaku usaha = 2, CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha = 2 (1 TL 2025 dan 1 carryover 2024) - TL yang diberikan ke lintas sektor = 0, CAPA yang dikirimkan oleh lintas sektor = 0 - Terhadap 8 sarana (2 pelaku usaha dan 6 lintas sektor) yang sudah diperiksa di Januari sudah dibuat semua surat tindak	A. Dep 1 - TL yang diberikan ke pelaku usaha = 3, CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha = 3 - TL yang diberikan ke lintas sektor = 6, CAPA yang dikirimkan oleh lintas sektor = 6 - Terhadap 2 sarana (pelaku usaha) yang sudah diperiksa di Februari sudah dibuat



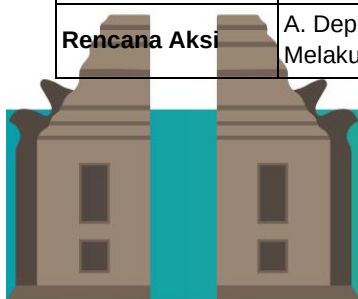


	Jan	Feb	Mar
	sejak sarana menerima surat tindak lanjut, CAPA yang dikirimkan oleh lintas sektor = 4 B. Dep 2 - TL yang diberikan ke pelaku usaha sebanyak 1, dan Tindak lanjut dilaksanakan langsung berupa pemusnahan di tempat terhadap produk OBA TIE. Terdapat 1 penerimaan CAPA dari pemeriksaan tahun sebelumnya atas hasil riksa IOT PT Lapi Laboratories - Tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan terhadap Lintas Sektor C. Dep 3	lanjutnya dan sudah diterima sarana pada bulan Feb. Timeline CAPA 21 HK masih di bulan Maret sehingga belum dihitung sebagai capaian di bulan Feb. B. Dep 2 - TL yang diberikan ke pelaku usaha (sarana distribusi) sebanyak 2, dan Tindak lanjut dilaksanakan langsung berupa pemusnahan di tempat terhadap produk Kosmetik TIE dan Kedaluwarsa dan TL sarana produksi sebanyak 1. - Tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan terhadap Lintas Sektor C. Dep 3	semua surat tindak lanjutnya dan sudah diterima sarana pada bulan Mar. CAPA nya sudah dikirimkan sebelum 21 HK - Target pemeriksaan sarana di bulan Maret sebanyak 12 sarana, semua sudah terealisasi dan sudah dibuat surat tindak lanjutnya sesuai timeline (11 surat TL, 1 sarana tutup sehingga tidak dibuat surat TLnya). Timeline CAPA 21 HK masih di bulan April dan Mei sehingga belum dihitung sebagai capaian di bulan Maret. B. Dep 2 - TL yang diberikan ke pelaku usaha sebanyak 2, dan Tindak lanjut dilaksanakan langsung berupa pemusnahan di tempat terhadap produk OBA TIE. Terdapat 1 penerimaan CAPA dari pemeriksaan tahun sebelumnya atas hasil riksa Industri Suplemen Kesehatan PT Oryza Farma dan 1 CAPA atas hasil pemeriksaan bulan Januari CV Syfadine - Tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan terhadap Lintas Sektor C. Dep 3
Kendala bulan tersebut	A. Dep 1 -Di bulan Januari terdapat pemeriksaan ke pelaku usaha (2 sarana) dan lintas sektor (6 sarana). Terhadap pemeriksaan tersebut baru dilakukan di akhir Januari 2025 sehingga surat tindak lanjut baru akan diterima sarana di bulan Februari (tidak dihitung sebagai capaian TL/CAPA bulan Januari) B. Dep 2 Tindak Lanjut yang dihitung terhadap sarana distribusi OBA adalah tindak lanjut di tempat pada saat pemeriksaan berupa pemusnahan terhadap produk TIE	A. Dep 1 -Pada Minggu ke-1 dan 2 Februari tidak dapat dilakukan pemeriksaan sarana karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan target dan penyesuaian Juknis Pemeriksaan dari Pusat. Pemeriksaan baru dilakukan pada akhir Februari (2 sarana) sehingga surat tindak lanjut baru bisa diterbitkan di bulan Maret B. Dep 2 Tindak Lanjut yang dihitung terhadap sarana distribusi OBA adalah tindak lanjut di tempat	A. Dep 1 -Pada bulan Maret terdapat pemeriksaan sarana dengan 3 tindak lanjut yang berupa PSK. Pelaksanaan PSK baru dilakukan terhadap 1 sarana di akhir Maret. Masih terdapat 2 sarana yang belum dilakukan PSK sehingga sarana belum menerima surat tindak lanjut untuk dasar pembuatan CAPA. B. Dep 2 Tindak Lanjut yang dihitung terhadap sarana distribusi OBA adalah tindak lanjut di





	Jan	Feb	Mar
	yang disaksikan oleh petugas Balai. Pembuatan TL atas pemeriksaan sarana produksi baru diterbitkan setelah 10 HK dari tanggal pemeriksaan sehingga akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Pemberian 10 HK dilakukan sebagai waktu pemenuhan ketidaksesuaian oleh Pelaku Usaha. C. Dep 3	pada saat pemeriksaan berupa pemusnahan terhadap produk TIE yang disaksikan oleh petugas Balai. Terhadap TL Sarana Produksi yang diterbitkan di Bulan berjalan, tidak dihitung sebagai TL CAPA/ rekomendasi C. Dep 3	tempat pada saat pemeriksaan berupa pemusnahan terhadap produk TIE yang disaksikan oleh petugas Balai. C. Dep 3
RTL/Rekomendasi	A. Dep 1 -Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan monev timeline CAPA 21 HK terhadap surat tindak lanjut yang sudah diterima sarana B. Dep 2 Memastikan TL diterbitkan sesuai timeline C. Dep 3	A. Dep 1 -Memastikan sarana terperiksa di akhir bulan Feb (2 sarana) dibuat surat tindak lanjutnya tepat waktu -Memastikan target pemeriksaan bulan Maret (12 sarana) terealisasi sesuai timeline dan mempercepat approval surat tindak lanjut agar bisa dikirimkan ke sarana tepat waktu -Menghubungi APJ sarana yang belum mengirimkan CAPA B. Dep 2 - Memastikan TL diterbitkan sesuai timeline - Memastikan TL yagn diterbitkan dilaporkan ke Balai oleh pelaku usaha C. Dep 3	A. Dep 1 -Memastikan pelaksanaan PSK terhadap 2 sarana yang surat tindak lanjutnya telah terbit di akhir bulan Maret bisa terealisasi di bulan April. -Memastikan 11 surat Tindak Lanjut (dari pemeriksaan di bulan Maret) dikirimkan CAPAnya tepat waktu sesuai timeline 21 HK B. Dep 2 - Memastikan TL diterbitkan sesuai timeline - Memastikan TL yagn diterbitkan dilaporkan ke Balai oleh pelaku usaha C. Dep 3
Timeline Penyelesaian	Akhir TW I 2025	Akhir TW I 2025	Akhir TW II 2025
Kondisi Awal	A. Dep 1 Terdapat sarana yang belum mengirimkan CAPA terhadap pemeriksaan sarana yang dilakukan pada Nov-Des 2024 B. Dep 2 Terdapat sarana distribusi dengan hasil TMK karena adanya temuan OBA TIE C. Dep 3	A. Dep 1 Pada Minggu ke-1 dan 2 Februari tidak dapat dilakukan pemeriksaan sarana karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan target dan penyesuaian Juknis Pemeriksaan dari Pusat. B. Dep 2 TL sarana produksi baru diterbitkan TL setelah 10 HK Terdapat sarana distribusi dengan hasil TMK karena adanya temuan kosmetik TIE, kedaluwarsa dan rusak C. Dep 3	A. Dep 1 Terdapat sarana (pelaku usaha/lintas sektor) yang tidak merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sudah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Serang B. Dep 2 Terdapat sarana yang belum menyampaikan CAPA C. Dep 3
Rencana Aksi	A. Dep 1 Melakukan komunikasi dan	A. Dep 1 Dilakukan monitoring pembuatan	A. Dep 1 - Dilakukan sosialisasi





	Jan	Feb	Mar
	koordinasi dengan pelaku usaha/lintas sektor untuk mengingatkan perihal pembuatan CAPA. B. Dep 2 Tindak lanjut dilakukan secara langsung pada saat pemeriksana berupa pemusnahan produk oleh pemilik sarana C. Dep 3	surat tindak lanjut terhadap pemeriksaan sarana yang dilakukan pada Februari 2025 B. Dep 2 Penerbitan TL hasil pemeriksaan sarana produksi yang diperiksa pada bulan sebelumnya C. Dep 3	terhadap pelaku usaha/lintas sektor pada saat dilakukan pemeriksaan sarana - Dilakukan monev terhadap feedback/CAPA terhadap surat tindak lanjut yang sudah di terima sarana di TW I 2025 - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha/lintas sektor untuk mengingatkan perihal pembuatan CAPA. B. Dep 2 Seluruh pemeriksaan yang dilakukan pada bulan sebelumnya dan bulan berjalan telah diselesaikan TL-nya. C. Dep 3
Kondisi Akhir	A. Dep 1 Terdapat 24 rekomendasi dari pelaku usaha/lintas sektor komoditi obat yang merupakan carryover 2024 yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha/lintas sektor pada bulan Januari-Februari 2025 B. Dep 2 Tindak Lanjut sarana distribusi OBA dilakukan langsung pada saat pemeriksaan C. Dep 3	A. Dep 1 Pemeriksaan baru dilakukan pada akhir Februari (2 sarana) sehingga surat tindak lanjut baru bisa diterbitkan di bulan Maret B. Dep 2 Tindak Lanjut sarana distribusi Kosmetik dilakukan langsung pada saat pemeriksaan C. Dep 3	A. Dep 1 Terhadap sarana yang sudah menerima surat tindak lanjut sampai dengan bulan Februari (10 sarana), seluruhnya sudah mengirimkan CAPA nya. B. Dep 2 TL sarana produksi telah ditanggapi oleh pelaku usaha dalam <i>timeline</i> C. Dep 3

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)





- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan** = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi** = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut** = rata-rata persentase sub aspek 1-6
- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

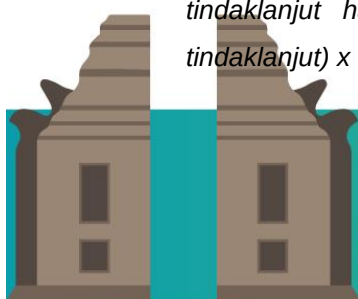
% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi** = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat** = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi** = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana** = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi** = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat** = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi** = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana** = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%





Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	100,00	113,64	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana produksi kosmetik. Pada triwulan I tahun 2025 tidak terdapat target pemeriksaan ke sarana produksi obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan

Capaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **113,64 %** dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	88,00	100,00	113,64	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	88,00		0,00	
TW III	88,00		0,00	
TW IV	88,00		0,00	
2025	88,00	100,00	113,64	▲ Tercapai





Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 namun dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dikarenakan pada Triwulan I tidak ada target dan pelaksanaan pemeriksaan ke sarana produksi obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

1) Sarana Produksi Obat

Seluruh target pemeriksaan sarana produksi obat di 2024 sudah diperiksa dan tidak terdapat *carryover* untuk dilakukan pemeriksaan pada triwulan I 2025.

Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB baru dilakukan pada 6-7 Februari 2025 dan surat Hasil Penetapan Perencanaan Inspeksi CPOB dari Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif No. B-PW.01.01.3.02.25.125 diterbitkan tanggal 28 Februari 2025. Surat tersebut merupakan dasar pelaksanaan Inspeksi CPOB Tahun 2025, berdasarkan surat tersebut, target pemeriksaan sarana produksi obat di wilayah pemantauan Balai Besar POM di Serang sebanyak 3 sarana. Telah disusun Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat tahun 2025 dengan target 1 sarana pada triwulan II, 1 sarana pada triwulan III dan 1 sarana pada triwulan IV.

2) Sarana Produksi OBA dan SK

Pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan baru direncanakan diperiksa pada TW III dan TW IV. Hal ini dikarenakan sarana – sarana tersebut terakhir diperiksa pada akhir tahun 2024, dan masih terdapat sarana yang masih dalam progress penyampaian CAPA atas hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya.

3) Sarana Produksi Kosmetik

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik yang dilakukan berdasarkan atas Surat Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.12.44.12.24 tanggal 30 Desember 2024 tentang pemeriksaan Sarana Kosmetik sebagai tindak lanjut atas temuan produk TMS. Sarana tersebut masuk ke dalam target pemeriksaan sesuai renlak pemeriksaan sarana produksi kosmetik 2025 karena dari hasil pembobotan, terdapat produk TMS dan juga terdapat pergantian alamat pabrik.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :

1) Sarana Produksi Obat

Memastikan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan dan renlak pemeriksaan yang telah disusun.

2) Sarana Produksi OBA dan SK





- Memastikan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan dan renlak pemeriksaan yang telah disusun
- Memantau bahwa sarana produksi telah menyelesaikan CAPA atas ketidaksesuaian pemeriksaan tahun sebelumnya.
- Memastikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan disusun sesuai timeline.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai CAPA dinyatakan diterima.

3) Sarana Produksi Kosmetik

- Memastikan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan dan renlak pemeriksaan yang telah disusun
- Memantau bahwa sarana produksi telah menyelesaikan CAPA atas ketidaksesuaian pemeriksaan tahun sebelumnya.
- Memastikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan disusun sesuai timeline. Khusus untuk sarana produksi kosmetik, diberikan 10 HK dari tanggal pelaksanaan pemeriksaan yang memungkinkan pelaku usaha melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.

Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai CAPA dinyatakan diterima.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.001.A (50%)	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten	13 sarana	1 sarana	Dengan adanya blokir mandiri terdapat penyesuaian jumlah target dan sebagian besar pemeriksaan baru direncanakan di TW II dan dan IV.

1) Sarana Produksi Obat

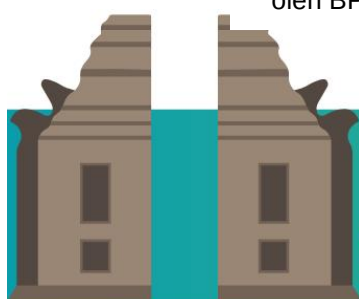
Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi obat pada triwulan I tahun 2025 sehingga belum terdapat realisasi trip pemeriksaan untuk sarana produksi obat.

2) Sarana Produksi OBA dan SK

Belum terdapat pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan pada TW I 2025.

3) Sarana Produksi Kosmetik

- Secara pro aktif menghubungi penanggung jawab teknis (PJT) sarana produksi untuk memastikan waktu 10 HK dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan.
- Pendampingan/ desk CAPA dengan pelaku usaha secara luring terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan balai maupun tindak lanjut atas surat peringatan yang diterbitkan oleh BPOM.





- Dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'nilik untuk memudahkan pemantauan Tindak Lanjut.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	100,00	113,64	4.055.000	Rp 5.985.000	147,60	0,77	-0,23	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien. Anggaran yang digunakan baru 1 Trip untuk perjalanan dalam kota (DK). Selain itu, pada Triwulan I terdapat penyesuaian renlak mengacu pada pengimplementasian Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terkait pemblokiran mandiri sehingga terdapat penyesuaian jumlah target yang semula 7 Industri Farmasi (IF) menjadi 3 IF, 2 Industri Obat Bahan Alam (IOT) menjadi 1 IOT, 1 usaha mikro obat tradisional (UMOT) menjadi dihapuskan, 1 Sarana Industri Suplemen Kesehatan, 6 Industri Kosmetik (IKos) menjadi 3 IKos.

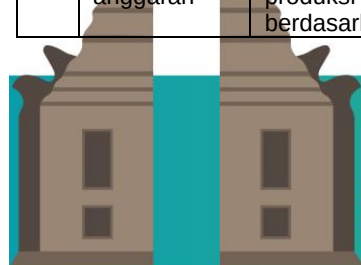
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Merupakan IKU baru di tahun 2025. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 113,64% untuk itu pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir triwulan I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.49 Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Merupakan IKU baru di tahun 2025	Memastikan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan	Akhir triwulan	- Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB pada 6-7 Februari 2025 - Menyusun Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat sesuai dengan surat target dari Pusat	- Pemeriksaan sarana produksi obat akan dilakukan pada bulan Mei, Agustus, November	Akhir Triwulan	Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB tahun 2025 dengan hasil target pemeriksaan sarana produksi obat di wilayah pemantauan Balai Besar POM di Serang sebanyak 3 sarana.
2	Keterbatasan anggaran	Penyesuaian jumlah sarana produksi berdasarkan	Akhir TW I	Penyusunan renlak blokir mandiri sesuai arahan Deputi Bidang Pengawasan	-	Akhir Triwulan	Renlak penyesuaian telah tersedia

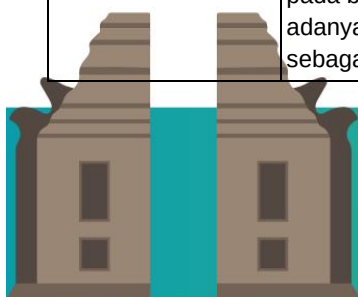




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		ketersediaan sisa anggaran blokir mandiri		Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.			

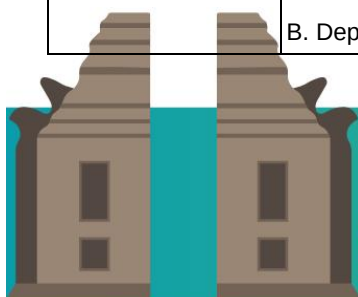
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	Dep 1 = 0 Dep 2 = 1 Dep 3 = 2	Dep 1 = 0 Dep 2 = 0 Dep 3 = 8	Dep 1 = 0 Dep 2 = 0 Dep 3 = 4
Realisasi RO	Dep 1 = 0 Dep 2 = 1 Dep 3 = 2	Dep 1 = 0 Dep 2 = 0 Dep 3 = 8	Dep 1 = 0 Dep 2 = 0 Dep 3 = 4
Target IKU	88,00	88,00	88,00
Realisasi IKU	100,00	100,00	100,00
Capaian Bulanan	113,64	113,64	113,64
Capaian Tahunan	113,64	113,64	113,64
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	A. Dep 1 Seluruh target pemeriksaan Sarana Produksi Obat di 2024 sudah terperiksa. Tidak terdapat carryover B. Dep 2 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sarana sesuai surat permintaan pemeriksaan sarana oleh Pusat atas tindak lanjut terhadap produk TMS.	A. Dep 1 Sudah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB pada 6-7 Februari 2025 B. Dep 2 Tidak terdapat perencanaan pemeriksaan sarana produksi di bulan berjalan.	A. Dep 1 Sudah dibuat Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025. Total target tahun 2025 sebanyak 3 sarana (pemeriksaan Mandiri Balai) yang akan diperiksa pada bulan Mei, Agustus, dan November B. Dep 2 Tidak terdapat perencanaan pemeriksaan sarana produksi di bulan berjalan.
Kendala bulan tersebut	A. Dep 1 Belum dilakukan Rapat Manajemen Inspeksi CPOB Tahun 2025 untuk menentukan target pemeriksaan di tahun ini sehingga belum dibuat renlak pemeriksaan ke sarana produksi obat B. Dep 2 TL belum dapat dibuat pada bulan berjalan karena adanya masa 10 HK sebagai masa	A. Dep 1 -Belum dikirimkan Surat Target Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dari Direktorat Pengawasan Produksi ONPP untuk menentukan Tim Audit (Apakah pemeriksaannya akan dilakukan Mandiri oleh Balai atau terdapat Pemeriksaan Bersama dengan Pusat) dan metode pemeriksaannya (Luring/Daring) sebagai dasar pembuatan Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025. B. Dep 2	A. Dep 1 Tidak ada kendala. Pemeriksaan sarana produksi obat akan dilakukan sesuai renlak (Mei, Agustus, dan November) B. Dep 2 Berdasarkan implementasi Inpres 1 tahun 2025, maka dilakukan blokir mandiri, sehingga dari target awal sejumlah 10 direduksi menjadi 4, dimana sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana, sehingga sisa target menjadi 3 yang akan diperiksa di TW III dan TW IV





	Jan	Feb	Mar
	penyampaian perbaikan dari pelaku usaha.	Sebagaimana besar target telah diperiksa di akhir 2024, sehingga perencanaan pemeriksaan baru akan dimulai pada TW II	
RTL/Rekomendasi	A. Dep 1 Rapat Manajemen Inspeksi CPOB dengan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP untuk menentukan target pemeriksaan sarana di 2025. B. Dep 2 Agar dipantau apakah dalam masa 10 HK sarana mengirimkan bukti perbaikan	A. Dep 1 -Memastikan pada bulan Maret sudah dibuat Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025 berdasarkan surat target yang dikirimkan oleh Pusat. B. Dep 2 Terhadap pemeriksaan di sarana produksi bulan sebelumnya telah diterbitkan TL	A. Dep 1 Memastikan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai ketentuan B. Dep 2 -
Timeline Penyelesaian	Akhir Triwulan I 2025	Akhir Triwulan I 2025	Akhir Triwulan
Kondisi Awal	A. Dep 1 Merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan penilaian mencakup kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan, jumlah pelaksanaan inspeksi, kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tidak lanjut. B. Dep 2	A. Dep 1 Merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan penilaian mencakup kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan, jumlah pelaksanaan inspeksi, kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tidak lanjut. B. Dep 2	A. Dep 1 Belum dibuat Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025 berdasarkan surat target dari Pusat B. Dep 2
Rencana Aksi	A. Dep 1 Memastikan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan B. Dep 2 TL akan dibuat setelah 10 HK selesai	A. Dep 1 Dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB dengan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP B. Dep 2 Setelah TL diterbitkan, agar dipantau progress CAPA	A. Dep 1 - Dibuat Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025 - Memastikan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat sesuai dengan ketentuan B. Dep 2 -
Kondisi Akhir	A. Dep 1 Tidak terdapat target dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat pada bulan Januari 2025 karena belum dilakukan Rapat Manajemen Inspeksi dengan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP B. Dep 2	A. Dep 1 Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen Inspeksi CPOB pada 6-7 Februari 2025 dengan hasil target pemeriksaan sarana produksi BBPOM Serang sebanyak 3 sarana. B. Dep 2	A. Dep 1 Telah dibuat Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025. Total target tahun 2025 sebanyak 3 sarana (pemeriksaan Mandiri Balai) yang akan diperiksa pada bulan Mei, Agustus, dan November B. Dep 2





IKU 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa **x 100%**

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

- ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK)
 - pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading sebagai C (TMK)
- kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Koordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.





Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	-	-

Hingga akhir triwulan 1 belum terdapat RHPK dari pusat untuk perhitungan capaian indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, sehingga realisasi dan capaian indikator ini belum dapat dihitung. Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 IKU ini dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

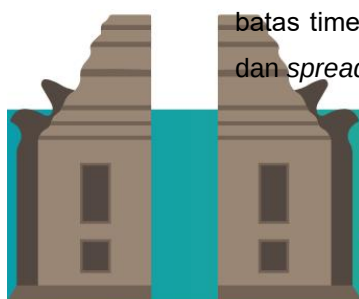
Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	85,00	-	-	-
TW II	85,00		0,00	
TW III	85,00		0,00	
TW IV	85,00		0,00	
2025	85,00			

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan karena belum terdapat RHPK dari pusat untuk perhitungan capaian indikator.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan pencapaian disebabkan oleh :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik agar ditindaklanjuti sebelum melewati batas timeline, melalui spreadsheet M'nilik (Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), dan *spreadsheet* Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA





2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan melalui kegiatan Sosialisasi CPPOB untuk Sarana Produksi Pangan Olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada tanggal 11 Februari 2025

Berdasarkan penyebab keberhasilan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian antara lain dengan cara:

- Intensifikasi monitoring dan evaluasi melalui link M'Nilik setiap bulannya dan *spreadsheet* Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA, serta mengirim surat kembali surat tindaklanjut yang belum ditindaklanjuti baik oleh internal maupun eksternal.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja telah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan desk CAPA dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan surat tindakan perbaikan baik sarana yang Memeuihi Ketentuan maupun sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan secara luring maupun secara daring, sehingga dapat menambah nilai sarana produksi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan *close*
3. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi a.d TWI	Keterangan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.001.A (50%)	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten			

Pada Tahun 2025 triwulan I terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian yang dilaksanakan, antara lain:

1. Sosialisasi CPPOB untuk Sarana Produksi Pangan Olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada tanggal 11 Februari 2025
2. BBPOM di Serang dampingi desk CAPA secara online terhadap sarana yang belum mengirimkan CAPA dalam rangka upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan kepatuhan industri pangan terhadap standar keamanan pangan.
3. Sosialisasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) pada 22 Januari 2025

Untuk memastikan bahwa target di tahun 2025 dapat berjalan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui Mnilik dan google form Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA untuk memaksimalkan dan memastikan semua pemeriksaan telah diselesaikan tindak lanjutnya.





Untuk memudahkan monitoring, setiap petugas wajib melengkapi data terkait pemeriksaan berserta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dibuat ke dalam link bit.ly

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	0	0,00	4.055.000	Rp 5.985.000	147,60	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien. Capaian terhadap efisiensi anggaran terdapat deviasi anggaran yang besar hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada triwulan I 2025 sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025. Akan dilakukan revisi anggaran, dan optimalisasi serapan anggaran inline dengan capaian kinerja sehubungan dengan relaksasi anggaran di triwulan II sampai dengan akhir tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2024, maka dipandang perlu untuk meningkatkan dan kompetensi petugas pengawas serta menyamakan persepsi petugas.

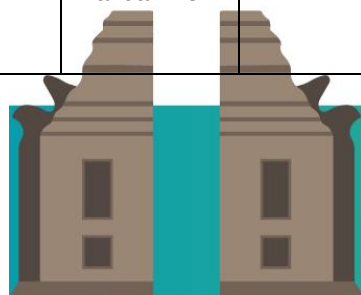
Untuk IKU 8 ada perubahan target sudah dilakukan pengajuan perubahan target ke Biro Perencanaan Badan POM

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Untuk meningkatkan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan, BBPOM di Serang akan melanjutkan program yang sudah berjalan pada Tahun 2025 dan melakukan perbaikan program di Tahun 2025, dengan cara sebagai berikut

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan karena terdapat perubahan manual IKU.	Melakukan monev melalui M'nilik dan google form Monitoring TL CAPA	Akhir TW I 2025	Telah dilakukan monev melalui link M'Nilik dan google form Monitoring TL CAPA disetiap bulan	Pemantauan dilakukan melalui link M'Nilik dan google form Monitoring TL CAPA	Akhir TW II 2025	Dari 12 sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa, telah diberikan tindak lanjut sesuai ketentuan dan dialporkan tepat waktu. Monev akan dipantau melalui M'Nilik dan google form Monitoring TL CAPA dimana setiap petugas harus mengupdate hasil pemeriksaan besera





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
							tindak lanjutnya.
2	Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan karena terdapat perubahan manual IKU.	Melakukan desk CAPA terhadap sarana	Akhir TW I 2025	Desk CAPA dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan Tindakan perbaikan (CAPA)	Pemantauan dilakukan melalui link M'Nilik dan google form Monitoring TL CAPA serta mengirimkan kembali surat bagi sarana yang belum mengirimkan CAPA	Akhir TW II 2025	Dilakukan sepanjang tahun, selain untuk meningkatkan pemahaman, juga untuk meningkatkan <i>engagement</i> pelaku usaha, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi dapat dilaksanakan secara optimal

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU	85,00	85,00	85,00
Realisasi IKU			
Capaian Bulanan	0,00	0,00	0,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	0,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan pada bulan Januari 2025 sebanyak 10 sarana dengan rincian : MK : 5 ; TMK : 5 yang sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan timeline sebanyak 2. Pemeriksaan sudah diinput ke dalam SIPT	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan pada bulan Februari 2025 sebanyak 4 sarana dengan rincian : MK : 2 ; TMK : 2, sarana yang sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan timeline pada bulan Februari sebanyak 8. Pemeriksaan sudah diinput ke dalam SIPT	Pada bulan Maret 2025 tidak ada capaian pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, sarana yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan timeline sebanyak 4
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala	Terdapat efisiensi anggaran, sehingga pemeriksaan sarana produksi pangan olahan menyesuaikan anggaran yang tidak diblokir	Terdapat efisiensi anggaran, sehingga pemeriksaan sarana produksi pangan olahan menyesuaikan anggaran yang tidak diblokir
RTL/Rekomendasi	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT	Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Terhadap sarana yang belum mengirimkan CAPA dilakukan desk CAPA tanggal 27 Februari 2025 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
Timeline Penyelesaian	Akhir TW I 2025	Akhir TW I 2025	Akhir TW I 2025
Kondisi Awal	Telah dilakukan pemeriksaan	Telah dilakukan pemeriksaan sarana	Pada bulan Maret 2025 tidak ada





	Jan	Feb	Mar
	sarana produksi pangan olahan pada bulan januari 2025 sebanyak 10 sarana dengan rincian : MK : 5 ; TMK : 5	produksi pangan olahan pada bulan Februari 2025 sebanyak 4 sarana dengan rincian : MK : 2 ; TMK : 2	capaian pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, sarana yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan timeline sebanyak 4
Rencana Aksi	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT	Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan -Terhadap sarana yang belum mengirimkan CAPA dilakukan desk CAPA tanggal 27 Februari 2025 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
Kondisi Akhir	Persentase pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai ketentuan telah tercapai 100%	Persentase pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai ketentuan telah tercapai 100%	Persentase pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai ketentuan telah tercapai 100%

IKU 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh melalui rumus = $(A+B+C)/3$

Komponen A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

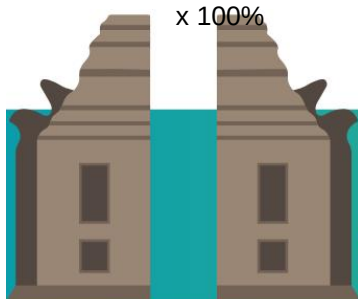
Perhitungan persentase sarana distribusi obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

Namun, informasi DO Final masih menunggu dari BPOM Pusat.

Komponen B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan sesuai dengan rumus = Rata-rata (a+b+c+d)

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjuti hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjuti}) \times 100\%$





Komponen C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan sesuai dengan rumus = Rata-rata (a+b+c+d)

- Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	-	-	-

Tidak terdapat data realisasi dan capaian TW I, karena belum terdapat RHPK dari pusat untuk perhitungan capaian indikator. Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 IKU ini dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

- Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	93,50	-	-	-
TW II	93,50		0,00	
TW III	93,50		0,00	
TW IV	93,50		0,00	
2025	93,50			

Tidak terdapat data realisasi dan capaian TW I, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan tiap triwulan karena belum terdapat RHPK dari pusat untuk perhitungan capaian indikator.





c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Komponen A: Sarana Distribusi Obat

Belum terdapat informasi cara perhitungan capaian IKU, namun pelaksanaan pemeriksaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Perencanaan dan pembobotan sarana sesuai petunjuk teknis telah disusun sesuai ketentuan pada awal tahun, namun dengan adanya efisiensi mengurangi target awal pemeriksaan menjadi 41%. Penyusunan rencana pelaksanaan dalam rangka efisiensi juga telah dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan. Perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi dapat diselesaikan sesuai ketentuan, baik dalam segi pemenuhan target dan kesesuaian tindak lanjut.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

- Menyusun perencanaan pemeriksaan dengan baik, sehingga pelaporan SIPT dapat diselesaikan sebelum timeline yaitu setiap tanggal 5 bulan berikutnya
- Menjalankan fungsi monitoring dan *reminder* dengan baik sesuai dengan penanggungjawab kegiatan, sehingga tidak ada hasil pemeriksaan yang terlewat dilaporkan
- Memastikan manual IKU dan formula perhitungan IKU final dari Pusat, agar tidak terdapat kesalahan perhitungan capaian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.004.(50%)	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang	304	40

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditagging pada QIC.004 yaitu pemeriksaan sarana distribusi. Selama TW I Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut

Pemeriksaan per komoditi	Januari		Februari		Maret	
	Target	Realisasi	Target	Realiasi	Target	Realisasi
Obat	5 trip	5 trip	1 trip	1 trip	6 trip	6 trip
Obat Bahan Alam	1 Trip	1 Trip	-	-	-	-
Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	1 Trip	1 Trip
Kosmetika	-	-	3 Trip	3 Trip	1 Trip	1 Trip

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	0	0,00	4.960.000	Rp 20.235.808	407,98	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran Tidak Efisien karena sudah ada realisasi anggaran sedangkan capaian indikator belum ada. Dalam pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat pada TW I terdapat kegiatan pengawasan yang tidak direncanakan sebelumnya yang menggunakan anggaran QIC.004, yaitu perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan sanksi PSK yaitu sebanyak 1 trip, untuk kegiatan penyaksian pemusnahan dan pembukaan segel pengamanan karena keterbatasan anggaran dilakukan secara daring (tanpa menggunakan anggaran)

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 belum terdapat data capaian IKU karena Manual IKU yang masih diperbaiki oleh Pusat. Maka dari itu pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir TW I tahun 2025 belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

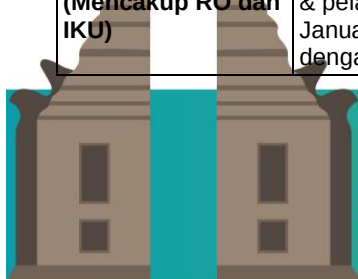
Tidak terdapat hasil evaluasi dari laporan kinerja sebelumnya karena merupakan IKU Baru.

Tabel 3.49 Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
NIHIL							

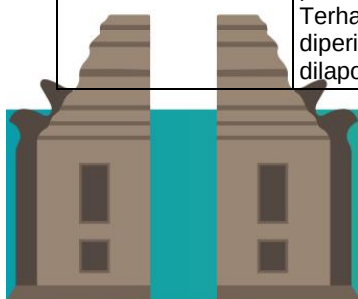
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	Dep 1 = 8 Dep 2 = 3 Dep 3 = 4	Dep 1 = 2 Dep 2 = 9 Dep 3 = 7	Dep 1 = 12 Dep 2 = 6 Dep 3 = 32
Realisasi RO	Dep 1 = 8 Dep 2 = 3 Dep 3 = 4	Dep 1 = 2 Dep 2 = 9 Dep 3 = 7	Dep 1 = 12 Dep 2 = 6 Dep 3 = 32
Target IKU	93,50	93,50	93,50
Realisasi IKU			
Capaian Bulanan	0,00	0,00	0,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	0,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Dep 1. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi & pelayanan pada bulan Januari sebanyak 8 sarana dengan rincian	Dep 1. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi & pelayanan pada bulan Februari sebanyak 2 sarana dengan rincian 2 apotek (2 TMK)	Dep 1. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi & pelayanan pada bulan Maret sebanyak 12 sarana dengan rincian 7 TMK; 4 MK; 1 Tutup





	Jan	Feb	Mar
	1. IFK : 2 sarana (2 MK) 2. RS : 2 sarana (1 MK, 1 TMK) 3. PKM : 4 sarana (2 MK, 2 TMK) Pemeriksaan telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline (sebelum tanggal 5 bulan berikutnya) Dep2. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan Januari sebanyak 3 sarana dengan rincian : sardis OBA 3 sarana (2 MK, 1 TMK). Pemeriksaan telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline	Pemeriksaan telah diinput ke SIPT sesuai timeline Dep2. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan Februari sebanyak 9 sarana dengan rincian : sardis Kos dalam rangka inwas Kos : 9 sarana, terdiri dari 5 sarana Klinik kecantikan (5 MK, 0 TMK) dan 4 sarana pengecer kosmetik (1MK, 3 TMK). Pemeriksaan telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline	Feedback pusat terhadap kesesuaian tindak lanjut telah difollow up, namun info pusat feedback disampaikan berkala setiap TW Dep2. Telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 6 sarana dengan rincian sebagai berikut : - sardis Kos : 3 sarana pengecer kosmetik (3 MK, 0 TMK) - sardis SK : 3 sarana (3 MK, 0 TMK) Pemeriksaan telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline
Kendala bulan tersebut	Dep 1. SIPT telah dikirimkan ke pusat, namun s.d tgl 5 Feb pusat belum memberikan feedback kesesuaian TL Dep2. Tidak ada kendala	Dep 1. Adanya efisiensi sehingga pelaksanaan pemeriksaan terhambat dan baru dilaksanakan minggu ke-3 Februari. Pusat belum memberikan feedback kesesuaian TL Dep2. Tidak ada kendala	Dep 1. Adanya hari raya dan cuti bersama Idul Fitri, menyebabkan hari kerja berkurang sehingga penyelesaian kegiatan harus dilakukan sebelum libur. Dep.2 tidak ada kendala
RTL/Rekomendasi	Dep 1. Melakukan konfirmasi ke pusat terkait feedback kesesuaian TL yang belum diterima; Menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan s.d akhir tahun 2025 Dep 2 Memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi dilakukan sesuai ketentuan	Dep 1. Melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan renlak pasca efisiensi Renlak telah disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi & Pelayanan ONPP Dep2. pemeriksaan sesuai dengan renlak serta target inwas kosmetik	Dep 1. Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun Dep2. pelaksanaan pemeriksaan on the track
Timeline Penyelesaian	Feb 2025	Akhir Feb 2025	Mar 2025
Kondisi Awal	Dep1. Pemeriksaan dilakukan terhadap jenis sarana yang tidak perlu dilakukan pembobotan; belum tersedia dokumen rencana pelaksanaan dan pembobotan sarana Dep 2. Merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan penilaian mencakup kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan, jumlah pelaksanaan inspeksi, kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tidak lanjut. Renlak telah disusun sesuai pembobotan	Dep1. Belum terdapat rencana pelaksanaan setelah adanya efisiensi anggaran; pemeriksaan terhambat karena adanya blokir anggaran Dep. 2 Terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan target inwas sardist kosmetik dikarenakan penyesuaian anggaran blokir mandiri. Semula 4 Trip (12sarana) menjadi 3Trip (9 sarana) sedangkan target pusat adalah 10 sarana	Dep1. Terdapat 12 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT Dep1. Terdapat 12 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT Dep 2. Terdapat pembatasan jumlah trip untuk sarana distribusi OBA/ SK/ Kosmetik
Rencana Aksi	Dep 1. Menyusun rencana pelaksanaan dan pembobotan sarana apotek, klinik, puskesmas, dan TO. Terhadap sarana yang telah diperiksa untuk langsung dilaporkan sesuai dengan	Dep1. Menyusun rencana pelaksanaan & pemotongan target secara proporsional. Terhadap sarana yang telah diperiksa pada akhir Februari untuk dilaporkan sesuai ketentuan	Dep1. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan, baik terkait pelaporan maupun penetapan tindak lanjut Dep 2. Pemastian peredaran





	Jan	Feb	Mar
	ketentuan Dep 2. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana sesuai renlak pemeriksaan	Dep 2 Melakukan pelaporan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik terkait ketersediaan anggaran terkait pelaksanaan inwas kosmetik 2024	OBA-SK-Kosmetik TMS hanya dapat dilakukan 1 TR per Triwulan. Selain itu, kegiatan sampling dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin sarana distribusi
Kondisi Akhir	Dep 1. 8 (delapan) sarana telah selesai diperiksa dan dilaporkan via SIPT sesuai timeline. telah disusun dokumen rencana pelaksanaan & pembobotan sarana Dep2. 3 (tiga) sarana telah diperiksa dan dilaporkan via SIPT sesuai timeline	Dep 1. 2(dua) sarana telah selesai diperiksa dan dilaporkan via SIPT sesuai timeline; telah disusun rencana pemeriksaan pasca efisiensi Dep2. 9 (sembilan) sarana telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline	Dep 1. Terhadap 12 sarana telah diinput ke SIPT, namun terdapat 1 sarana yang baru dikirim ke Pusat pada tanggal 8 April 2025 (melebihi timeline tanggal 5 April). Terhadap seluruh sarana yang diperiksa triwulan I yang dikirim sesuai timeline (21 sarana) seluruhnya telah dievaluasi pusat dengan hasil SESUAI. Dep2. 6 (enam) sarana telah diinput ke dalam SIPT sesuai timeline

IKU 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - Ketepatan waktu pelaporan
 - Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

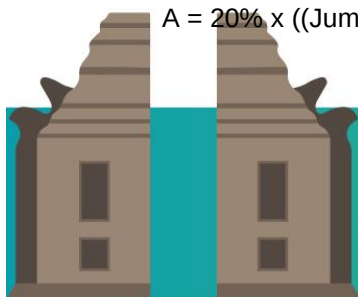
= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

*Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)





$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi sejumlah 43 sarana distribusi pangan olahan yang terdiri dari 34 sarana distribusi retail tradisional, dan 9 sarana distribusi retail modern.

Capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **125,00%** dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	80,00		0,00	
TW III	80,00		0,00	
TW IV	80,00		0,00	
2025	80,00		125,00	

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 namun dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Untuk itu pada triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025, persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 diperoleh hasil sebesar 100%, karena pemeriksaan sarana distribusi telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, dilaporkan tepat waktu melalui SIPT, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.





d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :

- 1) Melakukan penyesuaian target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025.
- 2) Melakukan monitoring hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan tindak lanjutnya melalui M'Nilik.
- 3) Melaporkan hasil pemeriksaan sarana distribusi di SIPT secara tepat waktu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.004.(44%)	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 antara lain :

- 1) Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan pelaporannya melalui SIPT
- 2) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan melalui aplikasi M'Nilik

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	4.364.800	Rp 17.807.511	407,98	0,31	-0,69	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Tidak Efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 125,00% untuk itu pada triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian target tahun 2025 sehingga capaian target tercapai dan dapat disimpulkan sampai dengan akhir tahun 2025.



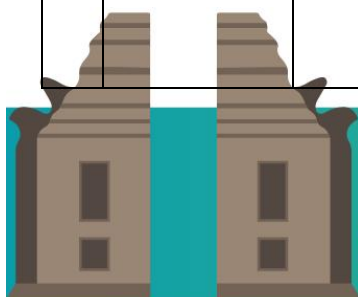


h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi agar dapat menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) melalui pemeriksaan rutin, sehingga tindak lanjut yang dilakukan terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan dapat langsung dilakukan dengan pembinaan di sarana.
- Kerjasama dengan lintas sektor terkait yaitu dinas perindustrian dan perdagangan kota/kabupaten pada pelaksanaan intensifikasi pengawasan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Pemberian informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang CPerPOB melalui kegiatan Baperan

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1.	Sarana distribusi yang belum dilakukan pembinaan, perlu dilakukan intervensi agar memiliki kepatuhan, sehingga tindak lanjut yang dilakukan terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan dapat langsung dilakukan dengan pembinaan di tempat.	- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi agar dapat menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) melalui pemeriksaan rutin, - Kerjasama dengan lintas sektor terkait yaitu dinas perindustrian dan perdagangan kota/kabupaten pada pelaksanaan intensifikasi pengawasan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.	Akhir TW I 2025	Terhadap 43 sarana distribusi yang diperiksa dilakukan pembinaan di tempat	Pemberian informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang CPerPOB melalui kegiatan Baperan	Akhir TW II 2025	43 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu
			Akhir TW I 2025	- Dilakukan pemeriksaan bersama dengan lintas sektor			Pemeriksaan sarana distribusi dengan lintas sektor sejumlah 36 sarana distribusi pangan olahan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu

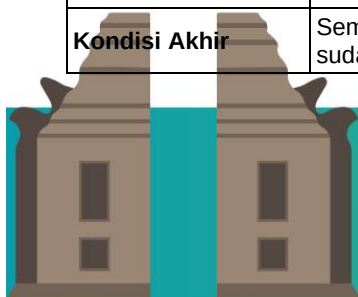




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
				pada kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dalam rangka inwas pada tanggal 25 Februari -26 Maret 2025			

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU	80,00	80,00	80,00
Realisasi IKU	100,00	100,00	100,00
Capaian Bulanan	125,00	125,00	125,00
Capaian Tahunan	125,00	125,00	125,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	TL bulan Desember 2024 telah diselesaikan	TL bulan Januari telah diselesaikan	TL bulan Februari telah diselesaikan di bulan Maret
Kendala bulan tersebut	Pemeriksaan bulan Januari masih masuk rentang timeline	Pemeriksaan bulan Februari masih masuk rentang timeline	Pemeriksaan bulan Maret masih masuk rentang timeline
RTL/Rekomendasi	Monitoring bulan selanjutnya untuk TL dengan timeline bulan berikutnya	Monitoring bulan selanjutnya untuk TL dengan timeline bulan berikutnya	Monitoring bulan selanjutnya untuk TL dengan timeline bulan berikutnya
Timeline Penyelesaian	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Kondisi Awal	Terdapat 4 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT .	Terdapat 7 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka inwas 5 sarana, pemeriksaan dep 1 yang menjadi capaian dep 3 sebanyak 1 sarana, dan 1 sarana lagi dalam rangka pemeriksaan TL sampel KLB	Terdapat 32 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT .
Rencana Aksi	TL bulan Desember 2023 telah diselesaikan	Perentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai 100%	Perentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai 100%
Kondisi Akhir	Semua sarana sudah dilakukan	Semua sarana sudah dilakukan pelaporan melalui SIPT	Semua sarana sudah dilakukan pelaporan melalui SIPT





	Jan	Feb	Mar
	pelaporan melalui SIPT		

IKU 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
 - a. **Pemenuhan jumlah target pengawasan** = Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%
 - b. **Ketepatan waktu pelaporan** = Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x 100%
- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$
 - a. **Pemenuhan target pengawasan** = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 - b. **Ketepatan waktu pelaporan** = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 - c. **Akurasi pengambilan keputusan** = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$
 - a. **Pemenuhan target pengawasan** = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 - b. **Ketepatan waktu pelaporan** = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 - c. **Akurasi pengambilan keputusan** = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
 - a. **Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target** = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)





- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan** = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling** = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan** = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.





a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,93	98,45	110,71	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025.

Pada triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah melakukan evaluasi terhadap 65 iklan obat, 143 iklan kosmetik, 44 iklan obat bahan alam, 9 iklan suplemen kesehatan, dan 116 iklan pangan olahan.

Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **110,71 %** dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	88,93	98,45	110,71	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	88,93		0,00	
TW III	88,93		0,00	
TW IV	88,93		0,00	
2025	88,93	98,45	110,71	Tercapai

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 namun dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

1) Iklan Obat

Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 100% karena seluruh target pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak (65 iklan) dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 15 pada bulan selanjutnya.

2) Iklan Obat Bahan Alam

Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 100% karena seluruh target pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak (36 iklan) dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu akhir bulan berjalan.

3) Iklan Suplemen Kesehatan





Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 100% karena seluruh target pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak (9 iklan) dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu sebelum akhir bulan berjalan.

4) Iklan Obat Kuasi

Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan Obat Kuasi yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 100% karena seluruh target pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak (8 iklan) dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu sebelum akhir bulan berjalan.

5) Iklan Kosmetik

Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 100% karena seluruh target pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak (143 iklan) dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.

6) Iklan Pangan Olahan

Pada triwulan I tahun 2025, persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 92,24%. Pengawasan iklan di triwulan I telah dievaluasi sesuai renlak sejumlah 116 iklan dan pelaporan per bulan ke Pusat melalui SIPT telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 15 pada bulan selanjutnya. Namun untuk media iklan masih belum memenuhi untuk media cetak, media luar ruang, dan media penyiaran yang akan dipenuhi di triwulan berikutnya secara kumulatif. Hal ini disebabkan surat edaran terkait mekanisme pengawasan iklan pangan olahan tahun 2025 yang memproporsikan media iklan dan kategori pangan untuk iklan pangan olahan yang diawasi, baru terbit pada tanggal 18 Februari 2025, sehingga pengawasan iklan pangan olahan pada bulan Januari dan Februari belum dapat memenuhi proporsi media iklan dan kategori pangan yang telah ditetapkan.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :

1) Iklan Obat

- Memastikan target evaluasi iklan obat per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu. Pada akhir Maret 2025 terdapat informasi perubahan timeline pelaporan dari yang sebelumnya tanggal 15 bulan selanjutnya menjadi tanggal 9 pada bulan selanjutnya.
- Pada bulan Februari 2025, seluruh personil Tim Deputi I yang melakukan evaluasi iklan obat telah mendapatkan pelatihan cara evaluasi iklan obat.
- Perlu monitoring dari Ketua Tim agar terhadap iklan obat yang ditolak/dikembalikan ke akun petugas segera diperbaiki sehingga tidak terlewat dikirimkan ke Pusat.

2) Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi





- Memastikan target evaluasi iklan Obat Bahan Alam per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu.
- Memastikan bahwa personil telah mengetahui ketentuan pengawasan iklan. Pada bulan februari 2025 seluruh personil Tim Deputi 2 sudah mendapatkan pelatihan evaluasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

3) Iklan Kosmetik

- Memastikan target evaluasi iklan kosmetik per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu. Terdapat perubahan timeline pelaporan dari yang sebelumnya tanggal 10 bulan berikutnya menjadi tanggal 5 pada bulan berikutnya, berlaku mulai bulan maret 2025.
- Memastikan bahwa evaluasi iklan yang dilakukan sesuai dengan target media pengawasan per bulan.

4) Iklan Pangan Olahan

- Memperbaiki rencana pelaksanaan pengawasan iklan pangan olahan dengan membreakdown target berdasarkan media iklan dan kategori pangan sesuai surat edaran Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2025.
- Memastikan target evaluasi iklan pangan olahan per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu.
- Melaksanakan advokasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten untuk dapat mendukung pengawasan iklan Pangan Olahan MD maupun PIRT yang disiarkan di TV/radio local di Provinsi Banten

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	QIC.004.(6%)	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	C - Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan - Pembelian Sampel	17 Trip	Pembelian sampel rokok 17,56%	Hingga akhir TW I, pengawasan iklan dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan rutin sehingga tidak terdapat serapan perjalanan. Anggaran hanya digunakan untuk melakukan pengawasan penandaan rokok

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan antara lain :

1) Iklan Obat

Pada bulan Januari terdapat 2 trip perjalanan dinas ke wilayah Pandeglang untuk mengumpulkan bahan/materi iklan obat yang harus dievaluasi selama triwulan I. Selain itu, pada saat melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian juga dilakukan pengumpulan materi iklan obat sehingga jumlah target pengawasan sesuai renlak dapat terpenuhi.

2) Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan kosmetik

Pengumpulan materi iklan untuk pengawasan Iklan OBA, SK dan Kuasi dilakukan pada saat sampling dan pemeriksaan sarana distribusi. Untuk pengawasan iklan media luar





ruang terkadang dibutuhkan alokasi perjalanan pengawasan iklan secara khusus agar pengawasan lebih efektif dan target dapat dipenuhi.

3) Iklan Pangan Olahan

- Pembagian renlak pengawasan iklan pangan olahan berdasarkan kategori pangan, dan media iklan
- Pengawasan iklan bersamaan dengan pengawasan sarana distribusi dan sampling pangan olahan yang dilakukan setiap bulannya selain pengawasan iklan secara khusus, sehingga jumlah target pengawasan sesuai renlak dapat terpenuhi.
- Upaya memperkuat MoU dengan KPID Provinsi Banten, sehingga dapat mendukung pengawasan iklan pangan olahan di media penyiaran TV/radio lokal yang akan dilaksanakan di triwulan II (bulan April).

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,93	98,45	110,71	595.200	Rp 2.428.297	407,98	0,27	-0,73	75 %	Tidak Efisien

Capaian terhadap efisiensi anggaran terdapat deviasi anggaran yang besar hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada Bulan Februari 2025, dimana dampak dari efisiensi ini termasuk dalam mengoptimalkan perjalanan dinas dalam rangka iklan ikut digunakan pula dalam mendukung pemeriksaan sarana Distribusi Obat dan Makanan sehingga realisasinya besar terutama di Bulan Februari 2025.

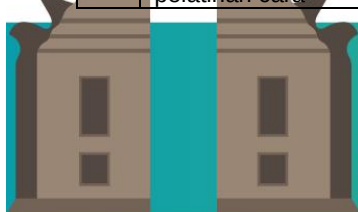
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Berdasarkan laporan kinerja triwulan I 2025 diperoleh informasi realisasi sebesar 98,45 % (capaian indikator sebesar 110,71%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian kinerja tahun 2025 dan akan terus dilakukan pengawasan agar target tahun 2025 dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Belum semua personil Tim Deputi I yang melakukan evaluasi iklan obat mendapatkan pelatihan cara	Memberikan pelatihan evaluasi iklan obat terhadap seluruh personil yang	Akhir TW I 2025	Pelatihan Evaluasi Iklan Obat dari Direktorat KMEI pada	-	-	Seluruh personil Tim Deputi I yang melakukan evaluasi iklan obat telah





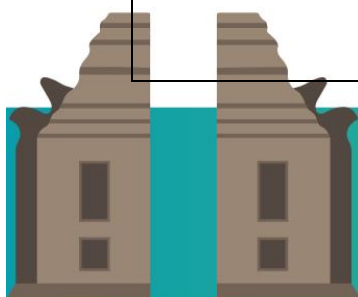
No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	mengevaluasi iklan obat	melakukan evaluasi iklan obat		27 Februari 2025			mendapatkan pelatihan cara evaluasi iklan obat.
2	Belum seluruh personel Deputy III yang mengevaluasi iklan Pangan Olahan mendapatkan pelatihan pengawasan iklan Pangan Olahan karena terdapat personel baru	Memberikan pelatihan : evaluasi iklan pangan olahan terhadap seluruh personil yang melakukan evaluasi iklan pangan olahan	Akhir TW I 2025	Pelatihan Pengawasan iklan Pangan Olahan untuk personil baru melalui ideas pada tanggal 09 Januari 2025	-	-	Seluruh personel Deputy III yang melakukan evaluasi iklan Pangan Olahan telah mendapatkan pelatihan pengawasan Iklan Pangan Olahan
3	Pada tahun 2024, evaluasi iklan obat hanya dihitung berdasarkan jumlah target pengawasan dari Pusat. Merupakan IKU baru di 2025 dengan mempertimbangkan perhitungan ketepatan waktu pelaporan.	Monitoring evaluasi iklan obat per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu.	Akhir triwulan	Sudah dilakukan monitoring evaluasi iklan obat pada Januari-Maret 2025	Monitoring evaluasi iklan obat periode triwulan II 2025 di evaluasi tepat waktu (untuk TW II – IV terdapat perubahan timeline pelaporan menjadi tanggal 9 bulan selanjutnya)	Akhir TW II 2025	Target 65 iklan obat pada triwulan I 2025 sudah dievaluasi tepat waktu. Laporan melalui SIPT dikirimkan ke Pusat sebelum tanggal 15 bulan selanjutnya.
4	Terdapat kendala dalam memperoleh iklan di media penyiaran TV/radio lokal	Memperkuat kerjasama dengan KPID Provinsi Banten untuk mendapatkan dukungan bahan dan tindak lanjut pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Makanan	Akhir TW II 2025	Sudah dilakukan MoU dengan KPID Provinsi Banten di tahun 2024	Advokasi pembahasan teknis MoU dengan KPID Provinsi Banten terkait pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Makanan	Akhir TW II 2025	Dalam pengawasan iklan dapat bekerjasama dengan KPID Provinsi Banten dalam hal perolehan bahan iklan di media lokal, dan tindak lanjut terhadap pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Serang





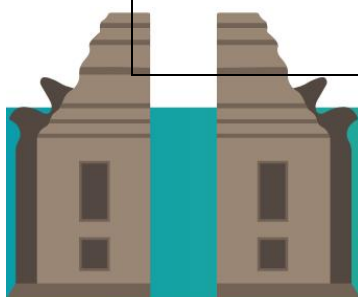
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU	88,93	88,93	88,93
Realisasi IKU	95,78	97,33	98,45
Capaian Bulanan	107,71	109,44	110,70
Capaian Tahunan	107,71	109,44	110,70
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	IKU Baru di Tahun 2025 A. Iklan Obat Seluruh target pengawasan iklan Obat di 2024 sebanyak 250 iklan sudah dievaluasi semua sesuai ketentuan. Tidak terdapat carryover. Pelaporan evaluasi iklan via SIPT harus dikirimkan ke Pusat secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya B. Iklan Kosmetik C. Iklan Obat Bahan Alam D. Iklan Suplemen Kesehatan E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat Target evaluasi iklan obat bulan Februari sebanyak 20 iklan, baru 19 iklan yang sudah dikirimkan ke Pusat tanggal 26 Februari 2025 (sesuai timeline). B. Iklan Kosmetik C. Iklan Obat Bahan Alam D. Iklan Suplemen Kesehatan E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat -1 Iklan obat Februari yang terlewat dikirim sudah dikirim ke Pusat tanggal 13 Maret 2025 (masih masuk timeline 15 Maret 2025). -Target Iklan Obat bulan Maret sebanyak 20 iklan, seluruhnya sudah dievaluasi dan dikirimkan ke Pusat tanggal 26 Maret 2025 (sesuai timeline) B. Iklan Kosmetik C. Iklan Obat Bahan Alam D. Iklan Suplemen Kesehatan E. Iklan Pangan
Kendala bulan tersebut	A. Iklan Obat Tidak ada kendala. B. Iklan Kosmetik terdapat kendala pada media e-commerce target e-commerce yang diberikan pusat yakni www.q0010.co.id sudah tidak dapat diskes, hal tersebut sudah dilaporkan ke pusat dan disarankan untuk menggantinya dengan female daily studio, namun masih dalam proses persuratan dr pusat untuk perubahan target e-commerce. Target Iklan Kosmetik 2025 sesuai dengan Surat No. PW.03.08.4.12.24.82 tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 336 iklan terdiri dari media online 60 % (75 % perawatan Kulit & 25 % rias wajah), Media elektronik 20 %, Media cetak 10 % dan Media luar ruang 10 %. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah renlak pengawasan iklan kos per bulan. Bulan Januari target iklan Kos sebanyak 40 iklan, capaian hasil pengawasan iklan sebanyak 46 Iklan, terdiri dari : - Media Online : 25 iklan, terdiri dari 19 iklan produk perawatan kulit (13 MK, 6 TMK) dan 6 iklan produk rias wajah (6 MK, 0 TMK) - Media Elektronik : 11 iklan (11 MK, 0 TMK) - Media Cetak : 4 iklan (4 MK, 0 TMK) - Media luar Ruang : 6 iklan (6 MK, 0 TMK) C. Iklan Obat Bahan Alam Dibuat renlak iklan OBA sesuai target	A. Iklan Obat Terdapat 1 iklan obat dari target 20 iklan bulan Februari yang masih ada di akun Kepala Balai karena sebelumnya ada data iklan yang belum diisi lengkap sehingga perlu di revisi B. Iklan Obat Bahan Alam Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu C. Iklan Suplemen Kesehatan Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu D. Iklan Kosmetik Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat Tidak ada kendala. B. Iklan Obat Bahan Alam Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu C. Iklan Suplemen Kesehatan Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu D. Iklan Kosmetik Tidak ada kendala, laporan diselesaikan tepat waktu E. Iklan Pangan





	Jan	Feb	Mar
	iklan per media pengiklan, yakni Internet 60 %, e-commerce 25%, Sosmed 20%, website 10%, lain-lain 5 %, TV Nasional 15 %, penyiaran lokal 5%, Lain-lain 20%(Cetak, leaflet, luar ruang, dll) pengawasan iklan OBA bln Januari sebanyak 12 Iklan, terdiri dari : - Sosmed : 4 iklan (4 MK, 0 TMK) - Lain - lain : 8 iklan (5 media luar ruang, 3 media cetak), hasil evaluasi 8 MK, 0 TMK Renlak Iklan Obat Kuasi mengikuti target iklan OBA, dengan hasil pengawasan iklan pada bulan Januari sebagai berikut : - website : 3 iklan (0 MK, 3 TMK) D. Iklan Suplemen Kesehatan Renlak iklan SK mengikuti target iklan OBA, dengan hasil pengawasan iklan pada bulan Januari sebagai berikut : - Website : 2 iklan (2 MK, 0 TMK) - Lain-lain : 1 iklan (1 MK, 0 TMK) E. Iklan Pangan		
RTL/Rekomendasi	A. Iklan Obat Memastikan target evaluasi iklan obat bulan Februari sebanyak 20 iklan di evaluasi tepat waktu B. Iklan Obat Bahan Alam Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu C. Iklan Suplemen Kesehatan Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu D. Iklan Kosmetik Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat -Memastikan iklan obat bulan Februari yang belum dikirimkan ke Pusat (1 iklan) sudah terkirim ke Pusat sebelum tanggal 15 Maret 2025 -Perlu monitoring dari Ketua Tim agar terhadap iklan yang ditolak/dikembalikan ke akun petugas segera diperbaiki sehingga tidak terlewat dikirimkan -Memastikan target evaluasi iklan obat bulan Maret sebanyak 20 iklan di evaluasi tepat waktu B. Iklan Obat Bahan Alam Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu C. Iklan Suplemen Kesehatan Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu D. Iklan Kosmetik Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat Terdapat perubahan timeline dari Pusat dari yang sebelumnya tanggal 15 bulan selanjutnya menjadi tanggal 9 bulan selanjutnya. Memastikan target evaluasi iklan obat bulan April sebanyak 25 iklan di evaluasi tepat waktu. B. Iklan Obat Bahan Alam Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu C. Iklan Suplemen Kesehatan Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu D. Iklan Kosmetik Memastikan bahwa pengawasan iklan mengikuti jumlah target per Media dan dikirimkan tepat waktu E. Iklan Pangan





	Jan	Feb	Mar
Timeline Penyelesaian	Akhir Bulan Februari 2025	Akhir Bulan Maret 2025	Akhir Bulan April 2025
Kondisi Awal	IKU Baru di Tahun 2025. Target Iklan Obat tahun 2025 sebanyak 250 iklan. Timeline pengiriman iklan ke Pusat yaitu tanggal 15 pada bulan selanjutnya	IKU Baru di Tahun 2025. Target Iklan Obat tahun 2025 sebanyak 250 iklan. Timeline pengiriman iklan ke Pusat yaitu tanggal 15 pada bulan selanjutnya	IKU Baru di Tahun 2025. Target Iklan Obat tahun 2025 sebanyak 250 iklan. Pada akhir Maret 2025 terdapat perubahan timeline pengiriman iklan obat ke Pusat, dari yang sebelumnya tanggal 15 pada bulan selanjutnya menjadi tanggal 9 bulan selanjutnya
Rencana Aksi	A. Iklan Obat - Monitoring evaluasi iklan obat per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu. B. Iklan Obat Bahan Alam mengirimkan laporan ssebelum lewat bulan C. Iklan Suplemen Kesehatan mengirimkan laporan ssebelum lewat bulan D. Iklan Kosmetik mengirimkan laporan ssebelum tanggal 10 bulan berikutnya E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat - Monitoring evaluasi iklan obat per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu. B. Iklan Obat Bahan Alam mengirimkan laporan ssebelum lewat bulan C. Iklan Suplemen Kesehatan mengirimkan laporan ssebelum lewat bulan D. Iklan Kosmetik mengirimkan laporan ssebelum tanggal 10 bulan berikutnya E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat - Monitoring evaluasi iklan obat per bulan sesuai renlak di evaluasi tepat waktu. B. Iklan Obat Bahan Alam mengirimkan laporan sebelum lewat bulan C. Iklan Suplemen Kesehatan mengirimkan laporan sebelum lewat bulan D. Iklan Kosmetik mengirimkan laporan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya E. Iklan Pangan
Kondisi Akhir	A. Iklan Obat Target Iklan Obat bulan Januari sebanyak 25 iklan, seluruhnya sudah dievaluasi dan dikirimkan ke Pusat tanggal 4 Februari 2025 (sesuai timeline). B. Iklan Obat Bahan Alam Iklan sudah terkirim C. Iklan Suplemen Kesehatan Iklan sudah terkirim D. Iklan Kosmetik Iklan sudah terkirim E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat Target Iklan Obat bulan Februari sebanyak 19 dari 20 iklan sudah dievaluasi dan dikirimkan ke Pusat tanggal 26 Februari 2025 (sesuai timeline). B. Iklan Obat Bahan Alam Iklan sudah terkirim C. Iklan Suplemen Kesehatan Iklan sudah terkirim D. Iklan Kosmetik Iklan sudah terkirim E. Iklan Pangan	A. Iklan Obat Target Iklan Obat bulan Maret sebanyak 20 iklan sudah dievaluasi dan dikirimkan ke Pusat tanggal 24 Maret 2025 (sesuai timeline) B. Iklan Obat Bahan Alam Iklan sudah terkirim C. Iklan Suplemen Kesehatan Iklan sudah terkirim D. Iklan Kosmetik Iklan sudah terkirim E. Iklan Pangan





Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKU 12. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.





- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	7,14	12,53	Kurang

Pada triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sejumlah 1 sarana produksi pangan fortifikasi dari target 8 sarana produksi pangan fortifikasi dengan target 57% ketercakupan terhadap 14 sarana pangan fortifikasi yang terdaftar di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang.

Capaian persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **12,53%** dengan kategori **“Kurang”**. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penetapan target RAPK yang seharusnya kumulatif, dan target di triwulan I yang seharusnya disesuaikan dengan target renlak pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di triwulan I yaitu sejumlah 1 sarana, dengan persentase target yaitu 7,14%.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	57,00	7,14	12,53	Kurang
TW II	57,00	-	0,00	-
TW III	57,00	-	0,00	-
TW IV	57,00	-	0,00	-
2025	57,00	7,14	12,53	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase sarana pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori Kurang. Hal ini disebabkan adanya kesalahan penetapan target RAPK, yang seharusnya kumulatif. Untuk itu pada triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian target sesuai dengan target kumulatif.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2025, persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 7,14%. Ketidaktercapaian target disebabkan karena adanya kesalahan dalam penetapan target triwulan yang seharusnya kumulatif. Hasil tersebut sesuai dengan target renlak yaitu satu sarana pada triwulan I. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penyesuaian pada target RAPK.

- d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :





1. Melakukan penyesuaian target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025.
2. Melakukan monitoring hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan tindak lanjutnya melalui aplikasi M'Nilik dan *spreadsheet_Monitoring_TL_CAPA*..
3. Melaporkan hasil pemeriksaan sarana produkdi psngsn fortifikssi secara tepat waktu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	QIC.003	Pem - Inspeksi	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT				

1. Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan pelaporannya melalui SIPT
2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui aplikasi M'Nilik dan *spreadsheet_Monitoring_TL_CAPA*.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	7,14	12,53	0	Rp 897.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat diukur. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 12,53% untuk itu pada triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian target tahun 2025 sehingga capaian target tercapai dan dapat disimpulkan sampai dengan akhir tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- Melakukan pelatihan dan *refreshment* untuk petugas inspeksi terkait pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi
- Melakukan identifikasi sarana produksi pangan fortifikasi yang ada di Provinsi Banten, untuk dilakukan pembobotan berdasarkan manajemen risiko, termasuk hasil pengujian terhadap sampel produk pangan fortifikasi yang disampling dan diuji di Balai Besar POM di Serang di tahun sebelumnya.





- Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan pelaporannya melalui SIPT
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui aplikasi M'Nilik dan *spreadsheet_Monitoring_TL_CAPA*.

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Belum seluruh personel Deputy III yang melakukan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi mendapatkan pelatihan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi Olahan karena terdapat personel baru	Memberikan pelatihan : Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi	Akhir TW I 2025	Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi tanggal 19-20 Februari 2025	-	-	Personel Deputy III yang melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi telah mendapatkan pelatihan pengawas pangan fortifikasi
2	Terdapat pelaku usaha fortifikasi yang belum memahami terkait titik kritis fortifikasi dan pentingnya fortifikasi pada pangan fortifikasi	Memberikan pembinaan dan refreshment terkait Pangan Fortifikasi	Akhir TW IV	Pembinaan di tempat untuk sarana produksi pangan fortifikasi yang dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi	Pelatihan dan refreshment CPPOB untuk Pangan Olahan fortifikasi	Akhir TW IV	Pelaku usaha pangan fortifikasi mendapatkan pembinaan di tempat pada saat pemeriksaan rutin

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	1,00	0,00	0,00
Realisasi RO	1,00	0,00	0,00
Target IKU	57,00	57,00	57,00
Realisasi IKU	7,14	7,14	7,14





Capaian Bulanan	12,53	12,53	12,53
Capaian Tahunan	12,53	12,53	12,53
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Awal Perhitungan 2024	Tidak ada target di bulan Februari 2025	Tidak ada target di bulan Maret 2025
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
RTL/Rekomendasi	Akan dilaksanakan pemeriksaan sarana dalam rangka verifikasi IP CPPOB dan pemeriksaan sarana sesuai dengan permohonan sertifikasi yang masuk	Pemeriksaan sarana produksi Fortifikasi selanjutnya di bulan Mei dan Juni	Pemeriksaan sarana produksi Fortifikasi selanjutnya di bulan Mei dan Juni
Timeline Penyelesaian	Januari 2025	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi
Kondisi Awal	Terdapat 1 sarana yang diperiksa dan perlu dilakukan pelaporan melalui SIPT .	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi
Rencana Aksi	-	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan sesuai renlak	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan sesuai renlak
Kondisi Akhir	Sudah dilakukan pelaporan melalui SIPT	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi di bulan Februari	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi fortifikasi di bulan Maret





Sasaran Kegiatan 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan upaya Laboratorium UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi dan Standar Metode Analisa Terverifikasi. Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk :

- Melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan
- Menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan
- Monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik jenis dan jumlahnya.

Telah dilakukan perencanaan *road map* dan target kemampuan Laboratorium tahun 2025 yang meliputi:

- a. Pemenuhan standar ruang lingkup dilakukan dengan penjadwalan peningkatan kemampuan uji dengan memasukkan parameter baru pada perencanaan sampling 2025 dan juga anggaran khusus untuk pengujian sampel penambahan ruang lingkup.
- b. Pemenuhan standar kompetensi telah dibuat pemetaan kompetensi pengujian dan program pelatihan 2025.
- c. Pemenuhan standar peralatan dilaksanakan dengan melakukan pemindahan alat dan pengadaan ICP MS.
- d. Pemenuhan metode analisa terverifikasi dilakukan dengan membuat program verifikasi metode analisa.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Nilai Akhir akan diperoleh di akhir tahun 2025 namun dilakukan monitoring capaian per triwulan. Nilai evaluasi di triwulan I adalah 71,30, lebih kecil dari target tahunan yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan yaitu 71,50.





- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,00	71,30	108,03	Sangat Baik

Berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 TW I Tahun 2025 No B-PR.10.01.10.03.25.140 tanggal 26 Maret 2025 maka realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 adalah 71,30 dimana melebihi target triwulan I yaitu 66,00 dengan capaian 108,03 dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

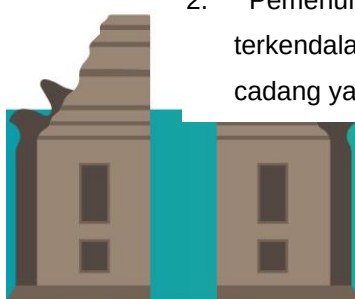
Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	66,00	71,30	108,03	Sangat Baik
TW II	68,70			
TW III	69,20			
TW IV	71,50			
2025	71,50	71,30	108,03	Tercapai

Berdasarkan realisasi triwulan I yaitu 71,30 maka diproyeksikan target tahun 2025 (71,50) akan tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tools yang digunakan pada Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium saat ini merupakan tools yang baru dimana berlaku per tahun 2025. Kendala tercapainya Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I 2025 antara lain :

- Pemenuhan Peralatan disebabkan oleh :
 - Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada awal tahun 2025 berdampak pada mundurnya pelaksanaan pengadaan alat yang semula direncanakan pada triwulan I menjadi triwulan
 - Pengadaan alat juga difokuskan untuk melakukan peremajaan alat yang rusak dan untuk pemenuhan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017.
- Pemenuhan Kompetensi, Metode Analisa Terverifikasi, dan Standar Ruang Lingkup terkendala oleh keterbatasan jumlah reagen dan media, perlengkapan penunjang, serta suku cadang yang dibutuhkan akibat adanya efisiensi anggaran.





Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian masing-masing parameter Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi dan Standar Metode Analisa Terverifikasi.
- Melakukan pemenuhan Standar Peralatan melalui pemindahan alat dari laboratorium kimia ke laboratorium biologi molekuler dengan tetap mempertimbangkan efektivitas penggunaan alat.
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi dengan uji banding antar personil.
- Melakukan pemenuhan Standar Metode Analisa Terverifikasi melalui Verifikasi Metode Analisa dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen, penunjang, baku pembanding dan suku cadang.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Rencana Tindak Lanjut perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain :

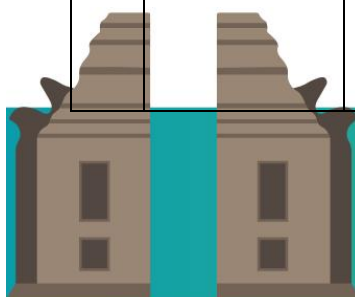
1. Peningkatan pemenuhan Peralatan akan dilakukan pada triwulan berikutnya melalui pengadaan alat.
2. Peningkatan pemenuhan Kompetensi, Metode Analisa Terverifikasi, dan Standar Ruang Lingkup tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan ketersediaan jumlah reagen dan media, perlengkapan penunjang, baku pembanding, serta suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian sampel rutin.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

	Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 tahun	Realisasi Januari - Maret 2025	
13	Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3165.RAB.001.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	0 paket	Sedang dalam proses pengadaan ICP MS, Scanner
				A Uji Profisiensi di BBPOM Serang	1 paket	0 paket	
		3165.PD.D.001.056	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	B Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	8 paket	0 paket	
				C Surveilans KAN dan Tindakan perbaikan	1 paket	1 paket	Pembayaran iuran tahunan
				D Sistem Mutu ISO 17025 (Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen)	5 paket	0 paket	
				E Konsultasi / Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan Pengujian	8 paket	0 paket	



Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 tahun	Realisasi Januari - Maret 2025	
			F Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling	2 paket	2 paket	Pengadaan test kit
			G Pengamanan Makanan RI 1 RI 2	1 paket	0 paket	
			H Pengujian Sampel Khusus (SRL, Uji Banding, IHT, Verifikasi Lab)	5 paket	4 paket	Pembelian sampel khusus
			I Penanganan Limbah dan B3	2 paket	0 paket	
			J Pengadaan Penunjang Laboratorium	19 paket	0 paket	
			K Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan (PNBP)	1 paket	0 paket	
			L Bimbingan Teknis LRPPI bahan kontak pangan olahan	1 paket	0 paket	
			M Pengembangan kemampuan laboratorium BB/BPOM laboratorium pengembangan pengujian Kobonappza	1 paket	0 paket	
			N Pengembangan kemampuan laboratorium BB/BPOM laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air	1 paket	0 paket	
			O Pengembangan kemampuan laboratorium BB/BPOM - Mikrobiologi dan Biologi molekul	1 paket	0 paket	
			P Bimbingan Teknis Internal Laboratorium (kosmetik, OT - SK, Obat Napza, Pangan, Mikrobiologi)	1 paket	0 paket	
			Q Workshop Sistem Mutu tentang LIMS	1 paket	0 paket	
			R Magang Laboratorium (Kimia Pangan, Obat Napza, Mikrobiologi)	4 paket	0 paket	
			S Asesmen Dan Koordinasi Fungsi Pengujian Antara PPPOMN dan Lab	1 paket	0 paket	
			T Regionalisasi Laboratorium BPOM 10,061,000 0 0 0 0.00 % 10,061,000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meet	1 paket	0 paket	
			U Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	2 paket	0 paket	
			V Pengadaan Penunjang Laboratorium (PNBP) 394,303,000 0 0 0 0.00 % 394,303,000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12 paket	0 paket	
			X Pelatihan teknis jejaring	1 paket	0	





Indikator	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 tahun	Realisasi Januari - Maret 2025	
			laboratorium pengujian pangan deteksi DNA Spesifik Spesies dan GMO		paket	

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,00	71,3	108,03	147.684.500	Rp 110.681.600	74,94	1,44	0,44	92 %	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada triwulan I dengan target Rp. 147.684.500; tercapai realisasi Rp. 110.681.600; dengan capaian TE 92% kategori **Efisien**. Selama triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa revisi anggaran yaitu penyesuaian item dan nominal pada 3165.RAB.001. dari Rp. 7.396.079.000; menjadi Rp.4.933.249.000 dan juga pengurangan 3165.PDD.001.056 belanja bahan dan jasa dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sampai dengan triwulan I tahun 2025 maka diproyeksikan bahwa target tahun 2025 sebesar 71,50 dapat diusahakan tercapai dengan tantangan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebabkan keterbatasan jumlah reagen dan media, perlengkapan penunjang, baku pembanding, serta suku cadang.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

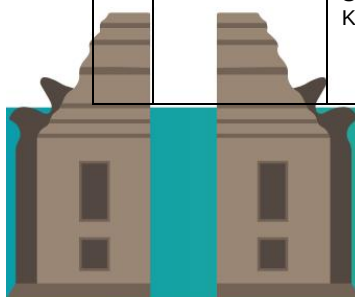
Berdasarkan penilaian Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 maka berikut tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi berupa monitoring rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target Tahun 2025 :





Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Tahun 2025 Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menggunakan tools yang baru yang terdiri atas Strandar Ruang Lingkup, Kompetensi, Peralatan, dan Metode Analisa terverifikasi.	dilakukan peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terutama melalui pemenuhan Standar Peralatan	Maret, Juni 2025	terlaksana pemindahan vaccum manifold laboratorium pangan ke laboratorium biologi molekuler (Maret)	pembelian alat ICPMS	Juni 2025	Kondisi TW I 2025 Realisasi 71.30 (Target TW I 2025 : 66,00; Target 2025 ; 71,50)
		dilakukan peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terutama melalui pemenuhan Standar Ruang Lingkup	Juni, September, Desember 2025	-	verifikasi Albendazol, mebendazol 02/OBASK/MA-PPOMN/24 verifikasi valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPOMN/23 verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) Kadar Pb, Cd, Hg, As, dan Sn 50/PA/16 (AAS-HVG); 51/PA/16 (AAS-GFA); Tepung Terigu, Mie Instan; verifikasi Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784- 1995 (Volumetri) Buah/Sayur dalam Kaleng, Buah Kering, Kelapa Parut, Nata de Coco serta Selai Buah dan Saus; Kadar Asam Dehidroasetat 09/PA/MA-PPOMN/24 (KCKT), Produk Bakeri	Juni 2025 September 2025 September 2025 Desember 2025	
		dilakukan peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terutama melalui pemenuhan Standar Kompetensi		Uji kadar sulfit pangan olahan 36/MA/91; SNI 2894:1992 (Volumetri)	verifikasi Albendazol, mebendazol 02/OBASK/MA-PPOMN/24 verifikasi ETORICOXIB, tablet, PH INDIA 2018 verifikasi MEFENAMIC ACID PerBPOM 23/2022 Suspensi Oral Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar verifikasi ESTRIOLE Japan PH edisi 17 Tablet verifikasi FINASTERID kapsul CHINA PH 2015	Juni 2025 September 2025 September 2025 September 2025	

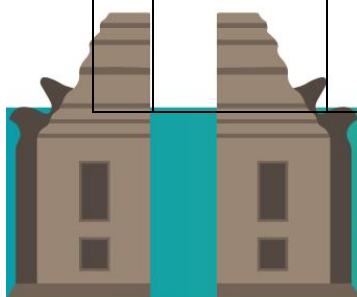




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					verifikasi MESTEROLONE tablet PerBPOM 23/2022	September 2025	
					verifikasi valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPOMN/23 KLT-Densitometri, KCKT	September 2025	
					verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) Tepung Terigu, Mie Instan	September 2025	
					Kadar Pb, Cd, Hg, As, dan Sn 50/PA/16 (AAS-HVG); 51/PA/16 (AAS-GFA); Tepung Terigu, Mie Instan	September 2025	
					verifikasi dienogest PerBPOM 23/2022,	Desember 2025	
					verifikasi Identifikasi Eritrosin B (Acid Red 51) CI 45430, 16/KO/MA-PPOMN/23, KCKT PDA	Desember 2025	
					verifikasi Basic blue 26 (CI 44045) 49/KO/MA-PPOMN/18 KCKT PDA		
					verifikasi Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784- 1995 (Volumetri) Buah/Sayur dalam Kaleng, Buah Kering, Kelapa Parut, Nata de Coco serta Selai Buah dan Saus	Desember 2025	
					verifikasi Kadar Asam Dehidroasetat 09/PA/MA-PPOMN/24 (KCKT), Produk Bakeri;	Desember 2025	
					verifikasi Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT) Gula, Sirup, Sediaan Pemanis termasuk Madu	Desember 2025	
	dilakukan peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terutama melalui pemenuhan Standar Metode Analisa	Maret, Juni, September, Desember 2025	uji verifikasi 2 MA Identification and Determination of Hydroquinone in Cosmetic Products by TLC and HPLC ACM 003; Identifikasi Sudan I, II, III, dan IV dalam Produk Kosmetik	IBUPROFEN Tablet FI VI Hal 730-731 Pemerian; Identifikasi; Disolusi; Keseragaman Sediaan; Penetapan Kadar; KETOROLAC TROMETHAMINE FI VI hal 852 -> (Suplemen III FI VI) Pemerian; Identifikasi; pH; Penetapan Kadar	Juni 2025		
				Identifikasi Deksametason, Prednison dan Prednisolon dalam Obat Tradisional dan	Juni 2025		



No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		Terverifikasi		secara KCKT-PDA MA PPOMN No. 35/KO/16 uji verifikasi Identifikasi Simultan Piroksikam, Natrium Diklofenak, Ibuprofen, Fenilbutazon dan Asam Mefenamat dalam Obat Tradisional Sediaan Padat secara Kromatografi Cair KinerjaTinggi dengan Detektor Photo Diode Array 22/OT /11 SPE-KCKT; dan Identifikasi Simultan Piroksikam, Natrium Diklofenak, Ibuprofen, Fenilbutazon dan Asam Mefenamat dalam Obat Tradisional Sediaan Cair secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan Detektor Photo Diode Array 23/OT /11 SPE-KCKT	Suplemen Kesehatan Sediaan Cair secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array 16/OTSK/MA-PPOMN/20 KCKT; Identifikasi Albendazol, Mebendazol dan Pirantel Pamoat dalam Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Spektrofotodensitometri 02/OBASK/MA-PPOMN/24 KLT-Densitometri, AM Escherichia coli British Pharmacopeia 2023; 11/MBM/MA-PPOMN/23; FINASTERID Kapsul CHINA PH 2015 Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar; Disolusi; Keseragaman Sediaan verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) Tepung Terigu, Mie Instan; Kadar Pb, Cd, Hg, As, dan Sn 50/PA/16 (AAS-HVG); 51/PA/16 (AAS-GFA); Tepung Terigu, Mie Instan Angka Lempeng Total ISO 21149 : 2017/Amd 1: 2022; METHYLERGOMETRINE MALEATE FI VI halaman 1135-1140; Pemerian; Identifikasi; pH; Penetapan Kadar Identifikasi Hexachlorophene dalam Kosmetik secara KCKT-PDA, 37/KO/MA-PPOMN/19; Identifikasi Minoksidil dalam Produk Kosmetik Sediaan Rambut secara KCKT-PDA MA PPOMN No. 02/KO/15 Kadar Asam Dehidroasetat 09/PA/MA-PPOMN/24 (KCKT), Produk Bakeri; verifikasi Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT) Gula, Sirup, Sediaan Pemanis termasuk Madu	Juni 2025 <	





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO (PDD)	0,00	0,00	0,00
Realisasi RO (PDD)			
Target RO (RAB)			
Realisasi RO (RAB)	0,00		
Target IKU			66,00
Realisasi IKU			71,30
Capaian Bulanan	0,00	0,00	108,03
Capaian Tahunan	0,00	0,00	99,72
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)			
Kendala bulan tersebut			1. Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada awal tahun 2025 berdampak pada mundurnya pelaksanaan pengadaan alat yang semula direncanakan pada triwulan I menjadi triwulan 2. Pengadaan alat juga difokuskan untuk melakukan peremajaan alat yang rusak dan untuk pemenuhan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017. 2. Pemenuhan Kompetensi, Metode Analisa Terverifikasi, dan Standar Ruang Lingkup terkendala oleh keterbatasan jumlah reagen dan media, perlengkapan penunjang, serta suku cadang yang dibutuhkan akibat adanya efisiensi anggaran.
RTL/Rekomendasi			1. Peningkatan pemenuhan Peralatan akan dilakukan pada triwulan berikutnya. 2. Peningkatan pemenuhan Kompetensi, Metode Analisa Terverifikasi, dan Standar Ruang Lingkup tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan ketersediaan jumlah reagen dan media, perlengkapan penunjang, serta suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian sampel rutin.
Timeline Penyelesaian			-
Kondisi Awal			-
Rencana Aksi			Pemenuhan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun
Kondisi Akhir	-	-	-





Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), berdasarkan penerimaan audiens terhadap beberapa aspek penting, yaitu sumber atau narasumber, konten atau informasi, tingkat pemahaman, dan manfaat dari KIE tersebut. Tingkat efektifitas KIE diukur menggunakan empat indikator yaitu kualitas sumber atau narasumber KIE, relevansi dan kejelasan konten atau informasi KIE, tingkat pemahaman audiens terhadap informasi yang disampaikan, serta manfaat yang dirasakan audiens setelah menerima KIE. KIE dilakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui berbagai media seperti media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang.

Target dari survei ini adalah masyarakat yang menerima manfaat KIE, baik sebagai peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT BPOM maupun sebagai pengguna kanal media KIE BPOM atau penerima produk informasinya. Teknik pelaksanaan survei dapat dilakukan melalui wawancara langsung (face to face interview), penyebaran kuisioner, atau secara daring (online survey). Untuk menentukan jumlah minimal responden yang dibutuhkan dalam survei, digunakan metode penghitungan berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan, yang disesuaikan dengan jumlah populasi sasaran dan mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada masing-masing triwulan. Untuk tahun 2025 target jumlah responden KIE BBPOM di Serang adalah sebagai Berikut:

No.	Jenis KIE	Jumlah Responden			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	KIE Rutin Tatap Muka	53	53	53	53
2	KIE Bersama Tokoh Masyarakat	0	243	80	0
3	KIE Media	53	53	53	53

Jumlah target responden setiap triwulan ditentukan sesuai rencana pelaksanaan KIE selama Tahun 2025. Untuk KIE tatap muka rutin dan KIE melalui media survey dilakukan rutin setiap bulan sepanjang tahun 2025, sedangkan untuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (Tomas) pelaksanaan survey menyesuaikan dengan jadwal KIE Tomas yaitu pada TW II dan TW III.





- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	89,07	103,59	Sangat Baik

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Serang TW I tahun 2025 sebesar 89,07. Realisasi ini melebihi target TW I dengan capaian 89,01 dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Nilai tingkat efektifitas KIE adalah rata-rata dari nilai tingkat efektifitas KIE langsung dan KIE Media. Responden yang memberikan kontribusi sebanyak 174 orang, terdiri dari responden KIE Media 80 orang dan KIE tatap muka 94 orang. Jumlah Responden KIE tatap Muka sebesar 33,81 % dari keseluruhan peserta kegiatan KIE Tatap Muka yaitu 278 orang.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	85,98	89,07	103,59	Sangat Baik
TW II	85,98			
TW III	85,98			
TW IV	85,98			
2025	85,98	89,07	103,59	▲ Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan TW I tahun 2025 BBPOM di Serang telah melebihi target TW I yaitu 89,07 dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahunan persentase capaian adalah sebesar 103,59 dengan kategori **tercapai**.

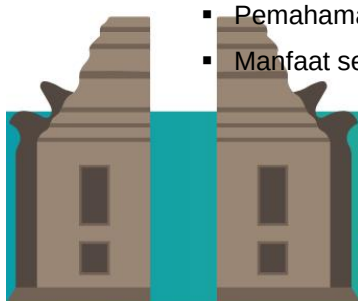
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai efektivitas KIE BBPOM di Serang TW I Tahun 2025 sebesar 89,07 dengan interpretasi efektifitas pelaksanaan KIE **Efektif**. Nilai rata-rata setiap indikator dari 7 kegiatan KIE Tatap muka yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Narasumber/Petugas sebesar 93,418;
- Konten/Informasi sebesar 92,642;
- Pemahaman Audiens 89,096; dan
- Manfaat sebesar 90,559.

Sedangkan nilai rata-rata untuk setiap indikator dari KIE melalui media sosial dan selain media sosial adalah sebagai berikut :

- Narasumber/Petugas sebesar 88,906;
- Konten/Informasi sebesar 91,250;
- Pemahaman Audiens 85,156; dan
- Manfaat sebesar 87,813.





Berdasarkan data diatas, nilai masing-masing indikator masuk kategori **efektif**, baik untuk KIE Tatap Muka maupun KIE Media. Nilai tiap indikator untuk KIE secara langsung lebih tinggi dibanding KIE melalui media. Ini menunjukkan bahwa KIE secara langsung dinilai lebih efektif, mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada KIE langsung memungkinkan untuk melakukan komunikasi dua arah sehingga peserta dapat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Jenis kegiatan KIE Tatap Muka yang sering diterima oleh responden adalah kegiatan penyuluhan /sosialisasi /seminar /webinar/talkshow (98,9% responden) dan nilai indikator tertinggi pada KIE langsung adalah narasumber. Ini menunjukkan bahwa narasumber pada KIE langsung BBPOM di Serang selama TW I kompeten dan dapat memberikan pemahaman kepada peserta.

Pada KIE Media, Jenis Media yang sering diterima oleh responden adalah media sosial (81,3% responden) dengan materi yang paling banyak diingat adalah CekKLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa), Cek Izin Edar dengan BPOM Mobile, dan Tugas serta wewenang BPOM. Nilai indikator tertinggi pada KIE Media adalah konten/informasi, ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dengan baik dan menarik.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Hasil survei efektifitas KIE menunjukkan bahwa materi kegiatan KIE yang dibutuhkan responden adalah informasi cara memilih dan mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman, penjelasan berita/issue Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat, dan cara mendaftarkan produk Obat dan makanan ke BPOM. Materi-materi tersebut telah diberikan sebelumnya baik pada KIE langsung maupun KIE melalui Media khususnya media sosial, namun belum diterima oleh sebagian responden. Oleh karena itu, BBPOM di Serang perlu menambah tema-tema tersebut baik pada KIE langsung maupun KIE melalui berbagai media termasuk media selain media sosial. Materi cara pendaftaran produk Obat dan Makanan akan dibuat sesuai jenis komoditi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Upaya peningkatan kinerja tingkat efektifitas KIE diantaranya adalah:

1. Publikasi melalui media sosial dikemas lebih menarik dengan mengikuti trend yang ada di media sosial;
2. Publikasi di media-media milik pemerintah daerah;
3. Pemilihan tema bapera sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, serta mengikuti isu terkini Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan DIVA Inklusif untuk kelompok rentan; dan
5. Perluasan Wilayah Inovasi DIVA pada daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan terdepan).

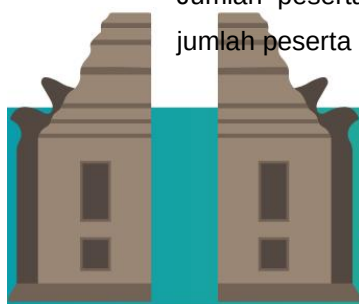




e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW I	Keterangan
1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BDC	Infokom	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	KIE Melalui Inovasi DIVA (Drive Thru Pengujian Sampel Pangan Olahan)	12 Kegiatan (13.320.000)	3 Kegiatan (2.994.000)	1. DIVA Januari (KP3B) 2. DIVA Februari (DIVA INklusif Ibu Hamil Posyandu Salira) 3. DIVA Maret (Pasar Rau, Kunjungan DPR)
					KIE Melalui Inovasi bedah peraturan online (Baperan)	12 Kegiatan (2.820.000)	3 Kegiatan (705000)	1. Baperan Bets 1: Badak banten: bermitra dengan UMKM Obat dan Makanan 2. Baperan Bets 2: SILENT PANDEMIC : Bahaya Tersembunyi di Balik Penggunaan Antibiotik yang Tidak Bijak" 3. Baperan Bets 3: mengenal lebih dekat inovasi sehat
					KIE Stunting	4 Kegiatan (7.490.000)	1 Kegiatan (1.469.600)	KIE Stunting SMKS PGRI pandeglang
					KIE Bersama Tokoh Masyarakat	10 Kegiatan (642.950.000)	-	Jadwal pelaksanaan TW II dan III
					Kunjungan Sekolah	1 Kegiatan (413.000)	1 kegiatan (413.000)	Kunjungan SMPN 20 Kota Serang
		BMB	Infokom	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	23 layanan/publikasi 915.630.000)	3 layanan/publikasi (2.189.000)	Terdiri dari 12 layanan informasi, 1 layanan media blast, 1 layanan media sosial, 5 media luar ruang, 2 media cetak (leaflet dan majalah), 2 media elektronik

Pada TW I Tahun 2025, KIE tatap muka terlaksana sesuai perencanaan yaitu KIE melalui Inovasi Baperan, DIVA, dan KIE Stunting. KIE melalui inovasi DIVA pada bulan Maret menyasar kelompok rentan yaitu ibu hamil di posyandu salira yang merupakan daerah 3T. Selain itu, KIE juga dilaksanakan pada 86 siswa SMPN 20 Kota Serang yang berkunjung ke BBPOM di Serang. Jumlah peserta BAPERAN yang melebihi target dan kunjungan sekolah menambah capaian jumlah peserta dan responden survey efektivitas KIE pada TW I tahun 2025.





KIE melalui media pada TW I 2025 terlaksana sesuai perencanaan yaitu 6 layanan/ publikasi yang terdiri dari 3 layanan informasi, 2 media luar ruang, dan 1 media cetak. Publikasi melalui media sosial dan wa blast, capaian akan dihitung pada akhir tahun masing-masing sebanyak 1 publikasi. Tema materi untuk KIE melalui media disesuaikan dengan agenda setting Badan POM dan issue terkini Obat dan Makanan di masyarakat, seperti obat setelan dan memilih takjil aman. Pemilihan tema dan penyajian yang menarik pada KIE Media mendukung tercapainya tingkat efektifitas KIE pada TW I 2025.

Pada tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran KIE yaitu KRO BDC dan BMB termasuk yang diefisiensi dengan besaran blokir masing-masing adalah 74,5% dan 84,11%. Untuk memastikan pelaksanaan KIE tetap berjalan sesuai perencanaan, dilakukan penyesuaian pelaksanaan KIE antara lain, pelaksanaan KIE secara daring, publikasi media luar ruang di area kantor, dan publikasi wa blast mandiri melalui hotline.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	89,07	103,59	20.931.600	Rp 16.831.600	80,41	1,29	0,29	95 %	Efisien

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja IKU Tingkat Efektivitas KIE adalah KRO BDC dan KRO BMB. Berdasarkan indikator tingkat efisiensi, pelaksanaan kegiatan dinilai efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

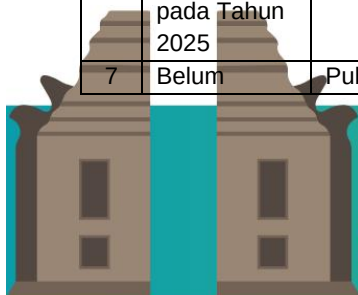
Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi realisasi IKU Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 95,53. Pada tahun 2025, terdapat perubahan tools perhitungan efektifitas KIE sesuai surat Sekertaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.01.25.45 tanggal 17 januari 2025 perihal Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2025 sehingga dilakukan penyesuaian target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di tahun 2025 menjadi **85,98**. Perubahan tools survey efektifitas KIE mencakup penambahan survey untuk KIE melalui media dan perubahan komponen indikator penilaian efektifitas KIE.





h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	KIE pada kelompok rentan dilakukan setahun 2 kali	KIE pada kelompok rentan ditambah frekeunsinya menjadi setiap TW	TW I 2025	Telah dilakukan Kegiatan DIVA Inklusif untuk peserta Ibu Hamil di Posyandu Salira	Akan dilaksanakan KIE untuk kelompok rentan pada TW II, TW III, dan TW IV	Setiap TW 2025	KIE pada kelompok rentan dilakukan tiap TW
2	KIE belum menjangkau wilayah pelosok yang mewakili tiap kabupaten /kota	KIE dilaksanakan di wilayah pelosok tiap kabupaten/kota	TW I 2025	Telah dilakukan Kegiatan DIVA di desa Salira Kabupaten Serang (utara Banten)	Akan dilaksanakan KIE pada wilayah pelosok pada TW II, TW III, dan TW IV	Setiap TW 2025	Jangkauan wilayah KIE lebih luas
3	Belum dilakukan KIE bersama Tokoh Masyarakat di Tahun 2025	Akan dilakukan KIE Bersama Tokoh Masyarakat di TW II dan III tahun 2025	TW II-TW III 2025		KIE Bersama Tokoh Masyarakat akan dilaksanakan pada TW II dan TW III	TW II-TW III 2025	Terlaksananya KIE Bersama Tokoh Masyarakat
4	Belum dilakukan KIE stunting pada Tahun 2025	Akan diadakan KIE Stunting pada setiap TW 2025	Setiap TW 2025		Akan diadakan KIE Stunting pada TW II, TW III, dan TW IV	Setiap TW 2025	KIE Stunting terlaksana setiap TW
5	Belum dilakukan publikasi Obat dan Makanan melalui media cetak pada tahun 2025	Akan dilaksanakan publikasi melalui media cetak yaitu brosur dan majalah	TW I dan TW II 2025	Publikasi melalui brosur yaitu Obat Setelan	Akan dilaksanakan publikasi melalui media cetak yaitu majalan dan brosur BPOM Mobile pada TW II 2025	TW I dan TW II 2025	Telah dilaksanakan publikasi Obat dan Makanan melalui media cetak yaitu brosur
5	Belum dilakukan publikasi Obat dan Maknan melalui media elektronik pada Tahun 2025	publikasi Obat dan Makanan melalui media elektronik yaitu ILM radio pada TW II 2025	TW II 2025		Akan dilaksanakan publikasi Obat dan Makanan melalui media elektronik yaitu ILM radio pada TW II 2025	TW II 2025	Belum dilakukan publikasi Obat dan Makanan melalui media elektronik yaitu ILM radio pada TW II 2025
7	Belum	Publikasi Obat	Setiap TW	Publikasi Obat	Akan	TW II	Belum

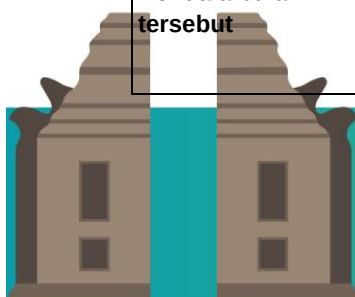




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	dilaksanakan Publikasi Obat dan Makanan melalui Media Luar Ruang Pada Tahun 2025	dan Makanan melalui media luar ruang dilakukan setiap TW		dan Makanan pad amedialuar ruang di area kantor yaitu publikasi BPOM Mobile dan Obat Setelan	dilaksanakan Publikasi di Media Luar pada TW II, TW III, dan TW IV	2025	dilaksanakan Publikasi di Media Luar pada TW II
7	Belum dilaksanakan publikasi melalui media sosial dan wa blast pada tahun 2025	Akan dilaksanakan publikasi melalui media sosial dan wa blast setiap bulan sesuai perencanaan	Setiap TW	Publikasi melalui media sosial dan WA Blast	Akan dilaksanakan publikasi melalui media sosial dan wa blast setiap bulan pada TW II, TW III, dan TW IV	TW II 2025	Telah dilaksanakan publikasi Obat dan Makanan melalui media sosial dan wa blast setiap bulan pada TW I

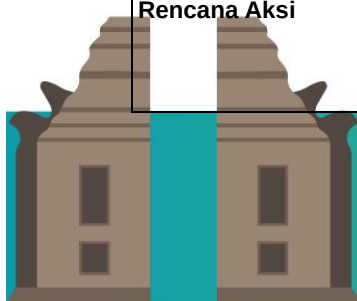
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	160	65	53
Realisasi RO	160	65	53
Target IKU	85,98	85,98	85,98
Realisasi IKU	91,14	86,84	89,07
Capaian Bulanan	91,14	86,84	89,07
Capaian Tahunan	91,14	86,84	89,07
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Pada Bulan Januari Telah dilakukan kegiatan KIE Rutin Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut yang direncanakan: diantaranya adalah 1. Kegiatan DIVA CFD KP3B tanggal 19 januari 2025 2.Baperan Bets 1 Tanggal 22 Januari 2025 3. Kunjungan Sekolah SMPN 20 Kota Serang Tanggal 14 Januari 2025	Pada Bulan Februari Telah dilakukan kegiatan KIE Rutin Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut yang direncanakan: diantaranya adalah 1. Kegiatan DIVA inklusif Posyandu Salira tanggal 14 Februari 2025 2. KIE Stunting SMKS Pandeglang tanggal 18 Februari 2025 2.Baperan Bets 2 tanggal 20 february 2025	Pada Bulan Maret Telah dilakukan kegiatan KIE Rutin Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut yang direncanakan: diantaranya adalah 1. Kegiatan DIVA di Kota Serang tanggal 6 maret 2025 2.Baperan Bets 3 tanggal 18 maret 2025
Kendala bulan tersebut	Hingga Januari Total Responden yang mengisi Survey masih belum memenuhi target responden TW I meskipun tingkat	Jumlah Total Responden yang mengisi Survey KIE tetap muka telah memenuhi target TW I , namun untuk responden KIE Media masih belum memenuhi target	Hingga Bulan Maret Total Responden yang mengisi Survey baik KIE tatap muka dan Media telah memenuhi target responden TW I begitu





	Jan	Feb	Mar
	efektifitas telah memenuhi target . Jumlah responden yaitu sebanyak 31 orang (19,38%) dari total peserta KIE 160 Orang untuk KIE tatap muka dan 3 orang untuk KIE Media. dengan rincian sebagai berikut: - KIE Tatap Muka: Kegiatan Kunjungan SMPN 20 Kota Serang sebanyak 12 orang; Baperan Bets 1 dengan tema Badak banten: bermitra dengan UMKM Obat dan Makanan sebanyak 19 orang - KIE Media: Sebanyak 3 orang	responden TW I meskipun tingkat efektifitas telah memenuhi target . Jumlah responden sebanyak 60 orang (26,67%) dari total peserta KIE 225 Orang untuk KIE tatap muka dan 48 orang untuk KIE Media. dengan rincian penambahan jumlah responden di bulan Februari adalah sebagai berikut: - KIE Tatap Muka: DIVA Inklusif Posyandu Salira sebanyak 17 orang; KIE Stunting sekolah Bersama Cegah Stunting Dengan Pangan Aman Untuk Generasi Sehat di SMKS Pandeglang sebanyak 20 Orang Baperan Bets 2 dengan SILENT PANDEMIC : Bahaya Tersembunyi di Balik Penggunaan Antibiotik yang Tidak Bijak” sebanyak 9 orang - KIE Media: Sebanyak 45 orang	juga dengan target tingkat efektifitas KIE telah tercapai. Jumlah responden bulan Maret adalah sebanyak 94 orang (33,57%) dari total peserta KIE 280 Orang untuk KIE tatap muka dan 80 orang untuk KIE Media. dengan rincian penambahan jumlah responden di bulan Maret adalah sebagai berikut: - KIE Tatap Muka: DIVA Pasar Rau sebanyak 13 orang; Baperan Bets 3 dengan tema mengenal lebih dekat inovasi sehati” sebanyak 21 orang - KIE Media: Sebanyak 32 orang
RTL/Rekomendasi	Pada Tahun 2025 terdapat update target baru yang dipisahkan antara kie media , kie tatap muka dan kie tokoh masyarakat. sehingga perhitungan target jumlah responden perbulan dan pertriwulan di sesuaikan dengan jumlah target tersebut Pada bulan Februari 2025 perlu dilakukan kegiatan KIE Stunting dan DIVA inklusif dengan sasaran peserta KIE Stunting Remaja Pelajar dan untuk DIVA inklusif Ibu Hamil. kegiatan DIVA inklusif dilakukan di wilayah 3T	Perlu ditetapkan target responden perbulan untuk setiap kegiatan rutin yang dilakukan agar capaian responden tercapai. berikut rencana target responden setiap bulan: 1. untuk KIE DIVA minimal Responden 5 orang 2. untuk KIE BAPERAN minimal responden adalah 13 orang 3. untuk KIE Media minal responden adalah 18 orang	Target responden dan tingkat efektifitas KIE Telah tercapai. rekomendasi yang dilakukan di bulan february diterapkan kembali di bulan Maret 2025
Timeline Penyelesaian	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Kondisi Awal	-	Jumlah Responden KIE Media dan tatap muka belum memenuhi target	Jumlah Responden KIE Media dan tatap muka belum memenuhi target
Rencana Aksi	Target perbulan responden minimal KIE Media dan KIE tatap Muka adalah masing-masing sebesar 18 orang, terhadap terget ini akan di upayakan beberapa strategi	Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan responden KIE dilakukan kembali pada bulan february yaitu : 1. Mengirimkan DM pengisian survey KIE Media kepada pemberi	Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan responden KIE dilakukan kembali pada bulan maret yaitu : 1. Mengirimkan DM pengisian survey KIE Media kepada





	Jan	Feb	Mar
	peningkatan, diantaranya adalah: 1. Mengirimkan DM pengisian survey KIE Media kepada pemberi like di postingan Instagram BBPOM di Serang 2. Strategi pemanduan pengisian survey KIE dan pemberian gimmick bagi pengisi survey tercepat yang pada tahun 2024 dilaksanakan terus akan dilaksanakan di tahun 2025 untuk memperluas jangkauan KIE pada bulan februari akan dilaksanakan kegiatan berikut: 1. KIE Stunting Remaja Pelajar 2. DIVA inklusif Ibu Hamil di wilayah 3T	like di postingan Instagram BBPOM di Serang 2. Mengenalkan Media Sosial BBPOM di Serang saat pelaksanaan KIE Offline agar responden KIE Media Bertambah 3. Strategi pemanduan pengisian survey KIE dan pemberian gimmick bagi pengisi survey tercepat yang pada tahun 2024 dilaksanakan terus akan dilaksanakan di tahun 2025	pemberi like di postingan Instagram BBPOM di Serang 2. Mengenalkan Media Sosial BBPOM di Serang saat pelaksanaan KIE Offline 3. Strategi pemanduan pengisian survey KIE dan pemberian gimmick bagi pengisi survey tercepat yang pada tahun 2024 dilaksanakan terus akan dilaksanakan di tahun 2025
Kondisi Akhir	Jumlah responden yaitu sebanyak 31 orang dan KIE tatap muka dan 3 orang untuk KIE Media.	Terdapat peningkatan jumlah responden KIE Langsung menjadi 60 responden dan KIE Media Menjadi 48 Responden	Terdapat peningkatan jumlah responden KIE Langsung selama periode hingga maret 2025 menjadi 94 responden dan KIE Media Menjadi 80 Responden

IKU 15. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik, sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari berbagai jenjang, seperti SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Terdapat 3 kriteria sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian pada tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan





Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut tahapan dan perhitungan persentase sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 :

Tabel Tahapan Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-Mei	1	Advokasi Lintas Sektor Program Sapa Sekolah	25%	Januari-April
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-Mei	2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1 : Maret-Mei Atau Batch 2 : Juli-September
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juli	3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1 : Maret-Mei Atau Batch 2 : Juli-September
4	Pemberian Paket Edukasi	10%	April-November		Pemberian Paket Edukasi	-	-
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-November		Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	-
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-Desember	4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25%	Juni-Juli Atau November-Desember
7	Pengawasan	10%	Agustus-Desember	5	Pengawasan	5%	Februari-Desember

Pada tahun 2025, jumlah sekolah yang diintervensi program ini terdiri dari 10 sekolah intervensi dan 30 sekolah perluasan di Kota Serang, serta 14 sekolah pengawasan di Kabupaten Lebak yang merupakan target intervensi tahun 2024.





a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	10,00	100,00	Baik

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan hingga Triwulan I sebesar 10,00% dengan capaian sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan untuk Triwulan I dengan kategori Baik. Capaian pada Triwulan ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hingga Triwulan I, Balai Besar POM di Serang telah melakukan kegiatan pra-Advokasi dengan lintas sektor (bobot 10%). Adapun rangkaian kegiatan tersebut, terdiri dari :

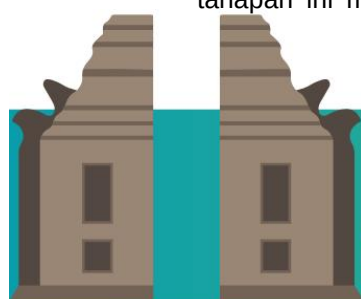
1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 di Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025.
2. Kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini bertujuan untuk menyampaikan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait.
3. Rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait pada tanggal 25 Maret 2025.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	10,00	10,00	100,00	Baik
TW II	47,50			
TW III	65,00			
TW IV	10 (100,00)			
2025	10 (100,00)	10,00	100,00	Perlu Upaya Keras

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan hingga Triwulan I sebesar 10,00 % dengan capaian sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan untuk Triwulan I dengan kriteria **Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian pada Triwulan I memiliki kriteria **Perlu Upaya Keras**.

Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan akan dilaksanakan pada sekolah intervensi dan sekolah perluasan. Untuk sekolah intervensi terdiri dari 5 tahapan, yaitu Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi, sedangkan untuk sekolah perluasan hanya berupa Sosialisasi Keamanan Pangan. Seluruh tahapan ini masih berjalan hingga akhir tahun 2024 dan diperlukan upaya untuk melakukan





monitoring dan evaluasi setiap tahapan agar berjalan sesuai perencanaan. Pada Triwulan I, BBPOM di Serang telah melaksanakan kegiatan pra-Advokasi dengan lintas sektor (bobot 10%).

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan yang menjadi target pada Triwulan I, yaitu kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor telah dilaksanakan BBPOM di Serang. Rangkaian kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor dimulai dari pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 di Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025, dilanjutkan Kegiatan Pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025 yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pra-Advokasi, dilaksanakan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan Kota Serang, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, serta Kementerian Agama Kota Serang pada tanggal 25 Maret 2025. Berdasarkan hasil rapat, telah direkomendasikan lokus intervensi untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu 5 sekolah intervensi tahap 1, 5 sekolah intervensi tahap 2 dan 30 sekolah perluasan.

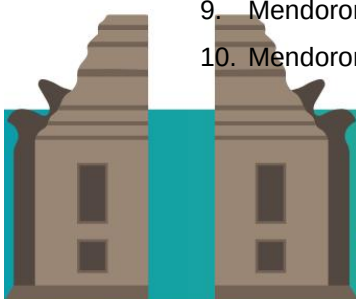
Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait, serta rekomendasi lokus intervensi sekolah, hal ini tentu akan mempermudah pelaksanaan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di tahap selanjutnya.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan lanjutan dari program yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Kegiatan ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat berbasis komunitas sekolah, seperti guru, siswa, petugas penyedia dan penjaja kantin, serta wali murid.

Agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal, sekaligus mencapai target kinerja IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, diperlukan upaya yang strategis dalam melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan perencanaan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan, diantaranya :

6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
7. Membuat surat permohonan penetapan lokus intervensi yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh Walikota Serang.
8. Meningkatkan keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan Pangan.
9. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan.
10. Mendorong sekolah yang diintervensi untuk melakukan pengimbasan ke sekolah lain.

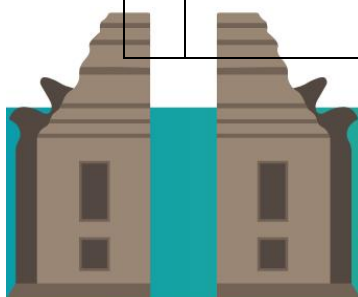




11. Meningkatkan keterlibatan wali murid dalam membudayakan keamanan pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
1	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	A	Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.875.000)	-	Kegiatan sosialisasi keamanan pangan untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 direncanakan pada bulan April 2025, sedangkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk 5 sekolah intervensi tahap 2 menunggu pembukaan blokir anggaran
				B	Bimtek Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (5.713.000)	-	Kegiatan bimtek keamanan pangan untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 direncanakan pada bulan April 2025, sedangkan pelaksanaan kegiatan bimtek untuk 5 sekolah intervensi tahap 2 menunggu pembukaan blokir anggaran
				C	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (3.000.000)	-	Pemberian paket edukasi keamanan pangan direncanakan diberikan bersama dengan kegiatan bimtek keamanan pangan pada bulan April 2025, sedangkan pelaksanaan pemberian paket edukasi untuk 5 sekolah intervensi tahap 2 menunggu pembukaan blokir anggaran



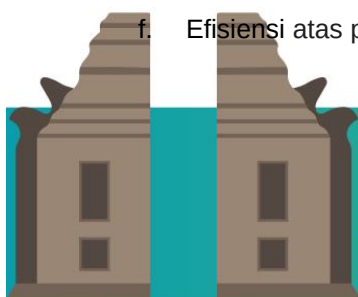


No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
				D Monitoring Kader Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.500.000)	-	Monitoring kader untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 direncanakan pada bulan Juni 2025, sedangkan monitoring kader untuk 5 sekolah intervensi tahap 2 menunggu pembukaan blokir anggaran
				E Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.504.000)	-	Sertifikasi untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 direncanakan pada bulan Juli 2025, sedangkan sertifikasi untuk 5 sekolah intervensi tahap 2 menunggu pembukaan blokir anggaran

Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Nasional Keamanan Pangan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini menargetkan 10 sekolah yang tersebar di Kota Serang. Sehubungan dengan efisiensi anggaran, Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan tanggung anggaran QDB.001 termasuk yang diblokir sebesar 88,76% sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan, antara lain :

1. Pelaksanaan intervensi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu intervensi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dilakukan intervensi untuk 5 sekolah yaitu 2 sekolah tingkat SD, 2 sekolah tingkat SMP/MTS dan 1 sekolah tingkat SMA. Intervensi tahap 2 juga melibatkan 5 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah tingkat SD, 1 sekolah tingkat SMP dan 2 sekolah tingkat SMK/MAN. Kegiatan intervensi sekolah tahap 1 mulai dilaksanakan pada triwulan 2, sedangkan kegiatan intervensi sekolah tahap 2 akan dilaksanakan setelah pembukaan blokir anggaran.
2. Beberapa tahapan program dilaksanakan secara daring yaitu sosialisasi Keamanan pangan untuk sekolah perluasan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan pengawalan.
3. Penyesuaian jumlah dan jenis paket edukasi yang diberikan ke sekolah dengan anggaran yang tersedia.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja





Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	10	100,00	3.690.000	Rp 2.552.000	69,16	1,45	0,45	92 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah **efisien** karena tingkat efisiensi anggaran pada Triwulan I mencapai 92%. Pada Triwulan I, BBPOM di Serang telah melakukan revisi anggaran terkait efisiensi dan pemblokiran anggaran, diantaranya anggaran perjalanan dinas, perlengkapan peserta, paket edukasi dan test kit. Namun demikian, anggaran yang telah direvisi ini diupayakan tetap mendukung pencapaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

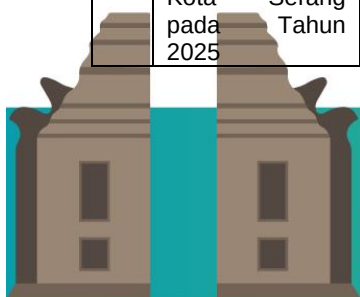
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 sebesar 100%, yaitu sebanyak 14 sekolah yang diintervensi program nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Pada tahun 2025 telah ditetapkan target sekolah intervensi sebanyak 10 sekolah. Untuk menindaklanjuti Surat dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, pada Triwulan 2 BBPOM di Serang akan mengusulkan penyesuaian target IKU bulanan untuk indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025. BBPOM di Serang juga akan terus melakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

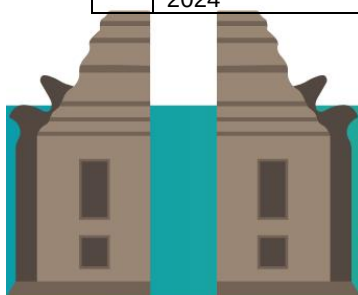
Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan baru akan dilaksanakan di 10 sekolah intervensi dan sosialisasi keamanan pangan di 30 sekolah perluasan di Kota Serang pada Tahun 2025	Pra-Advokasi Lintas Sektor	Triwulan I 2025	1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang terkait program nasional keamanan pangan Tahun 2025. 2. Pra-Advokasi dengan Walikota Serang	-	-	Telah dilaksanakan kegiatan Pra-Advokasi Lintas Sektor dan telah direkomendasikan lokus intervensi sekolah sebanyak 10 sekolah intervensi dan sebanyak 30 sekolah perluasan





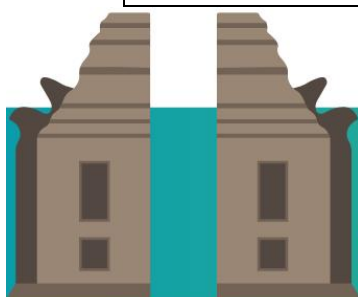
No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
				bersama Asda II dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. 3. Rapat penentuan lokus intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.			
2	Belum dilaksanakannya tahap advokasi lintas sektor	Dilaksanakan advokasi lintas sektor program nasional keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-	Pelaksanaan advokasi lintas sektor program nasional keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-
3	Belum dilaksanakannya tahap Sosialisasi keamanan pangan	Dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-	Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-
4	Belum dilaksanakannya tahap Bimbingan teknis kader keamanan pangan	Dilaksanakan bimbingan teknis kader keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-	Pelaksanaan bimbingan teknis kader keamanan pangan	Triwulan 2 2025	-
5	Belum dilaksanakannya tahap Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Dilaksanakan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan 3 2025	-	Pelaksanaan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan 3 2025	-
6	Belum dilaksanakannya tahap Pengawasan sekolah intervensi tahun 2024	Dilaksanakan pengawasan sekolah intervensi tahun 2024	Triwulan 3 2025	-	Pelaksanaan pengawasan sekolah intervensi tahun 2024	Triwulan 3 2025	-





i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target IKU	0,00	0,00	10,00
Realisasi IKU	0,00	0,00	10,00
Capaian Bulanan	0,00	0,00	100,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	0,10
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025	Pada bulan Maret telah dilaksanakan kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025, kemudian dilanjutkan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan lintas sektor terkait pada tanggal 25 Maret 2025.
Kendala bulan tersebut	-	Adanya perubahan pada struktur organisasi di Dinas Kesehatan sehingga perlu dilakukan koordinasi kembali	Terdapat perubahan tahapan dan persentase program sekolah sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan
RTL/Rekomendasi	Akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor pada bulan Februari	Akan dilakukan audiensi pra advokasi dengan walikota Serang pada bulan Maret	Akan dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi dan bimtek kader pada bulan April 2025
Timeline Penyelesaian	-	-	Maret 2025
Kondisi Awal	-	Belum dilakukan koordinasi dengan OPD terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kota Serang	Belum dilakukan kegiatan pra advokasi dengan Walikota Serang dan belum ditentukan lokus intervensi kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Rencana Aksi	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025	Melaksanakan kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025, kemudian dilanjutkan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan lintas sektor terkait pada tanggal 25 Maret 2025.
Kondisi Akhir	-	Program telah dilaksanakan sesuai rencana	Program telah dilaksanakan sesuai rencana





IKU 16. Jumlah desa pangan aman

Desa Pangan Aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ dan desa berkembang adalah desa dengan IDM $> 0,599$ dan $\leq 0,707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

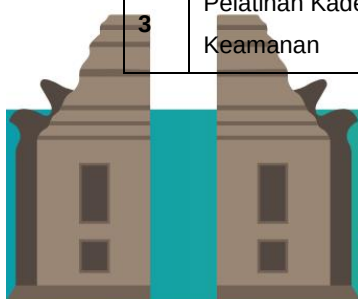
Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa yang telah :

- Memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif.
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyesuaian pada tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut rincian pembobotan sebelum dan setelah efisiensi :

Tabel Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025

Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	5%	Januari - April	1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari – April
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	20%	TW 1 dan TW II		Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	-	-
3	Pelatihan Kader Keamanan	10%	April-Juni	2	Pelatihan Kader Keamanan	25%	Maret-April atau





Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
	Pangan Desa (KKPD)				Pangan Desa (KKPD)		Juli-Agustus
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober	3	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	15%	Pre: Mei- Oktober - Post November		Fasilitasi Keamanan Pangan	-	-
6	Pengawasan Keamanan Pangan	10%	November-Desember		Pengawasan Keamanan Pangan	-	-
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember	4	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli atau November
8	Lomba Desa Pangan Aman	10%	Desember		Lomba Desa Pangan Aman	-	
9	Pengawasan	5%	Juli-Desember	5	Pengawasan	10%	Februari – November

Pada tahun 2025, jumlah kelurahan yang diintervensi program desa pangan aman terdiri dari 5 kelurahan intervensi di Kota Serang dan 5 desa pengawalan di Kabupaten Lebak yang merupakan lokus intervensi tahun 2024.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	10,00	10,00	100,00	Baik

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan hingga Triwulan I sebesar 10,00% dengan capaian 100% dengan kategori baik. Tahapan yang dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yaitu kegiatan pra-advokasi dengan Pemerintah Daerah Kota Serang.

Pada Triwulan I, Balai Besar POM di Serang telah melakukan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 di Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025.
2. Kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan





Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini bertujuan untuk menyampaikan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

3. Rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait pada tanggal 25 Maret 2025. Pada tahap ini telah ditetapkan kelurahan intervensi pada tahun 2025 sebanyak 5 kelurahan yang dibagi dalam 2 tahap pelaksanaan yaitu :
 - Intervensi Tahap 1 Tahun 2025 : Kelurahan Cipete, Kelurahan Kota baru (stunting), Kelurahan Cimuncang (stunting).
 - Intervensi Tahap 2 (menunggu pembukaan blokir anggaran) : Kelurahan Banten (stunting).

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

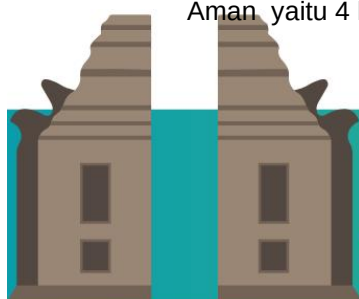
Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	10,00	10,00	100,00	Baik
TW II	70,00			
TW III	70,00			
TW IV	5 (100,00)			
2025	5 (100,00)	10,00	10,00	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan sebesar 10% dengan capaian sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan untuk Triwulan I dengan kriteria **Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian pada Triwulan 1 memiliki kriteria **Perlu Upaya Keras**. Tahapan program Desa Pangan Aman masih berjalan hingga akhir tahun 2025 dan perlu upaya untuk terus mengawal setiap tahapan agar berjalan sesuai dengan perencanaan.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan yang menjadi target pada Triwulan 1, yaitu kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor telah dilaksanakan BBPOM di Serang. Rangkaian kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor dimulai dari pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 di Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025, dilanjutkan Kegiatan Pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025 yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pra-Advokasi, dilaksanakan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait, pada tanggal 25 Maret 2025. Berdasarkan hasil rapat, telah di rekomendasikan lokus intervensi untuk program Desa Pangan Aman yaitu 4 kelurahan intervensi tahap 1 dan 1 kelurahan intervensi tahap 2.





Tahapan program Desa Pangan Aman pada triwulan I berjalan sesuai dengan perencanaan karena adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Walikota Kota Serang melalui Asisten Daerah II Kota Serang dengan mengkoordinasikan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan rapat penentuan lokus intervensi program Keamanan Pangan Nasional pada tanggal 25 Maret 2025. Dalam kegiatan rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan kota Serang serta perwakilan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kota Serang sehingga dapat dihasilkan lokus intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait, serta rekomendasi lokus intervensi sekolah, hal ini tentu akan mempermudah pelaksanaan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di tahap selanjutnya.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

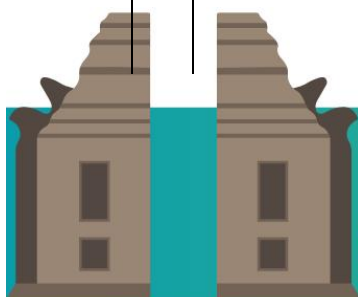
Agar program Desa Pangan Aman dapat berjalan sesuai perencanaan dan mencapai target kinerja IKU Jumlah Desa Pangan diperlukan upaya strategis dalam melaksanakan setiap tahapan. Pada triwulan II akan dilaksanakan Kegiatan Advokasi, Bimtek Kader Keamanan Pangan, serta Bimtek Komunitas. Beberapa upaya kegiatan yang direkomendasikan untuk perbaikan pada triwulan selanjutnya antara lain :

1. Monitoring kegiatan dilaksanakan setiap bulan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
3. Membuat surat permohonan penetapan lokus intervensi yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh Walikota Serang.

Meningkatkan koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Desa untuk mendorong tim Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) bergerak aktif sesuai rencan kegiatan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW 1	Keterangan
1.	Jumlah desa pangan aman	QDB.002.052	Infokom	Desa Pangan Aman	A. Advokasi Lintas Sektor	1 kota/kabupaten (8.440.000)	-	Dilaksanakan TW II
					C. Pelatihan Kader Keamanan Pangan (Metode A)	5 desa/kelurahan (8.650.000)	-	Dilaksanakan TW II
					D. Bimtek Komunitas Desa	100 komunitas (11.000.000)	-	Dilaksanakan di TW II
					G. Monitoring	1 kota/kabup	-	Dilaksanakan di TW IV





NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW 1	Keterangan
					Dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa	aten (8.563.000)		
					I. Pengawasan Kegiatan Desa Pangan Aman di Provinsi Banten (25 Desa)	5 Desa (1.800.000)	-	Dilaksanakan di TW IV
					J.Lomba	1 Desa (4.260.000)		Dilaksanakan di TW IV

Kegiatan Desa Pangan pada tahun 2025 di Kota Serang ini mempunyai target 5 kelurahan intervensi yang terdiri dari 3 kelurahan lokus stunting dan 2 kelurahan non stunting. Sehubungan dengan efisiensi anggaran, Program Desa Pangan Aman dengan tagging anggaran QDB.002 termasuk yang diblokir sebesar 93,35 % sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan, antara lain :

1. Pelaksanaan intervensi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu intervensi tahap 1 dan intervensi tahap 2. Tahap 1 intervensi dilakukan untuk 4 kelurahan yaitu 2 kelurahan stunting dan 2 kelurahan non-stunting. Tahap 2 dilaksanakan untuk 1 kelurahan stunting dilaksanakan apabila terdapat pembukaan blokir anggaran.
2. Terdapat penyesuaian tahapan sesuai sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025. Terdapat beberapa tahapan yang diiadakan yaitu pemberian tes kit dan gimmick, fasilitasi, pengawasan keamanan pangan, dan lomba desa pangan aman.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00	170.000	Rp 170.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja IKU Jumlah Desa Pangan Aman adalah KRO QDB.002. Indikator tingkat efisiensi yang diperoleh adalah 0.00 dengan kategori efisien.





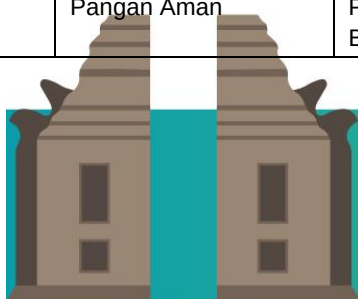
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 IKU Desa Pangan Aman yaitu 30 desa/kelurahan untuk itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target serta akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Adanya perubahan tahapan dan persentase program Desa Pangan Aman sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025 memerlukan penyesuaian target serta bentuk kegiatan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terkait perubahan ini akan dilakukan pengajuan perubahan target bulanan pelaksanaan program Desa Pangan Aman ke Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM pada triwulan II tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1.	Belum ditetapkannya 5 Kelurahan/Desa sebagai lokus intervensi Desa Pangan Aman di Kota Serang	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2025	TW I 2025	1. Koordinasi dengan OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2025. 2. Kegiatan pra-Advokasi dengan Walikota Serang dan rapat penentuan lokus intervensi yang melibatkan Asisten Daerah II Kota Serang dan OPD terkait telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025	-	-	Telah ditetapkan 5 kelurahan sebagai lokus intervensi program Desa Pangan Aman di Kota Serang yaitu Kelurahan Cipete, Kelurahan Panggungjati, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Cimuncang untuk intervensi tahap I, serta kelurahan Banten untuk intervensi Tahap II.
2.	Belum dilaksanakannya tahapan Advokasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, dan Bimtek Komunitas pada program Desa Pangan Aman	Direncanakan akan dilaksanakan tahapan Advokasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, dan Bimtek	TW II 2025	-	Akan dilaksanakan tahapan Advokasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, dan Bimtek Komunitas	Triwulan II tahun 2025	Belum dilaksanakan akan tahapan Advokasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, dan Bimtek Komunitas pada program Desa Pangan Aman

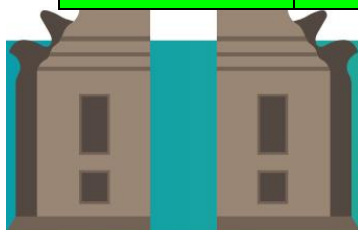




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		Komunitas pada program Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2025 untuk intervensi tahap I			pada program Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2025		
3.	Adanya perubahan tahapan dan persentase program sekolah sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025,	Pengajuan perubahan target bulanan pelaksanaan program Desa Pangan Aman ke Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM	TW II 2025	-	Akan dilakukan pengajuan perubahan target program Desa Pangan Aman ke Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM pada bulan April 2025	Triwulan II tahun 2025	Belum terdapat perubahan target tahapan program Desa Pangan Aman
4	Belum dilaksanakannya pelatihan kader keamanan pangan Tahun 2025	Melaksanakan pelatihan kader keamanan pangan	TW II 2025		Melaksanakan pelatihan kader keamanan pangan	TW II 2025	-
5	Belum dilaksanakannya Bimtek Komunitas Tahun 2025	Melaksanakan Bimtek Komunitas	TW II 2025		Melaksanakan Bimtek Komunitas	TW II 2025	
6	Belum Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	TW IV 2025		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	TW IV 2025	
7	Belum Melaksanakan Pengawasan Tahun 2025	Melaksanakan Pengawasan	TW III 2025		Melaksanakan Pengawasan	TW III 2025	

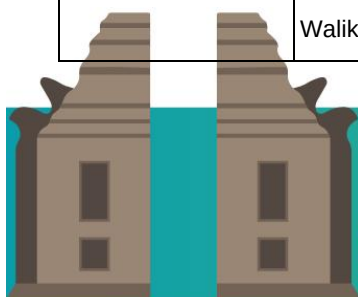
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	0,00	0,00	
Realisasi RO	0,00	0,00	





	Jan	Feb	Mar
Target IKU			10,00
Realisasi IKU	0,00	0,00	10,00
Capaian Bulanan	0,00	0,00	100,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	10,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025	Pada bulan Maret telah dilaksanakan kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025, kemudian dilanjutkan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan lintas sektor terkait pada tanggal 25 Maret 2025.
Kendala bulan tersebut	-	Adanya rotasi pegawai di dinas kesehatan sehingga perlu membangun kembali hubungan dengan Dinas Kesehatan Kota Serang	Terdapat perubahan tahapan dan persentase program Desa Pangan Aman sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025
RTL/Rekomendasi	Akan dilakukan koordinasi dengan OPD Pemerintahan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan di bulan Februari	Akan dilaksanakan kegiatan audiensi dengan Walikota Serang pada bulan Maret	Akan dilaksanakan kegiatan advokasi dan Bimtek kader pada bulan April 2024
Timeline Penyelesaian	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
Kondisi Awal	Belum dilakukan koordinasi dengan OPD Pemerintahan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan	Belum dilakukan koordinasi dengan OPD terkait Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kota Serang	Belum dilakukan kegiatan pra advokasi dengan Walikota Serang dan belum ditentukan lokus intervensi kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Rencana Aksi	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang sebelum kegiatan audiensi dengan Walikota Serang	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Serang sebelum kegiatan audiensi dengan Walikota Serang	Telah dilaksanakan kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025, kemudian dilanjutkan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan lintas sektor terkait pada tanggal 25 Maret 2025.





	Jan	Feb	Mar
Kondisi Akhir	Belum dilakukan koordinasi dengan OPD Pemerintahan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan	Program telah dilaksanakan sesuai rencana	Program telah dilaksanakan sesuai rencana

IKU 17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah pasar yang memiliki komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar serta para pemangku kepentingan dalam mengendalikan penggunaan bahan berbahaya yang biasa digunakan pada pangan, maupun pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. PPABK merupakan transformasi dari program sebelumnya yaitu Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini hadir sebagai bentuk penguatan terhadap upaya pengendalian bahan berbahaya pada pangan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan komunitas pasar sebagai garda terdepan.

PPABK merupakan program pemberdayaan masyarakat khususnya komunitas pasar yang terdiri dari pedagang, pengelola, pengunjung, dan asosiasi pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dilakukan dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Dari sisi supply, pedagang didorong menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Baik untuk menjamin keamanan pangan. Dari sisi demand, dilakukan edukasi kepada pengunjung pasar melalui kegiatan KIE agar lebih cerdas dalam memilih pangan.

Pasar yang dilakukan intervensi diusulkan oleh OPD terkait sebagai tempat pelaksanaan program PPABK. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau pasar di daerah wisata. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian pada tahapan program Pasar Aman Berbasis Komunitas. Berdasarkan Surat dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut tahapan dan perhitungan persentase PPABK Tahun 2025 :





Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Survei Pasar	5%	Januari-Mei	1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar	20%	Januari-April				
3	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	15%	April-Mei	2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Penyuluhan Pedagang Pasar	10%	April-Mei				
5	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	10%	April-Mei	3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus	4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei - Juli
7	Pengawalan	10%	Februari- Oktober	5	Pengawalan	10%	Februari - Juli

Pada tahun 2025, jumlah pasar yang diintervensi PPABK adalah 1 pasar di Kota Serang, serta 1 pasar pengawalan di Kabupaten Lebak yang merupakan lokus intervensi tahun 2024.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan triwulan yang bersangkutan

Tabel Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2025

Indikator Kerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10,00	10,00	100,00	Baik

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan hingga TW I sebesar 10% dengan capaian **100%** dengan kategori **“Baik”** dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada TW I ini BBPOM di Serang telah melaksanakan kegiatan Pra Advokasi dalam bentuk Koordinasi dan rapat penentuan lokus intervensi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:





1. Koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang pada 5 Februari tahun 2025, terkait pemaparan awal program PPABK dan penyampaian kriteria pasar intervensi;
2. Kegiatan pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini bertujuan untuk menyampaikan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait.
3. Rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait pada tanggal 25 Maret 2025, dan ditetapkan lokus intervensi program PPABK Tahun 2025 adalah Pasar kepandean. Pasar Kepandean dipilih dikarenakan Pasar Kepandean merupakan pasar rakyat yang belum pernah dilakukan intervensi sebelumnya oleh BBPOM di Serang, sehingga dinilai tepat untuk penerapan program dari awal secara komprehensif. Selain itu, Pasar Kepandean baru saja dicanangkan sebagai Pasar Sehat tematik oleh Pemerintah Kota Serang, yang akan dikembangkan tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif dan Perdagangan.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	10,00	10,00	100,00	Baik
TW II	70,00			
TW III	100,00			
TW IV	1 (100,00)			
2025	1 (100,00)	10,00	10,00	▼ Perlu Upaya Keras

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa capaian Program PPABK TW I Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target TW I Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kategori **baik**. Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi capaian di TW I masih dalam kategori **“Perlu upaya keras”**. Realisasi ini masih sesuai dengan perencanaan di Tahun 2025 yang menargetkan seluruh tahapan program PPABK baru akan selesai di TW III Tahun 2025. dan perlu upaya untuk terus mengawal setiap tahapan agar berjalan sesuai dengan perencanaan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan yang menjadi target pada Triwulan I adalah kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor telah dilaksanakan BBPOM di Serang. Rangkaian kegiatan Pra-Advokasi dengan Lintas Sektor dimulai dari pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang terkait Program PPABK 2025 di Kota Serang pada tanggal 25





Februari 2025, dilanjutkan Kegiatan Pra-Advokasi melalui kegiatan Audiensi dengan Walikota Serang pada tanggal 18 Maret 2025 yang juga dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pra-Advokasi, dilaksanakan rapat penentuan lokus intervensi bersama Asda II Kota Serang dan OPD terkait, yaitu Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dan direkomendasikan lokus intervensi Program PPABK Tahun 2025 di Kota Serang adalah Pasar Kepandean.

Realisasi tahapan PPABK yang dilaksanakan di TW I Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan tersebut dikarenakan Koordinasi yang baik antara BBPOM di Serang dengan Dinas terkait serta dukungan Pemerintah Daerah Kota Serang.

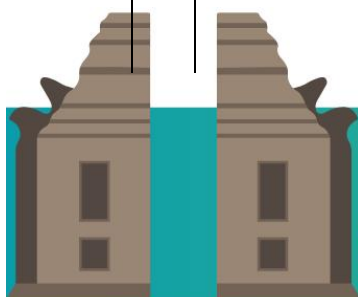
d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Agar prigram PPABK berjalan sesuai perencanaan dan mencapai target kinerja IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, diperlukan upaya startegis dalam melaksanakan setiap tahapan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
2. Membuat surat permohonan penetapan lokus intervensi program Nasional Keamanan Pangan yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh Walikota Serang.
3. Meningkatkan keterlibatan Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dan UPT Pasar pada pelaksanaan program PPABK.
4. Mendorong keterlibatan aktif komunitas pasar dalam pelaksanaan program PPABK.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PPABK.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	QDB.003	Infokom	Pasar pangan Aman	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	1 kota/kabupaten (25%)	10%	Pelaksanaan Pra Advokasi(10%) dan Advokasi (15%) di Kota Serang. Pra Advokasi direncanakan di TW I 2025 Advokasi direncanakan di Bulan April
					Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	1 Pasar (25%) (7.310.000)	-	Pelaksanaan Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar diPasar kepandean dengan peserta 10 orang pedagang,





NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
								2orang dinas, 4 orang pengelola pasar, 4orang pengelola pasar lain diluar pasar intervensi) direncanakan dibulan Mei
					Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	1 Pasar (20%) (640.000)	-	Sosialisasi Kader/pengelola pasar kepada komunita pasar (juni)
					Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	1 pasar (20%) (1.390.000)	-	Direncanakan di Bulan Juli di pasar Kepandean (uji Cekklik)
					Pengawasan	1 Pasar (10%) (1.795.000)	-	Direncanakan di bulan Juli di Pasar Citeras
					Koordinasi pasar	1 Pasar (510.000)	-	Koordinasi ke pasar terkait lomba dan program lainnya

Pada TW I Tahun 2025, pelaksanaan program yang telah dilakukan adalah berupa Pra Advokasi meliputi koordinasi , Audiensi dan rapat penentuan Lokus. Tahapan ini dilakukan untuk membangun dukungan dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendukung pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu, salah satunya adalah PPABK. Dalam tahapan ini juga ditetapkan lokus intervensi pasar di tahun 2025 sebagai permulaan kegiatan Advokasi dimana lokus intervensi tersebut akan menandatangani komitmen pelaksanaan program PPABK pada tahun 2025. Pelaksanaan program telah sesuai dengan target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut dikarenakan koordinasi yang baik BBPOM di Serang dengan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam mendukung pelaksanaan program nasional keamanan terpadu.

Sehubungan dengan efisiensi anggaran, Program PPABK dengan tanggung anggaran QDB.003 termasuk yang diblokir sebesar 89,93% sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan, yaitu dengan Penyesuaian jenis dan bentuk tahapan PPABK sesuai surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025. Penyesuaian tahapan program PPABK pada tahun 2025 antara lain :

1. Penyiapan tahapan survey pasar yang sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam penetapan lokus intervensi. Lokus intervensi pada tahun 2025 sesuai penunjukan OPD terkait dengan mempertimbangkan kriteria pasar intervensi sesuai KAK program PPABK.





2. Menyederhanakan tahapan seperti bimbingan teknis bagi pengelola pasar yang kini dilaksanakan bersamaan dengan penyuluhan kepada pedagang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
3. Tahapan Kampanye Keamanan Pangan yang dilakukan langsung dipasar disederhanakan menjadi Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar yaitu sosialisasi melalui konten keamanan pangan yang dilakukan secara daring atau melalui pengelola pasar.
4. Peniadaan pemberian tes kit pengujian dan tahapan pengujian bahan berbahaya pada pangan, tahapan ini diganti dengan pengujian *CekKlik* terhadap produk pangan olahan yang dijual di pasar sebagai bentuk pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00	0	Rp	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja IKU Jumlah Desa Pangan Aman adalah KRO QDB.003. Indikator tingkat efisiensi yang diperoleh adalah kategori belum terukur dikarenakan pelaksanaan pra-advokasi dan advokasi bersamaan dengan program nasional keamanan pangan terpadu lainnya menggunakan sumber anggaran dari Program Desa Pangan Aman.

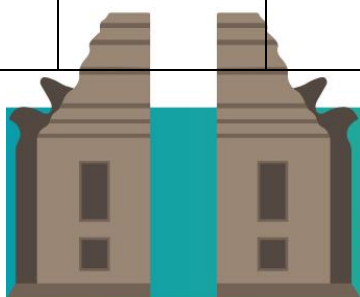
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 IKU Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu 5 (1 Pasar Intervensi tahun 2024 dan 4 Pasar Pengawasan dari intervensi Tahun 2020-2023). Pada tahun 2025 target pasar adalah 1 pasar intervensi tahun 2025 dan 1 pasar pengawasan yaitu pasar intervensi tahun 2024.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Belum di tetapkannya lokus intervensi Program PPABK di tahun 2025	Koordinasi dan audiensi dengan OPD terkait untuk menetapkan lokus intervensi sesuai kriteria pada KAK PPABK	TW I 2025	Koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2025. dilanjutkan dengan rapat penentuan lokus intervensi yang melibatkan Asisten	-	TW I 2025	Lokus Intervensi Pasar Pangan Aman berbasis komunitas tahun 2025 adalah pasar kepandean





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
				Daerah II Kota Serang dan OPD terkait telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025			
2	Belum dilaksanakannya tahapan Advokasi Lintas Sektor kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pelaksanaan Program Advokasi Lintas Sektor, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	TW II 2025		Akan dilaksanakan Advokasi Lintas Sektor Pada Bulan April bersamaan dengan Program nasional lainnya., kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar intervensipada bulan April dan Juni 2025	TW II 2025	Telah di tandatangani Lembar komitmen pelaksanaan Program pasar pangan aman berbasis komunitas oleh ASDA II Kota Serang dan Pengelola Pasar Kepandean
3	Belum dilaksanakannya Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi dan Pengawalan pasar Intervensi 2024	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi dan Pengawalan pasar Intervensi 2024	TW III 2025		Akan dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi dan Pengawalan pasar Intervensi 2024	TW III 2025	
4	Diperlukan kegiatan refreshment dalam bentuk koordinasi terkait pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), sekaligus membahas persiapan Lomba Pasar sebagai bagian dari upaya penguatan program.	Koordinasi dengan Pasar meliputi kegiatan PPABK/Lomba Pasar	TW IV 2025		Akan dilakukan Koordinasi dengan Pasar meliputi kegiatan PPABK/Lomba Pasar	TW IV 2025	Diperlukan kegiatan refreshment dalam bentuk koordinasi terkait pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), sekaligus membahas persiapan Lomba Pasar sebagai bagian dari upaya penguatan program.

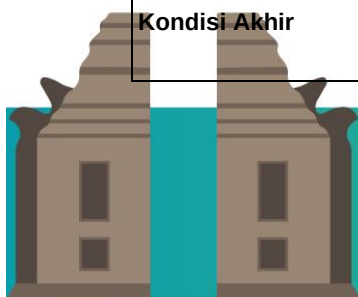
i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	0,00	0,00	0,00





	Jan	Feb	Mar
Realisasi RO	0,00	0,00	0,00
Target IKU			10,00
Realisasi IKU	0,00	0,00	10,00
Capaian Bulanan	0,00	0,00	100,00
Capaian Tahunan	0,00	0,00	10,00
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang pada tanggal 27 Februari 2025	Telah dilakukan Rapat Penetapan Lokus dengan Asda II Kota Serang dan dinas terkait pada tanggal 25 Maret 2025 sebagai pra advokasi (10%)
Kendala bulan tersebut	-	Tahapan Survey di Program PPABK pada Tahun 2025 dihilangkan sehingga perlu ditetapkan langsung pasar yang akan diintervensi.	Terdapat perubahan tahapan dan persentase program sekolah sesuai surat Direktur PMPUPU Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025 tidak hanya pada tahapan survey saja seperti informasi awal, sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan.
RTL/Rekomendasi	Diperlukan koordinasi dengan OPD Pemerintahan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan untuk menetapkan lokus intervensi dan sounding adanya program pasar pangan aman berbasis komunitas	Diperlukan kegiatan audiensi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang terkait penentuan dan diskusi penetapan lokus intervensi karena tahapan survey yang di hilangkan serta sounding awal kriteria pasar yang akan diintervensi.	Diperlukan kegiatan rapat penetapan lokus serta diskusi kepada lintas sektor dan pemerintah daerah kota Serang terkait komitmen dalam menjalankan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Hasil Rapat ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan advokasi di bulan April 2025
Timeline Penyelesaian	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Kondisi Awal	-	Rencana Kegiatan belum dilaksanakan	Rencana Kegiatan belum dilaksanakan
Rencana Aksi	Akan dilakukan pembuatan draft surat untuk dasar koordinasi dengan OPD Pemerintahan Kota Serang terkait Program Nasional Keamanan Pangan di bulan Februari	Akan dilaksanakan kegiatan audiensi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang membahas kriteria pasar intervensi dan program nasional pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan dilaksanakan di Kota Serang pada tahun 2025	Akan dilaksanakan kegiatan audiensi dengan Walikota Serang pada bulan Maret membahas penetapan lokus intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025
Kondisi Akhir	Draft Surat Kriteria pasar intervensi dan pelaksanaan program nasional Pasar	Program telah dilaksanakan sesuai rencana kriteria pasar dan sounding program pasar pangan	Program telah dilaksanakan sesuai rencana. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota





	Jan	Feb	Mar
	pangan naman berbasis komunitas tahun 2025 sebagai bahan koordinasi bulan Februari 2025	aman berbasis komunitas telah diinformasikan ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang	Serang yang dipimpin oleh Asisten Daerah II Kota Serang ditetapkan pasar kepandean sebagai pasar yang akan diintervensi di tahun 2025





Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan merupakan indikaor prioritas bidang pada Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Cara perhitungan pengukuran indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yaitu:

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

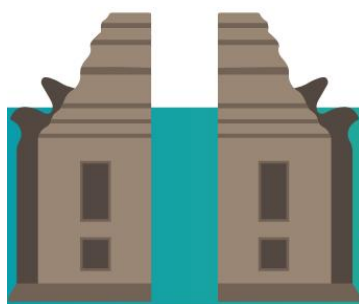
$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIP A

Yang dimaksud dengan UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK, UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3), dan atau UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Perhitungan realisasi kinerja bulanan merupakan rata-rata progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut dan realisasi kinerja tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator.





- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20,00	13,33	66,65	Cukup

Persentase tahapan *progress* indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan I sebesar 13,33% dengan capaian sebesar 66,65 dengan kategori **Cukup**.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

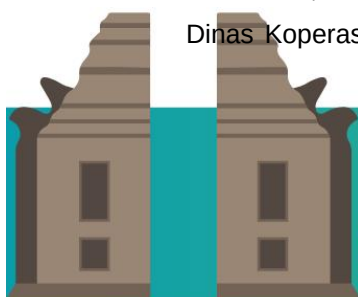
Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	20,00	13,33	66,65	Cukup
TW II	40,00			
TW III	80,00			
TW IV	92,00			
2025	92,00	13,33	14,49	▼ Perlu Upaya Keras

Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 belum memenuhi target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Perbandingan realisasi akan dilakukan pada bulan desember karena tahapan pendampingan masih berproses dan realisasi akan dihitung bila seluruh tahapan pendampingan selesai dilaksanakan.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh capaian progress tahapan sebesar 66,65%, hal ini disebabkan oleh perhitungan progress hanya dihitung berdasarkan capaian pendampingan UMK Pangan Olahan. Sedangkan progress pendampingan UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik belum dilakukan perhitungan sebab sampai dengan akhir triwulan I belum terdapat UMKM OBA dan Kosmetik yang mendaftar program pendampingan di Balai Besar POM di Serang.

Upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang pada triwulan I dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain, dilakukan kegiatan Bedah Peraturan Online dengan tema sosialisasi terkait Pendampingan UMKM pada 22 Januari 2025. Pada kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Serang mengundang lintas sektor terkait yang melakukan pembinaan UMKM antara lain, Dinas Perikanan Provinsi Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Ketahanan





Pangan Provinsi Banten, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Selain itu UMKM binaan lintas sektor tersebut juga turut hadir sebagai peserta. Peserta yang berasal dari UMKM yang berminat untuk dilakukan pendampingan dipersilakan mendaftar untuk selanjutnya di *screening* sesuai persyaratan target UMKM yang ditetapkan pada Rancangan Manual IKU 2025-2029.

Berdasarkan data yang masuk pada dokumen pendaftaran program pendampingan terdapat 1 pelaku usaha kosmetik dengan jenis sediaan cairan dengan klaim kegunaan sebagai beauty water. Namun setelah dilakukan konfirmasi kepada pelaku usaha diperoleh informasi bahwa, komposisi produk hanya berupa air dengan spesifikasi air minum (tidak mengandung bahan baku kosmetik lainnya), dokumen NIB yang dimiliki belum tercantum KBLI 20232, dan lokasi produksi di dapur rumah tinggal, berdasarkan data-data tersebut, calon UMKM tersebut belum memenuhi kriteria sebagai UMKM yang dapat didampingi sebab dengan bahan baku air tunggal belum memenuhi kriteria sebagai kosmetika, pelaku usaha belum dapat mempersiapkan rencana lokasi produksi yang sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, pelaku usaha belum menambahkan KBLI industri kosmetik. Sehingga belum dilakukan penetapan target UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun 2025.

Selain itu untuk UMKM OBA, belum ada pelaku usaha OBA yang mendaftar sebagai UMKM yang akan didampingi. Sehingga belum dilakukan penetapan UMK OBA yang didampingi.

Sedangkan untuk UMK Pangan olahan telah dilakukan proses pendampingan yang diawali dengan KIE/ Sosialisasi Keamanan Pangan pada 20 Maret 2025 dengan jumlah UMK sebanyak 15 UMK dari target UMK yang akan didampingi. Sehingga pada 27 Maret 2025 ditetapkan 15 UMK Pangan Olahan yang didampingi penerapan CPPOB pada tahun 2025.

Sehingga perhitungan capaian progress indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB diperoleh berdasarkan perhitungan capaian pendampingan UMK Pangan Olahan yaitu KIE sebesar 5% dan Penetapan UMK Pangan Olahan sebesar 8,33% total 13,33%.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Sebagai upaya rekomendasi perbaikan kinerja, dilakukan audiensi kepada pemerintah daerah untuk memberikan masukan UMK Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik yang potensial untuk didampingi dalam penerapan cara produksi yang baik, serta publikasi terkait perpanjangan pendaftaran pendampingan UMKM, sehingga target UMK yang didampingi pada tahun 2025 dapat tercapai.

Selain itu, untuk UMK Pangan Olahan dilakukan penetapan jadwal pelaksanaan tahapan proses pendampingan pada triwulan II yaitu Bimtek CPPOB yang direncanakan pada bulan April dan pendampingan penyusunan dokumen CPPOB pada bulan Mei dan Juni.





- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	QDG	Pem - Sertifikasi	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	A	Pendampingan UMKM Pangan Olahan	18 UMKM	15 Hingga TW 1 telah dilakukan kegiatan : Penjaringan UMK, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Target (15 dari 18)
				B	Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional	2 UMKM	Hingga TW 1 belum ada sarana UMKM yang Kosmetik dan OBA yang memenuhi kriteria pendampingan UMKM

Belum tercapainya progress tahapan pendampingan pada indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB disebabkan antara lain efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025 yang berdampak pada alokasi anggaran pada KRO QDG.001.052 semula alokasi anggaran Rp75.382.000,00 menjadi Rp10.480.000,00 yang berdampak pada berubahnya mekanisme pencapaian tahapan proses yang seharusnya dilakukan secara luring namun dilaksanakan secara daring.

Penjaringan UMKM yang sedianya dilaksanakan secara luring dengan mengundang lintas sektor dan pelaku usaha diubah menjadi secara daring melalui kegiatan Bedah Peraturan Online (Baperan). Kegiatan penjaringan ini kurang efektif sebab pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam mengakses aplikasi rapat secara daring (*zoom meeting*) baik karena keterbatasan kemampuan menggunakan aplikasi maupun keterbatasan kuota internet karena tidak adanya pembiayaan penggantian biaya akses internet.

Untuk tahapan pendampingan UMK Pangan olahan berupa KIE/ Sosialisasi juga dilakukan secara daring melalui aplikasi rapat secara daring (*zoom meeting*), namun lagi-lagi juga berjalan kurang efektif dengan keikutsertaan peserta yang rendah. Yaitu hanya 5 UMK dari 15 UMK yang terjaring pada saat penjaringan awal. Sehingga, dilakukan upaya berupa pembuatan grup pendampingan untuk memfasilitasi pembelajaran secara *blended learning* berupa pembuatan *google drive* untuk pembelajaran mandiri yang berisi rekaman video KIE/ Sosialisasi dan membuka ruang diskusi dengan fasilitator pendampingan UMK. Melalui ruang diskusi tersebut, pelaku usaha dapat menanyakan apabila terdapat materi yang belum dipahami. Setelah pelaku usaha telah mempelajari materi yang diberikan, dilakukan evaluasi berupa *post test* dengan memanfaatkan *google form*.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	
	T	R	%	T	R	%					
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20,00	13,33	66,65	2.440.000	Rp	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur





Pada triwulan I tahun 2025 pelaksanaan tahapan progress yaitu penjangkaran dan sosialisasi/ KIE keamanan pangan tidak menggunakan alokasi anggaran, sebab masuk dalam anggaran yang dilakukan efisiensi. Pelaksanaan tahapan dilakukan secara daring tanpa pembiayaan, sehingga masuk pada kategori belum diukur.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pada tahun 2024 tercapai dengan realisasi 100% dan pada tahun 2025 indikator ini ditetapkan kembali menjadi indikator kinerja dengan target 92%, dengan perubahan pada definisi operasional, kriteria, dan tahapan proses pendampingan.

Penetapan target progress pendampingan tahun 2025 telah memanfaatkan data laporan kinerja tahun 2024, namun dikarenakan adanya perubahan kebijakan dengan terbitnya Inpres 1 tahun 2025 yang berdampak pada efisiensi anggaran, pada triwulan I, realisasi tahapan progress tidak tercapai, sehingga diperlukan penyesuaian target tahapan progress.

Perubahan target tahapan progress bulanan triwulan II-IV, diusulkan menyesuaikan dengan tahapan proses pendampingan UMK Pangan Olahan karena berdasarkan data triwulan I belum ada UMK OBA dan Kosmetik yang mendaftar program pendampingan. Hal ini dikuatkan dengan data pelanggan yang datang berkonsultasi terkait perizinan belum ada pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai calon UMK target pendampingan. Sehingga dilakukan usulan perubahan target progress bulanan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sesuai tabel berikut:

Bulan	Semula (%)	Menjadi (%)	Justifikasi
April	20	35	Penyesuaian persentase progress tahapan pendampingan sesuai dengan tahapan pendampingan pangan olahan, sebab sampai dengan tw I belum terdapat UMKM OBA dan Kosmetik yang sesuai dengan kriteria sebagai target pendampingan
Mei	40	40	
Juni	40	45	
Juli	60	55	
Agustus	60	60	
September	80	65	
Oktober	80	75	
November	80	80	
Desember	92	92	





h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

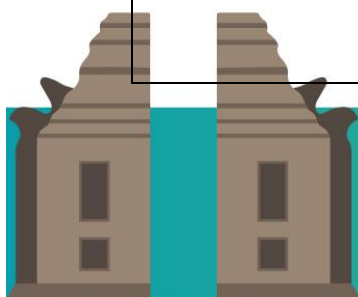
Dengan penyesuaian target tahapan progress dan pengawalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV, target indikator kinerja tahunan akan tercapai.

Tabel 3.49 Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
NIHIL							

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	0,00	0,00	0,00
Realisasi RO	0,00	0,00	0,00
Target IKU	0,00	0,00	20,00
Realisasi IKU	0,00	0,00	13,33
Capaian Bulanan	0,00	0,00	66,65
Capaian Tahunan	0,00	0,00	14,49
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Awal Proses Pendampingan 2024, dilakukan publikasi pembukaan pendaftaran pendampingan UMKM	Data pelaku usaha yang telah mendaftar, sedang dalam proses verifikasi pemenuhan persyaratan pendampingan UMKM	1. Telah dilakukan penetapan UMK Pangan Olahan yang didampingi (15 sarana dari 18 sarana) 2. Telah dilakukan sosialisasi UMK Pangan Olahan 3. Belum terdapat UMK OBA dan Kosmetik yang ditetapkan sebagai target pendampingan. Dari pelaku usaha yang berkonsultasi belum memenuhi kriteria untuk didampingi
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala	Data pelaku usaha belum lengkap, sehingga belum dapat ditetapkan kesimpulan verifikasi pemenuhan persyaratan pendampingan	1. Belum terdapat UMK OBA dan Kosmetik yang ditetapkan sebagai target pendampingan. Dari pelaku usaha yang berkonsultasi belum memenuhi kriteria untuk didampingi 2. Masih dilakukan penjangkaran terhadap 3 UMK Pangan olahan calon target





	Jan	Feb	Mar
			pendampingan tahun 2025
RTL/Rekomendasi	Verifikasi data pelaku usaha yang melakukan pendaftaran pada link yg telah diposting pada medsos dan publikasi melalui kegiatan Bedah Peraturan Online terkait Pendampingan UMKM	Mengkomunikasikan kepada pelaku usaha pendaftar untuk melengkapi data persyaratan pendampingan	1. Publikasi melalui medsos untuk penjangkaran UMK PO OBA dan Kosmetik 2. Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai DO
Timeline Penyelesaian	Februari 2025	Maret 2025	April 2025
Kondisi Awal	Telah dilakukan penjangkaran dan penyebaran link pendaftaran program pendampingan UMKM oleh BBPOM di Serang	Data pelaku usaha belum lengkap untuk diriviu kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan pada manual IKU	Telah ditetapkan target UMK Pangan Olahan yang didampingi sebanyak 15 UMK dari 18 UMK target
Rencana Aksi	Mengkomunikasikan kepada pelaku usaha pendaftar untuk melengkapi data persyaratan pendampingan melalui pesan whatsapp	Melakukan riviu kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan pada manual IKU terhadap data yang telah dilengkapi oleh pelaku usaha	1. Publikasi ulang melalui Instagram Balai Besar POM di Serang terkait perpanjangan pendaftaran pendampingan UMKM OBA, Kos dan Pangan Olahan sd 31 Mei 2025 2. Melanjutkan tahapan proses pendampingan UMK Pangan Olahan
Kondisi Akhir	Data pelaku usaha terverifikasi dan sebagai usulan penetapan target pendampingan UMKM	Rekap data usulan pelaku usaha untuk diajukan penetapan oleh Kepala UPT	Target pendampingan UMK Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik terpenuhi dan proses pendampingan UMK Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik dapat dilanjutkan sesuai dengan perencanaan





Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10,00	9,38	93,80	Baik





Pada triwulan I tahun 2025 target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada BBPOM di Serang sebesar 10,00% dengan realisasi sebesar 9,38% (capaian sebesar 93,80 %) dengan kategori **Baik**.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	10,00	9,38	93,80	Baik
TW II	70,00			
TW III	72,00			
TW IV	75,00			
2025	75,00	9,38	12,50	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada BBPOM di Serang TW I belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Akan dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan agar target akhir tahun 2025 bisa dicapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan adalah kendala teknis dan taktis terkait keterbatasan kewenangan dalam hal penangkapan dan penahanan. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan, pemberkasan, pelimpahan berkas perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti menjadi terkendala. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Balai Besar POM di Serang melakukan peningkatan sinergitas dengan POLDA Banten melalui penandatanganan Nota Kesepahaman guna memperoleh dukungan bantuan penangkapan dan penahanan. Pada tahun 2024 PPNS BBPOM di Serang telah melaksanakan serangkaian Upaya Paksa Bersama dengan Korwas PPNS POLDA Banten berupa Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Banten. Selain itu koordinasi dalam rangka peningkatan sinergitas dengan *Integrated Criminal Justice System* secara intersif dan berkesinambungan juga berdampak terhadap peningkatan kinerja penindakan dan mempercepat proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Serang.

Pada triwulan I 2025 PPNS BBPOM di Serang juga menghadapi gugatan Praperadilan dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang sebagai Termohon Praperadilan. Pada amar putusan Hakim Tunggal PN Serang menyebutkan bahwa permohonan Pemohon terkait Penggeledahan, Penyitaan, dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Serang ditolak untuk seluruhnya.

Selain itu, guna menjamin kepastian hukum dan percepatan penanganan perkara *carry over*, PPNS BBPOM di Serang telah melakukan gelar perkara terkendala bersama Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI.





Perubahan definisi operasional dan cara perhitungan indeks keberhasilan penindakan juga berpengaruh terhadap capaian. Saat ini, seluruh perkara *carry over* ditetapkan sebagai target dalam perhitungan indeks, dikecualikan apabila perkara *carry over* telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

BBPOM di Serang mengupayakan untuk dilakukan perbaikan kedepannya dengan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja melalui:

1. Gelar Perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Banten, serta bimbingan teknis oleh Kedeputan Bidang Penindakan untuk mempercepat proses penyidikan perkara baik perkara tahun berjalan maupun perkara *carry over*.
2. Mengikuti pelatihan penyidikan yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polda Banten, Polda Metro Jaya, akademisi, maupun Balai lain dilingkungan Badan POM RI.
3. Konsultasi secara rutin serta ekspose dengan Jaksa Peneliti Berkas perkara dan/atau Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten.
4. Memberlakukan wajib lapor kepada tersangka yang tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan untuk menghindari tersangka melarikan diri.
5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* baik pada unsur Kejaksaan, Pengadilan maupun Kepolisian sebagai upaya mengatasi keterbatasan kewewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan upaya paksa berupa bantuan membawa, penangkapan dan/atau penahanan.
6. Melakukan Upaya Paksa penangkapan dan penahanan pada perkara yang memenuhi persyaratan formil maupun materiil dalam rangka percepatan proses pemberkasan.
7. Memperkuat Jejaring intelijen dan pertukaran informasi adanya pelanggaran maupun tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan lintas sektor terkait seperti Badan Narkotika Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Intelijen Negara (BIN) dan/atau BINDA, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, ASPERINDO, dll.





- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	QCD.001.051	Penindakan	Operasi Intelijen	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	28 Trip	11 Trip	Sudah dilaksanakan dengan hasil informasi A1 yang telah di TL melalui ops penindakan sebanyak 1 kasus
	QCD.001.052		Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	10 KL	6 KL	Gelar yang dilakukan guna percepatan pemberkasan perkara carry over, gelar perkara terkendala, gelar perkara persiapan praperadilan, dan gelar perkara naik sidik dan penetapan TSK
	QCD.001.054		Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	2 PKR	1 PKR	Telah dilaksanakan OPS Penindakan LK 01-25
	QCD.001.055		Pemberkasan	B	Penangkapan dan Penahanan	2 PKR	0 PKR	Belum dilaksanakan
				A	Pemberkasan	2 PKR	0 PKR	Pemberkasan dilakukan untuk perkara carry over
				B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2 PKR	0 PKR	Pemberkasan dilakukan untuk perkara carry over
				D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	2 PKR	0 PKR	Belum dilaksanakan
	QCD.001.056		Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatritik)	E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	2 PKR	0 PKR	Belum dilaksanakan
				A	Perencanaan dan Evaluasi Wasmatritik	4 KL	0	Belum dilaksanakan
B		Pelaksanaan Wasmatritik		20 TR	0	Belum dilaksanakan		

Keberhasilan penindakan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sinergitas dan dukungan lintas sektor terkait utamanya yang tergabung dalam *Integrated Criminal Justice System* (I-CJS) sehingga koordinasi dan komunikasi harus terus terjalin dengan baik, antara lain melalui Nota Kesepahaman, gelar perkara/kasus, dan konsultasi. Selain itu jumlah dan kompetensi SDM yang mumpuni juga mempengaruhi terhadap pencapaian target persentase keberhasilan penindakan. Keberhasilan penindakan terlihat dari serangkaian proses penindakan, dimulai dari penentuan target operasi, baik melalui kegiatan intelijen maupun siber, operasi penindakan, dan kegiatan pemberkasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam menghadapi gugatan pra peradilan PPNS didampingi oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI, serta aktif berkoordinasi dengan Korwas Polda Banten dan Direktorat Penyidikan Badan POM RI. Selain itu untuk menunjang kinerja penindakan, PPNS juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka Penerbitan Surat Cekal terhadap tersangka dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) dalam rangka pengembangan perkara.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10,00	9,38	93,80	70.405.000	Rp 71.298.150	101,27	0,93	-0,07	75 %	Tidak Efisien

Penggunaan anggaran sebesar 101,27% untuk mencapai kinerja sebesar 93,80% terhadap target, termasuk kategori **Tidak Efisien** karena % capaian anggaran lebih besar daripada % capaian indikator kinerja. Hal ini disebabkan pada TW I PPNS fokus untuk menghadapi gugatan praperadilan yang tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri pada DIPA 2025. Pada triwulan I terdapat blokir anggaran dan perubahan target RO dari 4 perkara menjadi 2 perkara dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 sebesar 42.64%





g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 93,80%. Pada TW II telah diusulkan penyesuaian target pada RAPK TW II s.d TW IV ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehubungan dengan relaksasi pemanfaatan blokir pada UPT, seluruh anggaran pada Rincian Output (RO) Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan UPT, seluruh alokasi anggarannya dapat digunakan kembali sehingga anggaran dan target yang ada pada RO dimaksud dapat dilaksanakan sesuai DIPA Awal TA 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1.	Adanya Perkara <i>Carryover</i>	Percepatan pemberkasan	TW II	Pemberkasan	Koordinasi JPU dan Korwas	TW II	P21
		Tindak lanjut rekomendasi hasil Gelar Perkara Terkendala	TW II	Gelar Perkara terkendala	Penerbitan SK SP3 (sesuai Rekomendasi hasil gelar perkara)	TW II	SP3
2.	Keterbatasan Jumlah Personil	Pengambilan Sumpah Personil yang telah mengikuti Diklat PPNS	TW I	Sumpah PPNS	-	TW I	Penambahan jumlah PPNS
3.	Penyelesaian Berkas Perkara tahun 2025	Koordinasi CJS (kejaksaan dan Korwas)	TW II	Penetapan tersangka dan pemberkasan	Koordinasi JPU dan Korwas	TW II	P21
4.	Memperkuat Jejaring intelijen dan pertukaran informasi adanya pelanggaran maupun tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan lintas sektor	Koordinasi linsek	TW IV	Koordinasi linsek	Pertukaran informasi dan/atau Operasi Gabungan	TW II	Operasi Gabungan





i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	0,00	0,00	1,00
Realisasi RO	0,00	0,00	1,00
Target IKU	10,00	10,00	10,00
Realisasi IKU	0,00	0,00	9,38
Capaian Bulanan	0,00	0,00	93,75
Capaian Tahunan	0,00	0,00	12,50
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Penyelesaian Perkara Carry Over LK 05-24	Penetapan TSK LK 05-24 Koodinasi Hukor terkait penyelesaian gugatan Praperadilan Telah dilaksanakan Tahap I	Penerbitan SPDP
Kendala bulan tersebut	Progres Penetapan Tersangka	PPNS Menghadapi Praperadilan	Penambahan Jo Pasal 55 KUHP, sehingga perlu penetapan TSK Tambahan Gelar perkara terkendala dengan rekomendasi SP3
RTL/Rekomendasi	Tahap 1	Tahap I Perkara LK 05-24	Tahap I Perkara LK 05-24
Timeline Penyelesaian	Februari 2025	Maret 2025	Mei
Kondisi Awal	- Belum dilakukan penetapan tersangka - Belum dilakukan Tahap 1	Praperadilan Belum dilakukan pemeriksaan tersangka Belum Tahap 1	Tahap 1 LK 05-24 P19 LK 05-24 Penerbitan SPDP LK 01-25
Rencana Aksi	Tahap 1	Berkas P21	Berkas P21
Kondisi Akhir	Pemberkasan	Telah ditetapkan tersangka dan berkas perkara Tahap 1	Pemenuhan P19 LK 05-24 Pemberkasan LK 01-25 SP3 Perkara Terkendala





Sasaran Kegiatan 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

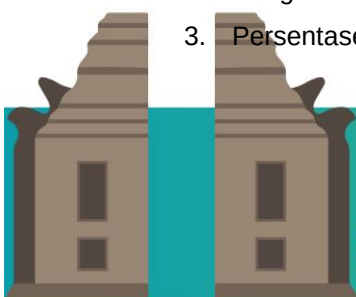
IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan merupakan indikator utama (IKU) yang baru diterapkan pada tahun 2025. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**);
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)





Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik

Pada triwulan I tahun 2025 target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada BBPOM di Serang sebesar 50,00% dengan realisasi sebesar 50,00% (capaian sebesar 100,00 %) dengan kategori **Baik**.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	50,00	50,00	100,00	Baik
TW II	50,00			
TW III	50,00			
TW IV	90,00			
2025	90,00	50,00	55,56	Perlu Upaya Keras

Realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada BBPOM di Serang TW I masih jauh dan belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Akan dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan agar target akhir tahun 2025 bisa dicapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Penyelesaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang selama ini dilakukan di Balai Besar POM di Serang belum menemui kendala yang berarti, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Dilakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down. Selain itu juga dilakukan profiling terhadap akun tertentu untuk dilaporkan ke Direktorat Siber Badan POM RI.
- Permintaan layanan pemberian keterangan ahli dari pihak kepolisian masih tinggi, khususnya terkait perkara penyalahgunaan obat ilegal;
- Dilakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.





d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

BBPOM di Serang mengupayakan untuk dilakukan perbaikan kedepannya dengan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja melalui:

1. Mengikuti pelatihan penyusunan laporan analisis kejahatan, baik yang diselenggarakan oleh Badan POM maupun lintas sektor atau pihak ketiga;
2. Mengikuti Pertemuan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan *Criminal Justice System* meliputi Kepolisian, Kejaksaan maupun dengan Pengadilan;
3. Memperkuat Jejaring intelijen dan pertukaran informasi adanya pelanggaran maupun tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan lintas sektor terkait seperti Badan Narkotika Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Intelijen Negara (BIN) dan/atau BINDA, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, ASPERINDO, dll.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	AEA	Penindakan	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	A Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	14 Laporan	3 Laporan	Hingga TW1 2025 laporan yang telah diselesaikan meliputi : 1. Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Jan 2025) 2. Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Feb 2025) 3. Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Mar 2025)
					B Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			Hingga TW1 2025 koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan meliputi : 1. PraPeradilan sebanyak 1 kali 2. Pemuatan Barang Bukti sebanyak 1 kali

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	21.680.000	Rp 73.119.080	337,27	0,30	-0,70	75 %	Tidak Efisien

Penggunaan anggaran sebesar 337,27% untuk mencapai kinerja sebesar 100% terhadap target, termasuk kategori Tidak Efisien karena % capaian anggaran lebih besar daripada % capaian indikator kinerja. Hal ini disebabkan pada TW I PPNS fokus untuk menghadapi gugatan praperadilan. Pada triwulan I terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 sebesar 57.09%.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi capaian triwulan I sebesar 100% untuk itu pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator Nilai Pembangunan ZI tahun 2025.





h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Belum terdapat Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital TW I (3 laporan)	Penyusunan Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital TW I (3 laporan)	TW1	Penyusunan Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital TW I	-	TW I	Terdapat Laporan Patroli Siber dan Penjejak Digital TW I

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	1,00	1,00	1,00
Realisasi RO	1,00	1,00	1,00
Target IKU	50,00	50,00	50,00
Realisasi IKU	50,00	50,00	50,00
Capaian Bulanan	100,00	100,00	100,00
Capaian Tahunan	7,14	14,29	21,43
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Pelaporan Patroli Siber dan Penjejak Digital Periode Januari 2025	Pelaporan Patroli Siber dan Penjejak Digital Periode Februari 2025	Pelaporan Patroli Siber dan Penjejak Digital Periode Maret 2025
Kendala bulan tersebut	Aplikasi ADP Down	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
RTL/Rekomendasi	Lapor ke admin ADP	Pelaporan secara rutin	Pelaporan secara rutin
Timeline Penyelesaian	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Kondisi Awal	Data belum terinput	Data belum terinput	Data belum terinput
Rencana Aksi	Input data di ADP	Input data di ADP	Input data di ADP
Kondisi Akhir	Data terinput di ADP	Data terinput di ADP	Data terinput di ADP





Sasaran Kegiatan 8

Layanan Publik UPT yang Prima

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan formula sebagai berikut :

Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

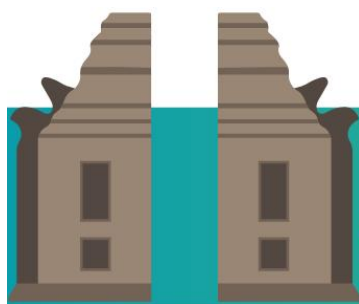
F02 adalah hasil penilaian dari seluruh aspek penyusun IPP oleh tim penilai, sedangkan F03 adalah hasil survei penilaian dari pelanggan.

Tabel Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Nama IKU	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-





Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik, nilai indeks akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 setelah melalui proses penilaian oleh tim penilai UPP BPOM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	4,7			
2025	4,7			

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik, nilai indeks akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 setelah melalui proses penilaian oleh tim penilai UPP BPOM.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan hasil penilaian PEKPP tahun 2024, BBPOM di Serang memperoleh nilai IPP 4,92 dengan rincian indeks F02 adalah 4,94 dan indeks F03 adalah 4,91. Hasil penilaian seluruh aspek pada F02 sudah maksimal yaitu 5 kecuali pada aspek inovasi mendapat nilai 4,5. Untuk terus meningkatkan kinerja UPP BBPOM di Serang, terdapat masukan dari Tim Penilai UPP BPOM terhadap pelayanan publik BBPOM di Serang, antara lain :

1. Aspek Kebijakan Layanan : Agar memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengaduan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan dalam konteks pengawasan internal terhadap standar pelayanan.
2. Aspek Profesionalisme SDM : Agar semua dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto harus diberi tanda tali air (watermark) yang berisi informasi tanggal, jam dan lokasi pengambilan foto untuk menjaga keabsahan dan keaslian data.
3. Aspek Inovasi : Agar BBPOM di Serang terus mengembangkan inovasi pelayanan publik dan diikuti kompetisi serta meraih prestasi pada level nasional.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, BBPOM di Serang harus mempertahankan aspek pelayanan publik yang sudah mempunyai nilai maksima yaitu dengan terus melaksanakan program pelayanan publik sesuai rencana, menetapkan standar pelayanan sesuai timeline, melakukan pelayanan publik sesuai standar Pelayanan yang sudah ditetapkan, melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelanggan yang dilayani, menindaklanjuti setiap masukan dari pelanggan, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik, memastikan kode etik pelayanan publik berjalan dengan menerapkan reward dan





punishment, serta konsisten melaksanakan inovasi pelayanan publik antara lain DIVA dan BAPERAN. Selain itu masukan dari tim penilai UPP pada tahun sebelumnya juga akan di tindaklanjuti.

BBPOM di Serang akan terus menjaga keberlanjutan inovasi dan terus mengikuti kompetisi inovasi baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2024, inovasi BAPERAN dan DIVA berhasil mendapat kan penghargaan TOP 24 pada Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2024. Inovasi DIVA juga telah dikembangkan menjadi DIVA INKLUSIF dengan memluas sasaran DIVA pada kelompok rentan. Diharapkan dengan pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang konsisten, pelayanan publik BBPOM di Serang makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan meningkatkan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Serang.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1	Keterangan
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	BAH	Pem - Sertifikasi	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	A Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Izin Distribusi (sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Permohonan Notifikasi KOS, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi Importir OT, SK	324 Dokumen	64 dokumen	Hingga TW 1 2025 jenis keputusan yang diterbitkan sbb: 1. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, 32 rekomendasi pemeriksaan. 2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang sebanyak 4 Izin Penerapan CPPOB. 3. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 2 closed CAPA by sistem sertifikasidob.pom.go.id. 4. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik sebanyak 2 rekomendasi. 5. Verifikasi IP CPPOB : 1 "

Kegiatan yang menunjang IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) ditagging pada KRO BAH yaitu Pelayanan Publik Lainnya. Hingga triwulan I tahun 2025 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Serang sebagai berikut :

1. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, 22 rekomendasi pemeriksaan.
2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang sebanyak 4 Izin Penerapan CPPOB.
3. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 2 closed CAPA by sistem sertifikasidob.pom.go.id.
4. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik sebanyak 2 rekomendasi.
5. Verifikasi dalam rangka pemenuhan komitmen IP CPPOB sebanyak 1 dokumen
6. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga sebanyak 33 sertifikat.





Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan efektifitas pendampingan kepada pelaku usaha obat dan makanan, Balai Besar POM di Serang juga melakukan inovasi Badak Banten (Bantu DAmplingi pelaKu usaha BANten Tumbuh dan bErdaya saiNg), yang bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses perizinan Obat dan Makanan bagi pelaku usaha di Banten.
2. Mendorong penjaminan keamanan dan mutu produk Obat, Kosmetik, Obat Bahan Alam, dan Pangan Olahan oleh pelaku usaha
3. Meningkatkan daya saing pelaku usaha Banten di pasar nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan dari Banten.
5. Meningkatkan Sinergitas antara Balai Besar POM di Serang dan pelaku usaha

Selama TW I tahun 2025, telah dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha melalui inovasi kegiatan Badak Banten sebagai berikut :

No	Tanggal	Pelaku Usaha	Keterangan Pendampingan
1.	8 Januari 2025	1. Yokomafood Serasi Jaya 2. Tangkal Kawung Indonesia 3. Kinarya Satria Durian 4. Putra Jaya Food Industries	Closing pendampingan Badak Banten 2024 dan penyerahan sertifikat IP CPPOB
2.	21 Januari 2025	PT Nawasena Alam Sentosa	Desk pengajuan IP CPPOB
3.	23 Januari 2025	CV Biru Lestari	Desk CAPA Verifikasi IP CPPOB
4.	21 Februari 2025	PBF KFTD Cabang Serang	Desk CAPA pertama Resertifikasi CDOB kategori Obat Lain, NPP, CCP
5.	28 Februari 2025	PBF KFTD Cabang Serang	Desk CAPA kedua Resertifikasi CDOB kategori Obat Lain, NPP, CCP
6.	25 Maret 2025	PT Permata Dunia Sukses Utama	Desk Pembuatan akun e-sertifikasi untuk pengajuan IP CPPOB
7.	27 Maret 2025	PT Permata Dunia Sukses Utama	Desk pengajuan IP CPPOB

Pada triwulan I juga telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan kinerja antara lain :

1. Pembahasan masukan pelanggan dan pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan.
2. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat pada 25 Februari 2025.
3. Revisi Standar Pelayanan Publik dengan mengakomodir masukan pelanggan, pengaduan masyarakat dan masukan dari Forum Konsultasi Publik.





4. Penetapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan.
5. Publikasi maklumat pelayanan pada ruang pelayanan, media sosial, media elektronik (TV layanan), dan Subsite BBPOM di Serang.
6. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana kelompok rentan sesuai masukan penilaian sarana pelayanan kelompok rentan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Indeks Pelayanan Publik UPT *)	0,00	0,00	115,70	9.192.600	Rp 10.826.300	117,77	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena data capaian indikator belum tersedia. Selama triwulan I tahun 2025 terdapat revisi anggaran pada KRO.BAH sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, sesuai Inpres 1 Tahun 2025 semula Rp. 312.175.000,- menjadi Rp. 27.241.700,-.

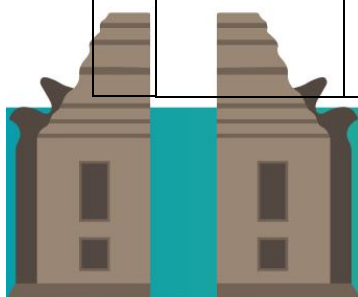
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 IKU Indeks Pelayanan Publik yaitu 4,92 untuk itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target serta akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target kinerja tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

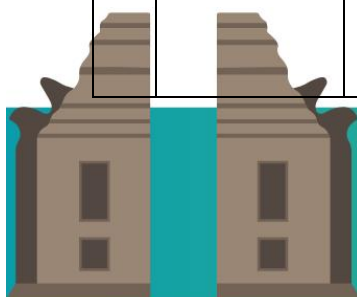
Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1.	Belum ditetapkan Standar Pelayanan Publik tahun 2025	Pada Bulan Februari akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penetapan Standar Pelayanan. Penetapan standar pelayanan melalui FKP adalah salah satu syarat yang harus di	TW I 2025	Telah dilaksanakan forum konsultasi publik pada tanggal 25 Februari 2025 dan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 telah ditetapkan			Telah ditetapkan standar Pelayanan Publik





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		penuhi oleh tiap unit pelayan publik.					
2.	Maklumat Pelayanan tahun 2025 belum ditetapkan	Penetapan Maklumat Pelayanan dan di publikasi	TW I 2025	Maklumat Pelayanan sudah ditetapkan dan dipublikasi pada ruang pelayanan, media sosial, media elektronik (TV layanan) dan Subsite BBPOM di Serang pada bulan Maret 2025	-		Maklumat Pelayanan sudah ditetapkan dan dipublikasi.
3.	Belum dilakukan publikasi Standar Pelayanan	publikasi standar pelayanan melalui berbagai media seperti : media Cetak, Media Luar ruang ; dan media sosial	TW II 2025	-	publikasi standar pelayanan melalui berbagai media seperti : media Cetak, Media Luar ruang ; dan media sosial	TW II 2025	Belum dilakukan publikasi Standar Pelayanan
4.	Belum dilakukan review SK yang terkait pelayanan publik.	review SK yang terkait pelayanan publik seperti SK Standar Pelayanan Publik, SK Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik, SK Mekanisme Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) Pegawai ASN dan non ASN serta Petugas Pelayanan Publik, SK Petugas Pelayanan Publik dan Ketentuan Seragam Petugas Layanan.	TW II 2025	-	review SK yang terkait pelayanan publik seperti SK Standar Pelayanan Publik, SK Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik, SK Mekanisme Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) Pegawai ASN dan non ASN serta Petugas Pelayanan Publik, SK Petugas Pelayanan Publik dan Ketentuan Seragam	TW II 2025	Akan dilakukan review SK yang terkait pelayanan publik

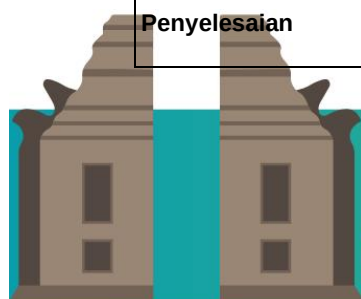




No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					Petugas Layanan.		
5.	Belum dilakukan penyusunan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik	Akan dilakukan penyusunan kebutuhan sarana prasarana	Triwulan I 2025	Telah disusun kebutuhan sarana prasana pelayanan publik	-	-	Telah dilakukan penyusunan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO	10,00	29,00	24,00
Realisasi RO	10,00	29,00	25,00
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	-	Telah dilaksanakan forum konsultasi publik pada tanggal 25 Februari 2025	Telah ditetapkan SK dan buku standar pelayanan publik BBPOM di Serang, sesuai dengan hasil masukan FKP 2025. pada Bulan Maret 2025 juga telah ditetapkan Maklumat pelayanan dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah) serta telah dilakukan publikasi maklumat tersebut melalui media cetak (poster di ruang layanan) media sisoal (instagram); media elektronik (TV layanan) dan Subsite BBPOM di Serang
Kendala bulan tersebut	-	-	-
RTL/Rekomendasi	Pada Bulan Februari akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penetapan Standar Pelayanan. Penetapan standar pelayanan melalui FKP adalah salah satu syarat yang harus di penuhi oleh tiap unit pelayan publik.	Revisi SP yang sudah mendapatkan masukan dari unsur masyarakat dan pengguna layanan serta penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik	Akan dilakukan publikasi standar pelayanan melalui berbagai media seperti : media Cetak, Media Luar ruang ; dan media sosial
Timeline Penyelesaian	Februari 2025	Maret 2025	April 2025





	Jan	Feb	Mar
Kondisi Awal	Belum ada perencanaan kegiatan untuk IKU IPP	Belum dilakukan Forum Kosnsultasi Publik	Belum dilakukan revisi SP dan penyusunan Forum Kosnsultasi Publik, malukmat pelayanan serta publikasi maklumat
Rencana Aksi	Pada Bulan Februari akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penetapan Standar Pelayanan. Penetapan standar pelayanan melalui FKP adalah salah satu syarat yang harus di penuhi oleh tiap unit pelayan publik.	Revisi SP yang sudah mendapatkan masukan dari unsur masyarakat dan pengguna layanan serta penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik	Akan dilakukan publikasi standar pelayanan melalui berbagai media seperti : media Cetak, Media Luar ruang ; dan media sosial
Kondisi Akhir	Telah dibuat perencanaan kegiatan untuk IKU IPP	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana





Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

IKU 22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%



NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Nama IKU	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai Pembangunan ZI, hasil pengukuran akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	90,20		0.00	
2025	90,20		0.00	

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai Pembangunan ZI, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan tiap triwulan, hasil pengukuran akan diperoleh pada akhir triwulan IV tahun 2025.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Hingga akhir tahun 2024 BBPOM di Serang belum berhasil meraih WBK karena masih terdapat TLHP BPK yang Belum Sesuai Saran sehingga BBPOM di Serang masuk kedalam klasifikasi TMS Pra Evaluasi dan tidak dilakukan desk.

Pada triwulan I tahun 2025 BBPOM di Serang telah melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dan melengkapi seluruh data dukung. Telah dilakukan pula reviu LKE ZI oleh tim auditor internal Balai Besar POM di Serang dalam upaya untuk meraih WBK. Pada





tanggal 15 April 2025 LKE dan data dukung telah diajukan penilaian oleh TPI (Inspektorat Utama).

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

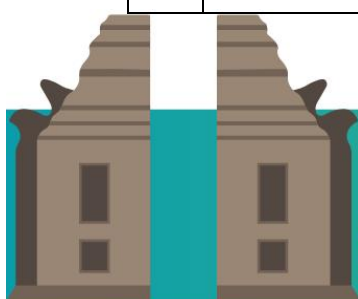
Beberapa Tindakan perbaikan yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait status lahan Balai Besar POM di Serang secara intensif (upaya pendekatan ke Pemerintah Provinsi Banten, setelah pelantikan Gubernur definitif, sehingga proses hibah dapat diproses sesuai regulasi yang berlaku di daerah), agar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sudah 100% pada saat penilaian berikutnya.
2. Mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Serang telah menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.

Selain itu BBPOM di Serang juga melakukan program yang mendukung capaian Nilai Pembangunan ZI, antara lain:

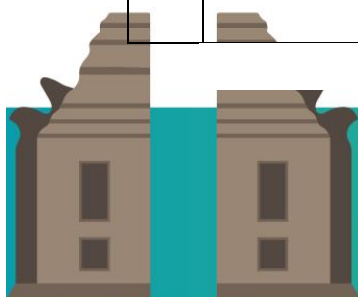
1. Pembentukan tim kerja pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai
2. Menetapkan Rencana Kerja pembangunan ZI tahun 2025
3. Pembentukan tim AOC tahun 2025
4. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain:

No	Inovasi	Uraian
1	Bersamamu, Melindungimu (Bersihkan sampahmu, agar lingkungan melindungimu) "Zero Waste"	Melakukan gerakan pengurangan penggunaan kemasan plastik untuk mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap penghuninya
2	Pastelan (Pegawai Teladan Triwulanan)	Pemberian reward dan punishment kepada pegawai setiap triwulan pada Balai Besar POM di Serang
3	SiDo-Q	Pemanfaatan SI-DOQ berbasis google sites yang dikelola oleh pengendali dokumen yang terdapat soft copy dokumen, pengajuan, dan sosialisasi dokumen seperti Manual Organisasi, SOP Makro, SOP Mikro, Dokumen Referensi Lain dan Dokumen Instruksi Kerja.
4	Jokes and Quizess	Pemberian kalimat-kalimat motivasi yang berisi candaan untuk meningkatkan motivasi dan rasa humor yang akan ditayangkan pada media sosial Youtube atau Instagram
5	SHInE G (Smart Healhty Impactfull n Energic Generation)	Pemberian sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) kepada pelajar/siswa dan komunitas sekolah
6	Batik Warisan	Membuat konten terkait AMR untuk media sosial dan media cetak; Melakukan sosialisasi/KIE kepada apoteker di sarana pelayanan kefarmasian
7	Kerlingan Monik (Mnilik)	Data hasil pemeriksaan rutin pada Digimon terinput secara otomatis pada kolom Mnilik





No	Inovasi	Uraian
8	DIVA	a. Terlaksananya pelayanan pengujian pangan olahan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat dan komunitas sekolah b. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran perijinan c. Tersosialisasinya keamanan obat dan makanan kepada masyarakat dan komunitas sekolah
9	E-Formula	Monev pelaksanaan aplikasi terkait permohonan tindakan perbaikan sarana perkantoran secara online
10	Monarki	Penggunaan aplikasi e-office dalam pengukuran Anggaran dan Kinerja BBPOM di Serang
11	DIGICODE (Digitalisasi Get Barcode)	Penggunaan aplikasi DIGICODE untuk scan barcode barang yang ter-update pada barcode Daftar Barang Ruangan BBPOM di Serang.
12	OATs	Melakukan kegiatan olahraga bersama di Kantor Balai Besar POM Serang Pelaksanaan: Minimal 1x dalam seminggu (Jumat pukul 08.00 s.d 09.30 WIB) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan.
13	AOC NEWS !	Pembuatan media tentang penyiaran berita seputar pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan RB dan/atau konten-konten yang menggali sisi humanis pegawai di lingkungan BBPOM di Serang yang mendukung pelaksanaan berAKHLAK di BBPOM Serang dalam format yang ditayangkan melalui media youtube atau instagram
14	BAPERAN	a. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dengan terlaksananya sosialisasi peraturan terkait obat dan makanan b. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran izin edar
15	Lapor Kang	Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas kinerja pegawai di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dan mendorong masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pemberian gratifikasi, pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Balai Besar POM di Serang atas layanan yang diberikan, maka masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui <i>hotline</i> "Lapor Kang" yang terhubung langsung kepada Kepala Balai BBPOM di Serang.
16	AOC Advance	Pengembangan Kompetensi bagi Tim RB dan AOC dalam meningkatkan softskill melalui pelatihan yang direncanakan
17	BBQ Live	Kuis terkait reformasi birokrasi, <i>Core Value</i> ASN BERAKHLAK dan nilai organisasi PIKKIR yang diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Serang.
18	Mosi-Mosi	Pemberian kata-kata inspiratif dalam bentuk gambar atau video untuk meningkatkan motivasi dan semangat, yang dibagikan pada Whatsapp Group Pegawai BBPOM di Serang
19	Sehati (SEsuaikan Perbaikan CAPA dengan HARapan menjadi berarTI)	Membuat monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha secara digital.
20	SIAR	Website yang berisi konten Pengelolaan Arsip, konten Kesehatan Pegawai, konten SAKIP dan konten Sistem Manajemen Mutu yang terdiri dari ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 dan ISO 37001:2016





- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	CAB	Tata Usaha	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	A	Pengadaan Sarana Gedung	1 Unit	0 Unit
		CAN	Tata Usaha	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	A	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7 Unit	6 Unit

Kegiatan yang menunjang IKU Nilai Pembangunan ZI ditagging pada KRO CAB yaitu Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan KRO CAN yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu dilaksanakan rapat persiapan penilaian PMPZI tahun 2025 bersama kepala balai, penyusunan rencana kerja aksi RB tahun 2025.

Timeline pengisian LKE ZI							
Target	Maret				April		
	1	2	3	4	1	2	3
Pengisian dan lengkapi data dukung							
Reviu Kepala Balai							
Reviu Tim Auditor Internal							
Perbaikan LKE dan data dukung							
Submit 14 April 2025							

Untuk peningkatan kompetensi *Agent of Change* pada tahun 2024 telah dilaksanakan *study banding* virtual sebanyak 2 kali yaitu dengan Tim AOC Balai POM Pangkalpinang pada tanggal 3 Mei 2024 dan dengan Tim AOC Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tanggal 18 Desember 2024.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM *)	0,00	0,00	#DIV/0!	58.361.300	Rp 44.985.000	77,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena data capaian indikator belum tersedia. Selama triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa revisi anggaran sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, diantaranya:

- Pemblokiran *Automatic Adjustment* sesuai Inpres 1 Tahun 2025
- Anggaran Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia berkurang Rp 530.000,- dan mengalami blokir sebesar 51.21%
- Anggaran Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami blokir sebesar 43.76%.





g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 sebesar 98,13% untuk itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target serta akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator Nilai Pembangunan ZI tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Belum dilakukan Audiensi dengan Gubernur	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk penjadwalan	Setelah pelantikan Gubernur definitif	Pengajuan permohonan audiensi pada 26 Maret 2025	Audiensi dengan Gubernur definitif terkait status lahan Balai Besar POM di Serang	TW II 2025	Belum terdapat jawaban dari Pemerintah Provinsi Banten
2	Belum dilakukan penilaian mandiri PMPZI 2025	Pengisian LKE dan melengkapi data dukung	TW I 2025	Pengisian LKE dan melengkapi data dukung	Submit hasil penilaian mandiri PMPZI	TW II 2025	s.d TW1 2025 telah dilakukan reviu oleh auditor internal
3	Menyusun Renja ZI 2025	Monitoring rencana kerja program prioritas rencana pembangunan ZI BBPOM di Serang	TW I 2025	Sudah dilakukan penyusunan Renja ZI 2025	Monev Renja ZI triwulan	TW II 2025	s.d TW1 2025 sudah dilakukan penyusunan Renja ZI 2025
3	Pelaporan Monitoring dan evaluasi implementasi Whistle Blowing System (WBS)	Monitoring dan evaluasi implementasi Whistle Blowing System (WBS)	Awal triwulan	Penyusunan laporan Monitoring dan evaluasi implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) TW I	Penyusunan laporan Monitoring dan evaluasi implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) TW II	TW II 2025	Sudah dilakukan pelaporan Monitoring dan evaluasi implementasi Whistle Blowing System (WBS)





i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO (CAB)			
Realisasi RO (CAB)			
Target RO (BMB)	3,00	1,00	1,00
Realisasi RO (BMB)	4,00	1,00	1,00
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Pada akhir TW1 dilakukan pengisian LKE ZI dan data dukung pada gdrive pusat		
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala		
RTL/Rekomendasi	Submit pengisian LKE ZI maksimal 15 April 2025		
Timeline Penyelesaian	TW II		
Kondisi Awal	dalam proses pencapaian IKU		
Rencana Aksi	Masih dalam proses pengisian LKE ZI dan melengkapi data dukung		
Kondisi Akhir	kegiatan pengisian LKE ZI terlaksana sesuai dengan perencanaan		

IKU 23. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.





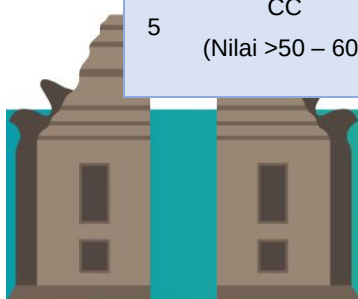
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Cara Perhitungan Nilai AKIP :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Predikat	Interpretasi
1	AA (Nilai >90 - 100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B (Nilai >60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.





No	Predikat	Interpretasi
6	C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Nama IKU	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai AKIP UPT BPOM, hasil pengukuran akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat.

- b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	82,44		0.00	
2025	82,44		0.00	

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai AKIP UPT BPOM, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan tiap triwulan, hasil pengukuran akan diperoleh pada akhir triwulan IV tahun 2025.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

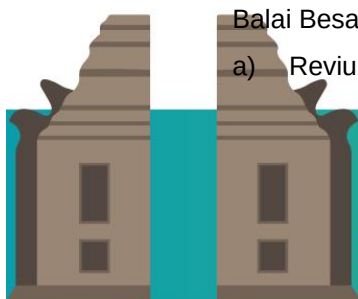
Pada tahun 2024 BBPOM di Serang telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 82,44 (Predikat A) dari 80,17 nilai ini adalah nilai tertinggi sepanjang periode renstra 2020-2024. namun demikian tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan hasil audit SAKIP tahun 2024 antara lain:

1. Perencanaan

Balai Besar POM di Serang telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, antara lain:

- a) Renvu Renstra dan matriks evaluasi akhir Renstra;





- b) Kertas Kerja reviu target indikator kinerja;
- c) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
- d) SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e) *Cascading* indikator kinerja disetiap level.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

Berdasarkan data laporan kinerja interim TW II, III, IV Tahun 2023 masih terdapat capaian indikator kinerja periode berjalan yang capaiannya menurun terus menerus, sehingga perencanaan kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2024 telah dilakukan reviu target sehingga terdapat perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja. Reviu target telah disertai dengan kertas kerja penetapan target dan telah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, namun penyusunan target baru berdasarkan data capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, belum berdasarkan basis data atau analisa yang memadai.

2. Pengukuran

Kriteria komponen pengukuran kinerja yang telah dipenuhi, antara lain:

- a) Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b) Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;
- c) Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;
- d) Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a) SOP pengumpulan data kinerja yang disusun telah memuat informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja, media pengumpulan data kinerja, PIC, mutu baku waktu dan tahapan proses perbaikan apabila terdapat kesalahan/perubahan data secara internal.

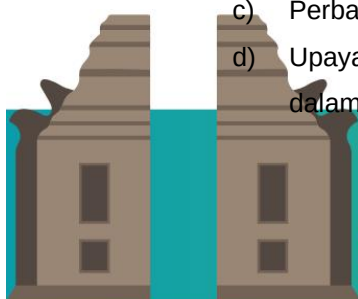
Namun demikian belum terdapat tahapan revisi Laporan Kinerja yang telah disampaikan apabila terjadi kesalahan/perubahan data antara lain:

- 1) Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Tahap perbaikan pelaporan data.
- b) Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib, yaitu terdapat kinerja yang tidak tercapai namun hambatan, rencana aksi dan rencana tindak lanjut belum seluruhnya diisi secara lengkap dan detail.

3. Pelaporan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Serang telah menyajikan, antara lain:

- a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- b) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan;
- c) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Satker yang sejenis;
- d) Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;





e) Pemanfaatan informasi kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Laporan Kinerja telah menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara capaian output dan anggaran pada masing-masing Indikator kinerja, namun belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan.
- b. Laporan Kinerja belum menyajikan pembahasan mengenai penyesuaian anggaran sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- c. Laporan Kinerja TW I Tahun 2024 telah memuat monitoring rekomendasi periode Tahun 2023 namun belum seluruh rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, terutama atas indikator kinerja yang belum tercapai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Balai Besar POM di Serang telah menyusun laporan evaluasi internal setiap triwulanan dengan menyajikan:

- a) Berita Acara Evaluasi Internal;
- b) Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
- c) Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja;
- d) Notulen rapat.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Laporan Evaluasi Internal (LEI) belum seluruhnya menyajikan hasil analisis capaian kinerja terutama terkait adanya permasalahan/kendala/hambatan yang menghambat capaian kinerja per masing-masing IKU serta tindak lanjutnya, misalnya pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang.
- b. Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya namun belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
1	Mengidentifikasi/mereviu target kinerja berdasarkan basis data yang memadai dan melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja sehingga layak dijadikan dasar penetapan target serta	Penetapan target tahun 2025 telah disertai dengan kertas kerja penetapan target berdasarkan data kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisa yang memadai Pada usulan penyesuaian target bulan April 2025 telah dilengkapi dengan exercise pencapaian target	TW II





No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
	dilengkapi dengan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan		
2	Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria alur penanganan apabila terjadi kesalahan/perubahan pada tahap usulan perubahan data dan tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta tahap perbaikan pelaporan data	Telah dilakukan penyesuaian Revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan tahapan Prosedur Perbaikan Data Kinerja ke Biro Perencanaan dan Keuangan (point C)	TW II
3	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi, hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib	Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2025 telah dilakukan dengan tertib meliputi kondisi awal, rekomendasi, timeline, rencana aksi dan kondisi akhir Tim Monev TU telah membuat spreadsheet untuk pengisian Monev Bulanan tahun 2025 (sebagai data dukung pengisian SIMETRIS)	TW II
4	Melengkapi laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam proses mencapai target kinerja di setiap level sasaran dan atau IKU. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal	Laporan Kinerja Tahun 2024 telah menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya pada setiap sasaran dan atau IKU	TW II
5	Menyempurnakan penyajian pada laporan kinerja dengan penjelasan mengenai dasar/latar belakang apabila terdapat penyesuaian aktivitas/anggaran/perencanaan kinerja sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Laporan Kinerja Interim TW I 2025 akan disempurnakan dengan menyajikan pembahasan mengenai strategi penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerja	TW II
6	Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya	Laporan Evaluasi Internal TW I 2025 telah dimanfaatkan untuk memonitoring hasil dan perbaikan kinerja.	TW II





No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
		Dari hasil evaluasi TW I 2025 BBPOM di Serang mengajukan penyesuaian target ke Roren pada IKU 8, 10, 12, 15, 16, 18 dan 19 pada bulan April 2025	
7	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian permasalahan/kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta pelaksanaan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang merupakan target tahunan yang penilaiannya keluar pada akhir TW IV 2024. Pada Laporan Kinerja Interim TW I, TW II dan TW III 2024 telah disampaikan permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) selama triwulan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2025, terhadap indikator yang memiliki target tahunan telah dilakukan pembahasan dalam Laporan Evaluasi Internal	TW II
8	Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker	Balai Besar POM di Serang telah menindaklanjuti hasil Inspektorat Utama Tahun 2023 yang belum sesuai	TW II

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	BKB.051	Tata Usaha	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Q Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	1 kali/trip	1 kali/trip

Kegiatan yang menunjang IKU Nilai AKIP UPT BPOM ditagging pada KRO BKB yaitu Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan. Pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 Sebesar 95.58%. Pelaksanaan rapat evaluasi bulanan secara rutin sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP dengan membahas capaian output dan IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pada bulan Januari dan Februari 2025 belum diperoleh matriks RHPK dari pusat, sehingga capaian IKU belum dapat dihitung.

Selain rapat evaluasi bulanan, pada triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan:

1. Penyusunan rancangan Renstra 2025-2029.
2. Penyusunan PK-RAPK 2025.





3. Penyusunan Manual IKU 2025-2029.
4. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024.
5. Penyusunan Laporan Tahunan 2024.
6. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun 2024.
7. Tim sakin mengikuti bimtek SAKIP dan LAPKIN 2024 secara daring pada Februari 2025.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM *)	0,00	0,00	#DIV/0!	1.311.000	Rp 1.310.500	99,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Tindak lanjut hasil evaluasi sakin tahun 2024 akan diselesaikan pada triwulan II tahun 2025 dan tidak memerlukan biaya. Sebagai tindak lanjut Inpres 1 Tahun 2025 pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran sebesar 95.58%, anggaran tersisa untuk percetakan, koordinasi dalam kota dan snack rapat koordinasi lintas sektor di balai.

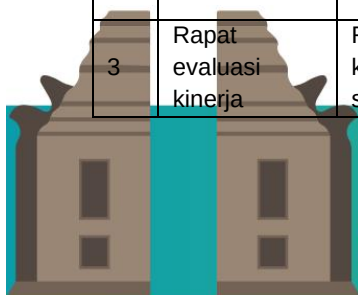
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi capaian tahun 2024 sebesar 99,12% untuk itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian target serta akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Dari hasil evaluasi TW I 2025 BBPOM di Serang akan mengajukan penyesuaian target ke Roren pada IKU 8, 10, 12, 15, 16, 18 dan 19 pada bulan April 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal	Menyusun Laporan Evaluasi Internal TW IV 2024	15 Jan 2025	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun 2024 pada 15 Jan 2025	-	-	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun 2024 diselesaikan tepat waktu
2	Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja tahun 2024	28 Februari 2025	Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 pada 28 Februari 2025	-	-	Laporan Kinerja tahun 2024 disusun tepat waktu
3	Rapat evaluasi kinerja	Rapat evaluasi kinerja secara setiap bulan	Maksimal tanggal 5 setiap	Rapat evaluasi kinerja bulan	-	-	Rapat evaluasi kinerja





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	bulanan		bulan	Jan, Feb dan Maret terlaksana tiap awal bulan			bulanan terlaksana
4	Target RAPK TW II-IV belum disesuaikan	Penyesuaian target bulanan pada RAPK IKU 8, 10, 12, 15, 16, 18 dan 19	TW II 2025	Pengajuan penyesuaian target kepada Rorenkeu selesai 21 April 2025	-	-	Excercise target IKU TW II-IV 2025
5	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025 belum diselesaikan	Menyusun Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025	Tiap awal triwulan	-	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025	25 April 2025	Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025 dalam proses penyusunan
6	Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 belum diselesaikan	Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I tahun 2025	Tiap awal triwulan	-	Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW I tahun 2025	30 April 2025	Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 dalam proses penyusunan

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO (BKB)	0,00	0,00	0,00
Realisasi RO (BKB)			
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Menunggu hasil penilaian Inspektorat 1 pada TW 4 2025		
Kendala bulan tersebut	-		
RTL/Rekomendasi	-		
Timeline Penyelesaian			
Kondisi Awal			
Rencana Aksi	-		
Kondisi Akhir			





IKU 24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Nama IKU	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-





Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai Kinerja Anggaran, hasil pengukuran akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 diperoleh melalui aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	5		0.00	
2025	5		0.00	

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi Nilai Kinerja Anggaran, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan tiap triwulan, hasil pengukuran akan diperoleh pada akhir triwulan IV tahun 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh komponen IKPA dan EKA. Berdasarkan surat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, nilai IKPA triwulan I tahun 2025 seluruh K/L sebesar 100.

Nilai IKPA didapatkan melalui <https://spanint.kemenkeu.go.id> dengan memilih menu MonevPA lalu memilih submenu Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker.

Nilai IKPA Triwulan I Tahun 2025

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPAStatker/indikatorKinerja

Relaunch to update

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAL DENGAN

MARET

Nilai EKA didapatkan melalui aplikasi SmartDJA pada [link https://monev.kemenkeu.go.id](https://monev.kemenkeu.go.id) pada menu NK Perencanaan Satuan Kerja. Penilaian dilakukan terhadap Efektivitas (capaian rincian output) dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK). Nilai EKA hingga akhir triwulan I tahun 2025 belum dapat diperoleh dikarenakan aplikasi belum siap.

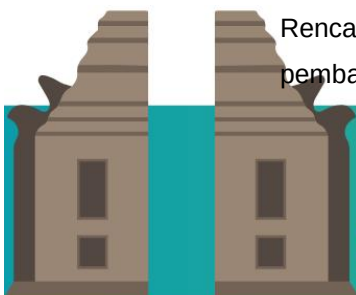




d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Nilai IKPA triwulan I tahun 2024 sebesar 100. Atas capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang tersebut, untuk perbaikan kinerja triwulan berikutnya direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan *awareness* semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan (baik total maupun per jenis belanja) dan target pencapaian output, antara lain:
 - Menyusun *Plan of Action* (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat.
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA.
 - Melakukan *update* RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulanan berakhir.
 - Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
 - Apabila RPD lebih besar daripada realisasi anggaran, maka agar mengakselerasi belanja dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa, dan segera menyelesaikan pembayaran tagihan yang telah selesai dikerjakan;
 - Apabila RPD lebih kecil daripada realisasi anggaran, maka agar memperhitungkan batas deviasi Halaman III DIPA sehingga tidak melebihi dari 5% antara rencana dengan realisasinya.
 - Melakukan inventarisasi terhadap belanja kontraktual untuk segera melakukan perikatan dan menyampaikan ADK Kontrak 5 hari kerja setelah kontrak di tanda tangani.
3. Meningkatkan percepatan realisasi anggaran terhadap anggaran yang tidak di blokir, antara lain:
 - Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA yang ditetapkan. Segera melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dengan mengacu peraturan dan penilaian kualitas revisi anggaran.
 - Mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Memperhatikan target capaian kinerja *output* yang harus dicapai setiap bulan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan, melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran
 - Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar





- Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	6384.EBA.956	Tata Usaha	Layanan BMN	A Koordinasi BMN	1 OK	0 OK
		6384.EBA.994	Tata Usaha	Layanan Perkantoran	A Pembayaran gaji dan tunjangan	14 BLN	4 BLN

Kegiatan yang menunjang IKU Nilai Kinerja Anggaran ditagging pada KRO EBA.956 yaitu Layanan BMN dan KRO EBA.994 yaitu Layanan Perkantoran. Selain itu dilaksanakan pula rapat evaluasi bulanan secara rutin sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran dengan membahas capaian output dan IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pada bulan Januari dan Februari 2025 belum diperoleh matriks RHPK dari pusat, sehingga capaian IKU belum dapat dihitung. Telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu, dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI triwulan I yang dilakukan bertahap mulai 21 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025. Tim Keuangan telah mengikuti sosialisasi Assesmen RO dan sosialisasi IKPA.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM *)	0,00	0,00	#DIV/0!	2.183.018.936	Rp 2.766.488.977	126,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efisiensi anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Sebagai tindak lanjut Inpres 1 Tahun 2025 pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran sebesar 94.37% pada KRO EBA.956, anggaran tersisa untuk koordinasi luar kota Pengurusan BMN.

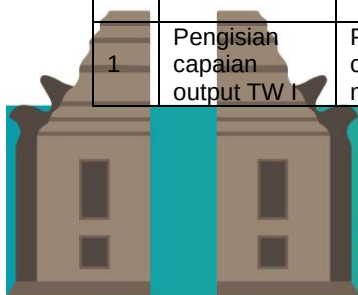
g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa target tahun 2024 telah tercapai dengan capaian sebesar 105,65% untuk itu akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 juga dapat tercapai. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator NKA tahun 2025.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Pengisian capaian output TW I	Pelaporan capaian output melalui Aplikasi	30 April 2025		Pelaporan capaian output bulan	30 April 2025	Capaian output bulan Jan, Feb dan Mar 2025





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	2025 belum dilakukan	Sakti tepat waktu			Jan, Feb dan Mar 2025 melalui Aplikasi		dalam proses pelaporan melalui aplikasi
2	Update Halaman III Dipa sesuai POA Tahun 2025	Penyusunan <i>plan of action</i> (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat, maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir	Maksimal 10 hari kerja pada awal triwulan	Update Halaman III Dipa: - TW I 2025 pada 5 Feb 2025	Update Halaman III Dipa TW II, III dan IV 2025	Maksimal 10 hari kerja pada awal triwulan	RPD TW I 2025 telah diupdate tepat waktu
3	Revisi DIPA/POK	Melakukan revisi anggaran untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan	Tentatif	Telah dilaksanakan revisi DIPA-POK TW I sebanyak 4 kali	-	-	POK terakhir s.d TW I adalah POK 4

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

	Jan	Feb	Mar
Target RO (994)			
Realisasi RO (994)	0,00		
Target RO (956)			
Realisasi RO (956)	0,00		
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	Hingga TW 1 2025 telah dilakukan 4 kali revisi anggaran surat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, nilai IKPA triwulan I tahun 2025 seluruh K/L sebesar 100		
Kendala bulan tersebut	Capaian Output belum dapat diisi pada SAKTI. Batas akhir input data capaian output periode Januari, Februari, dan Maret adalah tanggal 30 April 2025		
RTL/Rekomendasi	Menunggu update dari KPPN pengisian Capaian Output sudah dibuka pada SAKTI		
Timeline Penyelesaian	30 April 2025		
Kondisi Awal	Hingga akhir TW 1 Capaian Output belum dapat diisi		
Rencana Aksi	Melakukan pengisian Capaian Output TW I		
Kondisi Akhir	Hingga akhir TW 1 Capaian Output belum dapat diisi Nilai IKPA TW I sebesar 100		

IKU 25. Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan





manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Nama IKU	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	-	-	-	-

Pada triwulan I 2025 belum ada realisasi nilai Indeks Manajemen Risiko, hasil pengukuran akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025 setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Badan POM.

b. Membandingkan target dan realisasi kinerja per triwulan dan tahunan 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	-	-	-	-
TW IV	3		0.00	
2025	3		0.00	





Realisasi kinerja pada triwulan I 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 karena penilaian realisasi kinerja baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Selama periode Januari hingga Maret 2025 (Triwulan I) Balai Besar POM di Serang telah melakukan tinjauan terhadap daftar risiko dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Inspektur Utama Badan POM No. BPI.06.07.7.12.24.765 perihal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Telah dimasukkan isu internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan;
2. Telah dilakukan identifikasi risiko terhadap program maupun kegiatan baru;
3. Telah disusun kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak dalam risk register;
4. Telah dimasukkan kegiatan/proses bisnis yang dituangkan berupa narasi indikator kinerja mengacu pada aktivitas maupun SOP;
5. Seluruh risiko yang memiliki sumber risiko eksternal telah dilengkapi dengan pihak eksternal sebagai sumber risiko;
6. Telah dilakukan peninjauan terhadap penurunan risiko akibat pengendalian;
7. Telah dilakukan pembaruan terhadap dokumen Daftar Risiko 2024 mengacu pada program yang ada di tahun 2025.

Upaya peningkatan Indeks Manajemen Risiko di Balai Besar POM di Serang belum mendapat kendala yang berarti. Pada awal tahun 2025 dimana terdapat kebijakan blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 dimana peningkatan kompetensi termasuk dalam kegiatan yang terkena imbas efisiensi anggaran sehingga keikutsertaan pelatihan tidak dapat terlaksana, namun hal tersebut dapat diatasi dengan pelatihan yang dilaksanakan secara internal.

d. Upaya rekomendasi perbaikan kinerja

Dalam rangka upaya pencapaian target Indeks Manajemen Risiko, pada triwulan selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembaruan penilaian resiko pada Daftar Risiko, khususnya dalam rangka penilaian efektifitas upaya pengendalian resiko;
2. Perbaikan narasi pada proses bisnis;
3. Kodifikasi ulang terhadap resiko dalam Daftar Risiko; dan
4. Penilaian ulang risiko, khususnya terhadap nilai residual dari risiko jenis *fraud*.
5. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan Bimbingan Teknis SPIPT.





- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW1
25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	BKB.052	Tata Usaha	Pelaksanaan koordinasi	A Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan	12 paket	5 paket
					C Koordinasi dalam/luar kota	5 OK	1 OK
					D Keikutsertaan	1 OK	1 OK
					E Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai	136 OK	20 OK

Keberhasilan peningkatan nilai Indeks Manajemen Risiko dipengaruhi beberapa faktor, antara lain proses identifikasi risiko setiap kegiatan/program yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui pelaporan kinerja, laporan tahunan dan laporan lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan Teknik Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025 secara daring dengan Inspektorat Badan POM dalam rangka pendampingan penyusunan Daftar Risiko Tahun 2025.

- f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja *)	0,00	0,00	#DIV/0!	2.890.000	Rp 3.177.100	109,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

Bahwa dikarenakan penilaian capaian kinerja terhadap Indeks Manajemen Risiko baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV 2025, maka saat ini belum dapat dilakukan pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai nilai indeks manajemen risiko, untuk itu pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2025 dapat tercapai. Hingga akhir TW I belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator Indeks Manajemen Risiko tahun 2025.

- h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.49 Matriks Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	1. Isu internal dan eksternal belum diidentifikasi risikonya; 2. Belum mengidentifikasi risiko untuk program atau kegiatan baru; 3. Belum ada	Melengkapi dan melakukan pembaruan Daftar Risiko 2024 menjadi Daftar Risiko 2025	TW1	Telah dilakukan pembaruan pembaruan terhadap Daftar Risiko 2025	1. Perbaikan narasi proses bisnis; 2. Kodifikasi ulang resiko; 3. Penilaian	TW 2	Daftar Risiko 2025 telah diperbaiki





No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	kertas kerja penentuan skor resiko; 4. Belum ada kegiatan/proses bisnis yang dituangkan berupa narasi indikator kinerja; 5. Belum ada riviuh pihak eksternal sebagai sumber resiko eksternal; 6. Belum ada tinjauan penurunan resiko akibat pengendalian; 7. Belum ada pembaruan Daftar Risiko 2024 mengacu pada program 2025				ulang resiko fraud		

i. Monitoring upaya perbaikan IKU per bulan

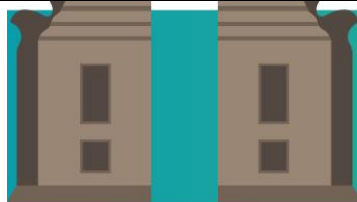
	Jan	Feb	Mar
Target IKU			
Realisasi IKU			
Capaian Tahunan			
Keterangan (Mencakup RO dan IKU)	- Pada awal TW 1 telah dilakukan Pengisian Manrisk mandiri (17 Januari 2025) - Telah dilakukan Workshop Manrisk 24 Jan 25		
Kendala bulan tersebut	Tidak ada kendala		
RTL/Rekomendasi	Perbaikan narasi proses bisnis, kodifikasi ulang risiko, penilaian ulang nilai residual risiko fraud		
Timeline Penyelesaian	TW II 2025		
Kondisi Awal	Proses bisnis, kodifikasi dan IKU belum disesuaikan		
Rencana Aksi	Akan dilakukan perbaikan narasi proses bisnis, kodifikasi ulang risiko, penilaian ulang nilai residual risiko fraud		
Kondisi Akhir	Proses bisnis, kodifikasi dan IKU belum disesuaikan		





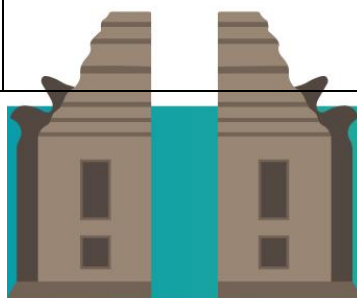
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Perencanaan Kinerja	Berdasarkan data laporan kinerja interim TW II, III, IV Tahun 2023 masih terdapat capaian indikator kinerja periode berjalan yang capaiannya menurun terus menerus, sehingga perencanaan kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2024 telah dilakukan reviu target sehingga terdapat perubahan target indikator pada Perjanjian Kinerja. Reviu target telah disertai dengan kertas kerja penetapan target dan telah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, namun penyusunan target baru berdasarkan data capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, belum berdasarkan basis data atau analisa yang memadai	Mengidentifikasi/mereviu target kinerja berdasarkan basis data yang memadai dan melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja sehingga layak dijadikan dasar penetapan target serta dilengkapi dengan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.	TW II	Penetapan target tahun 2025 telah disertai dengan kertas kerja penetapan target berdasarkan data kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisa yang memadai Pada usulan penyesuaian target bulan April 2025 telah dilengkapi dengan exercise pencapaian target	-	-	Telah ditambahkan data dukung kertas kerja berdasarkan smart-c tahun 2025-2029 Telah ditambahkan usulan penyesuaian target tahun 2025
2	Pengukuran Kinerja	SOP pengumpulan data kinerja yang disusun telah memuat informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan	a. Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria alur penanganan apabila terjadi	TW II	Telah dilakukan penyesuaian Revisi SOP Pengumpulan	-	-	Telah ditambahkan data dukung revisi SOP Mikro tentang pengumpulan data



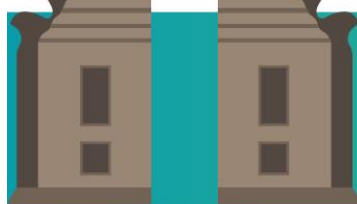


No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja, media pengumpulan data kinerja, PIC, mutu baku waktu dan tahapan proses perbaikan apabila terdapat kesalahan/perubahan data secara internal. Namun demikian belum terdapat tahapan revisi Laporan Kinerja yang telah disampaikan apabila terjadi kesalahan/perubahan data	kesalahan/perubahan pada tahap usulan perubahan data dan tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta tahap perbaikan pelaporan data.		Data Kinerja dengan menambahkan tahapan Prosedur Perbaikan Data Kinerja ke Biro Perencanaan dan Keuangan (point C)			kinerja hingga alur perubahan data
		Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib, yaitu terdapat kinerja yang tidak tercapai namun hambatan, rencana aksi dan rencana tindak lanjut belum seluruhnya diisi secara lengkap dan detil. 	b. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi, hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib.	TW II	Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2025 telah dilakukan dengan tertib meliputi kondisi awal, rekomendasi, timeline, rencana aksi dan kondisi akhir Tim Monev TU telah membuat	-	-	Telah melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS bulan Januari – Maret 2025 Tim Monev TU membuat spreadsheet untuk pengisian bulanan tahun 2025 sebagai data dukung pengisian SIMETRIS





No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					spreadsheet untuk pengisian Monev Bulanan tahun 2025 (sebagai data dukung pengisian SIMETRIS)			
3	Pelaporan Kinerja	Laporan Kinerja telah menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara capaian output dan anggaran pada masing-masing Indikator kinerja, namun belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan	a. Melengkapi laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam proses mencapai target kinerja di setiap level sasaran dan atau IKU. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal.	TW II	Laporan Kinerja Tahun 2024 telah menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya pada setiap sasaran dan atau IKU	-	-	Telah ditambahkan data dukung Laporan Kinerja tahun 2024 dengan menyajikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumberdaya
		Laporan Kinerja belum menyajikan pembahasan mengenai penyesuaian anggaran sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan	b. Menyempurnakan penyajian pada laporan kinerja dengan penjelasan mengenai dasar/latar belakang apabila terdapat penyesuaian aktivitas/anggaran/perencanaan	TW II	Laporan Kinerja Interim TW I 2025 akan disempurnakan dengan menyajikan	-	-	Telah disusun Laporan Kinerja Interim TW I tahun 2025



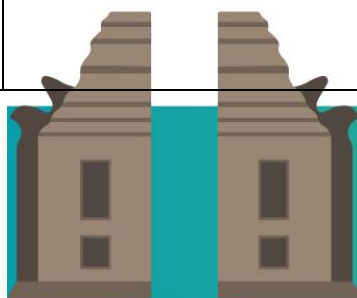


No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	kinerja sebagai strategi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		pembahasan mengenai strategi penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerja			
		Laporan Kinerja TW I Tahun 2024 telah memuat monitoring rekomendasi periode Tahun 2023 namun belum seluruh rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, terutama atas indikator kinerja yang belum tercapai.	c. Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.	TW II	Laporan Evaluasi Internal TW I 2025 telah dimanfaatkan untuk memonitoring hasil dan perbaikan kinerja. Dari hasil evaluasi TW I 2025 BBPOM di Serang mengajukan penyesuaian target ke Roren pada IKU 8, 10, 12, 15, 16, 18 dan 19 pada bulan April 2025	-	-	Telah ditambahkan laporan evaluasi internal TW I tahun 2025 Telah ditambahkan usulan penyesuaian target tahun 2025
4	Evaluasi Akuntabilitas	Laporan Evaluasi Internal (LEI) belum seluruhnya menyajikan	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara	TW II	Indeks kesadaran	-	-	Telah ditambahkan laporan evaluasi



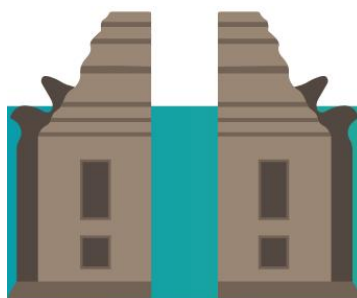


No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	Kinerja Internal	hasil analisis capaian kinerja terutama terkait adanya permasalahan/kendala/hambatan yang menghambat capaian kinerja per masing-masing IKU serta tindak lanjutnya, misalnya pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang.	berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian permasalahan/kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta pelaksanaan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target.		masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang merupakan target tahunan yang penilaiannya keluar pada akhir TW IV 2024. Pada Laporan Kinerja Interim TW I, TW II dan TW III 2024 telah disampaikan permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks kesadaran masyarakat			internal TW I tahun 2025 Pada laporan kinerja interim TW I, TW II dan TW III pada tahun 2024 telah disampaikan permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang





No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					(awareness index) selama triwulan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2025, terhadap indikator yang memiliki target tahunan telah dilakukan pembahasan dalam Laporan Evaluasi Internal			
		Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya namun belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.	b. Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker.	TW II	Balai Besar POM di Serang telah menindaklanjuti hasil Inspektorat Utama Tahun 2023 yang belum sesuai	-	-	Balai Besar POM di Serang telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama tahun 2023 yang sudah diupload di sapaapip





3.3 Realisasi Anggaran

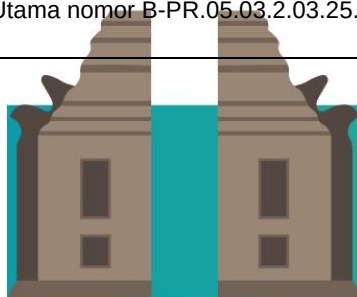
REALISASI ANGGARAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	6.536.286.000	15.370.692.000	7.171.967.000	29.078.945.000
Realisasi	1.690.670.471	1.520.945.311	44.985.000	3.256.600.782
Persentase	25,87%	9,90%	0,63%	11,20%

*Berdasarkan realisasi aplikasi Omspan s.d bulan Maret 2025

Penyesuaian aktivitas/anggaran/perencanaan kinerja serta perubahan pagu anggaran yang terjadi pada Triwulan I tahun 2025 dan Strategi Pencapaian Kinerja:

No	Penyesuaian Anggaran	Strategi Pencapaian Kinerja
1	Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024	- Bersama dengan Kepala Balai melakukan perhitungan ketercapaian target output sesuai <i>selfblocking</i> BBPOM di Serang sebesar Rp 3.052.581.000,- - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
2	Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 (Sesuai Inpres No.1 Tahun 2025)	- Revisi Penambahan blokir pada halaman IV DIPA A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 11.230.764.000 - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA - Bersama dengan Kepala Balai melakukan perhitungan ketercapaian target output
3	Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025	- Revisi pemanfaatan realokasi anggaran belanja modal. Anggaran BBPOM di Serang berkurang sebesar Rp 274.000.000,- - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA





REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	100.00	115.61	16,150,000	Rp 21,900,347	135.61
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	0.00	0.00	0.00	7,791,300	Rp 7,791,300	100.00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	24,975,500	Rp 33,555,800	134.35
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0	0.00	24,975,500	Rp 33,555,800	134.35
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	95.00	111.76	4,403,000	Rp 5,018,613	113.98
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72.00	100.00	138.89	0	Rp -	0
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	100.00	113.64	4,055,000	Rp 5,985,000	147.60
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	0	0.00	4,055,000	Rp 5,985,000	147.60
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	0	0.00	4,960,000	Rp 20,235,808	407.98
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00	4,364,800	Rp 17,807,511	407.98
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	98.45	110.71	595,200	Rp 2,428,297	407.98
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57.00	7.14	12.53	0	Rp 897,000	#DIV/0!
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66.00	71.3	108.03	147,684,500	Rp 110,681,600	74.94
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	89.7	104.33	20,931,600	Rp 16,831,600	80.41

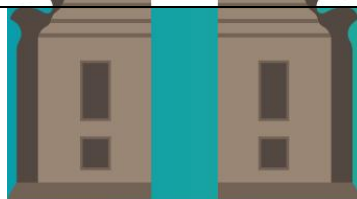




No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10.00	10	100.00	3,690,000	Rp 2,552,000	69.16
16	Jumlah desa pangan aman	10	10	100.00	170,000	Rp 170,000	100.00
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100.00	0	Rp -	#DIV/0!
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20.00	13.33	66.65	2,440,000	Rp -	0.00
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10.00	9.38	93.80	70,405,000	Rp 71,298,150	101.27
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	21,680,000	Rp 73,119,080	337.27
21	Indeks Pelayanan Publik UPT *)	0.00	0.00	115.70	9,192,600	Rp 10,826,300	117.77
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	58,361,300	Rp 44,985,000	77.08
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	1,311,000	Rp 1,310,500	99.96
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	2,183,018,936	Rp 2,766,488,977	126.73
25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja *)	0.00	0.00	#DIV/0!	2,890,000	Rp 3,177,100	109.93

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan %	Capaian Anggaran %	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	119.04	192.50	-0.42	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12.53	-	-	Belum Diukur
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108.03	74.94	0.44	Efisien

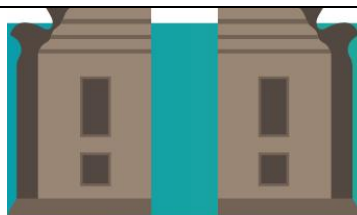




No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan %	Capaian Anggaran %	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	100.90	62.39	0.93	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	66.65	-	-	Belum Diukur
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	93.80	101.27	-0.07	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	337.27	-0.70	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang Prima	115.70	117.77	-0.02	Tidak Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	103.43	-	Belum Diukur

REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)			Capaian TE
		T	R	%	T	R	%	
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21.43	Rp 293,971,000	Rp 73,119,080	24.87	75 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	324	64	19.75	Rp 312,175,000	Rp 10,826,300	3.47	75 %
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9474	278	2.93	Rp 2,783,920,000	Rp 14,302,000	0.51	75 %
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0.00	Rp 228,000,000	Rp 4,487,600	1.97	75 %
5	Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	6	26.09	Rp 98,337,000	Rp 2,529,600	2.57	75 %





No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)			Capaian TE
		T	R	%	T	R	%	
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0.00	Rp 149,470,000	Rp -	0.00	#DIV/0!
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	5	71.43	Rp 80,000,000	Rp 44,985,000	56.23	95 %
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0.00	Rp 2,193,167,000	Rp 110,681,600	5.05	75 %
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Serang	4	1	25.00	Rp 490,912,000	Rp 71,298,150	14.52	90 %
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	0	0.00	Rp 386,510,000	Rp 2,552,000	0.66	75 %
11	Desa Pangan Aman	5	0	0.00	Rp 642,226,000	Rp 170,000	0.03	75 %
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	0	0.00	Rp 115,636,000	Rp -	0.00	#DIV/0!
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100.00	Rp 44,950,000	Rp 7,791,300	17.33	75 %
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20	0	0.00	Rp 75,382,000	Rp -	0.00	#DIV/0!
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	291	45	15.46	Rp 248,369,000	Rp 72,130,213	29.04	75 %
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	658	100	15.20	Rp 489,832,000	Rp 21,900,347	4.47	75 %
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	87	15	17.24	Rp 142,392,000	Rp 11,970,000	8.41	86 %
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	8	1	12.50	Rp 10,601,000	Rp 897,000	8.46	92 %
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	454	83	18.28	Rp 634,200,000	Rp 40,471,615	6.38	75 %
20	Alat Laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0.00	Rp 6,942,497,000	Rp -	0.00	#DIV/0!

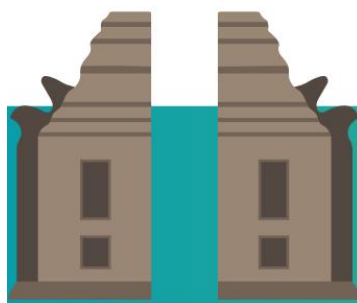




No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)			Capaian TE
		T	R	%	T	R	%	
21	Layanan BMN	1	0	0.00	Rp 8,000,000	Rp -	0.00	#DIV/0!
22	Layanan perkantoran	1	0	0.00	Rp 12,708,398,000	Rp 2,766,488,977	21.77	75 %

Anggaran Balai Besar POM di Serang bersumber dari APBN sesuai DIPA-063.01.2.672821/2025 yang diterbitkan 2 Desember 2024 sebesar Rp 29.352.945.000 termasuk *selfblocking* pada Triwulan I sebesar Rp 11.230.764.000 serta berdasarkan Surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 adanya realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan dengan nomor S-75/MK.02/2025 13 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sehingga total Anggaran Balai Besar POM di Serang sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp 29.352.945.000 realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 3.256.600.782 atau sebesar 11,20% termasuk *selfblocking*.

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Serang menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.





3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	> 1,81	75% (Tidak Efisien)





Tingkat Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Serang Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

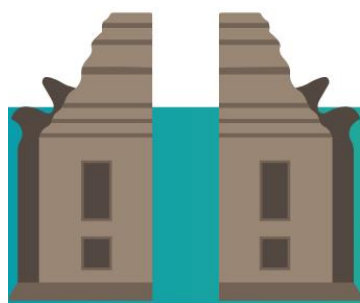
Tabel Tingkat Efisiensi Indikator

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.50	100.00	115.61	16,150,000	Rp 21,900,347	135.61	0.85	-0.15	75 %	Tidak Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	0.00	0.00	0.00	7,791,300	Rp 7,791,300	100.00	0.00	-1.00	75 %	Belum Diukur
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	24,975,500	Rp 33,555,800	134.35	0.88	-0.12	75 %	Tidak Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0	0.00	24,975,500	Rp 33,555,800	134.35	0.00	-1.00	75 %	Belum Diukur
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	95.00	111.76	4,403,000	Rp 5,018,613	113.98	0.98	-0.02	75 %	Tidak Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72.00	100.00	138.89	0	Rp -	0	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	100.00	113.64	4,055,000	Rp 5,985,000	147.60	0.77	-0.23	75 %	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	0	0.00	4,055,000	Rp 5,985,000	147.60	0.00	-1.00	75 %	Belum Diukur
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	0	0.00	4,960,000	Rp 20,235,808	407.98	0.00	-1.00	75 %	Belum Diukur





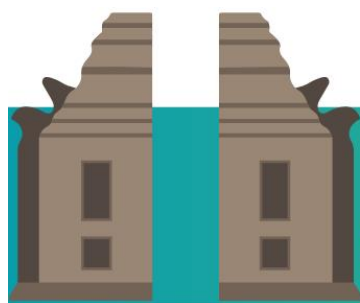
No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00	4,364,800	Rp 17,807,511	407.98	0.31	-0.69	75 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	98.45	110.71	595,200	Rp 2,428,297	407.98	0.27	-0.73	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57.00	7.14	12.53	0	Rp 897,000	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66.00	71.3	108.03	147,684,500	Rp 110,681,600	74.94	1.44	0.44	92 %	Efisien
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	89.07	103.59	20,931,600	Rp 16,831,600	80.41	1.29	0.29	95 %	Efisien
		15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10.00	10	100.00	3,690,000	Rp 2,552,000	69.16	1.45	0.45	92 %	Efisien
		16	Jumlah desa pangan aman	10	10	100.00	170,000	Rp 170,000	100.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100.00	0	Rp -	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20.00	13.33	66.65	2,440,000	Rp -	0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien





No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10.00	9.38	93.80	70,405,000	Rp 71,298,150	101.27	0.93	-0.07	75 %	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	21,680,000	Rp 73,119,080	337.27	0.30	-0.70	75 %	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT *)	0.00	0.00	#DIV/0!	9,192,600	Rp 10,826,300	117.77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	58,361,300	Rp 44,985,000	77.08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur
		23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	1,311,000	Rp 1,310,500	99.96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM *)	0.00	0.00	#DIV/0!	2,183,018,936	Rp 2,766,488,977	126.73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur
		25	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja *)	0.00	0.00	#DIV/0!	2,890,000	Rp 3,177,100	109.93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Diukur

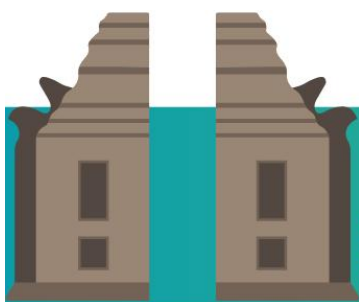
*Target anggaran berdasarkan RPD pada POK 4





Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Serang mempunyai 25 (dua puluh lima) indikator untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan dengan hasil, 4 (empat) indikator efisien, 12 (dua belas) indikator tidak efisien dan 9 (sembilan) indikator belum diukur. Dari hasil tabel diatas diperoleh -1,00 – 0,45 bisa disimpulkan semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada triwulan I ini nilai ketidakefisienan tertinggi terlihat pada IKU 12 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan karena rencana penarikan anggaran pada TW I tidak ada, akan tetapi ada realisasi anggaran sebesar Rp 897.000 sedangkan capaian output tidak tercapai sebesar 12,53% hal ini dikarenakan Pemeriksaan sarana produksi Fortifikasi selanjutnya di bulan Mei dan Juni. Berdasarkan data tabel diatas, berikut rinciannya:

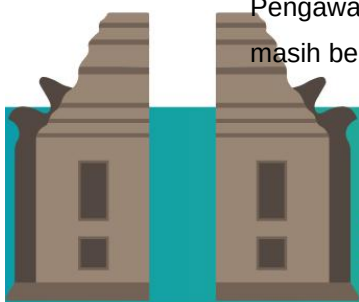
- 1) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan rencana penarikan dana pada TW I sebesar Rp 96.325.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp 154.263.476. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 11 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 1 adalah tidak efisien dengan nilai TE -0,59, beberapa capaian indikator yang dihasilkan tidak sebanding dengan capaian anggaran yang terealisasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian adalah sudah melakukan revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sampling obat dan makanan serta pengujian dan pengadaan berupa media mikro dan reagen untuk menunjang jaminan mutu hasil pengujian serta masih terlaksananya kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dalam pengambilan sampel untuk diuji.
 1. Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi anggaran tidak sebanding dengan target anggarannya pada triwulan I yang sudah terealisasi pada pengadaan sampel obat, obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan masih berjalan hingga triwulan IV.
 2. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang belum dapat diukur karena target output dihitung pada akhir tahun akan tetapi sudah ada realisasi anggarannya pada triwulan I yaitu pada Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans Bagi tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
 3. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi anggaran yang tidak sebanding dengan target anggarannya pada triwulan I yang sudah terealisasi pada pengujian laboratorium sampel makanan berupa reagen dan media mikro sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
 4. Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang belum dapat diukur karena belum ada panduan pengisian fix dari pusat tentang IKU ini, namun pada triwulan I yang sudah





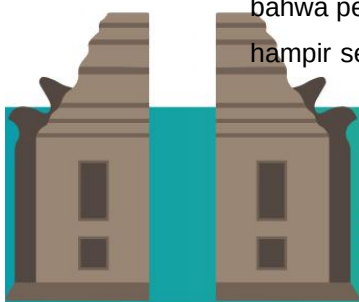
teralisasi pada pengujian laboratorium sampel makanan berupa reagen dan media mikro sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.

5. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi anggaran yang tidak sebanding dengan target anggarannya pada triwulan I yang sudah terealisasi pada pengadaan sampel makanan sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
6. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi output dan target output yang sudah melebihi capaiannya akan tetapi target dan realisasi anggarannya belum ada sehingga tidak sebanding pada triwulan I belum ada anggaran yang terealisasi pada kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Tindak Lanjut/ Monitoring Hasil Pengawasan (Saksi Pemusnahan/Pendampingan/Tindak Lanjut Kasus) sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
7. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi output dan target output yang sudah melebihi capaiannya dan target serta realisasi anggarannya juga sudah melebihi capaiannya pada triwulan I kegiatan yang sudah terlaksana Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
8. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang belum dapat diukur karena belum ada panduan pengisian fix dari pusat tentang IKU ini, pada triwulan I kegiatan yang sudah terlaksana Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
9. Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang belum dapat diukur karena belum ada panduan pengisian fix dari pusat tentang IKU ini, pada triwulan I kegiatan yang sudah terlaksana Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
10. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan target anggarannya, pada triwulan I kegiatan yang sudah terlaksana Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.





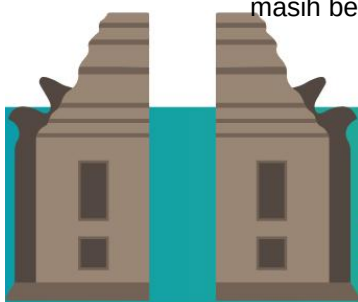
11. Indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang tidak efisien karena realisasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan target anggarannya, pada triwulan I kegiatan yang sudah terlaksana Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru sehingga masih berjalan hingga triwulan IV.
- 2) Sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan rencana penarikan dana pada TW I sebesar Rp 0 dan realisasi anggaran sebesar Rp 897.000. Tingkat efisien untuk sasaran kegiatan 2 tidak efisien, dikarenakan tidak direncanakannya penarikan dana akan tetapi ada realisasi di triwulan I.
12. Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena dikarenakan tidak direncanakannya penarikan dana akan tetapi ada realisasi di triwulan I. Namun di triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai Besar POM di Serang yang masih berjalan hingga triwulan IV.
- 3) Sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran sebesar Rp 147.684.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp 110.681.600. Tingkat efisien untuk sasaran kegiatan 2 adalah efisien.
13. Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran yang tidak melebihi rencana anggaran penarikannya pada triwulan I sudah terdapat realisasi pada kegiatan Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling, Pengamanan Makanan RI 1 RI 2, Pengadaan Penunjang Laboratorium dan Pengujian Sampel Khusus (SRL, Uji Banding, IHT, Verifikasi Lab) yang masih berjalan hingga triwulan IV.
- 4) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan rencana penarikan anggaran sebesar Rp 24.791.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.553.600. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 4 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ada 1 indikator yang tidak efisien dengan nilai TE sebesar -1,00, ketidakefisien ini disebabkan realisasi anggaran dan target sampai dengan triwulan I tidak sebanding target dan realisasi output. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam rangka tindak lanjut yang masih berjalan hingga triwulan IV.
14. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi dan target anggaran hampir sebanding dengan realisasi dan target output pada triwulan I yang sudah terealisasi





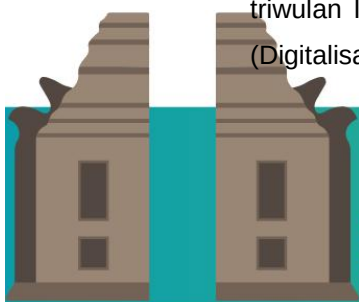
pada kegiatan Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan, KIE Stunting dan Forum Konsultasi Publik yang masih berjalan hingga triwulan IV.

15. Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang efisien karena realisasi dan target anggaran hampir sebanding dengan realisasi dan target output pada triwulan I yang sudah terealisasi pada kegiatan Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G dan Koordinasi Sekolah yang masih berjalan hingga triwulan IV.
 16. Indikator Jumlah desa pangan aman bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi dan target anggaran sudah sebanding dengan realisasi dan target output indikator pada triwulan I yang sudah terealisasi pada kegiatan Advokasi Lintas Sektor yang masih berjalan hingga triwulan IV.
 17. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena capaian output sudah terealisasi akan tetapi anggaran belum digunakan sehingga tidak sebanding pada triwulan I.
- 5) Sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 2.440.000 dengan realisasi anggaran triwulan I sebesar Rp 0. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 5 adalah tidak efisien dengan nilai TE - 1,00, ketidakefisiensi ini disebabkan belum adanya realisasi pada triwulan I. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan dan Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional berjalan hingga triwulan IV.
18. Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi anggaran belum digunakan pada triwulan I.
- 6) Sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 70.405.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.298.150. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 6 adalah tidak efisien dengan nilai TE -0,07, ketidakefisiensi ini disebabkan capaian anggaran yang dihasilkan hampir tidak sebanding dengan capaian output yang terealisasi. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian efisiensi adalah Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan, Gelar Kasus dan Pelaporan dan Pemberkasan hingga triwulan IV.
19. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena capaian anggaran yang dihasilkan tidak sebanding dengan capaian output yang terealisasi, pada triwulan I yang sudah terealisasi pada kegiatan Pengadaan Penunjang Laboratorium yang masih berjalan hingga triwulan IV.





- 7) Sasaran kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 21.680.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 73.119.080. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 7 adalah efisien dengan nilai TE -0,70, ketidakefisiensi ini disebabkan capaian indikator yang dihasilkan tidak sebanding dengan capaian anggaran yang terealisasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian adalah sudah terlaksananya pelaporan melalui ADP.
20. Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi anggaran belum sebanding dengan realisasi indikator pada triwulan I yang sudah terealisasi pada Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemusnahan Barang Sitaan dan Koordinasi/ Konsultasi/Keikutsertaan/Verifikasi Informasi/Pra Peradilan yang masih berjalan hingga triwulan IV.
- 8) Sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang Prima dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 9.192.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.826.300. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 8 adalah belum dapat diukur dikarenakan target indikator pembentuk untuk sasaran kegiatan baru dapat dilakukan pengukuran di akhir tahun 2025.
21. Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran belum dapat diukur karena realisasi output hanya bisa diukur pada akhir tahun namun sampai dengan triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Permohonan Notifikasi KOS, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi Importir OT, SK), Rapat/ Desk CAPA Sertifikasi CDOB/ SPA CPKB/ CPOTB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik/ Konsultasi IP CPPOB dan Koordinasi TKPPOM/ DAK/ Layanan Publik Lainnya yang masih berjalan hingga triwulan IV.
- 9) Sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 2.245.581.236 dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.815.961.577. Tingkat efisien untuk sasaran kegiatan 9 belum dapat diukur, dikarenakan target indikator pembentuk untuk sasaran kegiatan baru dapat dilakukan pengukuran di akhir tahun 2025.
22. Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran belum dapat diukur karena realisasi output hanya bisa diukur pada akhir tahun 2025 namun di triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang masih berjalan hingga triwulan IV.
23. Indikator Nilai AKIP UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran belum dapat diukur karena realisasi output hanya bisa diukur pada akhir tahun 2025 namun di triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip) yang masih berjalan hingga triwulan IV.

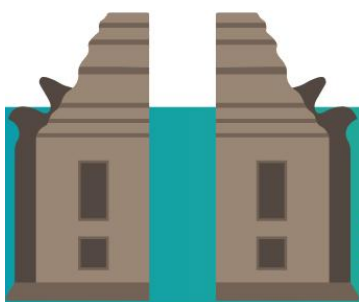




24. Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran belum dapat diukur karena realisasi output hanya bisa diukur pada akhir tahun 2025 namun di triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran Pembayaran gaji dan tunjangan, Operasional Perkantoran dan Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor yang masih berjalan hingga triwulan IV.
25. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran belum dapat diukur karena realisasi output hanya bisa diukur pada akhir tahun 2025 namun di triwulan I sudah terdapat realisasi pada anggaran Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai yang masih berjalan hingga triwulan IV.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa target output tahunan hanya dapat di klaim berdasarkan progress kegiatan yang sudah selesai dan di klaim di akhir tahun, sehingga tidak sebanding dengan realisasi anggaran yang sudah terlaksana. Balai Besar POM di Serang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.





BADAN POM
BALAI BESAR POM DI SERANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 menyajikan pengukuran capaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang yang dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan terhadap indikator-indikator yang dapat dilakukan perhitungan output secara langsung, sedangkan beberapa indikator yang dihitung pada akhir periode anggaran akan disajikan pada laporan SAKIP secara utuh.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian Kinerja Triwulan I 2025 Balai Besar POM di Serang sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (Dua) indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil “Sangat Baik” ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu pada:

- a) Sasaran kegiatan ketiga “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” sebesar 108,03%.
- b) Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sebesar 103,59%.

2. Terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil “Baik” ($90\% < x \leq 100\%$), yaitu pada:

- a) Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan” sebesar 100,00%, “Jumlah desa pangan aman” sebesar 100,00% dan “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” sebesar 100,00%.
- b) Sasaran kegiatan keenam “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT masing-masing wilayah kerja UPT” pada indikator kerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” sebesar 93,80%.



- c) Sasaran kegiatan kesepuluh “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” sebesar 100,00%.

3. Terdapat 1 (Satu) indikator kinerja yang “Cukup” ($60\% \leq x \leq 90\%$) yaitu pada:

- a) Sasaran kegiatan lima “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan” sebesar 66,65%.

4. Terdapat 1 (Satu) indikator kinerja yang “Kurang” ($<60\%$) yaitu pada:

- a) Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” pada indikator kinerja “Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan” sebesar 12,53%.

5. Terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja yang “Tidak Dapat Disimpulkan” ($>110\%$) yaitu pada:

- a) Sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 115,61%, pada indikator kinerja “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 117,65%, pada indikator kinerja “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 111,76%, pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” sebesar 138,89%, pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 113,64%, pada indikator kinerja “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 125,00% dan pada indikator kinerja “Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan” sebesar 110,71%.

Nilai Kinerja Organisasi triwulan I tahun 2025 adalah 97,20% dengan kriteria **Baik**. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang didukung anggaran APBN di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 29.352.945.000,- termasuk selfblocking sebesar Rp 3.052.581.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2025 dengan nomor SP DIPA-063.01.2.672821/2025 tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 adanya realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000,-. Pada tanggal 14 Februari 2025 Surat Sekretaris Utama dengan



nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, mengatakan bahwa Balai Besar POM di Serang harus memblokir anggaran sebesar Rp 11.230.764.000,- sehingga anggaran Balai Besar POM di Serang sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp 29.078.945.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 3.256.600.782 atau sebesar 11,20%.

4.2 Saran

1. Dari 25 indikator kinerja yang dievaluasi masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai target triwulan I tahun 2025 dimana 1 IKU dengan kategori cukup serta 1 IKU dengan kategori kurang, perlu dilakukan perhitungan kembali langkah-langkah strategis pencapaian indikator dan dilakukan penyesuaian target
2. Dari 25 indikator kinerja yang dievaluasi terdapat 7 indikator yang tidak dapat disimpulkan dengan capaian diatas 110% terhadap target triwulan I tahun 2025. Perlu dilakukan perhitungan kembali dan dilakukan penyesuaian target
3. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target.
4. Memelihara komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin efektivitas pelaksanaan SAKIP.
5. Meningkatkan *awareness* semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi.





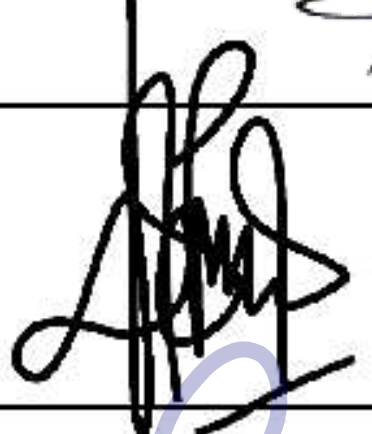
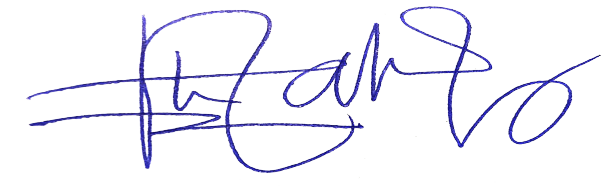
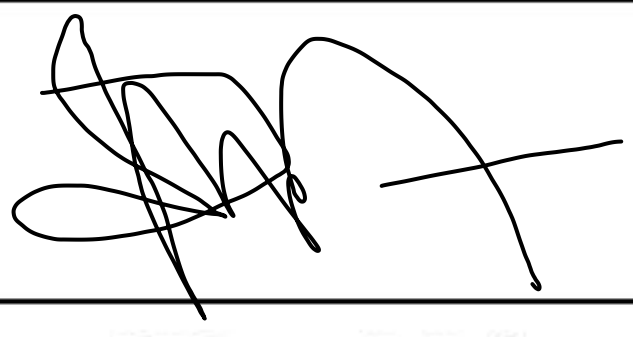
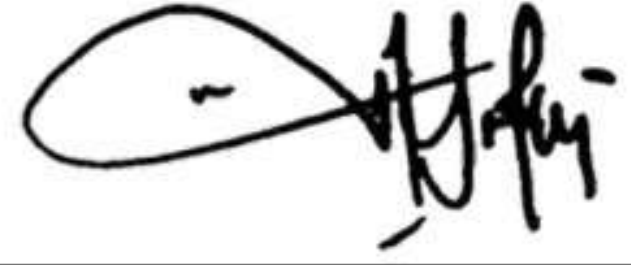
BADAN POM
BALAI BESAR POM DI SERANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

LAMPIRAN

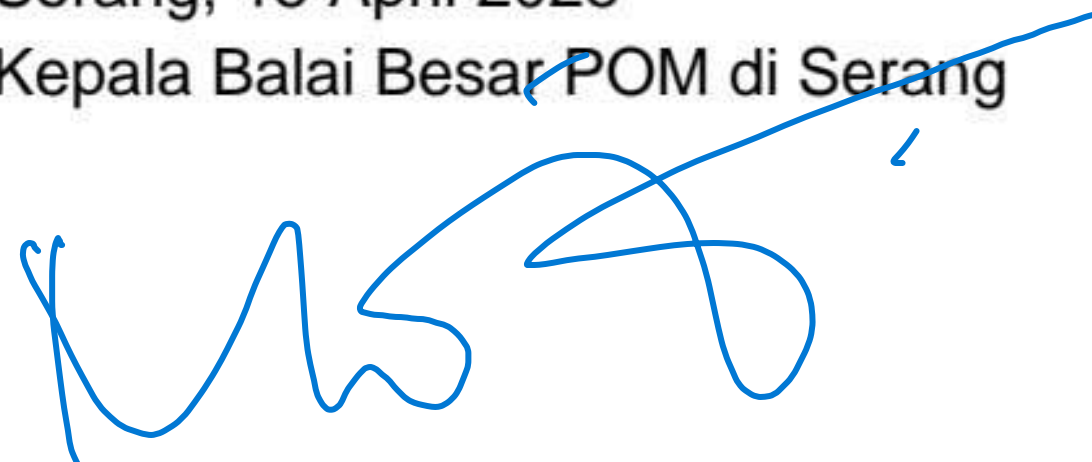
LEMBAR PERSETUJUAN DATA KINERJA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Verifikator Data :

Nama	Fungsi / Bagian	Tanda Tangan
Prabandaru Bismo, S.Farm., Apt	Inspeksi	
Dianing Pratiwi, STP	Sertifikasi	
Faizal Mustofa Kamil, S.Si, Apt	Pengujian	
Rhatih Eka Sasongko, S.Si., Apt., M.Farm	Infokom	
Farida Ayu Widyastuti, S.Farm., Apt	Penindakan	
Nenden Yopie Dwilestari Suparyat, S.Ak	Tata Usaha	

Menyetujui dan menyatakan data Capaian Kinerja Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang bulan Maret 2025 (terlampir) yang telah diisikan pada <https://bit.ly/monevserang2025> adalah benar adanya.

Serang, 15 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Serang



Mojaza Sirait, S.Si., Apt

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Pengujian : - Pelaksanaan destruksi sebagian sampel OBA dilakuakn di Lab PPPOMN dikarenakan microwave Lab Pangan mengalami kerusakan. Kondisi saat ini 3 alat microwave digester Lab BBPOM di Serang mengalami kerusakan.	Pengujian Mengajukan permintaan transfer alat Microwave Digester System Anton Paar Multiwave Pro dari PPPOMN
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Pengujian - Terdapat 5 sampel TIE pada komoditi OBA yang tidak dilakukan penandaan (pemilihan jenis sampel TIE pada SIPT, untuk penandaan tidak dapat dilakukan). Hasil pengujian TMS BKO. Tiga alat microwave difester Lab BBPOM Serang masih mengalami kerusakan. - Terdapat kekurangan kebutuhan reagen Ammonium Phosphate Monobasic, namun sudah dapat diatasi dengan sharing reagen dengan BPOM Bengkulu. Saat ini reagen sudah diterima di BBPOM Serang. Dengan adanya sharing reagen tersebut, kebutuhan tercukupi hingga Desember 2025	Pengujian : - Persiapan pelaksanaan transfer alat Microwave Digester System Anton Paar Multiwave Pro dari PPPOMN - Mengajukan pengadaan reagen Ammonium Phosphate Monobasic untuk pengujian berikutnya dan untuk mengembalikan ke BPOM Bengkulu
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Pengujian : Sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Th 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka terdapat perubahan renlak sampling dan pengujian, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Pengujian : - Membuat Renlak baru terkait sampling dan pengujian menyesuaikan kemampuan uji laboratorium dan ketersediaan anggaran - Dilakukan permohonan pemindahan alat Microwave dari Laboratorium Pangan PPPOMN ke Laboratorium di Serang per tanggal 6 Februari 2025, per tanggal 10 Februari 2025 sudah ada surat balasan dari laboratorium PPPOMN bahwa PPPOMN menyetujui pemindahan microwave ke Laboratorium BBPOM di Serang. Proses pemindahan akan dilakukan pada 14 April 2025. Proses klik e-katalog diperkirakan tanggal 9 April 2025 (setelah libur hari raya Idul Fitri).

[illegible]

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemuenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	90.00	50.00	0.00	0.00	33.33	0.00	100.00	33.33		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	90.00	80.00	60.00	66.67	50.00	66.67	100.00	73.00		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	90.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	95.00		

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	72.00	100.00	100.00	100.00	Dep 1 -Di bulan Januari terdapat pemeriksaan ke pelaku usaha (2 sarana) dan lintas sektor (6 sarana). Terhadap pemeriksaan tersebut baru dilakukan di akhir Januari 2025 sehingga surat tindak lanjut baru akan diterima sarana di bulan Februari (tidak dihitung sebagai capaian TL/CAPA bulan Januari)	Dep 1 Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan monev timeline CAPA 21 HK terhadap surat tindak lanjut yang sudah diterima sarana
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	72.00	100.00	100.00	100.00	Dep 1 -Pada Minggu ke-1 dan 2 Februari tidak dapat dilakukan pemeriksaan sarana karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan target dan penyesuaian Juknis Pemeriksaan dari Pusat. Pemeriksaan baru dilakukan pada akhir Februari (2 pelaku usaha) sehingga surat tindak lanjut baru bisa diterbitkan di bulan Maret	Dep 1 -Memastikan sarana terperiksa di akhir bulan Feb (2 sarana) dibuat surat tindaklanjutnya tepat waktu -Memastikan target pemeriksaan bulan Maret terealisasi sesuai timeline dan mempercepat approval surat tindak lanjut agar bisa dikirimkan ke sarana tepat waktu -Menghubungi APJ sarana yang belum mengirimkan CAPA
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	72.00	100.00	100.00	100.00	Dep 1 -Pada bulan Maret terdapat pemeriksaan sarana dengan 3 tindak lanjut yang berupa PSK. Pelaksanaan PSK baru dilakukan terhadap 1 sarana di akhir Maret. Masih terdapat 2 sarana yang belum dilakukan PSK sehingga sarana belum menerima surat tindak lanjut untuk dasar pembuatan CAPA.	Dep 1 -Memastikan pelaksanaan PSK terhadap 2 sarana yang surat tindak lanjutnya telah terbit di akhir bulan Maret bisa terealisasi di bulan April. -Memastikan surat Tindak Lanjut (dari pemeriksaan di bulan Maret) dikirimkan CAPAnya tepat waktu sesuai timeline 21 HK

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Januari Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA	Pemeriksaan sarana produksi kosmetik akan dilakukan sesuai renlak.
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Februari Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA	Pemeriksaan sarana produksi kosmetik akan dilakukan sesuai renlak.
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Maret Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA	Pemeriksaan sarana produksi kosmetik akan dilakukan sesuai renlak.

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	4	4	4	20.00	4	4	70.00	4	4	10.00	100.00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	11	11	11	20.00	11	11	70.00	11	11	10.00	100.00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	43	43	43	20.00	43	43	70.00	43	43	10.00	100.00

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari		100.00	100.00	93.33	100.00	85.59	95.78
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari		100.00	100.00	100.00	100.00	86.64	97.33
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret		100.00	100.00	100.00	100.00	92.24	98.45

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	1	1	14	7.14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1	1	14	7.14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	1	1	14	7.14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen

Nomor : B-PR.10.01.10.03.25.140 Jakarta, 26 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan
Tingkat 4 TW 1 Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM (terlampir)

Dalam rangka pemantauan pemenuhan IKU 'Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', maka PPPOMN telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 1 Tahun 2025. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen SKL yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Metode Terverifikasi.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4 sebesar 74,3% atau 108,9% dari target sebesar 68,6%
 - b. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target sebesar 66,2%..
2. Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah ditanggapi PPPOMN seperti tercantum pada Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4.

Sebagai tindak lanjut, kami menyarankan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target pada TW 2.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., Msi

Tembusan:

- Sekretaris Utama Badan POM
- Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

LAMPIRAN 1

Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

No : B-PR.10.01.10.03.25.140

Tanggal : 26 Maret 2025

Balai Besar POM Tingkat 4

- 1 Balai Besar POM di Medan
- 2 Balai Besar POM di Pekanbaru
- 3 Balai Besar POM di Semarang
- 4 Balai Besar POM di Surabaya
- 5 Balai Besar POM di Samarinda
- 6 Balai Besar POM di Makasar
- 7 Balai Besar POM di Manado
- 8 Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar/Balai POM Tingkat 3

- 1 Balai Besar POM di Serang
- 2 Balai Besar POM di Mataram
- 3 Balai Besar POM di Padang
- 4 Balai Besar POM di Denpasar
- 5 Balai Besar POM di Bandung
- 6 Balai Besar POM di Pontianak
- 7 Balai Besar POM di Yogyakarta
- 8 Balai Besar POM di Jakarta
- 9 Balai Besar POM di Bandar Lampung
- 10 Balai Besar POM di Banjarmasin
- 11 Balai Besar POM di Palembang
- 12 Balai Besar POM di Aceh
- 13 Balai Besar POM di Palangkaraya
- 14 Balai Besar POM di Gorontalo
- 15 Balai Besar POM di Kupang
- 16 Balai POM di Batam
- 17 Balai POM di Bengkulu
- 18 Balai POM di Palu
- 19 Balai POM di Kendari
- 20 Balai POM di Ambon
- 21 Balai POM di Manokwari
- 22 Balai POM di Pangkalpinang
- 23 Balai POM di Jambi
- 24 Balai POM di Mamuju
- 25 Balai POM di Sofifi
- 26 Balai POM di Tarakan

LAPORAN

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4



**Triwulan 1
2025**



I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersedia di pasar.

Pengawasan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: hal tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan;
- c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
- d. Standar Metode Terverifikasi.

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk:

- a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
- c. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
- d. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, BBPOM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium'. Tahun 2025 BBPOM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan unggul dan kompetensi pengujian unggul.

PPPOMN sebagai pengampu indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian

pemenuhan target SKL setiap triwulan. Target rata-rata nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 pada tahun 2025 adalah 72,3%, sedangkan target rata-rata nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 pada tahun 2025 adalah 69,5%. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak terhadap kemampuan pemenuhan nilai SKL. Setelah berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, PPPOMN mengirimkan surat dengan nomor B-PR.10.01.10.02.25.106 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permintaan Data Target SKL TW -TW 3 Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025 dan surat nomor B-PR.10.01.10.02.25.107 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permintaan Data Target SKL TW -TW 3 Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025. Terdapat 7 (tujuh) UPT yang mengajukan penyesuaian target, yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya (TW2 dan TW 3), BBPOM di Jakarta, BBPOM di Pontianak, Balai POM di Mamuju (TW 3), BBPOM di Jayapura dan Balai POM di Mamuju. Oleh karena itu, pada laporan ini dicantumkan hasil penilaian pemenuhan target nilai SKL TW 1 2025, baik terhadap target awal maupun target 'penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran'.

II. TUJUAN

1. Melakukan pemetaan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium TW 1 Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala PPPOMN No T-PR.10.01.10.03.25.120 tanggal 4 Maret 2025.

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Balai Basar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
2. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data

peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).

3. Pembuatan 'Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT"
4. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan 'Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4' yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputan 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Medan	70,1	78.6	86.0	50	41.9	70.7	69.1		102.3	
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78.9	82.3	80	46.0	76.5	73.5		104.1	
3	BBPOM di Semarang	79,7	85.3	85.2	90	47.3	82.4	70.3	76.2	117.3	108.2
4	BBPOM di Surabaya	80,4	77.2	84.9	30	48.5	66.4	72.7		91.4	
5	BBPOM di Samarinda	58,9	78.4	79.3	60	24.0	69.4	55.3		125.6	
6	BBPOM di Manado	68,7	76.1	85.7	90	35.3	76.7	67.5		113.6	
7	BBPOM di Makassar	73,3	83.3	85.6	80	28.5	77.6	72		107.8	
Rata-rata		72.2	79.7	84.1	68.6	38.8	74.3	68.6		108.9	

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.3	80.3	50	44.4	72.2	71		101.6	
2	BBPOM di Padang	77	83.4	87.0	100	21.3	81.2	76.7		105.9	
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	81.3	30	26.3	65.9	64		103	
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	20.5	73.9	70		105.6	
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	78.8	76.9	80	44.1	75.2	75		100.2	
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	81.0	50	26.4	67.9	62		109.6	
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.0	85.1	20	17.1	62.2	58		107.3	
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.0	84.6	70	29.5	74.9	72.9		102.7	
9	BBPOM di Bandung	81.7	84.5	86.8	80	64.0	82.0	79		103.8	
10	BBPOM di Jakarta	72.8	81.7	85.9	30	70.4	71.0	65.1	64.6	109.1	109.9

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
11	BBPOM di Serang	71.5	85.1	90.2	40	27.0	71.3	66.0		108.0	
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.3	91.1	80	41.4	80.0	77.1		103.8	
13	BBPOM di Denpasar	81.4	80.9	85.6	100	54.9	83.1	80.7		102.9	
14	BBPOM di Mataram	81.7	86.6	86.5	90	53.3	83.9	80.5		104.3	
15	BBPOM di Kupang	70.2	75.2	86.1	70	36.8	72.5	68.07		106.5	
16	BBPOM di Banjar Baru	71.5	70.7	76.6	40	14.4	60.1	54.7		109.9	
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.1	77.6	90	24.1	75.0	69.5		107.9	
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.5	90.1	50	24.3	70.2	72.0	70.9	97.5	99.0
19	Balai POM di Tarakan	39.1	36.9	31.4	30	3.9	31.1	28.3		110.0	
20	Balai POM di Gorontalo	65.1	82.8	71.8	50	25.8	68.3	64.9		105.2	
21	Balai POM di Palu	77.0	83.2	87.3	70	49.1	78.0	74.7		104.4	
22	Balai POM di Sofifi	45.8	51.4	54.7	80	10.5	53.7	42.8		125.4	
23	Balai POM di Ambon	73.9	81.1	70.2	40	41.8	66.7	71.0		94.0	
24	Balai POM di Kendari	74.5	81.8	89.3	70	52.0	78.0	71.0		109.8	
25	Balai POM di Mamuju	49.6	58.9	57.8	50	3.1	51.3	48.9		104.9	
26	BBPOM di Jayapura	70	70.4	83.9	60	35.9	67.6	63.0	62.0	107.2	109.0
27	Balai POM di Manokwari	64.1	64.4	72.2	90	11.1	65.8	60.7	60.68	108.3	108.4
	Rata-rata	69.5	76.4	79.4	62.2	32.4	69.7	66.2		105.9	

V. PEMBAHASAN

Kegiatan peningkatan kemampuan laboratorium baik kapasitas maupun kapabilitas secara umum telah terlaksana dengan baik. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terutama terhadap ketersediaan reagensia untuk pemenuhan Standar Ruang Lingkup ternyata tidak terlalu berdampak pada pemenuhan nilai SKL karena UPT BPOM melakukan peningkatan pemenuhan nilai SKL melalui aspek lain yang tidak terpengaruh langsung oleh efisiensi anggaran yaitu Standar Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium dapat dicapai melalui kegiatan melibatkan personel penguji dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup. Selain itu peningkatan nilai SKL dicapai melalui pemenuhan Standar Peralatan karena anggaran pengadaan instrumen tidak mengalami efisiensi.

Berdasarkan data pemenuhan target nilai SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4, terdapat 1 (satu) UPT dengan capaian 'baik', 3 (tiga) UPT dengan capaian 'sangat baik' dan 3 (tiga) UPT dengan capaian 'di atas 110%' yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM Manado. BBPOM di Semarang memperoleh capaian 'baik' jika diukur terhadap penyesuaian target yang diusulkan.

Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 yang memperoleh capaian 'baik' berjumlah 2 (dua) UPT, capaian 'sangat baik' berjumlah 24 (dua puluh empat) UPT dan 1 (satu) UPT dengan capaian 'di atas 110%' yaitu Balai POM di Sofifi.

Rata-rata pemenuhan target nilai SKL Laboratorium Tingkat 4 sebesar 74,3 % atau 108,9% dari target nilai SKL TW1 sebesar 68,6%. Rata-rata pemenuhan target nilai SKL Laboratorium Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target nilai SKL TW1 sebesar 66,2%.

Balai Besar/Balai POM juga telah melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri juga telah merencanakan solusi untuk mengatasinya. PPPOMN selalu mendorong Balai

Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatasi kendala/permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dialokasikan serta memanfaatkan jejaring diantara laboratorium dalam 1 (satu) regional atau antar regional, namun demikian PPPOMN tetap akan memberikan masukan jika diperlukan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL pada TW 1 antara lain:

1. Permasalahan pada perencanaan penambahan beberapa ruang lingkup tidak terealisasi, karena adanya keterbatasan anggaran pembelian reagen, dan pembelian sampel.
2. Penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline.

Data lengkap terkait kendala/permasalahan dan rencana tindak lanjut tercantum pada Lampiran.

VI. KESIMPULAN

Peningkatan kemampuan laboratorium BPOM TW 1 terlaksana sesuai perencanaan yang dilakukan, ditandai dengan nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4 sebesar 74,3% atau 108,9% dari target sebesar 68,6% dan nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target sebesar 66,2%.

VII. SARAN

1. Balai Besar/Balai POM agar senantiasa mengawal pemenuhan target SKL pada triwulan selanjutnya dengan memaksimalkan capaian komponen SKL yang tidak terdampak langsung dengan adanya efisiensi anggaran.
2. UPT BPOM dengan pemenuhan target di atas 110% agar mengajukan penyesuaian target.

Jakarta, 26 Maret 2025

Menyetujui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., MSi.

Penyusun Laporan,
Ketua Tim Kerja Laboratorium OTOKSK
PPOMN



Aan Risma Uli N., SSI., Apt., MSi.

Lampiran 1. Kendala/permasalahan terkait Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Palu	Perencanaan penambahan ruang lingkup obat tidak terealisasi seluruhnya, karena hasil verifikasi tidak bagus dan tidak memungkinkan untuk mengulang akibat keterbatasan reagen	penyesuaian rencana, diprioritaskan untuk penambahan ruang lingkup obat yang tersedia reagensinya dan metode analisis relatif mudah dan tidak kompleks	-
2	BPOM di Ambon	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan dan parameter uji penugasan kluster baru terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia di laboratorium 3. Menyesuaikan reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
3	BBPOM di Yogyakarta	Permasalahan pada Perencanaan penambahan beberapa ruang lingkup obat tidak terealisasi, karena adanya keterbatasan anggaran pembelian reagen, dan pembelian sampel	penyesuaian rencana, diprioritaskan untuk penambahan ruang lingkup obat yang tersedia reagensinya dan sampel yang relatif mudah didapat di TW 2	-
4	BPOM di Pangkal Pinang	1. Rentang waktu antara penyampaian tools oleh PPPOMN dengan penetapan target terlalu sempit. PPPOMN melakukan beberapa tahap perubahan tools (dari beberapa laboratorium) setelah target ditetapkan, termasuk pada saat pengisian SKL di bulan Maret, sehingga ada sejumlah baseline yang mengalami penurunan. Kami harus melakukan beberapa kali revisi baseline dan rencana pemenuhan.	Melakukan penyesuaian rencana pemenuhan SKL sesuai tools terbaru. Semoga tidak ada lagi perubahan tools.	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
5	Balai Besar POM di Banda Aceh	2. Balai Besar POM di Banda Aceh tidak mempunyai target terhadap pemenuhan SRL ditahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Sampel yang akan diadakan banyak yang sudah diusahakan di tahun lalu baik ke RS pemerintah kota Banda Aceh atau kabupaten serta memasukkan target sampel RL pada sampling tetapi tidak bisa dipenuhi. Target tahun ini sebelum efisiensi anggaran adalah 17 sampel dan pengadaannya direncanakan melalui pemesanan ke PBF. Namun karena keterbatasan anggaran dan sampel susah diadakan melalui sampling karena sampel sulit ditemukan di Banda Aceh maka pemenuhan RL tidak bisa terealisasi. Hal ini juga berdampak pada kompetensi personel penguji. Akan diusahakan di TW selanjutnya apabila dapat diupayakan anggaran untuk untuk penyediaan sampel dan reagensia.	Berusaha menaikkan nilai SKL dengan penambahan target verifikasi metode analisa	-
6	BPOM di Sofifi	1. Penambahan RL obat belum dapat diklaim karena belum dilakukan verifikasi MA Disolusinya. Pemenuhan verifikasi tidak terlaksana karena reagen dan sampel terbatas dan blm dapat diadakan, serta waktu pengujian yg terbatas akibat pemindahan instrumen dari gedung lama ke gedung baru.	Penyesuaian rencana pemenuhan SKL secara keseluruhan. Pelaksanaan verifikasi MA disolusi untuk sampel yang sudah diverifikasi PK	-
		2. Penambahan RL dan Verifikasi MA kosmetik belum bisa dilakukan TW1 karena keterbatasan reagen dan pengadaan reagen tertunda karena adanya efisiensi, reagen yang tersedia difokuskan untuk pengerjaan sampel rutin	Penambahan RL dan verifikasi MA akan dilakukan pada TW 2.	--

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
7	BBPOM di Jakarta	Penambahan RL Obat belum sesuai target karena ada target sampel yang belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan RL	Akan diganti dengan pengujian sampel lain di Triwulan 2 dan seterusnya	-
		Penambahan Verifikasi MA Obat belum sesuai target karena di triwulan 1 lab Obat juga harus melakukan verifikasi beberapa MA lain yang sudah masuk dalam baseline dalam rangka persiapan reakreditasi, selain itu sampel obat yang harus diuji di triwulan 1 juga cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan MA terverifikasi sesuai target	Target MA terverifikasi akan dikejar di triwulan 2 dan seterusnya	-
8	BPOM di Batam	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum terlaksana dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, suku cadang, serta anggaran pembelian sampel yang kurang akibat adanya efisiensi	Penyesuaian rencana untuk parameter obat yang tersedia reagensinya dan sampel yang relatif mudah didapat	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
9	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilahkan untuk mengirimkan surat permohonan revisi target SKL ke Biro Perencanaan dan Keuangan
10	BPOM di Kupang	1. Terdapat gap antara standar dan baseline SRL dikarenakan personil pengampu telah mutasi di luar fungsi pengujian maupun ke UPT lain. 2. Penambahan SRL obat yaitu zat aktif untuk kelas terapi sistem saraf pusat sulit ditemukan sehingga perlu waktu tambahan untuk sampling	1. Penambahan anggaran untuk pembelian sampel Ruang lingkup dan melakukan koordinasi dengan Pemeriksaan. 2. Melakukan pengembangan kompetensi untuk personil laboratorium obat dan Napza	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
11	BBPOM di Denpasar	Penambahan RL Obat belum sesuai perencanaan karena sampel yang direncanakan belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan RL	Akan diganti dengan pengujian sampel lain di Triwulan berikutnya, menyesuaikan dengan ketersediaan reagen dan sampel yang relatif mudah didapat di pasaran	-
		Penambahan RL OBA belum dapat dilakukan di TW 1 sesuai perencanaan karena kami merencanakan identifikasi Teofilin di TW 1, namun sampai saat ini belum ada MA identifikasi Teofilin yang di upload di SIMA		-
12	BBPOM di Medan	Pada awal tahun perencanaan penambahan ruang lingkup dilakukan berdasarkan sampel yang belum pernah masuk di laboratorium. Dilakukan permintaan kepada substansi inspeksi tetapi sampai akhir tw1 belum dapat di penuhi dikarenakan sampel tidak termasuk dalam sampel yang berbasis resiko. SRL dan Verifikasi dijadwalkan kembali di TW 2	Dijadwalkan kembali di TW 2	-

Lampiran 2. Kendala/permasalahan terkait Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Kendari	Di TW 1 sudah di lakukan Verifikasi 4 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta instrumen dan suku cadang yang tersedia di Lab Pangan dan Air		Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan Balai POM di Kendari
2	BBPOM di Banjar Baru	TW 1 dapat memenuhi target verifikasinya namun untuk selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketersediaan reagensia dan kondisi peralatan yang digunakan (Tidak ada anggaran perbaikan alat jika tetiba alat rusak)		Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan BBPOM di Banjar Baru
3	BPOM di Ambon	1. Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.. 2. Aspek 1 dan 2 tidak terpenuhi, karena ada beberapa metode telah dikerjakan, tetapi personil telah berpindah tugas ke UPT lain	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 penguji untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratorium 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	1. Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan Balai POM di Ambon. 2. Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
4	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilahkan untuk diajukan melalui surat ke Ka PPPOMN

Lampiran 3. Kendala/permasalahan terkait Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Pekanbaru	Verifikasi PK kloramfenikol dalam madu secara LCMSMS (10/PK/10) sudah dilakukan namun sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil LOD dan LOQ yang bagus.	Melanjutkan verifikasi PK kloramfenikol dalam madu di TW 2	-
2	BPOM di Kendari	Di TW 1 sudah dilakukan Verifikasi 3 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta suku cadang yang tersedia di Lab OBASKK	Akan dilakukan Verifikasi Metode Analisa sesuai perencanaan	-
3	BPOM di Ambon	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratorium. 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
4	BPOM di Batam	1. Untuk Penambahan RL belum ada kendala karena direncanakan di TW I 2. Untuk MA terverifikasi capaian baru bisa dilakukan di TW selanjutnya dikarenakan terjadi pengulangan verifikasi di tahap akurasi yang tidak masuk rentang keberterimaan	1. - 2. Dilakukan pengulangan uji sehingga masuk rentang keberterimaan	-
5	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	-
6	Banda Aceh	Permasalahan terkait penambahan RL, Verifikasi metode dan Peningkatan kompetensi pengujian adalah tidak tersedia baku pembanding (baku Sulbaktam), dan minimnya anggaran pembelian reagen, suku cadang dan sampel - Instrumen yang tidak bisa berfungsi karena perlu penggantian spart part	Penyesuaian perencanaan penambahan RL, Verifikasi MA, peningkatan kompetensi pengujian sesuai ketersediaan reagen, suku cadang dan sampel yang ada pada laboratorium - Koordinasi dengan vendor - Koordinasi PPK	-

Lampiran 4. Kendala/permasalahan terkait Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Kendari	Di TW 1 sudah di lakukan Verifikasi 1 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta suku cadang yang tersedia di Lab Kosmetik	Akan dilakukan Verifikasi Metode Analisa sesuai perencanaan	Target pemenuhan Standar MA terverifikasi BPOM Kendari untuk TW 1 adalah 1 MA dan sudah terpenuhi. untuk TW berikutnya dapat dilanjutkan pemenuhan target standar ini sesuai perencanaan
2	BBPOM di Palembang	Verifikasi MA telah dilaksanakan untuk beberapa MA, namun yang dilaporkan pada TW1 baru 1 Verifikasi karena masih dalam proses pembuatan laporan Verifikasi	Laporan akan diselesaikan pada TW 2	karena pemenuhan TW 1 untuk MA terverifikasi ada 2 MA, maka laorannya diusahakan diselesaikan pada TW 1
3	BBPOM di Ambon	1. Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya reagen, dan suku cadang. 2. Aspek 1 dan 2 tidak terpenuhi, karena ada beberapa metode telah dikerjakan, tetapi personil telah berpindah tugas ke UPT lain. 3. Verifikasi telah dilaksanakan tetapi masih dalam proses pembuatan laporan	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratorium 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan 4. Pelaporan verifikasi akan diselesaikan pada TW 2	Hasil pemenuhan SKL 94 % terhadap target karena tidak terpenuhi target SRL dan kompetensi. Agar dibuat POA pemenuhan SRL dan Kompetensi yang tidak tercapai pada TW 1, kemudian dilaporkan realisasinya. Sebagai langkah pencegahan untuk pemenuhan TW 2, agar dilakukan review kembali rencana parameter uji SRL yang akan dipenuhi disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Agar dapat menyelesaikan laporan verifikasi yang telah dilaksanakan pada TW 1
4	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilakan untuk mengirimkan surat permohonan revisi target SKL ke Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
5	BBPOM di Banda Aceh	- Proses pengerjaan verifikasi metode tidak berjalan dengan lancar karena HPLC mengalami kerusakan (LPGE pada pompa tidak berfungsi lagi) namun target verifikasi tidak ada di TW I. - Minimnya anggaran untuk pembelian reagensia, suku cadang, dan pemeliharaan alat.	- Kendala sudah dikoordinasikan dengan vendor dan PPPK dan sudah dilakukan pembelian LPGE namun masih dalam pengiriman. - Dilakukan penyesuaian terhadap Metode Verifikasi, pemenuhan kompetensi penguji, dan pemenuhan SRL berdasarkan baku pembanding, reagensia dan suku cadang yang tersedia.	Laporkan hasil penyesuaian yang dilakukan untuk pemenuhan SRL, Standar Kompetensi dan Standar MA terverifikasi
6	Balai POM di Batam	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium belum terlaksana karena terkendala suku cadang, baku pembanding, dan reagensia akibat adanya efisiensi	Penyesuaian kembali target rencana pemenuhan dengan memperhitungkan ketersediaan reagensia, baku pembanding, dan suku cadang setelah adanya penambahan anggaran. Verifikasi metode di prioritaskan untuk metode-metode yang masuk PUK namun belum terverifikasi	- Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat). - Laporkan hasil penyesuaian yang dilakukan untuk pemenuhan SRL, Standar Kompetensi dan Standar MA terverifikasi

Lampiran 5. Kendala/permasalahan terkait Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palembang	Belum ada perencanaan pada TW 1		
2	BPOM di Ambon	Tidak ada perencanaan di TW 2	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan media dan alat yang tersedia dilaboratorium 3. Menyesuaikan pembelian media dengan prioritas kebutuhan 4. Mengajukan perencanaan pembelian sample untuk pengujian yang tidak tersedia pada renlak sampling	Dipersilahkan untuk mengaplikasikan rencana tindak lanjutnya
3	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	-

Lampiran 6. Kendala/permasalahan terkait Baku Pembanding

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Ambon	Pengujian Parameter uji untuk verifikasi / pemenuhan RL tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia Baku pembanding (contohnya kolesterol dan Beta karoten)	Pengujian Parameter uji untuk verifikasi / pemenuhan RL difokuskan pada Baku pembanding yang tersedia	- Baku Beta Caroten akan dikembangkan lagi tahun depan, tahun ini ada kendala kerusakan bahan baku sehingga purity-nya/kadar tidak memenuhi syarat, dan tidak bisa direlease. - Baku Pembanding Cholesterol akan diadakan tahun depan (mohon disampaikan spek P yang dimaksud) Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP (ada kemungkinan belum diinput di Infalabs), jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)

Lampiran 7. Kendala/permasalahan Peralatan

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palangkaraya	Pemenuhan peralatan ditargetkan realisasi pada TW 2 (Alat GCMS)	-	1. Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
2	BBPOM di Banjar Baru	Pengadaan peralatan sementara masih menunggu arahan		Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 . 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
3	BBPOM di Yogyakarta	Terkait peralatan belum ada kendala, hanya saja adanya efisiensi anggaran berpengaruh pada anggaran kalibrasi dan pemeliharaan alat	Perlu penyesuaian dan prioritas untuk perbaikan dan kalibrasi peralatan	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
4	BBPOM di Ambon	1. Tertunda rencana pembelian alat dan perbaikan alat terkait dengan revisi anggaran terkait efisiensi.	Penyusunan pembelian alat dan perbaikan alat sesuai dengan skala prioritas	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
5	BPOM di Sofifi	Pengadaan masih berproses, kalibrasi dan pemeliharaan menunggu arahan terkait anggaran	Penyusunan pembelian alat dan perbaikan alat sesuai dengan skala prioritas	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
6	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Usulan Target agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan memperhatikan skala prioritas
7	BBPOM di Medan	"Belum ada kendala untuk TW 1 terkait peralatan (tidak ada target pemenuhan peralatan untuk TW 1). Pemenuhan peralatan tahun 2025 masih menunggu arahan (Alat GCMSMS)"	-	

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
8	BBPOM di Gorontalo	Peralatan Fume Hood menjadi standar di lab mikrobiologi bukan di lab kimia, sementara alat fume hood yang kami miliki sejumlah 5 unit semuanya berada di lab kimia dan diperuntukkan pengujian kimia, sehingga fume hood yang dimiliki tidak dapat menambah pemenuhan SKL bagian peralatan. Pemenuhan peralatan di lab mikro baru mencapai 51% dari standar.	Melakukan optimalisasi sisa pengadaan alat tahun 2025 agar dapat melakukan pengadaan item alat tahun 2024 yang diblokir hingga akhir tahun, terutama alat2 yang mendukung pemenuhan standar lab mikrobiologi.	

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Januari

Januari

KIE Tatap Muka

Summary QB									
1	INDEXS TATAP MUKA	88.81							
2	INDEXS MEDIA	88.73							
3	TOTAL INDEXS	88.82							
4									
5									
6	UNIT PELAKSANA TEKNIK	Tatap Muka	Media	Total Responden	INDEXS TATAP MUKA	INDEXS MEDIA	INDEXS KIE	KATEGORI INDEXS	
7		3581	2298	5.881	88.81	88.73	88.82	Effektif	
8	DA. PMPUPO	0	0	0					
9	DE. PMPUOTSOX	243	0	243	85.00		85.00	Effektif	
10	BEPOM Banda Aceh	58	81	139	91.52	100.00	95.96	Sangat Efektif	
11	BEPOM Medan	23	8	31	90.83	95.90	94.40	Sangat Efektif	
12	BEPOM Padang	34	34	68	83.75	88.63	86.17	Effektif	
13	BEPOM Pekanbaru	38	7	45	100.00	88.21	94.11	Sangat Efektif	
14	BEPOM Palembang	125	25	150	95.03	98.29	96.66	Sangat Efektif	
15	BEPOM Bandar Lampung	57	56	113	87.06	88.99	88.82	Effektif	
16	BEPOM Jakarta	73	89	162	87.13	87.17	87.15	Effektif	
17	BEPOM Bandung	40	132	172	86.63	87.73	87.18	Effektif	
18	BEPOM Semarang	229	10	239	83.83	96.67	90.25	Effektif	
19	BEPOM Yogyakarta	82	28	110	87.69	89.67	88.68	Effektif	
20	BEPOM Surabaya	68	55	123	88.33	88.86	88.59	Effektif	
21	BEPOM Serang	31	80	111	94.32	88.28	91.30	Effektif	
22	BEPOM Cilegon	108	29	137	84.76	84.43	84.59	Effektif	
23	BEPOM Mataram	34	25	59	100.00	89.90	94.95	Effektif	

91,30

KIE Media

Summary QB									
1	INDEXS TATAP MUKA	88.81							
2	INDEXS MEDIA	88.73							
3	TOTAL INDEXS	88.82							
4									
5									
6	UNIT PELAKSANA TEKNIK	Tatap Muka	Media	Total Responden	INDEXS TATAP MUKA	INDEXS MEDIA	INDEXS KIE	KATEGORI INDEXS	
7		3581	2298	5.881	88.81	88.73	88.82	Effektif	
8	DA. PMPUPO	0	0	0					
9	DE. PMPUOTSOX	243	0	243	85.00		85.00	Effektif	
10	BEPOM Banda Aceh	58	81	139	91.52	100.00	95.96	Sangat Efektif	
11	BEPOM Medan	23	8	31	90.83	95.90	94.40	Sangat Efektif	
12	BEPOM Padang	34	34	68	83.75	88.63	86.17	Effektif	
13	BEPOM Pekanbaru	38	7	45	100.00	88.21	94.11	Sangat Efektif	
14	BEPOM Palembang	125	25	150	95.03	98.29	96.66	Sangat Efektif	
15	BEPOM Bandar Lampung	57	56	113	87.06	88.99	88.82	Effektif	
16	BEPOM Jakarta	73	89	162	87.13	87.17	87.15	Effektif	
17	BEPOM Bandung	40	132	172	86.63	87.73	87.18	Effektif	
18	BEPOM Semarang	229	10	239	83.83	96.67	90.25	Effektif	
19	BEPOM Yogyakarta	82	28	110	87.69	89.67	88.68	Effektif	
20	BEPOM Surabaya	68	55	123	88.33	88.86	88.59	Effektif	
21	BEPOM Serang	31	80	111	94.32	88.28	91.30	Effektif	
22	BEPOM Cilegon	108	29	137	84.76	84.43	84.59	Effektif	
23	BEPOM Mataram	34	25	59	100.00	89.90	94.95	Effektif	

90,97

Rata-rata $91,3 + 90,97 = 91,14$

$$\text{Rata-rata} = (89,94 + 83,74) / 2 = 86,84$$

Maret

KIE Tatap Muka

UNIT PELAKSANA TIDINGS	Tatap Muka	Media	Total Responden	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
DE PAMPUJON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE PAMPUJON	231	8	235	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47
DE PAMPUJON	56	41	97	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92
DE PAMPUJON	19	8	26	96,79	96,79	96,79	96,79	96,79	96,79
DE PAMPUJON	54	25	79	92,76	92,76	92,76	92,76	92,76	92,76
DE PAMPUJON	10	7	17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DE PAMPUJON	127	26	153	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47	95,47
DE PAMPUJON	42	28	70	92,22	92,22	92,22	92,22	92,22	92,22
DE PAMPUJON	13	8	21	97,79	97,79	97,79	97,79	97,79	97,79
DE PAMPUJON	48	42	90	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67
DE PAMPUJON	230	5	235	93,79	93,79	93,79	93,79	93,79	93,79
DE PAMPUJON	252	27	279	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89	97,89
DE PAMPUJON	42	25	67	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47	94,47
DE PAMPUJON	54	30	84	91,43	91,43	91,43	91,43	91,43	91,43
DE PAMPUJON	120	32	152	92,76	92,76	92,76	92,76	92,76	92,76
DE PAMPUJON	23	21	44	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91
DE PAMPUJON	38	8	46	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89
DE PAMPUJON	54	18	72	95,71	95,71	95,71	95,71	95,71	95,71
DE PAMPUJON	29	47	76	95,62	95,62	95,62	95,62	95,62	95,62
DE PAMPUJON	58	34	92	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50

Nilai : 89,85

Link daduk : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shYofad2TXywpML9C5JVu9gY0f2p-WM77-Q9_V7APg/edit?gid=676094837#gid=676094837

KIE Media

UNIT PELAKSANA TIDINGS	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
DE PAMPUJON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE PAMPUJON	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DE PAMPUJON	8	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75
DE PAMPUJON	20	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
DE PAMPUJON	7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DE PAMPUJON	25	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
DE PAMPUJON	20	92,14	92,14	92,14	92,14	92,14	92,14	92,14	92,14
DE PAMPUJON	89	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76
DE PAMPUJON	42	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56
DE PAMPUJON	5	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
DE PAMPUJON	27	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59
DE PAMPUJON	20	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45
DE PAMPUJON	20	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11
DE PAMPUJON	31	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94
DE PAMPUJON	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DE PAMPUJON	19	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76
DE PAMPUJON	47	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30
DE PAMPUJON	54	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22

Nilai : 88,28

Link daduk : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYQsbaaxDaV3tmYE5q_h1c-ahnJtOEvnE-6xB8kDK58/edit?gid=538504801#gid=538504801

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari							0.00			
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0.00					0.00			
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	10	10.00					10.00			

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0.00			
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0.00			
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	0.00	0.00	0.00	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	0	0.00	0.00	0.00	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	20	13.33	0.00	0.00	13.33

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Progres Penetapan Tersangka LK 05-24	Tahap I Perkara LK 05-24
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	PPNS Menghadapi Praperadilan	Tahap I Perkara LK 05-24
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	4	4	1	4	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.38	Penambahan Jo Pasal 55 KUHP, sehingga perlu penetapan TSK Tambahan	Tahap I Perkara LK 05-24

Nomor : B-PR.09.02.63.04.25.156
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan
POM Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Jakarta, 14 April 2025

Yth. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut <https://bit.ly/definisiops>.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Mengingat masih adanya ketidaktepatan waktu pelaporan, maka bersama ini pula kami berikan kertas kerja perhitungan kinerja dimaksud pada tautan berikut <https://bit.ly/kertaskerjapenelusuransiber>.

Hal ini ditujukan supaya setiap UPT Badan POM dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan di masa yang akan datang dan kiranya dapat secara mandiri memproyeksikan nilai kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut, setiap UPT Badan POM dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC terkait.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Siber Obat dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.

Tembusan:

1. Deputi Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

LAMPIRAN

Surat Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan

Nomor :

Tanggal : 14 April 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Aceh							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru							100,00%	75,00%	66,67%
5.	Denpasar							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta							100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura							100,00%	100,00%	83,33%
9.	Kupang							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Mataram							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang							100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Surabaya							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:



Tepat Waktu

Lewat Waktu

**DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Balai POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Ambon							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Balikpapan							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banyumas							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Baubau							100,00%	100,00%	100,00%
5.	Batam							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Bengkulu							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bima							100,00%	75,00%	66,67%
8.	Bogor							100,00%	100,00%	100,00%
9.	Dumai							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Ende							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Indragiri Hulu							50,00%	75,00%	83,33%
12.	Jambi							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Jember							100,00%	75,00%	83,33%
14.	Kediri							100,00%	75,00%	83,33%
15.	Kendari							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Mamuju							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Manokwari							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palopo							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Palu							100,00%	75,00%	83,33%
20.	Pangkalpinang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Payakumbuh							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Sanggau							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Sofifi							100,00%	100,00%	100,00%
24.	Surakarta							100,00%	100,00%	100,00%
25.	Tabalong							100,00%	100,00%	100,00%
26.	Tangerang							100,00%	100,00%	100,00%
27.	Tanjung Balai							100,00%	100,00%	100,00%
28.	Tarakan							100,00%	100,00%	100,00%
29.	Tasikmalaya							100,00%	75,00%	83,33%
30.	Tulang Bawang							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

■ Tepat Waktu
■ Lewat Waktu

**DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA LOKA POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Loka POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Aceh Selatan							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Aceh Tengah							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banggai							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Belitung							100,00%	100,00%	100,00%
5.	Belu							100,00%	75,00%	66,67%
6.	Buleleng							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bungo							100,00%	100,00%	83,33%
8.	Kep. Sangihe							100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kep. Tanimbar							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kotawaringin Barat							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Lubuk Linggau							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Manggarai Barat							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Merauke							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Mimika							100,00%	100,00%	83,33%
15.	Morotai							100,00%	75,00%	66,67%
16.	Rejang Lebong							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Sambas							100,00%	75,00%	66,67%
18.	Sijunjung							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Sorong							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Sumba Timur							100,00%	75,00%	66,67%
21.	Tanah Bumbu							50,00%	25,00%	33,33%
22.	Tanjung Pinang							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Toba							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

Tepat Waktu
 Lewat Waktu

Direktur Siber Obat dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Bulan	B01	B02	B03
Jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu			
Jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun			
Persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber (50%)	50%	50%	50%
Nilai analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan			
Nilai maksimal penilaian analisis			
Persentase nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan (25%)			
Jumlah rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT			
Jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal oleh UPT (25%)			
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50%	50%	50%

RHPK PENGADAAN

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Kontrak							Realisasi Anggaran	PPK Penanggung Jawab
						No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	28	31
1	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Pengamanan Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 7 orang, 12 bulan	7 orang	E-Purchasing	384.EBA.994.002.0A.522191	PL.02.01.12A.12.24.287	27-Dec-2024	439.656,036	370	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	21.126.356.1-423.000	Jl. Terusan Cilwung No. 24, Chaurgeulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung	33,350,041	Andy Safari, S.Si.
													42,726,100	Andy Safari, S.Si.
													29,608,150	Andy Safari, S.Si.
2	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Alih Daya (Tenaga Kebersihan) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 13 orang, 12 bulan	13 orang	E-Purchasing	384.EBA.994.002.0A.522191	PL.02.01.12A.12.24.292	31-Dec-2024	775.398,540	366	PT. INDO NUSA PRIMA	73.345.410.2-417.000	Komp. Arga Baja Pura Jalan Arga Gede, D2, 07, Kotasari, Gerogol, Kota Cilegon, Banten	59,388,424	Andy Safari, S.Si.
													59,388,424	Andy Safari, S.Si.
													52,439,200	Andy Safari, S.Si.
3	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Alih Daya (Tenaga Pengemudi, Resepsionis, Pemelihara Sarpras) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 11 orang, 12 bulan	11 orang	E-Purchasing	384.EBA.994.002.0A.522191	PL.02.01.12A.12.24.293	31-Dec-2024	674.343,348	366	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten	51,653,320	Andy Safari, S.Si.
													51,653,320	Andy Safari, S.Si.
													45,773,200	Andy Safari, S.Si.
4	Sewa Rumah Kepala Balai	Pengadaan Sewa Rumah Dinas Jabatan Balai Besar POM di Serang TA 2025 selama 1 tahun sebanyak 1 unit	1 Unit	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0M.522141	PL.02.02.12A.12.24.285	27-Dec-2024	80.000,000	370	HJ RT LELA NURLAELA DRA	06.712.312.5-401.000	JL. HS KHOZIN No. 36 RT/RW: 003/024 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Serang, Banten	80,000,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
5	Pengadaan Jasa Pembasmi Hama	Pengadaan Jasa Pembasmi Hama Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 12 bulan	12 bulan	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0L.522191	PL.02.02.12A.12.24.289	30-Dec-2024	72.594,000	367	PT. RENTOKIL INDONESIA	01.000.179.0-058.000	South Quarter Tower B Lt21, Jl. RA Kartini Cilandak - Jakarta Selatan	6,049,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
													6,049,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
													6,049,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
6	Sewa Kendaraan Jabatan Pejabat Eselon II	Pengadaan Sewa Kendaraan Jabatan Pejabat Eselon II Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 1 unit	1 Unit	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0P.522141	PL.02.01.12A.1.25.01	6-Jan-2024	138.378,000	361	PT. ADI SARANA ARMADA TBK	01.955.213.2-054.000	Gd. Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara	45,578,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
7	Pengadaan Jasa Langganan Internet	Langganan Internet 1 BBPOM di Serang TA 2025 sebanyak 12 bulan	12 Bulan	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0J.521111	PL.02.01.12A.12.24.291	30-Dec-2024	203.999,040	367	PT. PARSAROAN GLOBAL DATATRANS	03.079.212.1-009.000	Gedung Graha Mampang Lt. 5 No. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan	16,999,920	Andy Safari, S.Si.
													16,999,920	Andy Safari, S.Si.
8	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)(Rid-P2501-11366832) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 1 Paket	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.521811	PL.02.01.12A.01.25.04	15-Jan-2024	79.188,000	92	PT. TRIANDAR JASTEKTAMA	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15 Jl. Letjend Suprpto Jakarta Pusat 10640	49,951,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
													17,160,600	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
9	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Januari 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.522111	AGA/PUSAT/2025/672821	6-Jan-2025	54.307,747	14	PT. PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU	54,307,747	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
10	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Febuari 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.522111	AGA/PUSAT/2025/672821	6-Feb-2025	53.925,862	14	PT. PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU	53,925,862	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
11	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Maret 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.522111	AGA/PUSAT/2025/672821	6-Mar-2025	38.680,059	14	PT. PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU	38,680,059	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
12	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan Telepon	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.055.0A.521114	FA Detail Akrual 27 Maret 2025	2-Jan-2025	7.196,675	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	7,196,675	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
13	Pengadaan Test Kit (Sampling dan Operasional Laboratorium Keilling)	Pengadaan Test Kit (Sampling dan Operasional Laboratorium Keilling) (RID-P2501-11373308)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0F.521811	PL.02.01.12A.01.25.07	17-Jan-2024	34.695,000	91	PT. TRIANDAR JASTEKTAMA	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15 Jl. Letjend Suprpto Jakarta Pusat 10640	34,695,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
14	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (FTIR) (ALE-P2501-11379352)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.522191	PL.02.01.12A.01.25.11	20-Jan-2024	7.000,000	26	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl. Bina Marga rt. 007/005 No.328, Jakarta Timur	7,000,000	Andy Safari, S.Si.
15	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (Fumehood Labotilik) (ALE-P2501-11366508)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.522191	PL.02.01.12A.01.25.08	17-Jan-2024	4.600,000	29	PT Cipta Mandiri Teknik	03.247.121.1-008.000	Ruko Mall Klender Jl. I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit Jakarta Timur	4.600,000	Andy Safari, S.Si.
16	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (Spektrofotometer UV-VIS Shimadzu) (ALE-P2501-11366580)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.522191	PL.02.01.12A.01.25.05	16-Jan-2024	3.996,000	30	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl. Panjang - Kebun Jeruk, DKI JAKARTA	3,996,000	Andy Safari, S.Si.
17	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom EP-01JN3BQ225DP4YXGV5ZW8QXR10	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.523123	EP-01JN3BQ225DP4YXGV5ZW8QXR10	28-Feb-2025	51.282,000	119	PT. MAJA BINTANG INDONESIA	03.276.991.1-009.000	JL RAYA SETU CIPAYUNG, 77, BAMBU APUS, CIPAYUNG	51,282,000	Andy Safari, S.Si.
						PL.02.01.12A.02.25.25								
18	Pengadaan Reagensia Prekursor	PENGADAAN REAGENSIA PREKURSOR (AL2-P2501-11354970)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.521811	PL.02.01.12A.01.25.02	13-Jan-2025	18.000,000	33					Andy Safari, S.Si.
19	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	PENGADAAN METHANOL FOR GCMS	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.053.0A.521811	-	-	1,050,000	-					Andy Safari, S.Si.
20	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	PENGADAAN REAGEN/MEDIA MIKRO (PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN) (ORK-P2501-11365577)	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.521811	PL.02.01.12A.01.25.06	16-Jan-2025	17.160,600	90					Andy Safari, S.Si.
21	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (LTN-P2412-11299472)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.CAN.001.051.0A.532111	PL.02.01.12A.12.24.283	1-Jan-2025	44.985,000	59					Andy Safari, S.Si.
21	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (LTN-P2412-11299472)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.CAN.001.051.0A.532111	PL.02.01.12A.03.25.26	4-Mar-2025	13.376,300	53					Andy Safari, S.Si.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Kontrak							Realisasi Anggaran	PPK Penanggung Jawab
						No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat		
22	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.055.0A.521114	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Andy Safari, S.Si.
23	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi serta Perlengkapann Sampling/Pengadaanan/Pelaporan/Pencetakana	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.055.0A.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	4,399,800	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	4,399,800	Andy Safari, S.Si.
24	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Transport Perjalanan Dinas Sampling Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.055.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	178,913	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	178,913	Andy Safari, S.Si.
25	Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB SPA CPKB,Pemohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK)	Transport dan Penginapan Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB,SPA CPKB,Pemohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.051.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	2,318,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	2,318,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
26	Penatausahaan BMN	Transport & Penginapan Penatausahaan BMN	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.956.054	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
27	Operasional Perkantoran	Pengadaan ATK	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.521811	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	16,287,846	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	16,287,846	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
28	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0D	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	28,357,456	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	28,357,456	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
29	Operasional Perkantoran	Pengiriman Dokumen / Barang	1 TW	Pengadaan Lan	6384.EBA.994.002.0A.521114	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	3,208,837	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	3,208,837	enden Yopie D.S., S.Ak.
30	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0E	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	2,232,804	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	2,232,804	enden Yopie D.S., S.Ak.
31	Operasional Perkantoran	Pengadaan Computer supplies	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.521811	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	8,068,711	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	8,068,711	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
32	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan (Kantor)	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.523111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	90,858,329	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	90,858,329	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
33	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Jaringan Listrik Laboratorium - ICP MS)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.523111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
34	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0C	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	21,254,951	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	21,254,951	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
35	Pengadaan Jasa Lainnya	Pengadaan Jasa Pengharum Ruangan	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0L.522191	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	3,080,250	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	3,080,250	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
36	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0K.523121	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	30,229,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	30,229,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
37	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	Transport & Penginapan Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.AEA.001.054	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	35,239,080	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	35,239,080	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
38	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemusnahan	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemusnahan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.AEA.001.054.0J.522191	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	22,000,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	22,000,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
39	Penerbitan keputusan/sertifikat dalam rangka Sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Pemohonan Notifikasi KOSMETIK, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, dan Rekomendasi Importir OT/SK	Belanja Bahan - Penerbitan keputusan/sertifikat dalam rangka Sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Pemohonan Notifikasi KOSMETIK, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, dan Rekomendasi Importir OT/SK	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.052.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	552,300	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	552,300	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
40	Penerbitan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik	Transport dan Penginapan Penerbitan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.052	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,918,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,918,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
41	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Transport dan Penginapan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BDC.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	6,775,400	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	6,775,400	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
42	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Belanja Bahan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BDC.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	775,600	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	775,600	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
43	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.521114	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	580,190	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	580,190	Andy Safari, S.Si.
44	Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengadaan Sampel dan Perlengkapan Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	20,007,050	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	20,007,050	Andy Safari, S.Si.
45	Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Transport Perjalanan Dinas Sampling Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	604,500	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	604,500	Andy Safari, S.Si.
46	Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BKB.001.052.0A.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,572,100	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,572,100	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
47	Koordinasi Lintas Sektor di Balai	Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BKB.001.052.0E.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	400,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	400,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
48	Koordinasi Lintas Sektor di Balai	Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BKB.001.052.0E.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	6,240,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	6,240,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Kontrak							Realisasi Anggaran	PPK Penanggung Jawab
						No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat		
49	Pemberkasan	Belanja Bahan - Pemberkasan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.055	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,606,500	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,606,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
50	Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	Konsumsi Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.ZC.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	2,974,300	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	2,974,300	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
51	Pengawasan Iklan dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Belanja Bahan - Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.0C.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	843,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	843,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
52	Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G	Belanja Bahan - Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.001.052.0G.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	392,000	25 March 1900	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	392,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
53	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDC.001.051.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	2,391,300	25 March 1900	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	2,391,300	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
54	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDC.001.051.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	28,860,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	28,860,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
55	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BMB.001.051.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,509,600	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,509,600	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
56	Kasus dan Pelaporan	Kasus dan Pelaporan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.052.0A.521211	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	4,028,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	4,028,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
57	Operasi Intelijen	Operasi Intelijen	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	4,220,500	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	4,220,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
58	Operasional Perkantoran	Pengadaan Form (TU)	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.521811	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	11,598,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	11,598,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
59	Operasional Perkantoran	Pengadaan Bahan Kebersihan	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.521811	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	15,352,628	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	15,352,628	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
60	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0H.523121	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	4,663,300	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	4,663,300	Andy Safari, S.Si.
61	Jasa Surveiln KAN	Jasa Surveiln KAN	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.0C.521219	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,500,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,500,000	Andy Safari, S.Si.
62	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1 TW	Swakelola	3165.QDC.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	5,400,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	5,400,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
63	Intervensi keamanan PJAS	Intervensi keamanan PJAS	1 TW	Swakelola	3165.QDB.001.052	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	3,180,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	3,180,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
64	Pemantauan/Evaluasi/Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Laboratorium	Pemantauan/Evaluasi/Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Laboratorium	1 TW	Swakelola	3165.PDD.001.056	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	5,654,600	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	5,654,600	Andy Safari, S.Si.
65	Pengadaan Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	Pengadaan Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	1 TW	Swakelola	3165.QIA.002.053.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	2,560,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	2,560,000	Andy Safari, S.Si.
66	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Swakelola	3165.QIA.001.055.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,820,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,820,000	Andy Safari, S.Si.
67	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitik)	Perjalanan Dinas - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitik)	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.056.0B	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	7,182,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	7,182,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
68	Operasi Intelijen	Perjalanan Dinas - Operasi Intelijen	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.051.0B	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	12,986,700	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	12,986,700	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
69	Pemberkasan	Pemberkasan	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.055	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	30,671,950	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	30,671,950	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
70	Pemberdayaan komunitas desa	Pemberdayaan komunitas desa	1 TW	Swakelola	3165.QDB.002.052	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	320,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	320,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
71	Perkuatan kapasitas desa	Perkuatan kapasitas desa	1 TW	Swakelola	3165.QDB.002.051.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
72	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QDB.003.053	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
73	Koordinasi lintas sektor	Koordinasi lintas sektor	1 TW	Swakelola	3165.QDB.001.051.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Andy Safari, S.Si.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Kontrak							Realisasi Anggaran	PPK Penanggung Jawab
						No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				
										Nama Pelaksana	NPWP	Alamat		
74	Sarana Distribusi Obat, OT, Kos, SK dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Sarana Distribusi Obat, OT, Kos, SK dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QIC.004.053	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	45,929,315	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	45,929,315	Andy Safari, S.Si.
75	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QIC.003.055.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	897,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	897,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
76	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.AEA.001.054	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	11,470,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	11,470,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
77	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.AEA.001.052.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	6,000,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	6,000,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
78	Penatausahaan BMN	Penatausahaan BMN	1 TW	Swakelola	6384.EBA.956.054	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
79	Kegiatan Monitoring Pendampingan UMKM	Kegiatan Monitoring Pendampingan UMKM	1 TW	Swakelola	3165.QDG.001.052.0A.524114	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
80	Advokasi dan Pendampingan UMKM	Advokasi dan Pendampingan UMKM	1 TW	Swakelola	3165.QDG.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	0	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
81	Sarana Produksi OMKA yang diperiksa UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Sarana Produksi OMKA yang diperiksa UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QIC.001.055	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	13,570,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	13,570,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
82	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	1 TW	Swakelola	3165.BAH.001.051.0A.524111	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	5,920,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	5,920,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
83	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	1 TW	Swakelola	3165.BAH.001.052	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	3,488,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	3,488,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
84	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	1 TW	Swakelola	3165.BDC.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	6,925,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	6,925,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
85	Operasi Penindakan	Operasi Penindakan	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.054	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	8,159,100	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	8,159,100	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
86	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.BMB.001.051.0A	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,020,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,020,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
87	Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.BKB.001.051	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,310,500	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,310,500	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
88	Pelaksanaan Koordinasi	Pelaksanaan Koordinasi	1 TW	Swakelola	3165.BKB.001.052	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	1,205,000	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	1,205,000	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 TW	Swakelola	WA.6384.EBA.994.002	FA Detail Akruai 27 Maret 2025	2-Jan-2025	109,730,626	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-.401.000	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang	109,730,626	Nenden Yopie D.S., S.Ak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5704,
(021) 3812684 Surel: ditpa.djpb@kemenkeu.go.id Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-50/PB.2/2025 20 Februari 2025
Sifat : Segera
Hal : Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025

Yth. Para Kepala Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan/Kepala Pusat Keuangan/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
2. Selain itu, berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
3. Menindaklanjuti kondisi di atas dan dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip *fairness treatment* dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk **seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025**.
4. Implementasi penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025 tersebut akan diterapkan pada Aplikasi OMSPAN secara berkala, segera setelah proses penyesuaian pada aplikasi selesai dilakukan.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Saudara untuk:
 - a. menyampaikan informasi kebijakan penyesuaian IKPA dimaksud kepada seluruh Satker di lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara berkala dengan memanfaatkan data dan nilai IKPA yang tersedia pada aplikasi OMSPAN; dan
 - c. menghimbau Satker untuk berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen menjaga integritas dan memberi pelayanan secara PASTI: Profesional, Amanah, Solutif, Terpercaya, dan Inovatif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. Para Kepala Subdirektorat lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTD) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan